



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

**KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2021**





BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnyadisingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2021

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- | | | |
|------------|---|--|
| a. BAB I | : | PENDAHULUAN |
| b. BAB II | : | GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH |
| c. BAB III | : | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| d. BAB IV | : | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH |
| e. BAB IV | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| f. BAB VI | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH |
| g. BAB VII | : | PENUTUP |

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peranturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD tahun 2021 disusun mengacu pada RPJMD 2019-2023 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019;
- (2) RKPD tahun 2021 sebagaimandimaksudpadaayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 24 Juli 2020
BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 24 Juli 2020
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng.....	II-3
2.1.1.4 Geologi.....	II-5
2.1.1.5 Hidrologi.....	II-6
2.1.1.6 Klimatologi.....	II-8
2.1.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-9
2.1.1.8 Peruntukan Lahan.....	II-10
2.1.1.9 Peruntukan Pengembangan Wilayah Perkawasan.....	II-16
2.1.1.10 Kawasan Rawan Bencana.....	II-21
2.1.1.11 Kondisi Demografis.....	II-23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-27
2.1.2.1 Fokus kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi.....	II-27
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-31
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-38
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-38
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-50
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-56

2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	II-59
2.3	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-183
2.4	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-183
2.4.1	Urusan pendidikan.....	II-183
2.4.2	Urusan Kesehatan.....	II-184
2.4.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-184
2.4.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman.....	II-184
2.4.5	Urusan Sosial.....	II-185
2.4.6	Urusan Tenaga Kerja.....	II-185
2.4.7	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-185
2.4.8	Urusan Pangan.....	II-186
2.4.9	Urusan Lingkungan Hidup.....	II-186
2.4.10	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-186
2.4.11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-186
2.4.12	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	II-187
2.4.13	Urusan Perhubungan.....	II-187
2.4.14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-187
2.4.15	Urusan Penanaman Modal.....	II-188
2.4.16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-188
2.4.17	Urusan Perpustakaan.....	II-188
2.4.18	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-188
2.4.19	Urusan Pariwisata.....	II-189
2.4.20	Urusan Pertanian.....	II-189
2.4.21	Urusan Perdagangan.....	II-189
2.4.22	Urusan Perindustrian.....	II-190
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan tahun 2019.....	III-1
3.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	III-1
3.1.1.2	Ketenagakerjaan.....	III-5
3.1.1.3	Inflasi.....	III-6
3.1.2	Proyeksi Kondisi Perekonomian Tahun 2020 dan 2021.....	III-7
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10

	3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-11
	3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-12
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2	Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-3
	4.2.1	Prioritas dan Sasaran Nasional.....	IV-3
	4.2.2	Prioritas dan Sasaran Daerah.....	IV-5
	4.2.3	Konektivitas Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah...	IV-13
	4.2.4	Konektivitas Sasaran Perangkat Daerah Dengan Urusan Daerah.....	IV-18
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
	5.1	Rencana Program Prioritas.....	V-1
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
	6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VI-1
	6.2	Inovasi Daerah.....	VI-41
BAB VII		PENUTUP.....	VII-1



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun keenam belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2021.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2021 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2021, RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD Kabupaten Morowali, RPJMD Kabupaten Morowali, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik,

partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Salah satu tantangan yang mendasar sehingga menjadi kendala dalam penyusunan RKPD tahun 2021 ini adalah penyusunan rencana kerja yang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Terbitnya peraturan tersebut mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja yang berpedoman pada nomenklatur program, kegiatan bahkan sampai pada sub kegiatan yang telah di atur dalam permendagri nomor 90 tahun 2019. Perbedaan nomenklatur perencanaan antara permendagri terbaru dengan nomenklatur yang sudah tertuang di dalam RPJMD mengharuskan tim penyusun untuk lebih bekerja keras dalam mengarahkan perangkat daerah menyusun rencana kerja. Indikator kinerja yang menjadi alat ukur pada setiap sasaran, program, kegiatan bahkan sampai pada sub kegiatan menjadi kendala dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, apalagi jika tidak terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan kinerja daerah

atau yang menjadi kewenangan urusan pada pemerintah daerah berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan program kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah juga menjadi kendala tersendiri yang mengharuskan untuk diusulkan ke kementerian dalam negeri untuk dilakukan pemutakhiran dengan tujuan penyeragaman program kegiatan semua pemerintah daerah, tetapi meskipun begitu Pemerintah Kabupaten Morowali tetap menghormati dan mentaati segala peraturan yang di amanahkan untuk dilaksanakan sehingga dalam proses penyusunan RKPD tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Morowali berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran untuk tetap menyelesaikan penyusunannya berdasarkan peraturan yang berlaku, adapun segala kendala maupun permasalahan dalam penyusunan RKPD tahun 2021 menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD di tahun mendatang.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (RPJMD) Periode 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01);

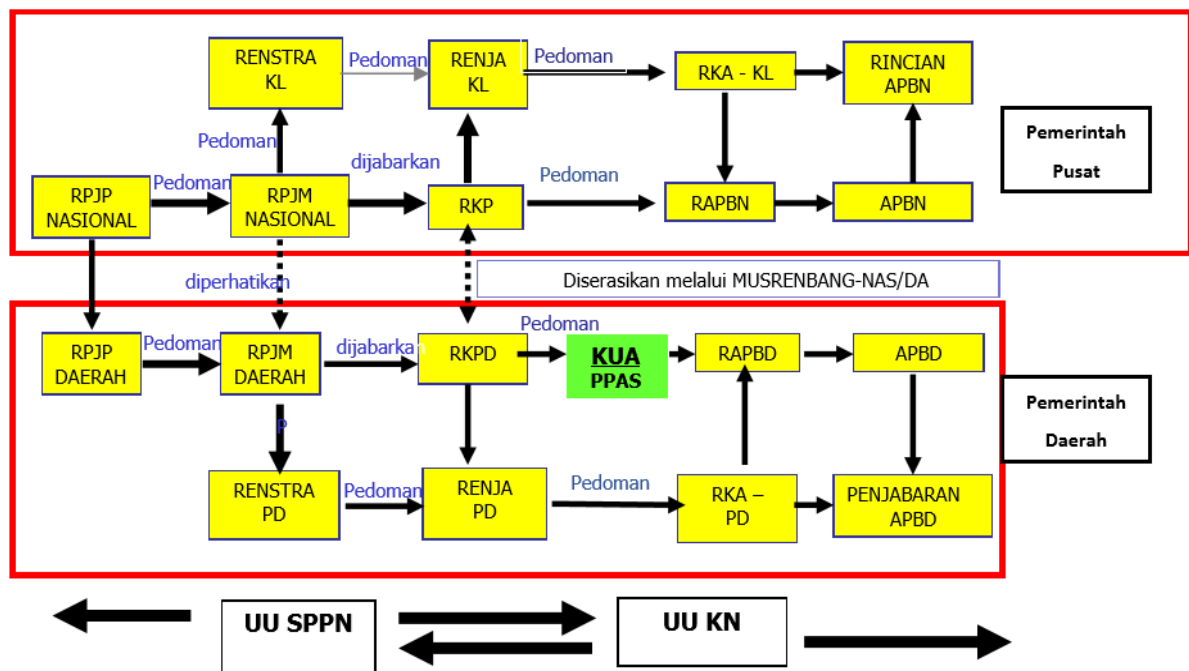
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD.

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi

waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Sumber: diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.

- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2021, RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, RPJPD Kabupaten Kabupaten Morowali Tahun 2005-2020, dan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Morowali dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat

Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Morowali.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Morowali. Berisi Tema, Tematik,. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN Republik Indonesia

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah

(RPJMD) tahun rencana serta berisi Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran, target kinerja serta interkoneksinya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2021, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Secara Administrasi Kabupaten Morowali memiliki batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; - Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali (2019), luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari total wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada Tabel 2.1 Berikut ini :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018

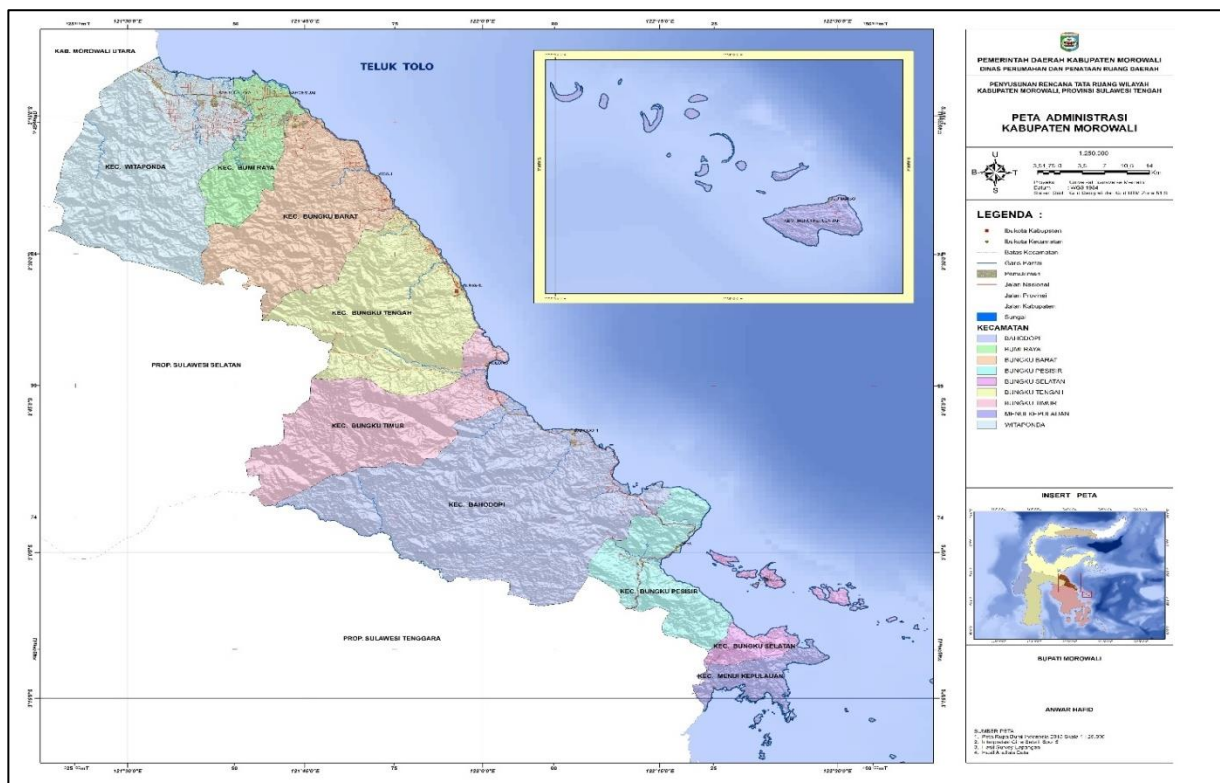
Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Menui Kepulauan	223,63	4,07	23/1	Uluambo	99
Bungku Selatan	403,90	7,38	26	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,76	12	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,23	13	Bahonsuai	48

Witaponda	519,70	9,50	9	Laantula Jaya	61
Luas Kabupaten	5.472,00	100,00	13		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 9 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan. Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowal,i selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Administrasi



2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31'12" Lintang Selatan dan 03°46' 48" Lintang Selatan serta antara 121°02' 24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya

(11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

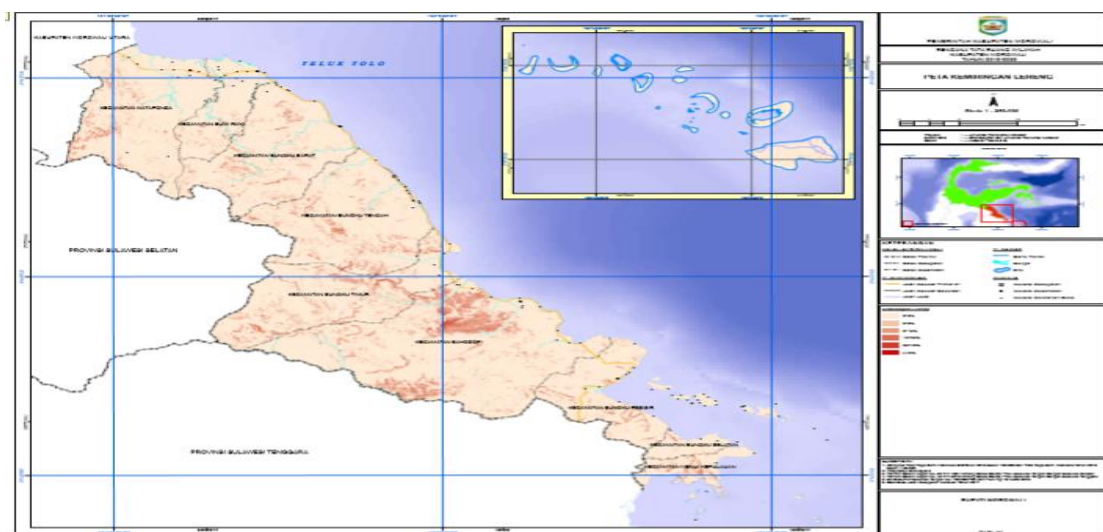
Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

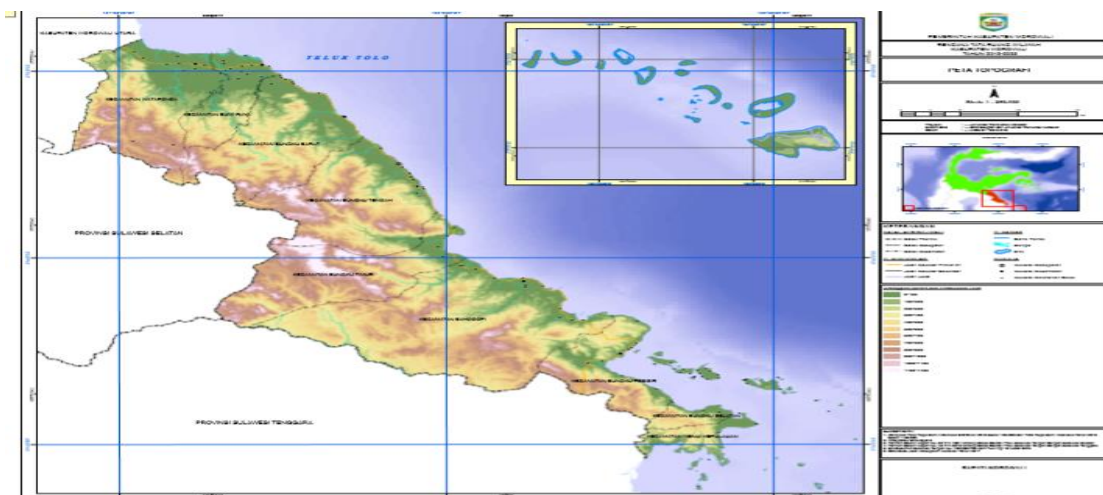
Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl,

dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 %luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar. selengkapnya tertera pada peta Topografi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.2 Peta Topograpi dan Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng berikut ini :

Gambar 2.2. Peta Kemiringan



Gambar 2.3. Peta Topografi

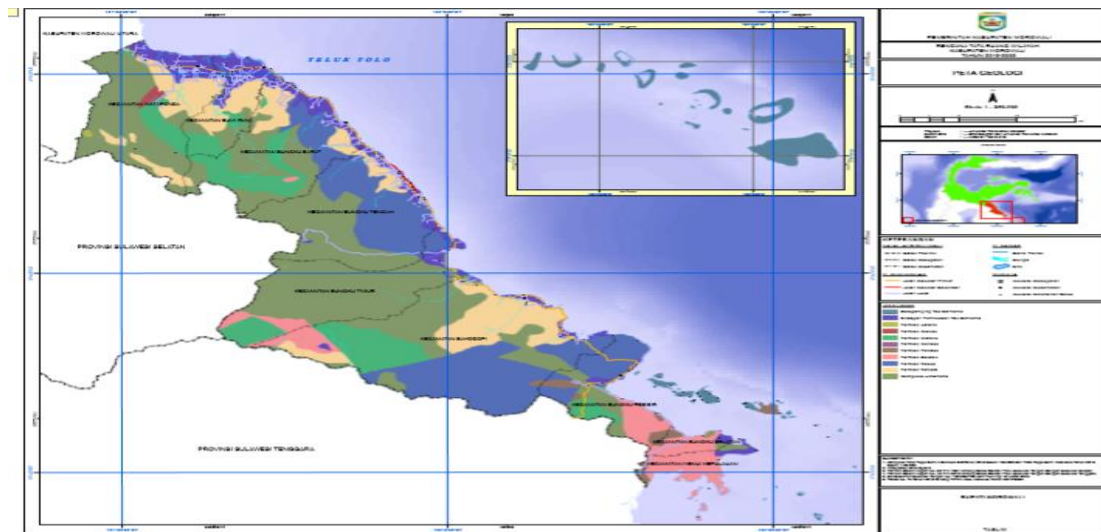


2.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: □ Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; □ Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; □ Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; □ Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan (Morowali). Selengkapnya tertera pada peta Geologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.4

Gambar 2.4. Peta Geologi

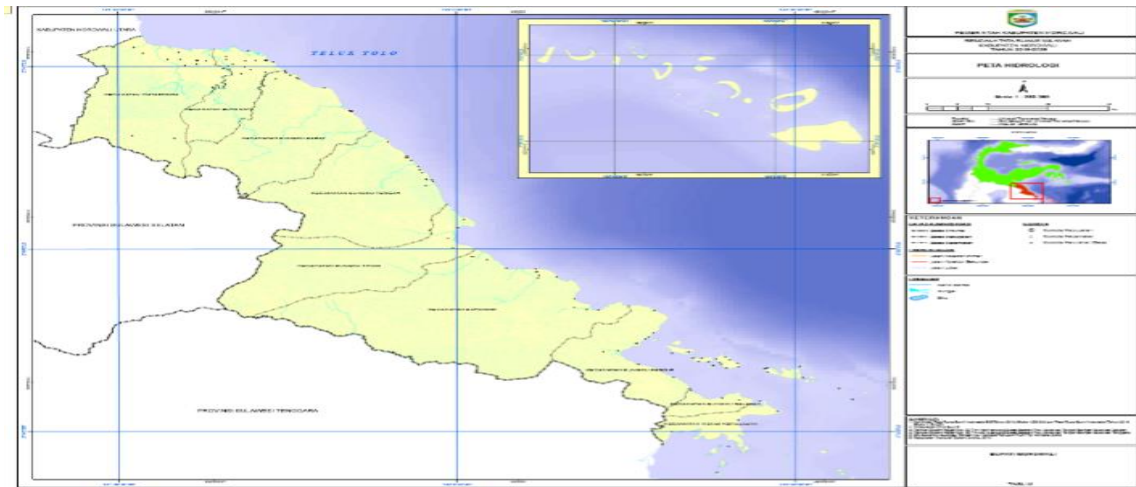


2.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87 Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Selengkapnya dijelaskan pada peta Hidrologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.5

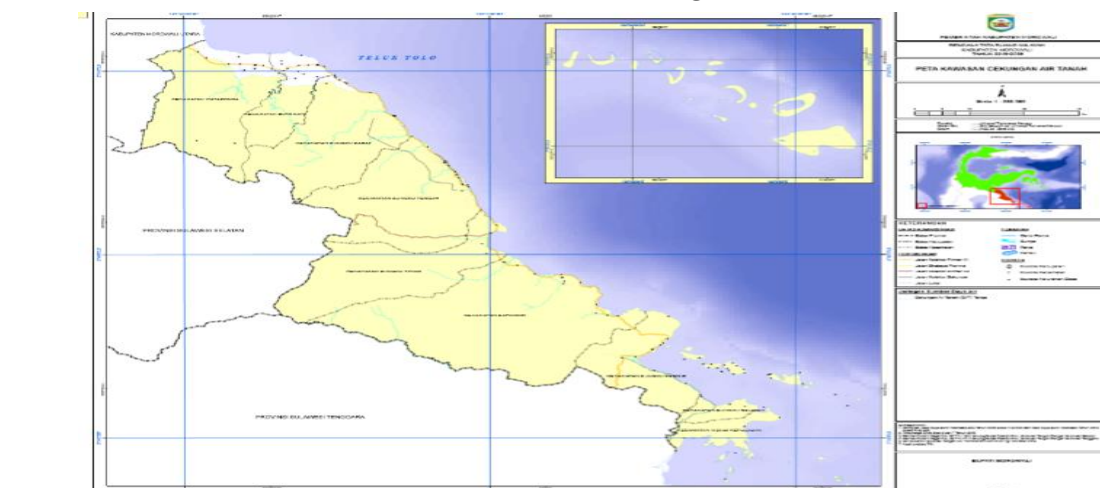
Gambar 2.5. Peta Hidrologi



Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada Gambar 2.6

Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah

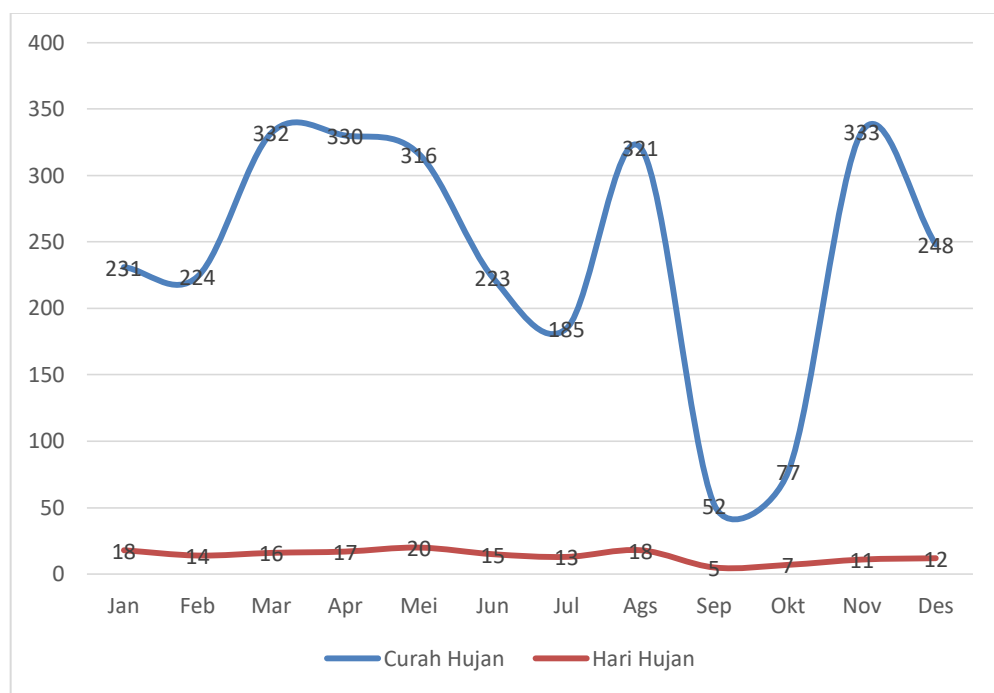


2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan

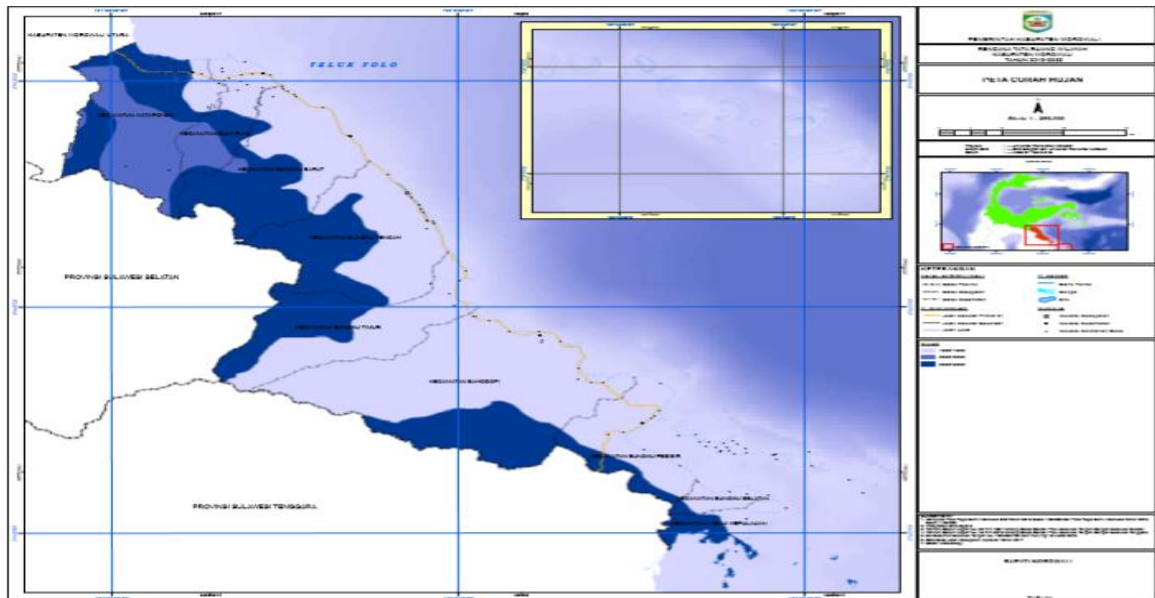
Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm3 dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm3 selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm3 selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm3 selama 7 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan gambar 2.8 peta Klimatologi Kabupaten Morowali

Gambar 2.7. Kondisi Iklim Morowali 2018



Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka, Tahun 2019

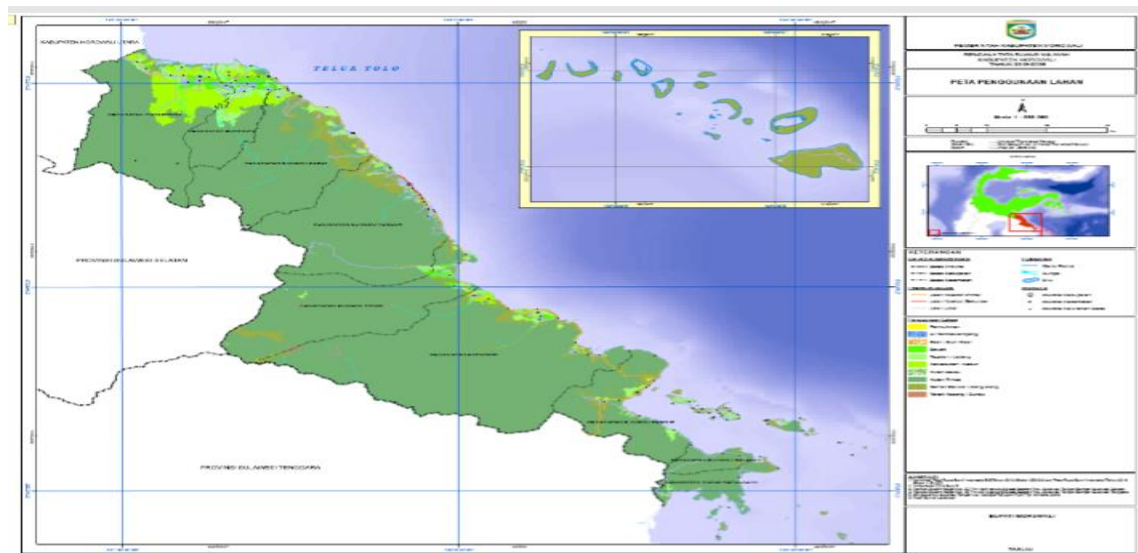
Gambar 2.8. Peta Curah Hujan



2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan. Selengkapnya dijelaskan pada table 2.3 dan peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan



2.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas Hutan Lindung, Kawasan Lindung Lainnya, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung (HL), di tetapkan seluas 99.576,41 hektar terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan
- Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat dikawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

- Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budi daya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan
- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan
- Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan disetiap Kecamatan
- Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan peternakan terdiri atas : a. kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; b. rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; c. rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; d. rencana pengembangan kawasan Budidaya

- Ternak terdapat di setiap Kecamatan; e. rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, f. rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; g. pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan h. rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- Kawasan perikanan tangkap a. seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan c. rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya
 - Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas : a. perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; b. rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan c. perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan.
 - Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: a. tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan b. kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi
 - Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi
 - Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: a. pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; b. pertambangan mineral logam yang

berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; c. pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; d. rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan e. Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi

- Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: a. pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan b. Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali di setiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah
- Kawasan industri besar terdiri atas: a) Kawasan Industri Logam; b) Kawasan Industri perkebunan; c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri

atas : a. industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas : industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan 2. rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya.

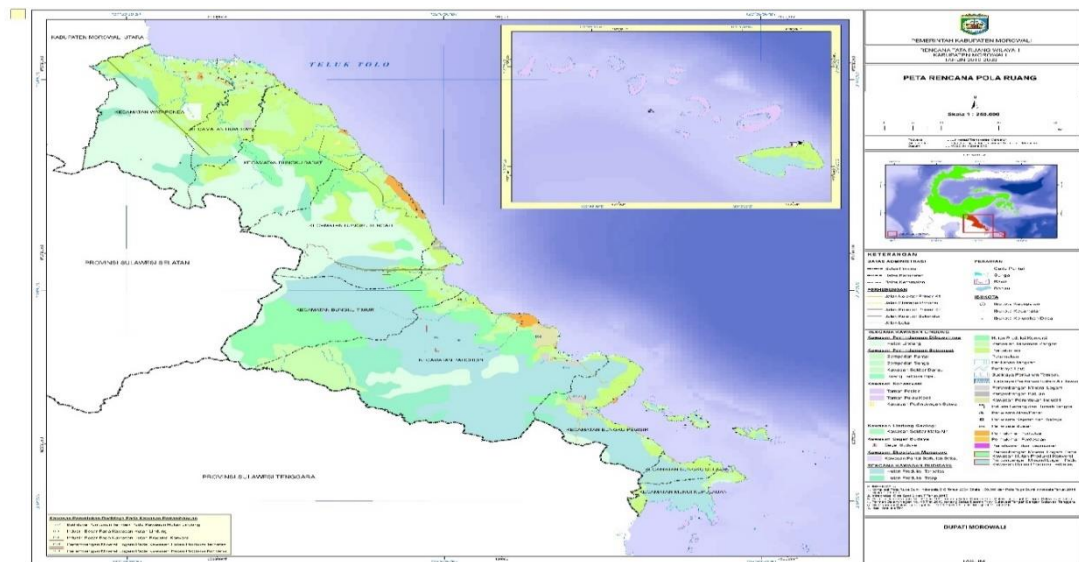
- industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : 1. industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2. rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah.
- industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : 1. Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda
- Kawasan pariwisata alam pegunungan/ Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Wisata Goa terdiri atas: 1. Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2. Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3. Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4. Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan b. Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1. Puncak Fafo baho di Kecamatan Bungku Tengah; 2. Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3. Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. c. Wisata air terjun terdiri atas: 1. Air Terjun Batu Kapal di Kecamatan Bungku Barat;
- Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan, di Kecamatan Bungku Tengah; 3. Permandian Lofi Kecamatan Bungku Timur; 4. Air Terjun Bahoumumpa di Kecamatan Bahodopi; 5. Air terjun Buleleng di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 6. Air kiri Sombori Kecamatan Menui Kepulauan. d. Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat
- Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: a. wisata alam Bentang Laut meliputi: 1. ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2. ekowisata Mangrove Nambo–Laroue di Kecamatan Bungku Timur. b. wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1. Pantai pasir Putih

Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2. Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3. Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4. Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5. Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6. Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7. Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8. Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan. c. wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan

- Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas : a. Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; b. Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; c. Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan d. Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan pariwisata buatan antara lain: a. Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan b. Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah.
- Rencana kawasan potensi pariwisata lainnya di setiap kecamatan
- Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : a. kawasan perkotaan bungku Tengah; b. permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; c. permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; d. rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan e. rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda.
- Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan;
- kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; c. rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan d. rencana pengembangan kawasan

permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada pada gambar 2.10 peta Pola Ruang Berikut ini :

Gambar 2.10. Peta Rencana Pola Ruang



2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

A. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebuna, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat

lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang). Luas lahan padi (Ha) menurut jenis irigasi dan jenis padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Luas lahan padi (Ha) menurut Jenis Irigasi dan Jenis Padi pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)			Luas Tanam (Ha)		
		Irigasi	Non Irigasi	Total	Sawah	Ladang	Total
1	Menui Kepulauan				0	0	0
2	Bungku Selatan				0	0	0
3	Bahodopi				73	0	73
4	Bungku Pesisir				150	8	158
5	Bungku Tengah				20	180	200
6	Bungku Timur				620	67	687
7	Bungku Barat				1.223	15	1.238
8	Bumi Raya				2009	25	2.034
9	Witaponda				2363,25	0	2.363,25

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa potensi sumberdaya lahan untuk tanaman padi berada di Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya dan Bungku Barat. Dua kecamatan pertama memiliki lahan irigasi mencapai 2000 Ha. Berdasarkan kondisi geografis, ketiga kecamatan dengan luas lahan padi terbesar memiliki topografi yang datar.

Potensi usahatani untuk padi ladang hanya terdapat di dua kecamatan yakni Bungku Barat dan Bahodopi. Potensi lahan untuk tanaman pangan lain selain untuk tanaman padi juga terdapat di kecamatan lain dengan kondisi topografi landai sampai bergunung. Berdasarkan data BPS (2019), potensi lahan tegalan di Kabupaten Morowali seluas 4476 Ha (terluas di Bungku Pesisir 1549 Ha), lahan huma/ladang mencapai 1900 Ha (terluas di Bungku Barat (871Ha) dan tidak digunakan seluas 27.875 Ha (terluas di Bungku Barat 26.756 Ha). Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2017 seperti halnya tanaman padi sebagian besar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara untuk tanaman pangan seperti kacang kedelai luas panennya mengalami peningkatan pada Tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya. Data perkembangan luas panen

tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali, Tahun 2014-2018

Jenis Tanaman	Tahun (Ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Padi	8.594	8.887	10.767,6	9.588,2	
Jagung	228	410	1.112,6	784,4	
Ubi Kayu	134	176	113,0	123,00	
Ubi jalar	74	134	66,0	42,50	
Kacang Tanah	61	58	45,0	32,0	
Kacang Kedelai	21	88	192,0	26,0	
Kacang Hijau	34	39	45,9	18,0	

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.3, luas panen tanaman padi di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan menjadi seluas 8.887 Ha di mana pada dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 luas tanaman padi seluas 8.594 Ha, demikian pula halnya yang dengan tanaman pangan lainnya juga mengalami peningkatan seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar kacang tanah, dan kacang hijau. Hanya tanaman pangan kacang kedelai yang mengalami peningkatan luas panen dari tahun sebelumnya yaitu seluas 88 Ha Tahun 2015 yakni pada Tahun 2011, luas tanaman kacang kedelai hanya sebesar 29 Ha. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Morowali.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi padi dan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2013-2017 menurut jenis (ton) dapat dilihat pada Tabel 2.5. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5, produksi tanaman padi sawah sebesar 44.296 ton pada Tahun 2015. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 6,40 persen jika dibanding produksi tanaman padi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 47.324 ton. Produksi padi mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2016 (51.038,4 ton), lalu mengalami penurunan kembali Tahun 2017 sebesar 46.723,3 ton. Untuk tanaman jagung jumlah produksi tertinggi pada Tahun 2016 yakni 5.077,9 ton, sementara pada Tahun 2015 yaitu sebesar 1.865 ton meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 989 ton, selanjutnya Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2.898,4 ton

Tabel 2.4 Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali, Tahun 2014-2018

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Padi	37.750	44.296	51.038,4	46.723,3	
Jagung	990	1.865	5.077,9	2.898,4	
Ubi Kayu	2.644	4.673	2.046,5	3.280,3	
Ubi jalar	892	1.748	794,2	553,9	
Kacang Tanah	94	76	54,6	40,3	
Kacang Kedelai	21	127	236,5	34,5	
Kacang Hijau	28	31	36,8	14,4	

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Untuk jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2013-2017, secara keseluruhan mengalami penurunan produksi seperti padi menurun dari 47.364 ton pada Tahun 2013 menjadi 46.723,3 pada Tahun 2017. Sebaliknya, jagung dan ubi kayu yang produksinya meningkat dari masing-masing 1.049 ton dan 1.995 ton pada Tahun 2013 menjadi masing-masing 2.898 ton dan 3.280 ton pada Tahun 2017. Tanaman ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, produksinya menurun selama periode 2013-2017.

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan dan kebutuhan keindahan atau seni. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang

dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tanaman kangkung dan tomat merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah, produksi tomat Kabupaten Morowali pada Tahun 2017 berada pada peringkat ketiga di bawah Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Sigi. Demikian pula, tanaman kangkung, juga memiliki luas panen terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain, pada tahun 2017, luas panen kangkung Kabupaten Morowali yakni 77 Ha, menempati peringkat keenam di bawah Kabupaten Banggai (158Ha), Parigi Moutong (120 Ha), Poso, Tolitoli dan Palu masing-masing 80 Ha. Selain potensi tanaman hortikultura jenis sayuran, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi produksi tanaman buah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.5 Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun

Jenis Tanaman	Tahun (Ku)	
	2017	2018
Bawang Merah	82	
Cabe Rawit	2040	
Kangkung	2.771	
Tomat	2.684	
Sawi	246	
Bayam	1.706	
Ketimun	984	
Kacang Panjang	2564	
Cabe besar	449	
Terung	1,757	

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.6 Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun

No	Kecamatan	Produksi (kuintal) Tanaman Buah					
		Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Langsat
1	Menui Kepulauan						650
2	Bungku Selatan	35	73	9	280	42	59
3	Bahodopi	250	398	-	2618	1967	288
4	Bungku Pesisir	904	108	-	2168	550	1.538
5	Bungku Tengah	2.290	360	660	660	373	-
6	Bungku Timur	350			1.238	236	
7	Bungku Barat		738		15	25	122
8	Bumi Raya	2.467					
9	Witaponda						

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

2.1.1.10 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah

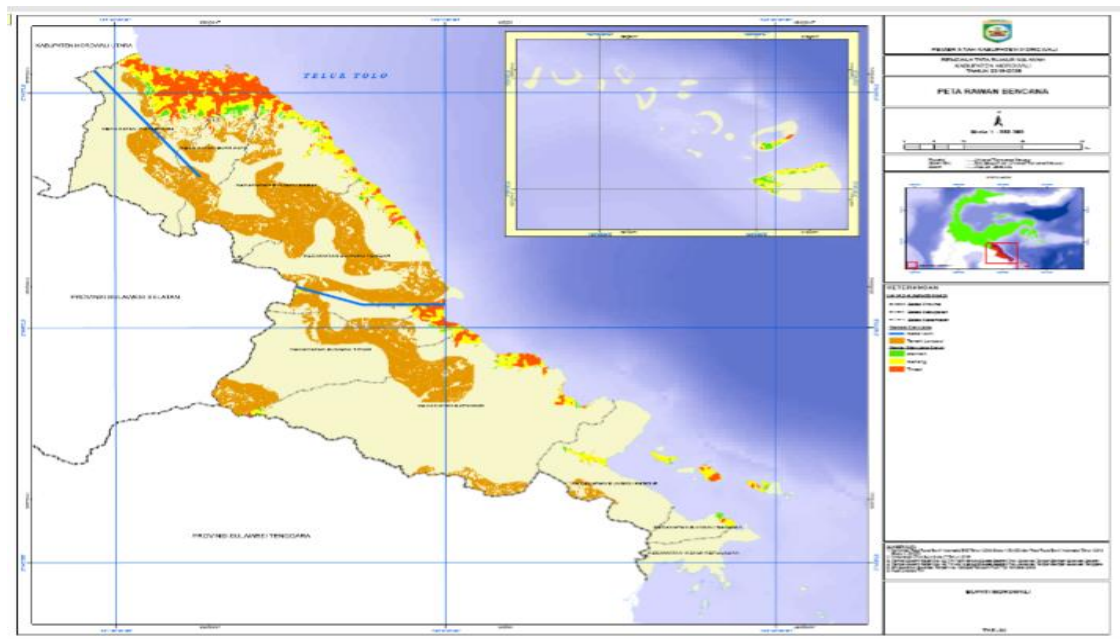
menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Pada Gambar 2.11

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi s berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur

Gambar 2.11. Peta Rawan Bencana



2.1.1.10. KONDISI DEMOGRAFIS

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan

dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Sensus Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2010 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebanyak 102.228 jiwa meningkat sebesar 10,66 persen pada Tahun 2015 menjadi 113.132 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 119.292 jiwa pada Tahun 2018 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,09 persen antara Tahun 2010.

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, yang pada Tahun 2018 tercatat berjumlah 25.477 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Wita Ponda sebanyak 19.585 jiwa, Kecamatan Bungku Selatan sebesar 14.667 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Menui Kepulauan sebanyak 13.462 jiwa, Kecamatan paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bungku Pesisir sebesar 4.688 jiwa Laju pertumbuhan penduduk yang merupakan profil dari tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali bervariasi antar kecamatan . selengkapnya tersaji pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali, Tahun 2010-2018**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)2010-2018
	Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2018	
Menui Kepulauan	12064	12.986	13.462	1,45
Bungku Selatan	17.273	14.135	14.667	-1, 89
Bahodopi	6.594	7.263	7.634	1,97
Bungku Pesisir	-	4.505	4.688	-

Bungku Tengah	27.774	23.365	25.477	-1,03
Bungku Timur	-	8.515	8.875	-
Bungku Barat	10.093	11.357	12.091	2,47
Bumi Raya	11.488	12.360	12.813	1,44
Witaponda	16.942	18.646	19.585	1,95
Morowali	102.228	113.132	119.292	2.09

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas Rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2018 sekitar 2,09% persen (Tahun 2015-2018), tertinggi di Bungku Barat antara Tahun 2010-2018 2,47% dan Witaponda antara Tahun 2015-2018 sebesar 1,95 %.

B. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Ratio" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk lakilaki dengan penduduk perempuan. Jika dilihat dengan cermat tabel 2.20, tergambar bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2018 dengan rasio sebesar 112,41, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 95,27

Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2018

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
	Laki - Laki	Perempuan			
Menui Kepulauan	9.527	6.894	95,27	13.462	11,28
Bungku Selatan	7.265	7.042	98,15	14.667	12,30
Bahodopi	4.040	3.594	112,41	7.634	6,40
Bungku Pesisir	2.404	2.284	105,25	4.688	5,41
Bungku Tengah	13.044	12.433	104,91	25.477	21,36
Bungku Timur	4.481	4.394	101,98	8.875	7,44
Bungku Barat	6.340	5.751	110,24	12.091	10,14
Bumi Raya	6.612	6.201	106,63	12.813	10,74

Witaponda	10.141	9.444	107,38	19.585	16,42
Morowali	60.895	58.397	104,28	119.292	100

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Secara keseluruhan terlihat sex rasio pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 95,27 sampai 112,41. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (sex rasio=100) dengan angka rasio sebesar 104,28 dan bahkan terdapat kecenderungan sex rasio tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Morowali.

C. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018, rata - rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 21,80 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 25.477 Jiwa mencapai kepadatan penduduk sebanyak 35,11 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 60,20 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 5,41 jiwa per km² selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 2.18

Tabel 2.9 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2018

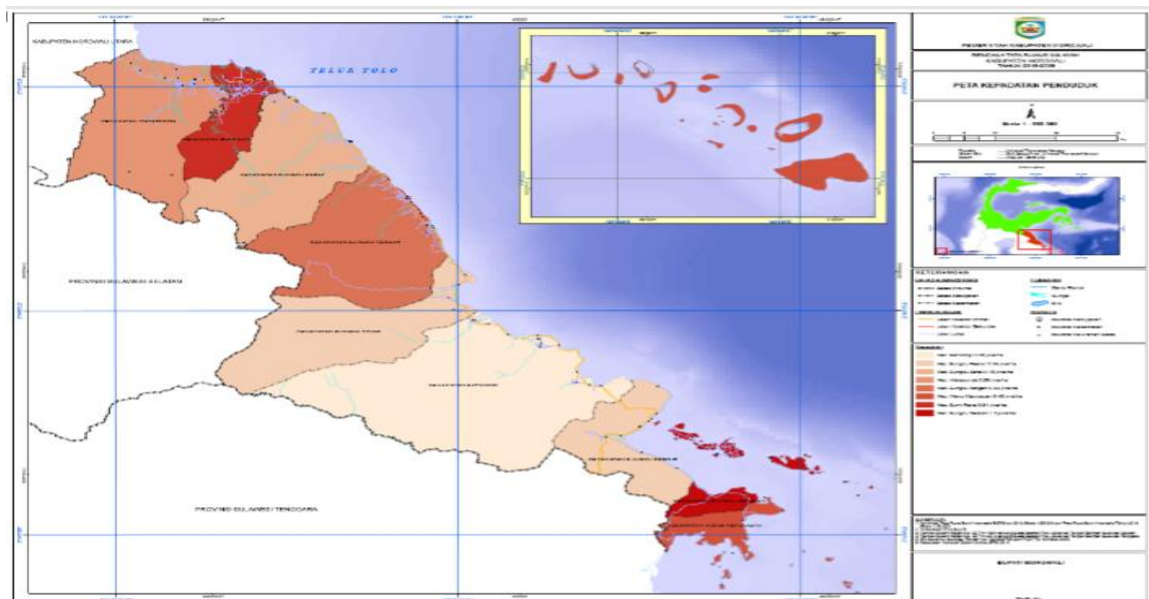
Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan (org/Km ²)
	Km ²	%	Jiwa	%	
Menui Kepulauan	223,63	4,07	13.462	11,28	60,20
Bungku Selatan	403,90	7,38	14.667	12,30	36,31
Bahodopi	1.080,98	19,76	7.634	6,40	7,06
Bungku Pesisir	867,29	15,85	4.688	5,41	5,41
Bungku Tengah	725,57	13,26	25.477	21,36	35,11
Bungku Timur	387,23	7,08	8.875	7,44	22,92

Bungku Barat	758,93	13,87	12.091	10,14	15,93
Bumi Raya	504,77	9,23	12.813	10,74	25,38
Witaponda	519,70	9,50	19.585	16,42	37,69
Morowali	5.472,00	100,00	119.292	100,00	21,80

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa Kecamatan Menui Kepulauan merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, sementara terendah kepadatan penduduknya di Kecamatan Bungku Pesisir. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali. Jika dilihat dari rata-rata jumlah anggota keluarga (ART) dalam satu rumah tangga, Kecamatan yang memiliki kepadatan terendah di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bungku Pesisir, dengan total penduduk sebanyak 4.688 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta kepadatan penduduk berikut ini :

Gambar 2.12. Peta Kepadatan Penduduk



2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN

2.1.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

A. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah maupun kabupaten Morowali tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut diarahkan pada aspek pemerataan

kesejahteraan masyarakat. suatu pembangunan akan kurang berarti apabila tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

Perekonomian Sulawesi Tengah cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat. Perlambatan tersebut terjadi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB mencapai 6,30 persen. Peningkatan ini melambat bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan laju 7,10 persen, namun salah satu Kabupaten yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Morowali dengan menempati urutan teratas di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Laju Pertumbuhan PDRB pada tahun 2018 sebesar 12,39 persen dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14,51 persen Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.10

PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota	ADHB (Miliar Rupiah)			ADHK (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Banggai Kepulauan	3.300	3.655		2.462	2.612		6,00	6,08	
Banggai	23.658	26.877		17.204	18.372		8,14	6,79	
Morowali	17.041	20.275	24.327	13.366	15.023	17.199	14,10	12,39	14,51
Poso	8.021	8.733		5.747	6.103		6,15	6,19	
Donggala	10.766	11.323		7.958	8.188		5,27	2,89	
Tolitoli	7.138	7.869		5.193	5.472		5,08	5,36	
Buol	5.149	5.539		3.767	3.937		4,05	4,52	
Parigi Moutong	15.803	17.308		11.148	11.668		5,31	4,66	
Tojo Una-Una	4.989	5.295		3.572	3.707		5,62	3,76	
Sigi	7.810	8.361		5.744	5.969		5,65	3,92	
Banggai Laut	2.006	2.203		1.543	1.634		6,26	5,90	
Morowali Utara	9.139	10.119		6.699	7.133		7,95	6,49	
Kota Palu	18.570	22.629		14.587	15.325		5,54	5,05	
Sulawesi Tengah	133.951	150.636		97.475	103.618		7,10	6,30	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel diatas kemampuan perekonomian Tahun 2018 di Sulawesi Tengah ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 150.636,32 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 133.951,16 miliar rupiah. Sedangkan ditinjau atas dasar harga konstan 2010, PDRB Sulawesi Tengah tahun 2018 mencapai 103.617,69 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 97.474,86 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi suatu

daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali tahun 2019 mencapai 14,51 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 12,39 persen. Adapun PDRB kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- ADH Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen.), 2015 – 2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,94	4,12	3,78	0,82	2,85
Pertambangan dan Penggalian	110,95	15,93	15,93	13,11	17,94
Industri Pengolahan	338,20	27,60	21,90	19,38	17,33
Pengadaan Listrik dan Gas	11,95	11,71	14,07	15,40	1,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	7,98	8,23	9,53	8,38	-0,08
Konstruksi	0,28	-8,68	6,81	6,27	13,31
Perdagangan Besar dan Eceran	24,27	9,92	6,23	5,81	4,74
Transportasi dan Pergudangan	28,77	7,29	6,42	5,38	14,85
Penyediaan Akomodasi	11,41	5,43	6,99	10,40	0,28
Informasi dan Komunikasi	10,74	9,16	9,16	11,42	1,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,51	9,81	7,23	7,26	7,52
Real Estat	18,68	5,01	2,76	2,12	2,15
Jasa Perusahaan	7,60	7,92	9,22	8,73	8,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,45	6,04	7,42	8,71	8,89
Jasa Pendidikan	7,31	6,89	5,60	5,61	4,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,64	9,89	10,03	9,60	9,4
Jasa lainnya	6,58	6,80	8,19	8,09	2,1
Total PDRB	67,82	12,42	14,1	12,39	14,51

Sumber: BPS Kabupaten Morowali

Tabel 2.11 menjelaskan Per tumbuhan tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 19,38% namun pada tahun 2019 turun menjadi 17,33%, diikuti oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,40% menurun menjadi hingga 1,85% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mencapai 0,82% namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,85%. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB menurut harga berlaku. Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun masih pada sektor industri pengolahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12

Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- ADHB
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015 – 2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,54	12,68	11,57	9,93	8,83
Pertambangan dan Penggalian	26,19	26,88	27,30	28,55	31,27
Industri Pengolahan	29,68	33,09	35,52	37,51	36,85
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Konstruksi	19,64	16,54	15,42	14,51	14,31
Perdagangan Besar dan Eceran	4,86	4,87	4,59	4,36	3,98
Transportasi dan Pergudangan	0,42	0,41	0,04	0,35	0,36
Penyediaan Akomodasi	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
Informasi dan Komunikasi	1,10	1,06	1,01	0,96	0,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,85	0,84	0,80	0,74	0,67
Real Estat	0,91	0,86	0,78	0,68	0,62
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,25	1,21	1,13	1,04	0,96
Jasa Pendidikan	0,68	0,67	0,64	0,58	0,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,40	0,38	0,36	0,33
Jasa lainnya	0,30	0,31	0,30	0,28	0,24
Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani adalah indeks nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang harus dibayar petani dikalikan dengan 100 %. Adapun Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Wilayah	Nilai Tukar Petani	
	2015	2019
Kab.Morowali	100.49	100,14
Prov.Sulawesi Tengah		96,22

Sumber: BPS Kab.Morowali

Dari tabel 2.13 di ketahui Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali tahun 2015 yaitu sebesar 100,49 dan pada tahun 2019 menjadi 100,14. Peranan sector pertanian masih cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Morowali. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Secara agregat sudah mencapai 14,51 %. Dimana pertumbuhan sector pertanian menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2017 mencapai 3,78% menjadi 0,8 % Tahun 2018 kemudian kembali peningkatan menjadi 2,85 % pada Tahun 2019.

Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Morowali berkembang cukup pesat terutama dari pendatang, maka sector pertanian merupakan sector yang penting untuk dikembangkan lebih lagi. Hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan penduduk akan bahan pangan yang tentu mengalami peningkatan yang drastis. Jangan sampai dengan tingginya permintaan akan hasil pertanian di Kabupaten Morowali, justru tidak searah dengan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Hal ini kan membahayakan pembangunan di Kabupaten Morowali sendiri dikarenakan potensi sektor pertanian cukup besar malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Indeks Pembangunan Manusia

Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia dengan nilai IPM berkategori 'Sedang'. IPM yang dicapai Sulawesi Tengah Tahun 2018 tercatat sebesar 68,88 dan masih jauh di bawah IPM Indonesia sebesar 71,39. Dilihat dari posisinya, IPM Sulawesi Tengah berada pada peringkat 25 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 26. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.14

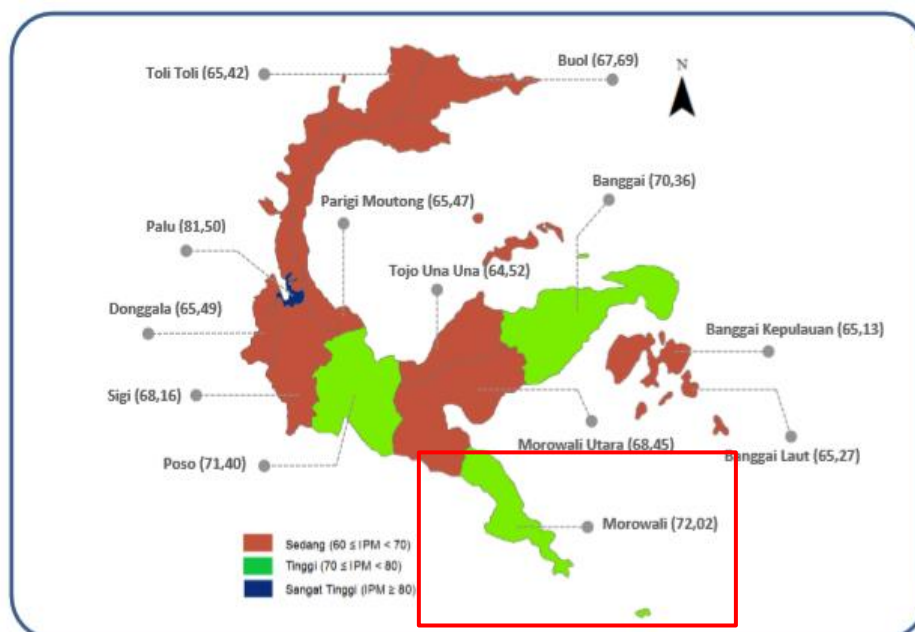
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota, 2011 – 2019

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banggai Kepulauan	60.54	61.09	61.74	62.33	62.97	63.45	64.07	64.68	
Banggai	64.63	65.44	66.39	67.11	67.44	68.17	69,00	69.85	
Morowali	66.03	66.48	66.86	67.91	69.12	69.69	70.41	71.14	72.02
Poso	65.59	66.2	66.94	67.65	68.13	68.83	69.78	70.68	
Donggala	60.15	61.33	63.38	63.55	63.82	64.42	64.66	65.14	
Toli-Toli	59.12	60.05	61.44	61.91	62.72	63.27	64.05	64.6	
Buol	63.03	63.98	64.5	65.41	65.61	66.37	66.69	67.3	
Parigi Moutong	60.36	61.13	61.98	62.2	62.79	63.6	64.09	64.85	
Tojo Una-Una	58.87	59.55	60.32	61.15	61.33	62.27	62.61	63.38	
Sigi	61.76	62.88	64.1	64.64	65.35	65.95	66.72	67.66	
Banggai Laut	0	0	61.86	62.12	62.9	63.49	64.08	64.8	
Morowali Utara	0	0	65.01	65.81	66	66.57	67.35	67.95	
Kota Palu	78.1	78.36	78.65	79.12	79.63	79.73	80.24	80.91	
Sulawesi Tengah	64,27	65	65.79	66.43	66.76	67.47	68.11	68.88	
Nasional			68,31	68,9	69,55	70,18	70,81	71,39	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 2.13

Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota, 2011 – 2019



Tabel 2.14 dan Gambar 2.13 menunjukkan nilai pertumbuhan IPM Sulawesi Tengah terus menurun dari 1,54 persen pada tahun 2011, menjadi masing-masing 1,13 dan 1,22 persen pada tahun 2012 dan 2013, kemudian melambat lagi menjadi 0,97 dan 0,49 persen pada tahun 2014 dan 2015. Namun, pada tahun 2016 angka pertumbuhan IPM Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yaitu sebesar 1,07 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi kembali melambat menjadi 0,95 persen dan pada tahun 2018 tumbuh 1,13 persen. Pertumbuhan dari tahun ke tahun ini mampu meningkatkan peringkat IPM Sulawesi Tengah dari 26 pada tahun 2017 menjadi 25 pada tahun 2018. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Morowali berada pada urutan ke dua setelah kota palu sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2011 dengan nilai 66,03 % sedangkan pada tahun 2019 yaitu mencapai 72,02 % sehingga mengalami perubahan status dari “ Sedang “ menjadi “ Tinggi” . dengan adanya perubahan status ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). adapun Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut
Komponen dan Kabupaten/Kota, 2017 – 2019

Kabupaten /Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribu Rupiah)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Banggai Kepulauan	64,53	65,12		13,03	13,04		7,99	8,14		7.440	7.545	
Banggai	70,02	70,32		12,89	13,22		7,92	8,06		9.516	9.712	
Morowali	68,07	68,45	68,82	12,77	12,89	13,33	8,73	8,98	9,11	11.012	11.159	11.277
Poso	70,16	70,51		13,38	13,68		8,81	9,04		8.781	8.936	
Donggala	65,89	66,37		12,46	12,47		7,84	7,85		7.924	8.106	
Tolitoli	64,12	64,71		12,70	12,71		7,85	7,96		7.916	8.017	
Buol	67,00	67,59		13,06	13,07		8,63	8,74		7.934	8.079	
Parigi Moutong	63,19	63,57		12,44	12,45		6,98	7,18		9.488	9.808	
Tojo Una-Una	64,07	64,61		11,81	11,82		7,90	8,16		7.465	7.608	
Sigi	68,72	69,15		12,51	12,85		8,22	8,43		8.113	8.236	
Banggai Laut	63,62	64,21		12,87	12,88		8,21	8,44		7.693	7.810	
Morowali Utara	68,34	68,77		12,21	12,22		8,39	8,58		8.842	8.985	
Kota Palu	69,93	70,31		15,92	16,2		11,26	11,33		14.871	15.074	
Sulawesi Tengah	67,32	67,78		13,04	13,13		8,29	8,52		9.311	9.488	
Nasional	71,06	71,2		12,85	12,91		8,10	8,17		10.664	11.059	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jika dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, secara umum Kabupaten Morowali mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan di suatu wilayah, baik dari sisi sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Pada tahun 2019, UHH Kabupaten Morowalu mencapai 68,82 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,82 tahun. Kecenderungan Umur Harapan Hidup tahun 2011-2019 di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir hidup diharapkan dapat hidup lebih lama karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Dimensi kedua pembentuk IPM yaitu pengetahuan yang diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Secara umum, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Morowali sebesar 13,33 tahun dan angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,11 tahun sedangkan Pada dimensi standar hidup layak, rentang nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2019 berkisar antara 11.277 ribu rupiah per tahun.

B. Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif. Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatannya dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lainnya. Adapun kondisi kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 – 2019

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (000 Org)				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Banggai Kepulauan	300.753	317.475	317.475	18,72	18,56	18,38		16,18	15,92	15,65	
Banggai	352.840	373.695	373.695	33,97	33,5	33,72		9,47	9,2	9,12	
Morowali	381.753	402.292	402.292	17,36	16,99	17,03	16,61	15,13	14,55	14,34	13,75
Poso	429.161	449.834	449.834	42,23	41,88	41,75		17,71	17,16	16,71	
Donggala	291.011	308.212	308.212	55,69	54,44	54,28		18,59	18,17	18,03	
Tolitoli	281.882	299.052	299.052	30,68	30,64	31,79		13,47	13,3	13,66	
Buol	314.556	332.163	332.163	25,27	25,76	25,39		16,68	16,65	16,08	
Parigi Moutong	366.762	388.440	388.440	82,38	82,88	83,66		17,8	17,55	17,41	
Tojo Una-una	417.508	442.186	442.186	27,62	27,3	27,78		18,56	18,15	18,27	
Sigi	299.261	316.949	316.949	29,55	29,55	29,78		12,76	12,66	12,6	
Banggai Laut	306.611	324.734	324.734	11,59	11,63	11,97		16,6	16,17	16,32	
Morowali Utara	392.811	412.942	412.942	19,22	19,25	19,4		16,07	15,73	15,53	
Kota Palu	473.555	492.085	492.085	26,24	25,49	25,26		7,06	6,74	6,58	
Sulawesi tengah	391.763	413.785	413.785	420,52	417,87	420,21		14,45	14,14	14,01	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan pada tabel diatas, terjadi penurunan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dimana pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor

pertanian, namun pada sektor perikanan di wilayah kepulauan program kegiatannya belum terlaksana dengan baik.

C. Pengangguran

Tingkat Pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Penganggur adalah Tenaga Kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang bekerja kurang dari dua jam pada minggu yang lalu. Tingkat pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Seseorang dikatakan Bekerja bila yang bersangkutan bekerja lebih dari 2 jam pada minggu yang lalu. Rasio Orang yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Morowali yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.17

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), 2017 – 2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Banggai Kepulauan	70,72	70,18	73,55
Banggai	69,4	71,49	66,93
Morowali	60,72	60,8	62,6
Poso	76,84	75,48	72,36
Donggala	60,33	63,82	65,52
Toli-Toli	60,79	66,57	62,25
Buol	64,56	67,02	66,93
Parigi Moutong	67,3	72,05	68,09
Tojo Una-Una	68,97	76,58	78,59
Sigi	67,8	69,1	69
Banggai Laut	62,13	69,3	65,17
Morowali Utara	75,30	75,45	65,65
Kota Palu	66,28	65,82	65,28
Sulawesi Tengah	67,14	69,52	67,59

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.18

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah , 2017 – 2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Banggai Kepulauan	3,24	3,60	2,02
Banggai	2,94	3,00	2,20
Morowali	2,72	2,89	3,03
Poso	3,69	2,47	2,25
Donggala	3,32	2,85	2,81
Toli-Toli	4,35	3,18	3,16
Buol	4,40	4,57	4,05
Parigi Moutong	2,66	2,70	2,37
Tojo Una-Una	2,88	3,74	2,97
Sigi	5,29	3,78	2,61
Banggai Laut	3,21	3,35	3,05
Morowali Utara	2,00	2,12	3,12
Kota Palu	6,56	5,81	6,36
Sulawesi Tengah	3,81	3,43	3,15

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel 2.18 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Gini Ratio

Gini Ratio adalah Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Adapun Indeks Gini ratio Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah, 2012-2018

Kabupaten/Kota	Gini Rasio						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Banggai Kepulauan	0,338	0,315	0,301	0,32	0,302	0,338	0,345
Banggai	0,374	0,407	0,317	0,321	0,319	0,302	0,311
Morowali	0,371	0,396	0,363	0,377	0,332	0,304	0,304
Poso	0,331	0,304	0,317	0,382	0,357	0,302	0,300
Donggala	0,329	0,26	0,274	0,312	0,316	0,348	0,326
Tolitoli	0,392	0,337	0,334	0,306	0,375	0,382	0,369
Buol	0,368	0,321	0,336	0,307	0,313	0,329	0,348
Parigi Moutong	0,310	0,300	0,289	0,343	0,31	0,304	0,305
Tojo Una-una	0,341	0,34	0,339	0,338	0,338	0,33	0,313
Sigi	0,337	0,357	0,31	0,33	0,315	0,33	0,303
Banggai Laut	-	-	-	0,308	0,306	0,307	0,307
Morowali Utara	-	-	-	0,337	0,335	0,336	0,314
Kota Palu	0,369	0,41	0,397	0,43	0,363	0,358	0,357
Sulawesi Tengah	0,374	0,389	0,362	0,374	0,362	0,355	0,346

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Tabel 2.19 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pada Tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,346. Angka ini relatif stagnan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2017 yang sebesar 0,355, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,346, angka tersebut turun sebesar 0,019 poin. dibandingkan dengan Kabupaten lainnya Kabupaten Morowali masih

berada pada Tingkat ketimpangan rendah hal ini disebabkan karena Gini ratio Kabupaten Morowali pada Tahun 2016 sebesar 0,332 dan untuk tahun 2017 mencapai 0,304 sedangkan tahun 2018 tetap dengan nilai 0,304. Namun Gini ratio di Kabupaten Morowali di tahun 2018 berada di urutan ketiga setelah kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenjang Pendidikan	Capaian			
	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
	2018	2019	2018	2019
SD/MI/Paket A	94,66	98,49	106,66	121,33
SMP/MTs/Paket B	70,96	88,53	94,76	115,32
SMA/SMK/MA/Paket B	68,43	80,76	82,52	103,19

APM dan APK Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, capaian tersebut harus terus di jaga untuk menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat kabupaten morowali. Permasalahan lain adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Khusus pada wilayah kepulauan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan guru serta

keterjangkauan dan aksesibilitas murid bersekolah. Pada beberapa wilayah kecamatan khususnya kepulauan masih banyak terdapat gedung sekolah dengan kondisi belum layak dalam menjalankan proses belajar mengajar serta belum memadainya sarana prasarana seperti buku dan peralatan mengajar, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

B. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Bidang Urusan/Indikator	Capaian	
	2018	2019
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00	0,00
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,34	0,44

Terjadi peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, hal ini di sebabkan karena beberapa faktor yaitu masih adanya budaya lokal yang berpemahaman bahwa anak memiliki kewajiban membantu orang tua mencari nafkah sehingga banyak anak yang berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja padahal program pendidikan gratis telah menyentuh jenjang pendidikan SMA. Hal ini menjadi masukan untuk pemerintah provinsi dikarenakan kewenangan pendidikan SMA sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi.

C. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka kelulusan sekolah SD menunjukkan persentase anak yang lulus sekolah yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka kelulusan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Bidang Urusan/Indikator	Capaian	
	2018	2019
Angka Kelulusan SD/MI	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTS	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100

D. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan yang kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya, misalnya tingkat kelulusan sekolah SD yang kemudian melanjutkan kejenjang sekolah SMP yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka melanjutkan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator	Capaian	
	2018	2019
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	96,63	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,37	100

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian, bahwa semua anak yang lulus sekolah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Maka program yang pendidikan yang telah berjalan selama ini harus di pertahankan bahkan di tingkatkan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

A. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau Mallnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus atau wasting, stunting dan berat badan kurang. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan

menurut umur. Adapun persentase balita gizi buruk di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Capaian	
		2018	2019
1	2	3	5
#	Persentase balita gizi buruk	0.3	0.09

Terjadi kenaikan balita yang mengalami gizi buruk berdasarkan tabel di atas, hal ini disebabkan karena asupan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak mengandung kualitas gizi yang baik. Permasalahan ini kiranya perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat merumuskan program yang tepat sasaran untuk penanganan masalah tersebut. Program yang perlu menjadi perhatian terkait masalah ini adalah program urusan pangan, infrastruktur dan urusan kesehatan itu sendiri sehingga bisa berkolaborasi untuk mengatasi gizi buruk.

B. Persentase Balita Stunting

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting dimasa yang akan datang mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Persentase balita stunting di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	2018		2019	
	Total Balita Stunting	persentase stunting	Total Balita Stunting	persentase stunting
Angka Stunting			1042	12,0

C. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang

terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014), sedangkan Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 1 tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu bangsa. Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.87	0.013
Angka Kelangsungan hidup bayi	0.28	0.35
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran bayi	0.71	0.7
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran bhidup	15.07	10.5
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	79.72	0.003

Data tersebut menunjukkan adanya trend peningkatan dalam mengatasi kematian ibu dan bayi. Hal tersebut harus di pertahankan sehingga tidak terjadi kematian ibu dan bayi di karenakan pelayanan kesehatan yang kurang optimal, mengingat urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus di lakukan oleh pemerintah yang mana masyarakat memiliki hak atas setiap pelayanan kesehatan.

D. Rasio Prasarana Kesehatan

Rasio prasarana kesehatan yang dimaksud dalam indikator ini adalah Rasio posyandu per satuan balita, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk, Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk. Adapun penjelasan masing-masing indicator tersebut adalah sebagai berikut :

1) Rasio posyandu per satuan balita;

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Data Rasio posyandu per satuan balita dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio posyandu per satuan balita	15.79	75

Selama kurun waktu 2018-2019 terjadi tren peningkatan, ini berarti jumlah posyandu semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap balita.

2) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Data rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	0.08	0.08

3) Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk;

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data rasio rumah sakit persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	0.02	0.02

Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua rumah sakit, dengan jumlah penduduk morowali 119.292 berarti satu rumah sakit melayani 59.646 penduduk. Jika melihat ideal rasio pelayanan penduduk, maka perlu adanya penambahan sarana prasarana, baik itu dari kamar pasien maupun peningkatan

manajemen pelayanan sehingga bisa sejalan dengan standar pelayanan kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk melihat sejauh mana rumah sakit di gunakan oleh masyarakat, dan sejauh mana masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap.

E. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	0.32	0.32

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00026 pada tahun 2018 dan tetap sama pada tahun 2018 sehingga dapat diartikan bahwa 1 dokter melayani 3.125 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali masih membutuhkan ketersediaan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Tetapi jika di bandingkan dengan standar kementrian kesehatan yaitu 26 dokter per 100.000 penduduk maka jumlah dokter tersebut sudah ideal hanya saja penyebarannya yang belum merata.

F. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1000 pddk)

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1000 pddk)	6.29	6.23

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00629 pada tahun 2018 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 159 penduduk. Ini kemudian menunjukkan penurunan pada tahun 2019 yaitu 0,00623 bahwa 1 tenaga paramedis melayani 161 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi penurunan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah.

G. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Pada prinsipnya, semua indikator pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan ibu dan bayi terjadi tren positif di Kabupaten Morowali. Adapun data cakupan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100

Adapun yang terkait dengan indikator cakupan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan kompetensi kebidanan	100	100
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94.48	96.28
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	100	100
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
Penderita diare yang ditangani	2.525	2802
Angka Kejadian Malaria	0.26	0.13
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100
Cakupan kunjungan bayi	100	100
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	100	100
Cakupan pembantu puskesmas	25.65	25.65
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 9rasio kunjungan K4)	83.07	94
Cakupan pelayanan anak balita	65.61	56

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Infrastruktur Jalan

Indikator Infrastruktur jalan yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Terkait dengan ketiga indikator tersebut kondisinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	19.16	31.45
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.008	0.006
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	16.868	18.92

Terjadi peningkatan yang signifikan untuk jaringan jalan dalam kondisi baik, tetapi terjadi penurunan pada rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi penduduk di kabupaten morowali sehingga perlu menjadi pertimbangan terkait populasi penduduk. Meskipun begitu program pembangunan jalan terus mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kelancaran aktivitas ekonomi.

B. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang mempunyai akses layanan sanitasi, sekurang-kurangnya memiliki fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Adapun persentase rumah tinggal bersanitasi pada Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Persentase rumah tinggal bersanitasi	0.392	1.67

Terjadi peningkatan rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2018-2019, hal ini harus terus ditingkatkan mengingat angka tersebut masih jauh dari kondisi ideal khususnya di wilayah kepulauan. Sanitasi merupakan indikator wajib atau dengan kata lain menjadi standar pelayanan minimal pemerintah daerah sehingga wajib untuk di laksanakan dan di tingkatkan kinerjanya karena dengan membaiknya sanitasi maka secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian atau kondisi angka kemiskinan masyarakat.

C. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang mempunyai layanan air bersih. Bentuk penyediaan air bersih selain pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan pemasangan pompa dan pembangunan sumur yang mana sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel dibawah :

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Proporsi rumah tangga pengguna air bersih (%)	45.47	44.66

Terjadi penurunan rumah tangga pengguna air bersih sebesar 0,81 persen, maksudnya adalah adanya rumah tangga yang belum tersentuh layanan air bersih atau terbatasnya akses untuk menggunakan air bersih. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah kepulauan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di karenakan kondisi topografi kepulauan, sehingga program air bersih di wilayah kepulauan

tersebut harus tepat penanganannya dan terus mengevaluasi program-program yang sudah berjalan. Hal ini harus terus di tingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi indikator kinerja wajib oleh pemerintah daerah.

D. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio Jaringan Irigasi	27.86	15.91

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat di ketahui bahwa masih besarnya kebutuhan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan lahan budidaya. Hal ini juga dapat dilihat dari produktivitas pertanian yang masih rendah, sehingga untuk meningkatkan produktivitas tersebut maka perlu adanya peningkatan jaringan irigasi untuk mencapai target produktivitas pertanian.

E. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	6.10	1.195

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman

A. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah atau tempat tinggal yang layak untuk dijadikan hunian dari sisi atap,lantai dan dinding bagi penduduk kategori rumah tangga miskin. Layak atau tidak layakinya suatu tempat tinggal dinilai berdasarkan perhitungan teknis dan peninjauan lapangan. Semua data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif sampai mencapai rumusan kesepakatan untuk

menilai layak atau tidak layak rumah tersebut untuk dijadikan hunian atau tempat tinggal. Rumah layak huni di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Rumah Layak Huni (%)	18.8	271

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan capaian rumah layak huni dari tahun 2018 ke tahun 2019. Ini disebabkan karena adanya program unggulan pemerintah daerah untuk pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. Sehingga indikator program kegiatan ini masih butuh perhatian yang sangat tinggi guna mengejar target RPJMD tersebut dan di sisi lain indikator ini merupakan program pendukung dalam pengentasan kemiskinan. Program ini kategori berhasil, karena dengan adanya program ini maka pengentasan kemiskinan dari bidang infrastruktur dapat di atasi secara perlahan berdasarkan data angka kemiskinan. Program ini akan terus berlanjut khususnya di wilayah kepulauan.

D. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar saat ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi kabupaten morowali saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik, sehingga saat ini pemerintah daerah terus menggenjot untuk memberikan pelayanan listrik kepada daerah-daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan tren penggunaan listrik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	93	94

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan bidang sosial dapat dilihat dari data kemiskinan sebagaimana tabel di bawah ini :

Indikator	Tahun	
	2018	2019
Presentase Penduduk diatas garis kemiskinan	86	86.25
Persentase Penduduk Miskin	14	13.75
Rasio Kesenjangan Kemiskinan/Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)	0.7	0.5

Berdasarkan pada tabel diatas, terjadi penurunan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dimana pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, namun pada sektor perikanan di wilayah kepulauan program kegiatannya belum terlaksana dengan baik.

2.1.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Indikator	Tahun	
	2018	2019
Jumlah Angkatan Kerja	16,123	2,119
Tingkat Pengangguran terbuka	15,529	1,939

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel di atas Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a) Analisis Indikator SKPG

➤ Aspek Ketersediaan Pangan

No.	KECAMATAN	Rasio Ketersediaan (r)	Skor_Pertanian
1	Menui Kepulauan	0.53	3
2	Bungku Selatan	16.33	1

3	Bahodopi	0.21	3
4	Bungku Pesisir	1.08	2
5	Bungku Tengah	0.58	3
6	Bungku Timur	2.48	1
7	Bungku Barat	3.09	1

b) Aspek Akses Pangan Tahunan

➤ Data Keluarga Miskin

No	KECAMATAN	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Pra dan sejahtera I (Total)	% Pra dan Sejahtera I (r)	Skor_Miskin
1	Menui Kepulauan	4,122	3,048	-	3,048	74	3
2	Bungku Selatan	4,202	3,082	-	3,082	73	3
3	Bahodopi	14,529	1,232	-	1,232	8	1
4	Bungku Pesisir	1,897	1,030	-	1,030	54	3
5	Bungku Tengah	8,967	2,557	-	2,557	29	2
6	Bungku Timur	3,639	1,120	-	1,120	31	2
7	Bungku Barat	4,315	1,815	-	1,815	42	3
8	Bumi Raya	4,551	1,905	-	1,905	42	3
9	Wita Ponda	6,309	1,729	-	1,729	27	2
10	MOROWALI	52,531	17,518	-	17,518	33	2

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

➤ Data Status Gizi

No	KECAMATAN	Total KEP	% KEP (r)	Skor KEP
1	Menui Kepulauan	4	1.01	1
2	Bungku Selatan	53	20.23	3
3	Bahodopi	14	2.88	1
4	Bungku Pesisir	13	6.10	1
5	Bungku Tengah	8	2.34	1
6	Bungku Timur	1	0.42	1
7	Bungku Barat	3	2.78	1
8	Bumi Raya	13	4.81	1

9	Wita Ponda	5	2.54	1
	MOROWALI	114	4.54	1

d) Indek Komposit

➤ Situasi Pangan dan Gizi

No	KECAMATAN	S_Pertanian	S_Pra dan Sejahtera I	S_KEP	Skor_Komposit	Indeks Komposit Tahunan (IKT)
1	Menui Kepulauan	3	3	1	7	3
2	Bungku Selatan	1	3	3	7	3
3	Bahodopi	3	1	1	5	3
4	Bungku Pesisir	2	3	1	6	3
5	Bungku Tengah	3	2	1	6	3
6	Bungku Timur	1	2	1	4	1
7	Bungku Barat	1	3	1	5	3
8	Bumi Raya	1	3	1	5	3
9	Wita Ponda	1	2	1	4	1
10	MOROWALI	1	2	1	4	1

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Tahun	
	2018	2019
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.9	1.9

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Indikator	CAPAIAN	
	2018	2019
Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)	17000	17000
Jumlah kapal berangkat	300	300
Jumlah penumpang turun	9000	5000
Jumlah Penumpang naik	8000	6000
Jumlah barang bongkar (ton)	200000	15000
Jumklah barang muat (ton)	400000	35000

Rasio Ijin Trayek	17	17
Jumlah uji kir angkutan umum	-	150
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	1
Persentase layanan angkutan darat	33.5	35
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	150
Pemasangan rambu-rambu	350	-
Rasio panjang jalan per jumlah kendarann	4.97	4,7
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6521	6000
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	17000	17000

5. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

A. DATA TOWER

NO	SITEID	SITE NAME	KOTA_KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS JARINGAN		
						2G	3G	4G
1	COI097	COMBAT MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	-	Ya
2	LWK038	IPI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	IPI	Ya	Ya	Ya
3	MRW002	BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	Ya	Ya	Ya
4	MRW003	BAHONSUAI	MOROWALI	BUMI RAYA	PARILANGKE	Ya	Ya	Ya
5	MRW006	LAANTULA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	LANTULA JAYA	Ya	Ya	Ya
6	MRW008	WOSU	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	Ya	Ya	Ya
7	MRW016	BAHODOPI	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
8	MRW017	BUMI RAYA	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBATAE	Ya	Ya	Ya
9	MRW019	UNGKAYA	MOROWALI	WITA PONDA	UNGKAYA	Ya	Ya	Ya
10	MRW022	KANTOR BUPATI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
11	MRW023	LIMBO MAKMUR	MOROWALI	BUMI RAYA	LIMBO MAKMUR	Ya	Ya	Ya
12	MRW024	BENTE	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
13	MRW025	KEPULAUAN MENUI	MOROWALI	MENUI KEPULAUAN	ULUNAMBO	Ya	-	-
14	MRW028	DMT ATANANGA	MOROWALI	BUMI RAYA	SAMARENDA	Ya	-	Ya
15	MRW033	TBG LANONA	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	LANONA	Ya	Ya	Ya
16	MRW034	TBG MATANSALAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MATANSALA	Ya	Ya	Ya
17	MRW035	TBG TOPUTI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	TOFUTI	Ya	Ya	Ya
18	MRW044	DMT BAHOMOLEO	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOLEO	Ya	Ya	Ya
19	MRW120	TBG BUNGKU TIMUR	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	KAPALA	Ya	-	
20	MRW045	DMT BAHOMETEFE	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMETEFE	Ya	Ya	Ya

21	MRW046	DMT FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
22	MRW117	TBG FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
23	MRW051	TBG BAHOMAKMUR	MOROWALI	BAHODOPI	BAHOMAKMUR	Ya	Ya	Ya
24	MRW052	TBG LEULEA	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	
25	MRW058	TBG SALONSA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	SOLONSA JAYA	Ya	-	
26	MRW059	TBG TOFOGARO	MOROWALI	BUNGKU BARAT	TOFOGARO	Ya	Ya	Ya
27	MRW060	TBG KALEROANG	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	KALEROANG	Ya	-	
28	MRW072	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
29	MRW076	BDM MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
30	MRW077	TBG ARTHABUMI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU PESIR	LAROENAI	Ya	Ya	Ya
31	MRW078	BDM MOROWALI 2	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
32	MRW083	API BUNGKU TENGAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
33	MRW084	BDM BROLY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
34	MRW086	MCR PASAR BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BUNGI	Ya	Ya	Ya
35	MRW087	DMT UMBELE	MOROWALI	BUMI RAYA	UMBELE	Ya	Ya	Ya
36	MRW088	DMT BAHOMOHONI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
37	MRW089	WANXIANG	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMOTEFEE	Ya	Ya	Ya
38	MRW092	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
39	MRW093	IMIP RUSUNAWA APARTEMEN	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
40	MRW098	BDM MESS LIME STONE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
41	MRW099	BDM MESS BLOK M	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
42	MRW114	EBT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
43	MRW100	BO DMT ISAT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
44	MRW106	IMIP BDM MESS 2 A	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
45	MRW107	IMIP GUEST HOUSE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
46	MRW130	BDM WORKSHOP KM6	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
47	MRW131	BDM OFFICE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
48	MRW094	DMT BETE-BETE	MOROWALI	BUNGKU PESIR	BETE-BETE	Ya	-	
49	MRW095	DMT TANGOFA	MOROWALI	BUNGKU PESIR	TANGOFA	Ya	-	

➤ Jaringan Telekomunikasi Untuk Kabupaten Morowali

No	Lokasi	Status Sinyal Komunikasi				Ket.
		4G	3G	2G	No Signal	
1	Kec. Bungku Tengah	1	15	1	2	
2	Kec. Bungku Timur	0	5	0	5	
3	Kec. Bahodopi	0	7	2	2	
4	Kec. Bungku Pesisir	1	4	2	2	
5	Kec. Bungku Selatan	0	2	4	20	
6	Kec. Menui Kepulauan	0	3	3	18	Signal untuk desa Dongkalan berasal dari desa Molore, Provinsi SulTra
7	Kec. Bungku Barat	0	10	0	0	
8	Kec. Bumi Raya	0	13	0	0	
9	Kec. Witaponda	0	9	0	0	

6. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan perhatian dalam pembangunan Morowali mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Morowali. Sedangkan Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari usaha persaingan yang tidak sehat. Secara umum ada tiga aspek untuk melihat UMKM yaitu dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Adapun kondisi koperasi dan UKM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Persentase koperasi aktif	31.03	24.79
Jumlah Koperasi Aktif	36	30
Jumlah Seluruh Koperasi	116	121
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)	87	95
Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM Aktif)	41	33

Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil)	3500	4434
---	------	------

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan protein hewani dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Produksi perikanan tangkap (ton)	3,4126.6	
Produksi perikanan budi daya	65.91	
Produksi rumput laut	545.58	

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan jika terdapat potensi objek pariwisata dan cara untuk mempromosikan objek wisata tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dapat dilihat dari dua indikator sebagaimana pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Jumlah kunjungan wisatawan	4019	4972
Objek wisata	31	31

Program pengembangan destinasi pariwisata merupakan upaya menata kawasan/obyek wisata, serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (tourist arrival). Program Pengembangan pemasaran pariwisata dimaksudkan untuk lebih mengenalkan, memberikan informasi dan promosi pariwisata di Morowali kepada pasar wisata potensial baik regional maupun nasional bahkan internasional. Saat ini pemerintah Kabupaten Morowali dalam upaya pengembangan pariwisata dalam bidang infrastruktur sehingga dengan infrastruktur pariwisata yang memadai maka akan

menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Morowali yang secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap perekonomian daerah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Morowali. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaissans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Dua indikator untuk melihat capaian kinerja pada urusan pertanian adalah sebagai berikut :

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2018					2019				
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luxas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
PADI SAWAH + PADI LADANG	12,146.50	10,695.50	2.00	4.873	52,119.17	9,880.30	11,264.30	252.50	4.873	54,890.93
PADI SAWAH	11,891.50	10,458.50	2.00	4.89	51,131.61	9,743.30	11,129.30	250.50	4.89	54,411.15
PADI LADANG	255.00	237.00	-	2.44	578.99	137.00	135.00	2.00	2.44	329.81
JAGUNG	628.00	1,530.4	4.00	3.695	5,654.83	1,347.30	1,179.7	3.00	3.695	4,358.99
KEDELAI	1,978.20	1,543.70	514.50	1.326	2,046.95	56.00	61.00	1.00	1.33	80.89
KACANG										

TANAH	54.00	51.50	1.00	1.259	64.84	49.50	52.50	1.00	1.26	66.10
UBI KAYU	127.00	160.00	6.00	26.669	4,267.04	133.00	144.00	-	26.669	3,840.34
UBI JALAR	40.50	46.50	1.00	13.027	605.76	41.00	38.50	-	13.027	501.54
KACANG HIJAU	136.80	137.80	-	0.802	110.52	58.00	61.00	-	0.802	48.92
TALAS	22.00	35.00	-	-	-	17.50	19.50	-	-	-

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	3.9	4,0
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	2.08	

Sektor perdagangan memberikan andil yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri pada PDRN dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	Capaian	
	2018	2019
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (HK 2000)	19,38	17,33
Pertumbuhan Industri (HK 2000)	652	769
Pertumbuhan IKM	-18	98

Terjadi penurunan PDRB di sektor perindustrian sebesar 2,05 persen. Meskipun terjadi penurunan, tetapi sektor industri masih menjadi sektor yang paling tinggi dalam berkontribusi pada PDRB hal ini dikarenakan adanya aktifitas pertambangan sebagai kategori dari industri pengolahan besar. Peningkatan ini kemudian yang tidak diikuti oleh industri kecil atau industri rumah tangga sehingga

terjadi ketimpangan antara level industri sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengkoneksikan industri kecil dengan kawasan perindustrian. Terjadinya koneksi antara industri kecil dengan kawasan perindustrian diharapkan dapat menunjang PDRB sektor industri dan mengurangi gap antara industri besar dan kecil.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n- 1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket		
		(Akhir Periode RPJMD)				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
Urusan Pendidikan																	
Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.725.287.4 86,87														
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Dinas			31 Org	851.232. 776	40 Orang	2.571.23 9.450										
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan kinerja dan tertib adminstras			12 bln	19.860.0 92	12 Bulan	945.000										

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan kebersihan kantor di lingkup Dinas Pendidikan			1 Thn	10.000.000	1 Tahun	10.000.000										
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja			12 bln	144.937.850	1 Tahun	121.052.064										
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas Pendidikan			33 bk	33.694.100	50 Buku/10 767540 Lembar	40.193.370										
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan			12 bln	9.792.036	5 Jenis	10.000.000										
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya kebutuhan listrik/ penerangan bangunan kantor dengan pengadaan kompon			100%	73.960.000	0,89	523.115.670										
Penyediaan	Tersedianya			2152		2442											

makanan dan minuman	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai			Dos	39.280.000	Dos	42.000.000										
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu			1 Thun	67.261.889	95 Kali	503.641.562										
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	1.455.193,90														
Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya Presentase Sarana dan Prasarana yang layak pakai			5 Paket	576.510.000	1 paket	110.938.950										
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional			72 Unit	1.265.650.000	1 Unit	270.000.000										
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					1	150.000.000										
Pemeliharaan	Terlaksananya					2 Unit											

rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan						10.000.00										
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional					1	18.514.800										
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor			1 Paket	25.000.000	25 Unit	27.750.000										
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor			20 Unit	10.000.000	1 Tahun	15.000.000										
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	100%	558.044.470,15														
Pendidikan dan pelatihan formal	Diikutkannya staf Dinas Pendidikan mengikuti			19 Org	340.260.012	25 Orang	-										

	diklat/ kursus/Bimtek																
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	186.014.823,38														
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersampaianny Laporan capaian kinerja secara tepat			2 Dok	5.000.000	2 Dokumen	5.250.000										
Program Pendidikan Anak Usia Dini		100%	16.772.513.895,40														
Pembangunan Gedung PAUD/TK	Jumla gedung TK			3 Unit	448.750.000	5 Unit	1.100.000.000										
Pengadaan alat bermain edukasi PAUD TK	Trpenuhinya saran belajar PAUD			4 Kec	200.000.000	3 Pkt	330.000.000										
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya Kopetensi Tenaga Pendidik			70 Org	73.020.000	125 Org	250.000.000										
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program	terlaksananya Diklat Peningkatan			100 Org	153.000.000	125 Org	250.000.000										

pendidikan anak usia dini	Mutu Pendidik PAUD																
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BPP)	Terselenggara nya Proses Belajar PAUD			254 lbg	3.909.63 8.500	260 lbg	2.080.00 0.000										
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini			75 Org	88.000.0 00	75 Org	112.500. 000										
Pengembangan Gebyar PAUD	Terlaksananya Kegiatan Gebyar PAUD			1 Keg	103.400. 000	1 Keg	150.000. 000										
Sosialisasi penggunaan Biaya Operasional BOP PAUD	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelolaan Lembaga PAUD			233 Org	195.914. 718	250 Org	225.000. 000										
Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya Apresiasi Bunda PAUD			1 Keg	64.400.0 00	1 Keg	100.000. 000										
Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF	Terlaksananya Diklat Peningkatkan Kopetensi			92 Org	50.401.5 00	100 Org	75.000.0 00										

Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya	100%	46.422.845.379,54														
Pelesarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			1 Keg	49.970.000												
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Terselenggaranya Kegiatan seni dan budaya daerah			3 Keg	296.863.750												
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Peningkatan jumlah bantuan/fasilitas seni dan budaya daerah yang disalurkan ke masyarakat			1 Keg	47.234.000												
Pembangunan Replika Rumah Raja	Tersedianya replika rumah raja			1 Paket	179.690.000												
Pengadaan Baju Adat	Peningkatan Jumlah baju adat			9 Psg	139.934.000												
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan jumlah buku dan karya rekam budaya	100%	845.862.518,54														

	dan seni																
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Meningkatnya jumlah bantuan fasilitas seni dan budaya daerah yang disalurkan ke masyarakat			3 Jenis	439.465.250												
Penjemputan tamu secara Adat	Peningkatan jumlah budaya dan seni yang teridentifikasi dan terdata secara akurat untuk kelanjutan pengembangan nilai budaya			12 Bulan	151.566.750												
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tersedianya Kamus Bahasa Daera Bungku	100%	64.864.497.310,59														
Pembangunan gedung sekolah (DAU)	Jumlah gedung sekolah yng terbangun			51 Paket	11.652.544.200												
Pembangunan gedung sekolah (DAK)	Jumlah gedung sekolah yng terbangun			1 Paket	14.028.276.078												
Pengadaan	Jumlah mobiler			1389													

Mobiler Sekolah	sekolah			Pasan g	1.592.63 9.000												
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	tersedianya rumah/tempat tinggal guru & terpenuhinya rumah/tempat tinggal guru khusus daerah 3T			1 Keg	572.869. 400												
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar/Operasional BOS dan BSM	Meningkatnya minat bakat dan kreativitas siswa dibidang olahraga dan seni & tersedianya Anggaran			1 Keg	31.640.0 00												
Penyediaan Fasilitas UNBK (Server SMP)	Tersedianya Sarana Pelaksanaan UNBK			386 Unit	2.979.28 6.550												
Program Pendidikan Non Formal		100%	1.549.244.1 95,07														
Pemberian bantuan operasional pendidikan non	Terlaksananya bantuan operasional pendidikan non			9 Kec	649.800. 000												

formal	formal																
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non fromal	Terlaksananya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non fromal			1 Keg	90.000.000												
Program Pendidikan Luar Biasa		100%	421.427.503,68														
Penyediaan Operasional Sekolah Luar Biasa	Tersedianya Operasional SLB			1 Keg	179.552.000	1 Sekolah	126.000.000										
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100%	41.917.187.029,85														
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Tersedianya Tenaga Pendidik yang profesional			1 Keg	228.578.116	35 Guru	247.983.750										
Pembelajaran Berbasis IT	Pengadaan softwaere pembelajaran Tk.SD			200 Guru	234.000.000												
	Pengadaan																

	softwaere pembelajaran Tk.SMP																
Pendidikan dan Pelatihan dan penguatan bagi calon kepala sekolah dan kepala sekolah	lahirnya kepala sekolah/calon kepala sekolah yang memenuhi standar kompetensi sesuai amanah permendiknas nomor 13 tahun 2007			129 Kepse k	260.166. 800												
Pengangkatan Guru Kontrak Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Guru			890 guru	18.155.8 01.500	695 Guru	23.547.5 75.100										
Penyediaan Operasional Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan	Tersedianya Data Penerima TPG, TKG dan TAMSIL			1 Keg	191.189. 400	1 Keg	102.105. 444										
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya persentase ketersediaan data informasi pendidikan	100%	5.695.474.2 91,50														
Monitoring, evaluasi dan	Terlaksananya monitoring dan			43 Penga	340.394.	43 Pengaw	493.066.										

pelaporan	Evaluasi ke Satuan Pendidikan			was	700	as	350										
Operasional Sekolah (Ujian Nasional)	Terselenggara nya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) Jenjang SMP/MTs dan SD/MI			196 sekolah	974.306. 915	196 Sekolah	934.365. 600										
Penyusunan Profil Pendidikan	Tersedianya Profil Pendidikan dan Pangkalan Data Informasi berbasis Online			2 Dok	269.628. 810	2 Dokumen	247.944. 900										
Penyediaan Operasional UPTD	Tersedianya Operasional UPTD			9 UPTD	395.605. 000	9 UPTD	684.127. 499										
Penyediaan Operasional SKB	Tersedianya Operasional SKB			1 SKB	52.888.5 00	1 SKB	105.037. 273										
Urusan Kesehatan																	
Bidang Urusan Kesehatan...																	

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		100%	1.633.210.1 49,29		4.081.25 7.000	100	10.060.0 00.000										
Pembangunan gedung kantor	Presentase Sarana Prasarana Kesehatan			100	3.809.22 5.000	100	5.000.00 0.000										
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Presentase Sarana Prasarana Kesehatan			100	184.600. 000	100	5.000.00 0.000										
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi			4	87.432.0 00	100	60.000.0 00										
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		100%	2.829.285.4 63,64		9.140.91 7.443		16.500.0 00.000										
Pendidikan dan pelatihan formal	Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk			100	78.457.6 23	100	150.000. 000										
	Rasio Tenaga Paramedis Per																

	Jumlah Penduduk																
Rekrutmen Tenaga Kesehatan Kontrak	Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk			100	9.026.13 2.820	100	16.000.0 00.000										
	Rasio Tenaga Paramedis Per Jumlah Penduduk																
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda)	Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan			100	36.327.0 00	100	350.000. 000										
Program.....					4.361.15 5.967		#VALUE !										
Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif			95	3.205.13 0.355	100	3.339.13 5.010										
	Angka Kesertaan Ber KB (CPR)			0													
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Jumlah Peserta KB Aktif			60	20.970.0 00	100	20.970.0 00										
	Angka Kesertaan Ber KB (CPR)			0													

Pengadaan Prasarana Gudang Alat Kontrasepsi, Transportasi Pelayanan KB, Sarana Pertugas Lapangan KB dan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK)	Jumlah Peserta KB Aktif			100	1.135.05 5.612	100	1.136.17 2.600										
PROGRAM : OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		100%	9.313.651.9 51,52		5.235.11 1.840		13.000.0 00.000										
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat Terhadap Kebutuhan Obat			100	2.141.35 0.309	100	8.000.00 0.000										
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase Pemerataan Obat dan Perbekalan kesehatan yang ada			100	3.093.76 1.531	100	5.000.00 0.000										
PROGRAM : UPAYA KESEHATAN		100%	10.263.508. 200,00		29.572.7 72.699		51.395.3 88.189										

MASYARAKAT																	
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Cakupan Sarana Prasarana Kesehatan			#VALUE!	1.732.699.000	100	15.000.000.000										
Revitalisasi sistem kesehatan	Terlaksananya model kerjasama dlm Pelayanan Kesehatan Dasar yg berbasis masyarakat (Model Manajemen Prima Kesehatan)			95	12.219.056.185	100	5.000.000.000										
Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan	Tersedianya perbekalankesehatan (alat medis dan penunjang)			-	1.839.934.541	100	12.000.000.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kaleroang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	213.270.000	100	277.760.000										

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bahodopi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	228.540.000	100	289.840.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bungku	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	272.084.000	100	356.635.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bahonsuai	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	254.754.000	100	384.835.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lantula Jaya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	268.684.000	100	354.675.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wosu	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	293.484.000	100	376.435.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ulunambo	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	285.234.000	100	393.035.000										

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lafeu	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	269.904.000	100	363.075.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bahomotefe	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	285.474.000	100	285.315.000										
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	5.372.967.430	100	5.000.000.000										
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pratama Paku	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	274.735.000	100	2.747.350.000										
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Terlaksananya Peringatan HKN			100	96.470.000	100	350.000.000										
Pelayanan Kefarmasian (DAK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	1.513.976.075	100	2.190.000.000										
Kapitasi Puskesmas	Cakupan Pelayanan			100	414.941.	100											

Kaleroang	Kesehatan Masyarakat				403												
Kapitasi Puskesmas Bahodopi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	671.500.000	100											
Kapitasi Puskesmas Bungku	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	930.243.200	100											
Kapitasi Puskesmas Bahonsuai	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	349.680.000	100											
Kapitasi Puskesmas Lantula Jaya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	369.180.000	100											
Kapitasi Puskesmas Wosu	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	407.586.800	100											
Kapitasi Puskesmas Ulunambo	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	440.360.538	100											
Kapitasi Puskesmas Lafeu	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100	320.281.847	100											

	Masyarakat																
Kapitasi Puskesmas Bahomoteffe	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			100	247.732. 680	100											
Kapitasi Puskesmas						100	6.026.43 3.189										
PROGRAM : PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		100%	1.465.659.3 35,32		31.008.0 00		150.000. 000										
Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			75	31.008.0 00	100	150.000. 000										
PROGRAM : PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT		100%	1.699.230.5 44,13		513.627. 000		5.000.00 0.000										
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase Media promosi Penyuluhan Sadar Hidup			50	77.620.0 00	100	3.500.00 0.000										

	Sehat																
Penyuluhan, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (DBH Pajak Rokok)	Persentase Media promosi Penyuluhan Sadar Hidup Sehat			65	436.007. 000	100	1.500.00 0.000										
PROGRAM : PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		100%	5.376.030.6 56,24		282.278. 000		281.278. 000										
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Cakupan Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan			96	239.598. 000	100	238.598. 000										
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Cakupan Stunting			12	42.680.0 00	100	42.680.0 00										
PROGRAM : PENGEMBANGA N LINGKUNGAN SEHAT		100%	4.716.191.9 91,33		130.234. 000												
							130.234. 000										
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa yang Melaksanakan			85	130.234. 000	100	130.234. 000										

	STBM																
	Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak																
PROGRAM : PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN GAN PENYAKIT MENULAR		100%	6.249.976.2 62,55		3.507.36 6.385		3.419.44 4.000										
Penyemprotan/fog ging sarang nyamuk	Persentase Daerah Focus Penyemprotan/ Foging Sarang			100	95.142.0 00	100	95.142.0 00										
	Angka Kesakitan DBD			0	-												
	Angka Kesakitan DBD			0	-												
#VALUE!	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100	-												
Pelayanan pencegahan dan penggulangan	Prevelensi Tuberculosis Per 100.000			441	301.125. 000	100	301.300. 000										

penyakit menular	Penduduk																
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			0													
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS			100													
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			100													
	Penderita Diare yang ditangani			2885													
	Jumlah Penderita Pneumonia Per 1000 Balita			55													
Pencegahan penularan penyakit	(Annual ParaCite Indeks - API)			0,28	76.922.00	100	77.147.00										

Endemik/Epidemi k	Malaria Per 1000 Penduduk																
	Angka kejadian Malaria			0,28													
	Tingkat kematian akibat malaria			0													
	Prevelensi HIV AIDS/ 100 Penduduk			0,01													
Peningkatan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 0-11 Bulan			100	168.600. 980	100	168.600. 000										
	Persentase Desa Yang Mencapai UCI			96													
Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase Penyelidikan Epidemologi (PPE) < 24 Jam Pada Desa/Keluraha n yang Mengalami KLB			100	94.430.0 00	100	100.000. 000										
Peningkatan	Cakupan			100		100											

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Pelayanan Kesehatan Haji				233.214.000		263.614.000										
	Cakupan Penanganan Akibat Masalah Krisis Kesehatan/Bencana			100													
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DBH Pajak Rokok)	Presentase Puskesmas yang mengadakan pengendalian PTM Terpadu			80	484.775.000	100	-										
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)	Prevelensi Tuberculo Per 100.000 Penduduk			100		100	107.473.000										
	Prevelensi HIV AIDS (Persen) dari Total Populasi			9	106.214.405												
	Jumlah Penderita Diare			100													

	Per 1000 Balita																
	(Annual ParaCite Indeks - API) Malaria Per 1000 Penduduk			0,28													
	Jumlah Penderita Pneumonia Per 1000 Balita			100													
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)	Presentase Desa/Kel yang melaksanakan Posbindu PTM			98	1.820.94 3.000	100	1.820.94 3.000										
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DBH Pajak Rokok)				100	126.000. 000												
Dukungan Operasional Penanggulangan Bahaya Rokok (DBH CHT)				100	-		-										
Pelayanan pencegahan dan						100	485.225.										

penaggulangan penyakit tidak menular							000										
PROGRAM : STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN		100%	4.521.549.3 17,32		480.884. 808		484.646. 808										
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan				80	462.069. 808	100	465.789. 808										
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan				100	18.815.0 00	100	18.857.0 00										
PROGRAM : KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		100%	10.462.043. 728,19		8.214.94 3.427		8.247.55 3.627										
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan			75	8.214.94 3.427	100	8.247.55 3.627										
PROGRAM :		100%															

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA			1.610.668.127,46		85.716.000		85.716.000										
Pelayanan pemeliharaan kesehatan LANSIA	Persentase Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan			90	85.716.000	100	85.716.000										
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN		100%	729.910.027,55		-		-										
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Terlaksananya pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya pada sarana produksi dan distribusi			0	-	100	-										
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan	Terlaksananya pengawasan pangan dan			0	-	100	-										

kesehatan makanan restaurant	bahan berbahaya lainnya pada sarana produksi dan distribusi																
PROGRAM : PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK		100%	2.826.211.6 26,67		300.636. 500		300.636. 500										
Penanggulangan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			100	174.821. 500	100	174.821. 500										
Pelatihan BBLR	Cakupan Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan			100	125.815. 000	100	125.815. 000										
	Cakupan Stunting			12	-												
	Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah min. 90			90													

	Tablet																
Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat				1 Tahun	126.406.775.181,30	<i>1 Tahun</i>	58.047.024.595										
Pelayanan Kesehatan RSU (BLUD)				1 Tahun	30.103.452.667,00	<i>1 Tahun</i>	40.000.000.000										
Pendukung Pelayanan RSUD (BLUD)		100%	99.566.437.022,90	1 Tahun	96.303.322.514,30	<i>1 Tahun</i>	18.047.024.595										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																	
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSU Pratama Paku	Terpenuhinya biaya operasional dan Pemeliharaan RSUPratama Paku			100%	3.012.522.572,00												
Infrastruktur																	
Pekerjaan Umum																	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan					83	8.511.340.000	15	980.340.000	18,07 %	12%	15	980.340.000				

	Jalan																
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Jalan					10709	51.354.9 45.000	28	10.15 4.945 .000	0,26%	20%	28	10.154 .945.0 00				
Kegiatan Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan Jalan					27	9.878.74 0.000	3	1.118 .740. 000	11,11 %	11%	3	1.118. 740.00 0				
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan Jembatan					11203	126.851. 873.000	455	3.249 .873. 000	4,06%	3%	455	3.249. 873.00 0				
Kegiatan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan Jembatan					1	800.000. 000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					204295	460.749. 238.517	4429 5	52.74 9.238 .517	21,68 %	11%	44295	52.749 .238.5 17				
Kegiatan Peningkatan Jalan	Terlaksananya Peningkatan Status Jalan menjadi lebih baik					54	7.550.50 0.000	6	590.5 00.00 0	11,11 %	8%	6	590.50 0.000				
Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen pengawasan Pembangunan					40	8.000.00 0.000	0	-	0,00%	0%	0	-				

	Jalan																
Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan	Tersedianya dokumen pengawasan Pembangunan Jembatan											0	-				
Kegiatan Perencanaan Peningkatan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan Peningkatan Jalan											0	-				
Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan	Tersedianya dokumen pengawasan Peningkatan Jalan											0	-				
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Jembatan					43	4.686.970.000	3	646.970.000	7,19%	14%	3,1	646.970.000				
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan					440	4.799.640.000	40	299.640.000	9,09%	6%	40	299.640.000				
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan											0	-				

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Sistem informasi/data base jalan dan jembatan					1	300.000. 000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya sistem informasi/data base jalan					1	200.000. 000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Tersedianya sistem informasi/data base jembatan											0	-				
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan					4	1.140.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Pembangunan gedung workshop	Terbangunnya Gedung Workshop					4	1.380.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Pembangunan laboratorium kebinamargaan	Terbangunnya Laboratorium Kebinaamargaan					16	95.300.0 00.000			0,00%	0%	0	-				
Pengadaan alat-	Tersedianya					100				0,00%	0%	0					

alat berat	alat-alat berat						1.130.00 0.000						-				
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat					46	2.880.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan					100	1.240.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya Laboratorium Kebinamargaan					28	1.770.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat					10	100.000. 000	10	100.000.00 0	100,00 %	100%	10	100.00 0.000				
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat					60	3.120.00 0.000	10	500.000.00 0	16,67 %	16%	10	500.00 0.000				
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium					100	860.000. 000			0,00%	0%	0	-				

kebinamargaan	kebinamargaan																
Peningkatan Kualitas Tenaga ahli	Meningkatnya kualitas tenaga ahli					120	1.080.000.000			0,00%	0%	0	-				
Peningkatan Kapasitas Tukang	Meningkatnya kualitas tukang					120	860.000.000			0,00%	0%	0	-				
Sosialisasi SPM Jasa Konstruksi	Terlaksananya sosialisasi SPM Jasa Konstruksi					120	860.000.000			0,00%	0%	0	-				
Peningkatan Sumber Daya Pengelola Barang dan Jasa	Meningkatnya Sumber Daya Pengelola Barang dan Jasa											0	-				
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					30	6.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen Perencanaan pengembangan infrastruktur					14	54.593.434.000	3	1.593.434.000	21,43 %	3%	3	1.593.434.000				
Pembangunan/pe ningkatan infrastruktur	Terbangunnya infrastruktur pada wilayah					4	1.300.000.000			0,00%	0%	0	-				

	strategis dan cepat tumbuh																
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					12	2.250.000.000	1	50.000.000	8,33%	2%	1	50.000.000				
Pengawasan pembangunan Infrastruktur	Tersedianya dokumen pengawasan pembangunan infrastruktur											0	-				
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Terbangunnya infrastruktur perdesaaan					28	115.522.505.000	6	5.522.505.000	21,43 %	5%	6	5.522.505.000				
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaaan					40	10.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan					1	350.000.000			0,00%	0%	0	-				
Monitoring, evaluasi dan	Terlaksananya Monitoring,											0	-				

pelaporan	Evaluasi dan Pelaporan																
												0	-				
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					8	2.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					67528	45.018.990.000	4528	3.018.990.000	6,71%	7%	4528,485	3.018.990.000				
Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					4	1.300.000.000			0,00%	0%	0	-				
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan					1400	700.000.000			0,00%	0%	0	-				
Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran					8000	6.400.000.000			0,00%	0%	0	-				

	drainase/gorong-gorong																
Pembangunan Trotoar	Terlaksananya Pembangunan Trotoar											0	-				
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong					14645	32.219.070.000	2372	5.219.070.000	16,20 %	16%	2372,304545	5.219.070.000				
Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong	Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong											0	-				
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan talud/bronjong					4667	3.500.000.000			0,00%	0%	0	-				
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan talud/bronjong											0	-				
Program pengendalian banjir	Terlaksananya kegiatan Pengendalian banjir					4000	7.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-	Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah					2684	128.500.000.000			0,00%	0%	0	-				

badan sungai	tangkapan air dan badan-badan sungai																
Pembangunan prasarana pengaman pantai	Terbangunnya prasarana pengaman pantai					400	698.900.000	400	698.900.000	100,00 %	100%	400	698.900.000				
Pembangunan tanggul pemecah ombak	Terbangunnya tanggul pemecah ombak											0	-				
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					10	1.140.496.900	1	240.496.900	10,00 %	21%	1	240.496.900				
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi					3	72.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Terlaksananya Pembangunan jaringan air bersih/air minum					28139	9.848.780.000	4282	1.498.780.000	15,22 %	15%	4282,228571	1.498.780.000				

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Terlaksananya Normalisasi saluran sungai					34857	60.999.949.816	6286	10.999.949.816	18,03 %	18%	6285,685609	10.999.949.816				
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terpeliharanya Jaringan Irigasi					48	5.266.850.000	6	266.850.000	12,50 %	5%	6	266.850.000				
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang telah dibangun					5	749.845.000	1	109.845.000	20,00 %	15%	1	109.845.000				
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan					3571	6.250.000.000			0,00%	0%	0	-				
Pembangunan Jaringan Irigasi	Terbangunnya jaringan irigasi											0	-				
Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi												0	-				
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi												0	-				
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya penyediaan dan pengolahan air baku					52	1.300.000.000			0,00%	0%	0	-				

Pembangunan sumur-sumur air tanah	Terbangunnya Sumur-sumur air tanah					8	10.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Terdistribusinya penyediaan air baku											0	-				
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terlaksananya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya					10	2.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Terbangunnya embung dan bangunan penampung air lainnya											0	-				
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Tersedianya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					22	69.381.744.000	2	2.845.436.000	9,09%	4%	2	2.845.436.000				
Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Tersedianya prasarana dan sarana air					192	95.946.289.000	12	5.946.289.	6,25%	6%	12	5.946.289.00				

bagi masyarakat berpenghasilan rendah	minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah								000				0				
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah					4	2.500.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Tersedianya teknologi pengolahan air minum dan air limbah					4	1.300.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	Meningkatnya teknik pengolahan air limbah					4	1.300.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	Meningkatnya teknik pengolahan air minum					7	26.517.3 00.000	1	1.517 .300. 000	14,29 %	6%	1	1.517. 300.00 0				
Pengembangan distribusi air minum	Meningkatnya distribusi air minum					41	10.200.0 00.000	1	200.0 00.00	2,44%	2%	1	200.00 0.000				

								0									
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum					22	2.200.000.000			0,00%	0%	0	-				
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah					1	1.300.000.000			0,00%	0%	0	-				
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan											0	-				
Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Tata Ruang					1	300.000.000			0,00%	0%	0	-				
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang											0	-				
Penyusunan	Tersedianya					11		2		18,18	18%	2					

rencana tata ruang wilayah	dokumen Tata Ruang Wilayah						5.500.000.000		1.000.000.000	%			1.000.000.000				
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang kawasan					2	1.000.000.000			0,00%	0%	0	-				
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Tersedianya dokumen rencana teknis ruang kawasan					11	5.200.000.000			0,00%	0%	0	-				
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan											0	-				
Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya					1	300.000.000			0,00%	0%	0	-				
Survey dan pemetaan	Terlaksananya Survey dan Pemetaan					2	50.000.000			0,00%	0%	0	-				
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pelatihan aparat dalam pemanfaatan					4	100.000.000			0,00%	0%	0	-				

	ruang																
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang											0	-				
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						14	5.700.00 0.000	1	300.0 00.00 0	7,14%	5%	1	300.00 0.000				
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang					4	300.000. 000			0,00%	0%	0	-				
Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang					21	4.250.00 0.000			0,00%	0%	0	-				
Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan pemanfaatan ruang					4	400.000. 000			0,00%	0%	0	-				
Sosialisasi	Terlaksananya					4				0,00%		0					

kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota												-				
Perumahan																	
Program Pelayanann Administrasi perkantoran	Persentase pelayanan yang cepat dan tepat dan bebas pungli					1	925.503. 432	1	859.5 45.76 6	100,00 %	93%	1	859.54 5.766				
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						1	10.900.0 00	1	10.86 5.000	100,00 %	100%	1	10.865 .000				
Penyediaan jasa Administrasi keuangan						1	630.603. 432	1	578.0 53.14 6	100,00 %	92%	1	578.05 3.146				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						1	14.000.0 00	1	13.99 5.363	100,00 %	100%	1	13.995 .363				
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah						1	270.000. 000	1	256.6 32.25 7	100,00 %	95%	1	256.63 2.257				

Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Pembangunan Perumahan Layak Huni																
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu						395	22.328.380.300	271	13.886.212.868	68,61 %	62%	271	13.886.212.868				
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Mewujudkan Lingkungan Sehat Perumahan																
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat perumahan						1	60.000.000	1	60.000.000	100,00 %	100%	1	60.000.000				
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Mewujudkan Pemberdayaan Komunitas Perumahan											0	-				
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis						74	8.084.703.700	37	7.580.484.306	50,00 %	94%	37	7.580.484.306				

masyarakat																	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrika n	Tersedianya Jaringan Listrik dan Penerangan Jalaan Umum																
Penyambungan jaringan listrik						78	24.692.8 46.691	68	23.96 0.687 .584	87,18 %	97%	68	23.960 .687.5 84				
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tersedianya Sarana Prasarana Areal Pemakaman																
Pengelolaan sarana dan prasarana pemakaman						6	1.150.00 0.000	6	1.148 .066. 700	100,00 %	100%	6	1.148. 066.70 0				
Program penataan, Penguasaaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana pemerintah																
penguasaan, pemilikan						5	9.661.79 2.500	3	6.945	60,00 %	72%	3	6.945.				

penggunaan dan pemanfaatan tanah									.098.500				098.500				
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur																
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur						3	696.306.800	3	696.306.800	100,00 %	100%	3	696.306.800				
DINAS SOSIAL																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kabutuhanPel ayanan Administrasi Perkantoran																
	persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																
Penyediaan jasa peralatan dan	Jumlah Biaya Jasa dan	Honora rium,Li	447.661.37	Honora rium,Li	271.859.												

perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	strik, perwatan Kendar aan, makan Minum	1	strik, perwatan Kendar aan, makan Minum	300											
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Biaya Jasa dan Perlengkapan kantor		124.730.000	0	-											
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Selama 1 Tahun	0	-	Atk, Alat Kebersihan, Pemeliharaan dan printer	44.783.600											
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Biaya Jasa dan Perlengkapan kantor	30 keg	1.341.730.635	5	317.984.910											
Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	Jumlah Biaya Jasa dan Perlengkapan kantor	100%	8.036.269.522		908.661.500,00											
							5.506.128.460									

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																	
Fasilitas Manajemen usaha bagi keluarga miskin	Presentase PMKS yang tertangani	110 kube	219.222.191	0	19.100.000												
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Presentase PMKS yang mendapatkan bantaun Sosial	60 kube	1.839.941.269	0	0												
sharing Program Keluarga Harapan (PKH)	Presentase PMKS yang mendapatkan bantaun Sosial	17.518 KPM	2.042.250.000	5.320	308.450.000												
Sharing Rastra	Presentase PMKS yang mendapatkan bantaun Sosial	17.518 KPM	1.465.000	8.293	380.448.250												
Verifikasi dan Validasi Data Prima Bantuan Iuran Kesehatan/Basis Data Terpadu (BDT)	Presentase PMKS yang mendapatkan bantaun Sosial	64523 JIWA	1.403.250.000	48.980	219.763.250												

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Mewujudkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																
<i>Penanganan masalah-Masalah Strategis Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa</i>	Presentase PMKS yang tertangani	100%	732.602.151	100%	104.550.000												
Pendataan dan Pelayanan Lansia Miskin/Terlantar	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	377 Orang	1187 orang	0	189.081.500												
Program Pembinaan Anak Terlantar	Mewujudkan Pembinaan Anak Terlantar																
Pendataan anak terlantar	Presentase PMKS yang tertangani	400 orang	2.489.635.472	100	50.000.000												
Program pembinaan para	Mewujudkan Pembinaan																

penyanggah cacat dan trauma	Para Penyanggah Cacat dan Trauma																
Pendayagunaan para penyanggah cacat dan eks trauma	Persentase Penyanggah Cacat Fisik dan Mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	1110 orang	2.893.533.7 38	0	102.872. 000												
Dinas TransNaker																	
Tenaga Kerja																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhanPel ayanan Administrasi Perkantoran																
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa sumber air dan listrik dalam 1 tahun	1 paket	58.200.000	1 paket	10.200.0 00		0,00		0,00		#DIV/0!		10.200 .000		18%		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan	1 paket	46.400.000	1 paket	6.400.00 0		0,00		0,00		#DIV/0!		6.400. 000		14%		

kantor	kantor dalam 1 tahun																
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun	1 paket	60.000.000		10.000.000		0,00		0,00		#DIV/0!		10.000.000		17%		
Penyediaan Jasa admistrasi keuangan	Jumlaah honor tenaga administrasi dalam 1 tahun	18 Org	2.233.281.660	18 Org	388.281.660		0,00		0,00		#DIV/0!		388.281.660		17%		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah iuran kebersihan kantor dalam 1 tahun	1 Pkt	38.500.000	1 paket	3.500.000		0,00		0,00		#DIV/0!		3.500.000		9%		
Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK dalam 1 tahun	1 Pkt	187.480.080	1 paket	39.469.830		0,00		0,00		#DIV/0!		39.469.830		21%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	1 Pkt	225.021.000	1 paket	35.109.250		0,00		0,00		#DIV/0!		35.109.250		16%		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pkt	118.553.350	1 paket	18.553.350	-	0,00		0,00		#DIV/0!		18.553.350		16%		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	1 Pkt	65.700.000	1 paket	5.700.000		0,00		0,00		#DIV/0!		5.700.000		9%		

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat Konsultasi Dan Koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	1 Pkt	882.187.000	1 paket	107.187.000		0,00		0,00		#DIV/0!		107.187.000		12%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur										#DIV/0!		-		#DIV/0!		
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin gedung kantor dalam 1 tahun		279.412.160	1 Unit	199.890.000		0,00		0,00		#DIV/0!		199.890.000		72%		
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pemenuhan kabutuhanpen ingkatan kapasitas sumber daya aparatur										#DIV/0!		-		#DIV/0!		
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dalam 1 tahun		574.970.008	1 Org	22.150.000		0,00		0,00		#DIV/0!		22.150.000		4%		
Program	persentase								#DIV/0!				#DIV/0		#DIV/0!		

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	penyelesaian perlindungan ketenagakerjaan								0!		-		!		0!		
Fasilitasi Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus Perselisihan hubungan industrial yang terselasaikan	160	103.276.000		0,00		0,00		#DIV/0!		103.276.000		#DIV/0!		#DIV/0!		
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja/serikat kerja yang menerima pendidikan peraturan Ketenagakerjaan		19.486.600		0,00		0,00		#DIV/0!		19.486.600		#DIV/0!		#DIV/0!		
Pembentukan Dewan Pengupahan Pelaporan	Jumlah UMK dan UMSK kabupaten		113.598.000		0,00		0,00		#DIV/0!		113.598.000		#DIV/0!		#DIV/0!		
	jumlah Monev yang dilaksanakan	4 kec.	36.695.000		0,00		0,00		#DIV/0!		36.695.000		#DIV/0!		#DIV/0!		
Program Peningkatan Kesempatan	pencari kerja yang di tempatkan								#DIV/0!		-		#DIV/0!		#DIV/0!		

Kerja																	
Pelaporan	Juml;ah Monev yang dilaksanakan	4 kali	503.935.222		0,00		0,00		#DIV/0!		503.935.222		#DIV/0!		#DIV/0!		
Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang produktif												-		#DIV/0!		
	Jumlah Kartu Putih	24964	86.123.476		0,00		0,00		#DIV/0!		86.123.476		#DIV/0!		#DIV/0!		
Pendidikan dan pelatihan Keterangan bagi pencari kerja	Jumlah pelatihan yang di laksanakan		498.880.000		0,00		0,00		#DIV/0!		498.880.000		#DIV/0!		#DIV/0!		
Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah gedung atau Ruang yang tersedia		370.000.000		0,00		0,00		#DIV/0!		370.000.000		#DIV/0!		#DIV/0!		
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi																	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam	jumlah unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang terbina																

rangka pengembangan kawasan																	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi (DAK AFIRMASI	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dalam kawasan Transmigrasi																
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah unit Perumahan Transmigrasi																
PEMDES (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.558.000												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya Penyediaan jasa dan Perlengkapan kantor			100	9.558.000												

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mewujudkan Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur			100	900.000												
Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Mewujudkan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			100	75.000.00												
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik dan jabatan politik			4	75.000.00												
Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak			1	84.944.636												
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu	jumlah pessenger rapat koordinasi antar jejaring			15	44.971.900												

pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	dan Jumlah pelatihan pendampingan kasus korban kekerasan																
	Jumlah penjangkauan kasus korban kekerasan			15	0												
Fasilitas forum anak nasional	jumlah anak dan pendamping yang difasilitasi dalam forum anak nasional			1	39.972.736												
sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	jumlah peserta sosialisasi			15	0												
Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			100	1.161.070.000												
Lomba peningkatan	Jumlah keluarga sehat			9	0												

peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	dan sejahtera																
Program peran perempuan di perdesaan	Meningkatkan Peran Perempuan di Pedesaan				1.099.680.000												
Penunjang Operasional Tim Penggerak PKK Kabupaten	Terlaksananya Penunjang Operasional Tim Penggerak PKK Kabupaten			99,97	1.099.680.000												
Pangan																	
PERTANIAN PERKEBUNAN																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
Penyediaan Jasa Komunikasi	Tersedianya jasa komunikasi , listrik air dan telpon			12	39.000.000												
Penyediaan jasa	Tersedianya			125													

administrasi keuangan	Honorarium				2.882.134.000												
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor			12	900.000												
Penyediaan ATK	Tersedianya ATK			12	31.999.880												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			12	25.000.000												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17	332.717.625												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			0													
Penyediaan Makan dan Minum Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu			12	13.446.000												
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program keluar			1	255.048.000												

daerah	dan kedalam daerah																
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
Pembangunan gedung kantor	Presentase Sarana Prasarana Perkantoran																
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Terlasana Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Oprasional																
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Presentase Sarana Prasarana Perkantoran																
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi																
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		100%	183.460.120,50		408.933.700												

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Pertanian/Peternakan/Kelompok Tani/Kelompok Ternak																
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya kemampuan lembaga petani/peternak yang dilatih :																
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif / WISMP-II	Jumlah P3A yang mandiri di Kabupaten Morowali			1	60.000.000												
Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan	Tersedianya Dana Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan			1	88.592.000												
Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan	Tersedianya Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan			1													
Kegiatan	Jumlah			1													

Penyusunan Programa Tingkat Kecamatan	dokumen penyusunan programa Tingkat Kecamatan				23.163.2 00												
Kegiatan Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten	Jumlah dokumen penyusunan programa Tingkat Kabupaten			1	4.004.50 0												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkeb unan		100%	5.765.889.4 90,30														
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan			4	221.014. 000												
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Penyerapan Pangan (Food Utilization)			87,2	12.160.0 00												
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Ketersediaan pangan (Food Utilization)			14313 ton	120.893. 400												

	Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal)			3071													
	Ketersediaan Protein Perkapita (Gr)			86,19													
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pupuk Bersubsidi	Jumlah realisasi Pupuk sesuai RDKK			1 dok	100.000.000												
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Terkumpulnya Data Harga Pangan																
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Peningkatan Produksi, Produktivitas lahan Kering																
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.			100	51.130.000												
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk	Produktivitas Padi atau bahan pangan lokal lainnya			1 dok	2.298.306.750												

Perkebunan, Produk Pertanian	Per Hektar																
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan			1 tahun	40.483.5 00												
Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Perumusan Program Ketahanan Pangan			1 Keg	30.540.2 00												
Kegiatan Pelaksanaan Hari Pangan Se-Dunia (HPS)	Peningkatan Kualitas SDM			1 Keg	80.000.0 00												
Kegiatan Pemutakhiran Data Statistik Pertanian	Jumlah dokumen laporan statistik pertanian peternakan			1 Keg	35.000.0 00												
Lingkungan Hidup																	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Kelancaran Kegiatan dengan Administrasi																

	yang tertib																
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perengapan kantor			3 Kantor	93.922.500												
Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya adminisitrasi keuangan yang tertib			9 orang operator, 12 tenaga Adm	480.628.401												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasaranan perkantoran				277.514.500												
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program keluar dan kedalam daerah				231.587.414												
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan			78,95													
	Persentase jumlah sampah			80													

	yang berkurang melalui 3R																
	Persentase Jumlah sampah yang tertangani			44,4													
	Operasionalisasi TPA/TPST/SP A di Kabupaten/Kota			80													
	Persentase izin Pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan			76													
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap perundang-undangan			10													
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya penampungan persampahan dan pendukung pengelolaan			2 unit Kontainer, 3 unit bak	560.951.293												

	persampahan			sampah beton													
Kerja sama Penegelolaan sampah	tersedianya regulasi penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan			PERD A Kerja sama denga n pihak swasta , peratur an tentan g petunju k teknis pengel olaan persa mpaha n	5.768.86 8.360												
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran indeks kualitas air			30 sungai/ laut													
	Hasil			4													

	pengukuran indeks kualitas udara			perusahaan													
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten/Kota			26,13 %													
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data pengukuran kualitas air (sungai dan laut), kualitas udara dan			30 sungai/ laut	103.085.000												

	pencemaran																
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi			5 perusahaan	52.312.000												
Pengkajian dampak lingkungan	tersedia dokumen perencanaan Lingkungan Hidup (Ekoregion, SILHD, daya dukung dan daya tampung)			1 Dok	262.917.368												
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Tersedianya data ketaatan pengelolaan lingkungan pertambangan			2	29.999.250												
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	tersedianya pendampingan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam ketaatan terhadap PUU			3 perusahaan	20.100.000												
Koordinasi penyusunan AMDAL	tersedianya data AMDAL yang diproses			Palu dan Sekitar	20.012.000												

	di DLH Provinsi			nya													
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan			1 Kec./1 761,10 m													
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Duakuinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Kab. Morowali			MHA/K L dan penan aman pohon diluar kawas an hutan	53.689.0 00												
Penignkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan kinservasi SDA	Terlindunginya daerah tangkapan air			1761,1 0 M	1.932.13 7.000												
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat																
	Pengaduan masyarakat			3 aduan													

	terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya didearah Kabupaten/Kota																
	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup didaerah (PPLHD) di Kabupaten			3 orang													
Pengembangan data dan informasi lingkungan	tersedianya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan			-	1.074.950												

	Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)																
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	tertatanya lahan hutan kota			12 Hektar													
Penataan RTH	Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) se- Kecamatan Bungku Tengah			12 Hektar	158.835. 000												
PEMDES																	
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Mewujudkan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			100	150.000. 000												
Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			126	100.000. 000												
Peningkatan	Terlaksananya			126	50.000.0												

Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Peningkatan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa				00												
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Mewujudkan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		101.092.500														
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Bagi Usaha Milik Desa	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Manajemen Bagi Usaha Milik Desa	9	50.546.250														
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat	126	50.546.250														
Program Peningkatan keberdayaan	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat				75.530.000												

Masyarakat Pedesaan	Pedesaan																
Pemutahiran Data Profil Desa/Kelurahan Secara Online	Terlaksananya Pemutahiran Data Profil Desa/Kelurahan Secara Online			126	7.450.000												
Dukungan PANSIMAS (Pembinaan BP-SPAMS dan Asosiasi BP-SPAM)	Terlaksananya Pembinaan BP-SPAMS dan Asosiasi BP-SPAM)			40	48.080.000												
Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terlaksananya Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)			100	20.000.000												
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa				816.746.300												
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan	Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam			9	137.340.500												

desa	bidang manajemen pemerintahan desa																
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Aparatur Pemerintah Desa			9	137.340. 500												
Pembinaan Kelembagaan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Aparatur Pemerintah Desa																
Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak			8	542.065. 300												
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan																

	kawasan perdesaan																
PERHUBUNGAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran											0	-				
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12				12		6		50,00 %		6	-	50%			
Penyediaan jasa peralatan administrasi Keuangan	Tersedianya Komponen Listrik Untuk Penerangan Kantor	10		15		10		10		100,00 %		25	-	250 %			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	120				120		120		100,00 %		120	-	100 %			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Tersedianya Laporan LAKIP	1		1		1		1		100,00 %		2	-	200 %			
Program peningkatan	Tersedianya Laporan	1		1		1		1		100,00 %		2	-	200 %			

sarana dan prasarana aparatur	Keuangan Tahunan																
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan											0	-				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3		5		3		2		66,67 %		7	-	233 %			
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Prasarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ yang terpelihara											0	-				
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Prasarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ yang	1				1		0		0,00%		0	-	0%			

	terpelihara																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ											0	-				
Pendidikan Teknis Perhubungan	Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	2				1		1		100,00 %		1	-	50%			
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi bagi Masyarakat																
PPNS Perhubungan	Jumlah Halte sebagai tempat Jemput dan Pemberhentian Penumpang	1				1		2		200,00 %		2	-	200 %			
Penyusun Andalalin	Jumlah Dermaga/Tambatan Perahu	10		16		10		6		60,00 %		22	-	220 %			

	yang memadai																
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan bagi Masyarakat	13		1		13		10		76,92 %		11	-	85%			
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya Alat Kelengkapan Jalan yang memadai																
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terpenuhinya standar kelaikan Angkutan Orang dan Barang																
KOMINFO																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi yang cepat dan	12				12	32.600.000	12	119.660.000	100,00 %	367%	12	119.660.000	100 %			

	efisien																
Penyedia jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	12				12	518.000.000	12	847.663.492	100,00 %	164%	12	847.663.492	100 %			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12				12	47.850.000	12	24.900.000	100,00 %	52%	12	24.900.000	100 %			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi keluar dan dalam daerah	12				12	210.000.000	12	270.000.000	100,00 %	129%	12	270.000.000	100 %			
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	
Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Tersedianya Informasi yang akurat dan akuntabel tentang pembangunan daerah						3.176.835.000		2.499.737.800		79%	0	2.499.737.800				
Program Kerjasama Informasi dan																	

Media Massa																	
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Citra Positif Pemerintah daerah	23					1.310.100.000		902.170.000		69%	0	902.170.000	0%			
KOPERASI																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran																
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Waktu Layananan (Bulan)	12	3.000.000	12	6.282.250												
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki (Unit)	-	-	1	10.000.000												
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang yang dibayarkan Honorinya (Orang)	20	270.000.000	20	421.663.438												
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (Jenis)	20	45.000.000	9	29.991.647												
Penyediaan	Jumlah barang	36 +		36 +													

barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan (Buku + Lembar)	38.320	22.000.000	58.320	20.000.000												
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor (Unit)	5	5.000.000	5	5.750.000												
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Layanan Makan/Minum (Dos Makanan + Dos Minum Snack)	168 + 189	5.000.000	168 + 189	9.933.000												
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Waktu Kegiatan Rapat Koordinasi (Luar Propinsi & Dalam Propinsi)	3 & 16	516.100.000	4 & 17	353.213.503												
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu																
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan	3	44.800.000	1	22.000.000												

	Pelatihan Formal (Orang)																
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	UKM yang terbentuk pertahun																
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Pengembang an UKM yang difasilitasi	1	112.836.00 0	40	526.439. 000												
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru																
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah Produk UMKM yang di promosikan (Produk)	5	147.500.00 0	5	79.190.0 00												
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang dilatih (Orang)	30	100.000.00 0	60	279.913. 144												
Revitalisasi Data UMKM	Jumlah Data UMKM	3504	368.648.00 0	4448	49.650.0 00												
Program Pengembangan	Peningkatan aksesibilitas																

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM																
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan (kegiatan)	1	25.000.000	1	12.714.000												
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif																
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya koordinasi program pembangunan koperasi	2	75.000.000	2	74.964.000												
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Koperasi)	10	35.000.000	14	24.775.000												
Peningkatan dan pengembangan jaringan	terwujudnya koperasi yang maju dan	5	35.000.000	5	24.725.000												

kerjasama usaha koperasi	kompetitif (Koperasi)																
Koordinasi Pemberdayaan Koperasi	Terkordinasiny a Pemberdayaan Koperasi (Kegiatan)	1	20.000.000	0	0												
Penanaman Modal																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.593.370. 139,44		2.972.3 67.252												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air dan listrik penunjang kerja aparatur			12	24.750. 000												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Meningkatny a fasilitas kantor			12	17.000. 000												
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatny a kesejahteraa n pegawai PHL (org)			23	628.649 .772												
Penyediaan Alat	meningkatny																

Tulis Kantor	a mobilitas kinerja aparatur				42.163. 092												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	meningkatny a mobilitas kinerja aparatur				15.000. 000												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitas penunjang kerja aparatur				1.465.2 26.500												
Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	Meningkatny a sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antara pusat, provinsi dan daerah				779.577 .888												
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mewujudkan Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur	100%	139.586.0 99,33														
Program Peningkatan	Mewujudkan Terciptanya																

Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur																
Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Mewujudkan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	139.586.099,33		128.200.000												
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan			5	128.200.000												
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan	100%	9.073.096,46														

	Kuangan																
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		100%	291.446.653,74														
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Mewujudkan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	2.533.685.982,86														
Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis Atara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kemitraan antara UMKM dan PMA/PMDN (MoU)	30	750.000.000,00	10	209.018.000												
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMD N/PMA) (juta)	68.526.418	350.000.000,00	13.960.867	230.618.200												
Penyelenggaraa n Pameran	Meningkatnya jumlah	4	750.000.000,00	3	436.910												

Investasi	event keikutsertaan even promosi dalam dan luar negeri (event)				.610												
Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Mewujudkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	1.815.144.600,48														
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	116		57													
	Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dn PMDN)	3166		56													
	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta)	8.057.693		2.803.288													
Penyusunan dan Pengumpulan	Meningkatnya jumlah data		200.000.000,00	1	136.388												

Data Informasi	potensi unggulan daerah (dok)				.000												
Pemantauan dan Pengawasan Perizinan	Meningkatnya jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (juta)		150.000.000,00	70	528.916.000												
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Mewujudkan Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		2.308.544.082,55														
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perizinan	Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perizinan		291.446.653,74														
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik	Meningkatnya jumlah sistem pelayanan yang digunakan				49.865.000,00												
Program	Meningkatka		332.602.0														

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dalam Perizinan	n Kualitas Pelayanan Informasi dalam Perizinan		84,55														
Sosialisasi dan Publikasi terhadap Layanan Publik	Meningkatnya jumlah penyelesaian pengaduan/sengketa investasi (sengeta)			3	140.141 .235												
Pemuda Olahraga																	
Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran		3.112.320.016	79%	1.416.558.694												
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	70.000.000	12 Bulan	14.399.996												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Kegiatan	19.061.550	1 Keg	3.061.550												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah jasa pemeliharaan	1 Buah	15.000.000	0 buah	-												

Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan dinas																
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya honor dan pengurusan adm. Keuangan	37 org	858.237.21 6	37 org	769.936. 742												
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 Kegiat an	4.800.000	0	-												
Penyediaan ATK	tersedianya ATK penunjang administrasi kantor	5 Kegiat an	117.639.25 0	1 Keg	23.503.2 46												
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksana cetakan dan pengandaan adm. Kantor	10 Kegiat an	74.541.000	2 keg	14.541.0 00												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan ktr	1 Kegiat an	5.000.000	0 keg	-												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr.	2 Kegiat an	401.500.00 0	1 keg	345.295. 000												
penyediaan bahan	tersedianya	0	0	0 buah	0												

bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																
Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	48.346.000	12 Bulan	4.650.000												
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10 Kegiatan	1.498.195.000	2 Keg	241.171.160												
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		400.000.000	0%	-												
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional roda dua	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional roda dua	0	0	0 buah	-												
Pembangunan Gedung kantor	Terpenuhinya fasilitas gedung kantor	0	0	1 Keg	-												
Pengadaan Mebeleur	terpenuhinya Mebeleur kantor	9 Buah	200.000.000	0 buah	-												
Pemeliharaan	terpeliharanya	4	200.000.00	0 Keg													

rutin/berkala Gedung/kantor	Gedung/kantor secara rutin / berkala	Kegiat an	0		-												
Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	0	0	0 Keg	-												
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	0	0	0 Keg	-												
Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	0	0	0%	-												
Pengadaan Pakaian Olahraga	Terpenuhinya Kelengkapan Pakaian Olahraga	0	0	0 pasang	-												
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur		440.000.00 0	0%	-												
Tersosialisasinya sosialisasi peraturan perundang- undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	0	0	0 org	-												
Bintek Implementasi	Tersenggarany a Implementasi	0	0	0 org	-												

Peraturan perundang- undangan	Peraturan perundang- undangan																
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	22 Orang	440.000.00 0	0 Orang	-												
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan pengembangan n sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan		20.000.000	0%	-												
Penyusunan LAKIP	tersusunnya LAKIP Dinas	4 Lapora n	20.000.000	-	-												
Penyusunan Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan Realisasi Anggaran	0	-	-	-												
Prog. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Mewujudkan peningkatan Peran serta pemud dalam kegiatan kepemudaan		13.262.137. 500	100%	4.036.53 8.732												

Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	11 Kegiatan	3.783.531.000	4 Keg	2.867.289.000												
	Jumlah Organisasi pemuda yang di bina	3 Orang		0 Org													
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah peserta Diklat Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda	175 Orang	5.128.606.500	35 org	1.169.249.732												
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah pekan jambore pemuda Tkt Daerah dan Nasional	12 Kegiatan	1.700.000.000	0 Keg	-												
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	7 Kegiatan	200.000.000	0 keg	-												
Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang ada	9 Buah/ Unit	2.450.000.000	0 buah	-												
Peningkatan upaya penumbuhan	Meningkatkan upaya penumbuhan		1.050.000.000	0%	-												

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda																
Pelatihan kelompok usaha pemuda kreatif	Cakupan wirausaha muda			0 kelompok	-												
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah kegiatan penyuluhan narkoba	3 Kegiatan	300.000.000	0 keg	-												
Pelatihan kewirausahaan pemuda	Cakupan wirausaha muda	30 Kelompok	750.000.000	-	-												
Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah raga	Meningkatnya jumlah pelatih dan wasit yang bersertifikat		380.000.000	100%	-												
Pengembangan Sistim Sertifikasi dan Standarisasi profesi	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	55 Orang	380.000.000	0 Orang	-												
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		12.598.878.200	98%	2.392.245.960												

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlit yang dibina	125 Atlit	5.688.930.0 00	35 Atlet	546.898. 860												
	Jumlah Pembinaan Olahraga	9 Cabor		13 Cabor													
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	jumlah pelaksanaan kompetisi olahraga	6 keg	5.249.948.2 00	1 keg	1.451.10 3.900												
	jumlah perolehan medali	132 Medali		20 Medali													
	Jumlah atlet berprestasi (regional & nasional)	127 Atlit		20 Atlet													
	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tkt regional dan nasional	7 Cabor		7 Cabor													
	Jumlah Organisasi Olahraga	55 Orgs		11 Org													
Pemberian Penghargaan Bagi Insan olahraga yang	Jumlah atlit dan wasit serta pelatih dan instruktur	171 Orang	660.000.00 0	26 Org	138.500. 000												

berdedikasi olahraga dan berprestasi	olahraga daerah nasional berprestasi yang mendapat penghargaan																
Pelaksanaan Turnamen Morowali CUP	Jumlah Tim yang prestasi dalam kegiatan turnamen Morowali Cup	20 Tim	1.000.000.000	4 Tim	255.743.200												
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif		10.096.505.568	99%	2.421.095.000												
Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olah raga	Jumlah gedung olahraga yang dibangun	24 Buah	10.096.505.568	6 Buah	2.421.095.000												
	Jumlah Lapangan olahraga yang dibangun	63 Buah		12 Buah	0												
Pemantauan sarana prasarana olahraga	Terlaksananya Pemantauan sarana prasarana olahraga	0	0	0	0												
Perikanan																	

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					3.478.595.721												
Penyediaan Jasa Komunikasi	Tersedianya jasa Komunikasi , listrik air dan telpon																
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium			9. operat or 12 Tng Adm	480.628.401												
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor																
Penyediaan ATK	Tersedianya ATK																
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan																
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Kantor				277.514.500												
Penyediaan Jasa	Tersedianya			3													

Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor	93.741.220												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga																
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program keluar dan kedalam daerah			1	231.700.000												
Program pengembangan budidaya perikanan					1.566.393.300												
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pembudidaya dan POKDAKAN			4 Pokda kan	828.618.300												
Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Perikanan	Tersedianya Sarana Prasarana Bidang Perikanan			7 Pokda kan	737.775.000												
Program		100%															

pengembangan perikanan Tangkap					7.893.987.000												
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pengetahuan Nelayan dan KUB			Penda mping KUB	99.875.000												
Pengembangan Lembaga UsahaPerdagangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Kelompok Usaha Nelayan			Penge mbang an Lemba ga	213.800.000												
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Perikanan Tangkap			72 KUB	7.580.312.000												
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		100%			1.311.557.500												
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksana Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan																

Pengadaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana POKLAHSAR			9 POKL AHAR	1.261.89 2.500												
Pendampingan pada Kelompok POKLAHSAR	Terbina Kelompok POKLAHSAR yang lebih kreatif			Penda mping POKL AHAR	49.665.0 00												
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		100%			78.990.0 00												
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Teridentifikasi Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			1 Pokda kan	78.990.0 00												
Program Pengembangan kawasan budidaya Perikanan					947.680. 000												
Pendampingan Pengembangan kawasan budidaya	Terbinanya Pembudidaya POKDAKAN			9 POKD AKAN	947.680. 000												

Perikanan																	
PERTANIAN PERKEBUNAN																	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan																	
		100%	5.765.889.4 90,30		15.252.3 46.920												
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan																
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Penyerapan Pangan (Food Utilization)			4	221.014.000												
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Ketersediaan pangan (Food Utilization)			87,2	12.160.000												
	Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal)			14313 ton	120.893.400												
	Ketersediaan Protein Perkapita (Gr)			3071													
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah realisasi Pupuk sesuai RDKK			86,19													

Kegiatan Pupuk Bersubsidi																	
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Terkumpulnya Data Harga Pangan																
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Peningkatan Produksi, Produktivitas lahan Kering																
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.			100	51.130.000												
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Produktivitas Padi atau bahan pangan lokal lainnya Per Hektar			1 dok	2.298.306.750												
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan			1 tahun	40.483.500												
Kegiatan	Perumusan			1 Keg													

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Program Ketahanan Pangan				30.540.200												
Kegiatan Pelaksanaan Hari Pangan Se-Dunia (HPS)	Peningkatan Kualitas SDM			1 Keg	80.000.000												
Kegiatan Pemutakhiran Data Statistik Pertanian	Jumlah dokumen laporan statistik pertanian peternakan			1 Keg	35.000.000												
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		100%	12.917.090.092,20		12.362.819.070												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan/ peternakan tepat guna :			10 Ha	382.000.000												
Pengadaan Fasilitas Teknologi	Panjang jalan ke kantong produksi			20,2 Km	4.190.000.000												

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna..	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan/ peternakan tepat guna :			18 Unit	2.294.479.000												
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		100%	2.813.055.175,63		5.878.340.070												
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya sarana Produksi Pertanian (Unit)			227 Unit	869.164.500												
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Peningkatan Produktivitas tanaman Perkebunan			5000 pohon	251.932.200												
Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air/PLA Bidang Pangan (Sharing Pembantuan)	Peningkatan Dukungan Kegiatan Dana Sharing Tugas Pembantuan Bidang PLA			1 Tahun	264.545.750												

Kegiatan Penyediaan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Tersedianya bibit unggul Tanaman pangan yang bersertifikat :			1906,4 3	509.884. 250												
	- Benih Padi																
Kegiatan Sharing Tugas Pembantuan Bidang Pangan	Peningkatan Dukungan Kegiatan Dana Sharing Tugas Pembantuan Bidang Pangan			1 Tahun	313.185. 000												
Kegiatan Sharing Tugas Pembantuan Bidang Perkebunan	Peningkatan Dukungan Kegiatan Dana Sharing Tugas Pembantuan Bidang Perkebunan			1 Tahun	160.280. 850												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			833.982.24 9.586,00		3.509.34 7.520												
Pembibitan dan Perawatan Ternak	Ketersediaan Bibit Ternak Unggul :				3.223.00 0.000												
Pengembangan Agribisnis Peternakan	Ketersediaan Bibit Ternak Unggul melalui			500	172.168. 420												

	inseminasi buatan																
Sharing Tugas Pembantuan Bidang Pternakan	Peningkatan Dukungan Kegiatan Dana Sharing Tugas Pembantuan Bidang Pternakan			1 Tahun	114.179. 100												
Perdagangan/Per industrian																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya palayanan administrasi perkantoran		5.171.772.7 60		1.043.33 3.709												
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya listrik kantor	12 bulan	92.700.000	12 bulan	13.627.0 16												
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlangkapan Kantor	Tersedianya jasa perlengkapan kantor	12 bulan	41.200.000	12 bulan	4.749.89 2												
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan	12 bulan	51.500.000	12 bulan	8.423.45 5												

kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional																
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	3.096.322.760	12 bulan	559.472.188												
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediaya ATK	12 bulan	180.250.000	12 bulan	33.998.040												
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	103.000.000	12 bulan	18.000.000												
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediaya makan dan minum	12 bulan	61.800.000	12 bulan	7.750.000												
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		1.545.000.000		397.313.118												
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri				4.858.682.600												
Kegiatan Pengembangan	Berkembangnya pasar dan				4.858.68												

Pasar dan Distribusi Barang/Produk	efektifitas distribusi barang/produk				2.600												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Terlaksanya monitoring kegiatan dan kondisi pasar		386.250.000		138.106.500												
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah		1.287.500.000		285.863.339												
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Terlaksananya revitalisasi pasar dan penunjangnya		3.090.000.000		399.480.000												
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	Tersedianya jasa perencanaan		901.250.000		223.480.000												
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan	Tersedianya jasa pengawasan		772.500.000		132.493.000												
Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Terlaksananya revitalisasi pasar dan penunjangnya		28.667.725.000		3.679.259.761												

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		7.294.695.0 50		1.780.93 4.000												
Kegiatan Operasionlaisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Meningkatnya operasionalisas i dan pengembangan UPT Kemetrologian		5.369.995.0 50		1.579.14 2.000												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Terlaksananya tera dan tera ulang pada alat UTTP		1.200.000.0 00		66.150.0 00												
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tera dan tera ulang		519.671.05 0		100.907. 000												
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Unit Metrologi Legal	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Unit Metrologi Legal		3.650.324.0 00		1.412.08 5.000												
Kegiatan	Meningkatnya																

Monitoring Harga Barang dan Barang Strategis Lainnya	monitoring harga barang dan barang strategis lainnya		1.924.700.0 00		201.792. 000												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Terlaksananya pemantauan harga dan peredaran barang di 9 kecamatan		1.152.200.0 00		95.700.0 00												
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tentang pengawasan barang dan barang strategis lainnya		772.500.00 0		106.092. 000												
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas iptek sitem produksi		1.946.882.0 00		115.960. 000												
Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Menguatnya kemampuan industri berbasis teknologi		1.946.882.0 00		115.960. 000												

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pengembangan IKM				163.005.000												
Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Meningkatnya fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya				10.170.000												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Terlaksananya pendampingan IKM		777.000.000		5.230.000												
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan industri berbasis SDA		772.500.000		4.940.000												
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Meningkatnya pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri		1.545.000.000		152.835.000												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Terlaksananya monitoring pengembangan IKM		772.500.000		85.025.000												

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan IKM		772.500.00 0		67.810.0 00												
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Meningkatnya pengmbangan sentra-sentra industri potensial				660.546. 500,00												
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Sentra Industri	Tersedianya sarana maupun prasarana sentra industri				660.546. 500,00												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Terlaksananya monitoring pengembangan Sentra IKM		24.720.000, 00		4.800.00 0,00												
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan Sentra IKM		298.527.47 5,00		57.966.5 00,00												
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	Tersedianya mesin dan peralatan Produksi Sentra IKM Furnitur		315.009.15 0,00		237.567. 500,00												

Belanja modal Perlengkapan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana perlengkapan kantor Sentra IKM		210.006.10 0,00		39.462.5 00,00												
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Tersedianya sarana Sentra IKM		1.050.030.5 00,00		209.000. 000,00												
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Tersedianya prasarana Sentra IKM		525.015.25 0,00		111.750. 000,00												
Transmigrasi																	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi																	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka	jumlah unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang terbina	1	5.627.732.6 06		1.205.51 6.000												

pengembangan kawasan																	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi (DAK AFIRMASI)	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dalam kawasan Transmigrasi			7	2.747.77 5.000												
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah unit Perumahan Transmigrasi		1.652.008.6 67	1	370.001. 588												
BKD																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.163.674. 850		2.838.95 0.037												
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	1.061 Orang	13.781.015. 850	198 Orang	2.428.91 3.437												
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi	Jumlah pejabat BKD yang mengikuti diklat	23 Orang	801.609.00 0	6 Orang	292.586. 600												

PNS Daerah	PIM																
Pelaksanaan Ujian Dinas & Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti UPI dan UD	450 Orang	581.050.00 0	64 Orang	117.450. 000												
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			18.086.733. 854		2.208.71 0.256												
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis	Jumlah ASN yang pindah golongan (SK Pangkat)	4.150 SK	919.936.00 0	800 SK	165.181. 155												
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah PNS yang dimutakhirkan datanya	18.475 Orang	595.000.00 0	3.321 Orang	128.220. 600												
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah ASN yg mengikuti tugas belajar	12 Orang	368.820.00 0	3 Orang	82.570.0 00												
Pengurusan karpeg, karis/karsu	Jumlah ASN yang mengurus Karpeg, Karis/Karsu	1.750 Orang	500.000.00 0	750 Orang	99.814.0 00												
Pengusulan NIP	Jumlah Pengusulan NIP CPNS	1.059 Orang	600.000.00 0	199 Orang	175.835. 500												

Penyusunan/peng usulan bezetting dan formasi PNS	Jumlah formasi penerimaan ASN	1.511 Orang	689.174.00 4	250 Orang	309.174. 004												
Pengurusan satya lencana karya satya	Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan	345 Orang	238.650.00 0	50 Orang	75.947.0 00												
Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	Persentase pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT (%)	500	13.781.015. 850	95%	1.095.82 9.997												
Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah ASN yang pensiun	334 SK	394.138.00 0	60 SK	76.138.0 00												
Program Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona I			5.489.121.9 63		1.217.58 4.894												
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	95 Orang	2.199.341.1 63	19 Orang	364.992. 594												
Penyediaan peralatan dan perlengkapan		60 Bulan	843.621.80 0	12 Bulan	259.751. 800												

kantor																	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan luar	60 Bulan	2.266.159.000	12 Bulan	556.881.500												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	180.000.000	12 Bulan	35.959.000												

2.3. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil capaian pembangunan dan evaluasi kinerja RPJMD maka di tetapkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk di tingkatkan. Ini dapat dilihat dari capaian IPM 72,02 yang merupakan peringkat kedua setelah Kota Palu, tetapi pada angka harapan hidup 68,82 kita masih jauh dari kata ideal dan masih berada di bawah beberapa kabupaten di sulawesi tengah yang mana di ikuti oleh beberapa permasalahan pada gizi buruk dan stunting.
2. Angka kemiskinan yang masih sangat tinggi yaitu 13,75%. Jika dilihat dari persentase penurunan dari tahun sebelumnya termasuk cukup baik yaitu 13,47% tetapi masih berada dibawah angka kemiskinan beberapa kabupaten. Penurunan ini juga tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan pada wilayah kepulauan.
3. PDRB kabupaten yang masih di dominasi oleh sektor industri dan pertambangan mengharuskan pemerintah daerah lebih fokus memprioritaskan sektor lainnya sehingga tidak terjadi ketimpangan antar sektor. Ketimpangan antar sektor ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar wilayah.
4. Pemerataan pembangunan khususnya kecamatan yang berada pada wilayah kepulauan. Infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menunjang pengentasan kemiskinan, antara lain rumah layak huni, jalan, air bersih, jaringan irigasi bagi para petani, dan lainnya.

2.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Aspek keterjangkauan dan aksesibilitas kewilayahan terutama pada daerah terpencil dan terisolir.
2. Distribusi dan jumlah sebaran guru yang tidak merata.

3. Kesiapan anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan dasar terutama di pedesaan belum optimal.
4. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah.
5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar.
6. Ketersediaan Guru Berdasarkan Bidang Keahlian

2.4.2. URUSAN KESEHATAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana kesehatan belum optimal dan jaringannya masih kurang memadai.
2. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan
3. Tingginya Angka Stunting
4. Ketersediaan Obat Yang Belum Merata
5. Usia Harapan Hidup masih dibawah usia harapan nasional
6. Angka Kematian Ibu masih tinggi
7. Angka Kematian Bayi masih tinggi
8. Status Gizi balita masih rendah.

2.4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah
2. Belum Optimalnya infrastruktur di sektor pariwisata.
3. Masih rendahnya ketersediaan air bersih, listrik di daerah kepulauan

2.4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya rumah yang kondisinya tidak layak huni.
2. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.

3. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, jamban keluarga, dan air buangan.

2.4.5. URUSAN SOSIAL

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan sosial adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai.
3. Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS.
4. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.

2.4.6. URUSAN TENAGA KERJA

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran.
2. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang ketenagakerjaan.
4. Kompetensi tenaga kerja lokal yang masih rendah sehingga masih sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;

2.4.7. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum tersedianya pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

2.4.8. URUSAN PANGAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pangan adalah sebagai berikut :

1. Masih Banyaknya desa rawan pangan di sebabkan oleh akses pangan dan ketersediaan pangan.
2. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, dan berimbang.
3. Rendahnya kemampuan daya beli disebabkan kemiskinan khususnya di wilayah kepulauan.

2.4.9. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Jumlah armada kebersihan tidak sebanding dgn jumlah perkembangan penduduk.
2. Ketersediaan TPA dan TPS yang belum sebanding dengan jumlah desa dan volume sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan segala fasilitas sarana prasarana persampahan.
4. Tidak adanya teknologi pengelolaan sampah/limbah yg dihasilkan masyarakat.

2.4.10. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP-EI, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah) belum memadai yakni jaringan yang sering terganggu, server (alat perekam) perlu perawatan setiap tahunnya serta mobil pelayanan Adminduk.
2. Gedung Kantor yang tidak memadai untuk mendukung proses pelayanan diantaranya ruangan perekaman dan data yang kurang representatif.

2.4.11. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya desa yang belum memiliki BUMDES.

2. BUMDES yang sudah terbentuk belum berjalan optimal.
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan desa baik perencanaan maupun pengawasan dalam menggunakan dana desa.

2.4.12. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya tenaga penyuluh KB untuk menjangkau seluruh wilayah penduduk Kabupaten Morowali.
2. Peran keikut sertaan KB masih perlu di optimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB.

2.4.13. URUSAN PERHUBUNGAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
2. kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, guradrail dan LPJU yang belum dapat optimal dipenuhi
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas.

2.4.14. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Koperas, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan dan pertanian (agribisnis) yang di kelola oleh koperasi masih sangat terbatas.
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
3. Terbatasnya akses modal dan informasi pasar
4. Masih minimnya pendampingan bagi UKM dan Koperasi
5. Masih terbatasnya koneksi UKM dengan kawasan perindustrian
6. Belum optimalnya sarana bagi UKM dan koperasi

2.4.15. URUSAN PENANAMAN MODAL

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang belum menggunakan sistem informasi teknologi
2. Sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan perizinan belum memadai seperti ruang pelayanan dan perangkatnya.
3. Penanaman investasi pada kecamatan di luar lingkaran tambang belum maksimal.
4. Promosi potensi serta keunggulan daerah yang belum berjalan optimal.

2.4.16. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Minat dan Kemauan kalangan Pemuda dalam Kegiatan Organisasi
2. Kurangnya Minat dan Kesadaran kalangan pemuda dalam ikut serta kegiatan sosialisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
4. Pembinaan olahraga yang belum berjalan optimal.

2.4.17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya minat baca masyarakat namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti masih kurangnya gedung perpustakaan, literatur bacaan, serta ruang baca yang nyaman.
2. Aksesibilitas dalam pelayanan perpustakaan desa sangat sulit di jangkau.
3. Pelayanan pengunjung serta pengadministrasian buku belum berbasis informasi teknologi.

2.4.18. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan bagi para nelayan maupun kelompok nelayan.

2. Sarana prasarana perikanan yang belum berbasis teknologi atau belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Keterbatasan modal usaha bagi para pelaku usaha perikanan.
4. Jaringan pemasaran dan produk perikanan masih kurang
5. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan

2.4.19. URUSAN PARIWISATA

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pariwisata pada Destinasi Wisata sebagian besar belum tersedia.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membantu mengembangkan objek wisata.
3. Belum optimalnya penarikan retribusi pada objek wisata.

2.4.20. URUSAN PERTANIAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
2. Modal usaha yang dimiliki oleh para petani belum termanfaatkan secara optimal.
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang produktif.
4. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai dan belum terdistribusi secara merata.
5. Masih kurangnya intensifikasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
7. Jaringan pemasaran produk pertanian masih kurang

2.4.21. URUSAN PERDAGANGAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tata kelola perdagangan yang mengakibatkan rantai distribusi barang menjadi panjang
2. Sulitnya mengontrol peredaran barang keluar masuk daerah

3. Sulitnya mengawasi barang kadaluarsa dan tidak berizin di daerah-daerah yang jauh dari ibukota
4. Masih rendahnya fasilitas penunjang untuk pemenuhan kriteria pasar tradisional modern kabupaten

2.4.22. URUSAN PERINDUSTRIAN

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterampilan manajemen usaha pelaku industri kecil dan menengah (IKM)
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna pelaku IKM.
3. Masih rendahnya inovasi pelaku IKM dalam menembus pasar lokal dan regional.
4. Masih rendahnya kerjasama antara pelaku IKM dengan industri besar yang ada.
5. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam pertanian dan kelautan Kab. Morowali sebagai bahan baku industri.
6. Rendahnya kapasitas pembina ASN akibat kurangnya diklat-diklat teknis yang diikuti.



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021**

**BAB
III**

**KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH**

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Morowali tahun 2021 memiliki tema “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan SDM, Penyediaan Sarana Produksi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Infrastruktur Menuju Morowali Sejahtera Bersama”. Penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Morowali tahun 2021 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian daerah tahun sebelumnya.

3.1.1. KONDISI PEREKONOMIAN TAHUN 2018 DAN 2019

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, Perekonomian Kabupaten Morowali pada tahun 2018 tumbuh 12,39%. Pertumbuhan ini lebih rendah dari pada pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 14,10%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada kategori industri pengolahan sebesar 19,38%, sedangkan pertumbuhan paling kecil terjadi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni tumbuh sebesar 0,82%. Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan pdrb adalah sektor industri pengolahan (19,38%), sektor pengadaan listrik dan gas (15,40%), serta sektor pertambangan dan penggalian (13,11%). sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 0,82%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 3,78%. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor lain yang pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali tahun 2014-2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,04	10,94	4,12	3,78	0,82
Pertambangan dan Penggalan	-55,18	110,95	15,93	15,93	13,11
Industri Pengolahan	13,58	338,20	27,60	21,90	19,38
Pengadaan Listrik dan Gas	20,98	11,95	11,71	14,07	15,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	7,80	7,98	8,23	9,53	8,38
Konstruksi	441,25	0,28	-8,68	6,81	6,27
Perdagangan Besar dan Eceran	13,16	24,27	9,92	6,23	5,81
Transportasi dan Pergudangan	26,45	28,77	7,29	6,42	5,38
Penyediaan Akomodasi	6,66	11,41	5,43	6,99	10,40
Informasi dan Komunikasi	10,71	10,74	9,16	9,16	11,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	8,51	9,81	7,23	7,26
Real Estat	18,29	18,68	5,01	2,76	2,12
Jasa Perusahaan	2,93	7,60	7,92	9,22	8,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,52	7,45	6,04	7,42	8,71
Jasa Pendidikan	8,51	7,31	6,89	5,60	5,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,51	9,64	9,89	10,03	9,60
Jasa lainnya	6,28	6,58	6,80	8,19	8,09
Total PDRB	0,09	67,82	12,42	14,1	12,39

Sumber : BPS 2019

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali masih lebih tinggi, karena laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 adalah 6,30% dan tahun 2017 7,10%. Sementara, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selama tahun 2016-2018 berada di peringkat pertama. Secara lebih lengkap, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)		
	2016	2017	2018
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	5,94	6,00	6,08
Banggai	38,22	8,14	6,79
Morowali	12,42	14,10	12,39
Poso	6,03	6,15	6,19
Donggala	4,32	5,27	2,89
Tolitoli	4,86	5,08	5,36
Buol	3,09	4,05	4,52
Parigi Moutong	5,04	5,31	4,66
Tojo Una-Una	5,16	5,62	3,76
Sigi	5,03	5,65	3,92
Banggai Laut	7,30	6,26	5,90
Morowali Utara	5,76	7,95	6,49
Kota Palu	5,50	5,54	5,05
Sulawesi Tengah	9,94	7,10	6,30

Sumber : BPS 2019

Empat sektor penyumbang PDRB terbesar pada tahun 2018 adalah (1) Industri Pengolahan (37,95%); (2) Pertambangan dan Penggalian (27,69%); (3) Konstruksi (14,68%); (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10,08%). Selengkapannya, kontribusi sektor penyumbang PDRB dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah),
2014 – 2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.507.242	1.735.408	1.843.278	1.976.200	2.044.287
Pertambangan dan Penggalian	1.584.742	3.356.581	3.906.196	4.651.535	5.613.847
Pengolahan	917.426	3.804.951	4.808.844	6.050.594	7.693.216
Pengadaan Listrik dan Gas	916	1.016	1.191	1.376	1.685
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.097	3.472	3.940	4.470	5.063
Konstruksi	2.388.749	2.517.121	2.403.827	2.626.714	2.976.236
Perdagangan	468.985	623.343	707.668	782.786	893.433

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda					
Transportasi dan Pergudangan	41.385	53.413	59.915	66.308	71.890
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.598	15.411	16.656	18.206	20.400
Informasi dan Komunikasi	126.627	141.330	154.625	172.171	197.781
Jasa Keuangan dan Asuransi	94.781	108.974	122.784	136.375	151.463
Real Estat	97.815	116.412	124.911	133.123	138.884
Jasa Perusahaan	2.376	2.563	2.798	3.118	3.459
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	146.984	160.771	175.986	192.641	213.398
Jasa Pendidikan	78.053	86.795	97.577	108.199	118.566
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.933	51.592	57.721	65.546	73.265
Jasa lainnya	33.942	39.088	45.509	51.449	57.749
Produk Domestik Regional Bruto	7.552.653	12.818.241	14.533.426	17.040.812	20.274.621

Sumber : BPS 2019

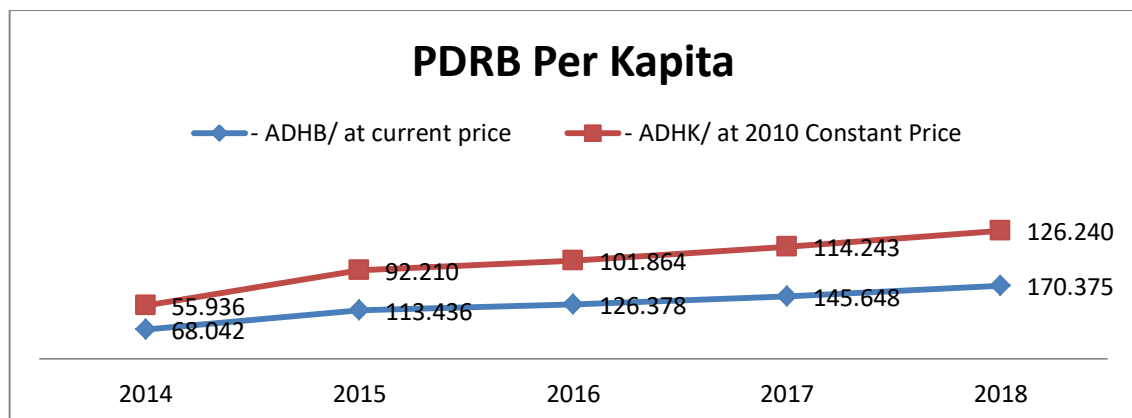
Tabel 3.4.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014 – 2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,96	13,54	12,68	11,6	10,08
Pertambangan dan Penggalian	20,98	26,19	26,88	27,3	27,69
Pengolahan	12,15	29,68	33,09	35,51	37,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Konstruksi	31,63	19,64	16,54	15,41	14,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6,21	4,86	4,87	4,59	4,41
Transportasi dan Pergudangan	0,55	0,42	0,41	0,39	0,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,18	0,12	0,11	0,11	0,1
Informasi dan Komunikasi	1,68	1,10	1,06	1,01	0,98

Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	0,85	0,84	0,8	0,75
Real Estat	1,30	0,91	0,86	0,78	0,69
Jasa Perusahaan	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,95	1,25	1,21	1,13	1,05
Jasa Pendidikan	1,03	0,68	0,67	0,63	0,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,40	0,40	0,38	0,36
Jasa lainnya	0,45	0,30	0,31	0,30	0,28
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS 2019

PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kabupaten Morowali adalah Rp. 145.648,- meningkat lebih tinggi menjadi Rp. 170.375,- pada tahun 2018.



Sumber : BPS 2019

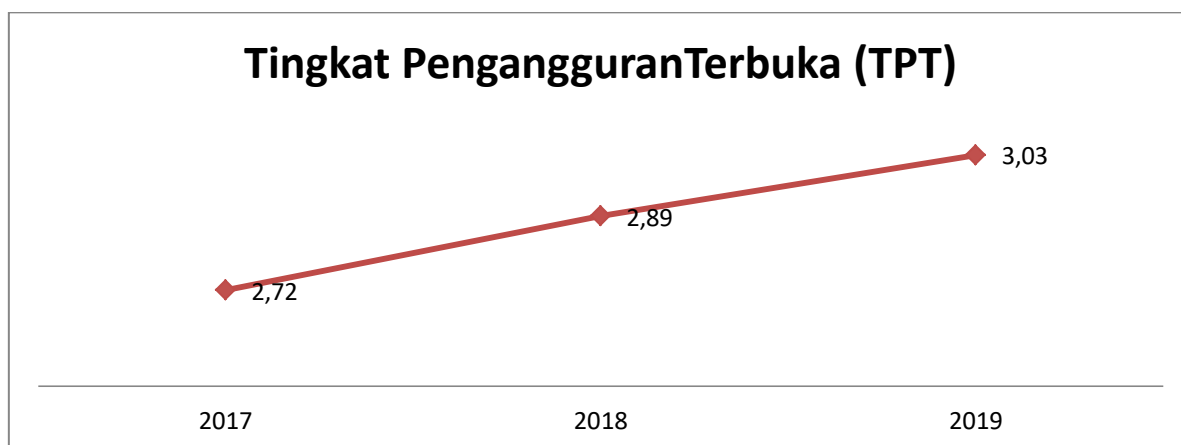
Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, 2014-2018

3.1.1.2. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan.

Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Pada tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar (60,8%). Pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar (62,6%). Dibandingkan kondisi tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 lebih tinggi atau naik 0,14% dari 2,89% pada tahun 2018 menjadi 3,03% pada tahun 2019.

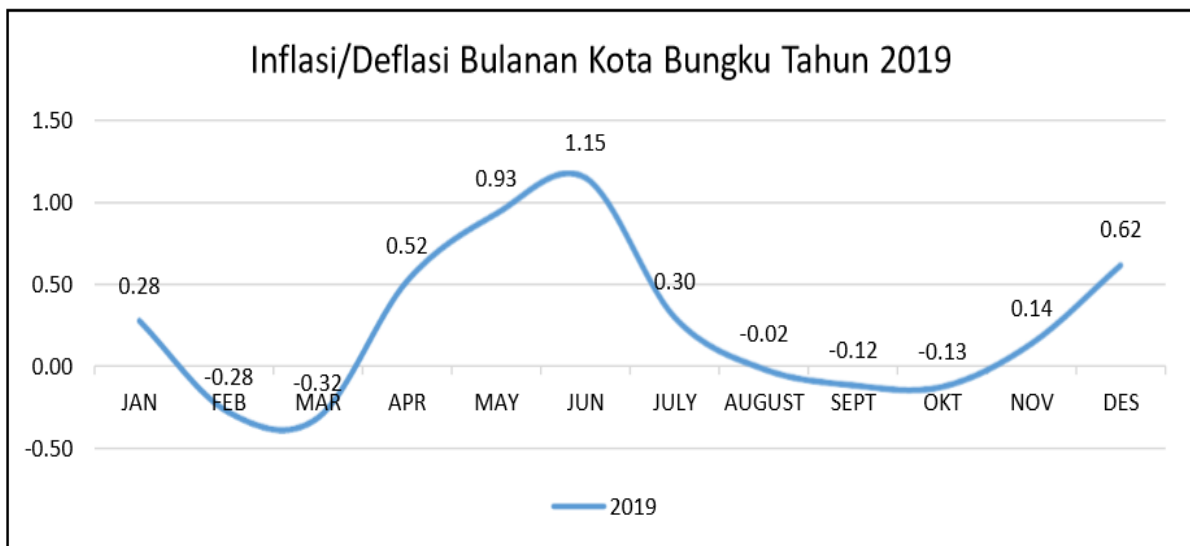


Sumber : BPS 2019

Gambar 3.2.
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2017-2019

3.1.1.3. Inflasi

Di awal tahun 2019 di Kota Bungku terjadi inflasi dengan nilai 0,28 persen dan terjadi naik turun indeks harga hingga bulan November 2019 Kota Bungku mengalami inflasi sebesar 0,11 persen. Tahun 2019 terdapat perbedaan tren naik turun grafik perkembangan inflasi/deflasi di Kota Bungku. Perbedaan terlihat pada bulan Mei dikarenakan pengaruh bulan puasa menambah tekanan inflasi yang mendorong naiknya harga kebutuhan pokok dan komoditas perumahan akibat biaya distribusi yang meningkat di tahun 2019. Kemudian di bulan Juni 2019 karena bulan lebaran dan bersamaan dengan musim ombak yang mengakibatkan harga komoditas perikanan meningkat dan menjadi penyebab dominan tingkat inflasi tinggi di bulan Juni 2019. Kemudian bulan Juli masih terjadi inflasi namun terjadi penurunan sampai di bulan Oktober yang terjadi deflasi sebesar 0,13 persen. Di bulan November sampai Desember terjadi inflasi yang mencapai 0,62 persen.



Sumber : BPS 2019

Gambar 3.3.
Inflasi/Deflasi Kota Bungku Tahun 2019

3.1.2. PROYEKSI KONDISI PEREKONOMIAN TAHUN 2020 DAN 2021

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Morowali pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kabupaten Morowali masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Urusan Pendidikan
 - Belum Meratanya distribusi Guru antar wilayah
 - Ketersedian Guru berdasarkan Bidang keahlian
 - Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
- b. Urusan Kesehatan
 - Masih terbatasnya Tenaga Kesehatan
 - Tingginya Angka Stunting
 - Belum Optiimalnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
- c. Urusan Infrastruktur
 - Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar antar Wilayah
 - Belum Optimalnya Infrastruktur di sektor Pariwisata
 - Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni
 - Masih Rendahnya ketersediaan air bersih, listrik di daerah Kepulauan
- d. Urusan Pertanian

- Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - Jaringan Pemasaran dan Produk Pertanian masih Kurang
 - Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Urusan Perikanan
- Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Perikanan
 - Jaringan Pemasaran dan Produk Perikanan masih Kurang
 - Belum Optiimalnya Sarana dan Prasarana Perikanan
 - Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- f. Urusan UMKM dan Koperasi
- Terbatasnya Akses Modal dan Informasi Pasar
 - Masih Minimnya Pendampingan bagi UKM dan Koperasi
 - Belum optimalnya sarana bagi UMKM dan Koperasi
 - Masih terbatasnya koneksi UKM dengan kawasan perindustrian
- g. Pembangunan Berkelanjutan

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah; *Pertama*, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusifsesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. *Kedua*, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. *Ketiga*, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. *Keempat*, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. *Kelima*, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. *Keenam*, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2018 dan tahun 2019, maka prospek perekonomian pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,78
Pertumbuhan Ekonomi	15,03%
Angka Kemiskinan	13,40%
Nilai Tukar Petani	100,14%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,86%
Gini Ratio	0,292

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD tahun 2005-2025 di tahun kelimabelas dan RPJMD Tahun 2018-2023 tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2018-2023 dan prioritas pembangunan RKPD 2021.

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2021, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar-Daerah; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan turun sebesar -24% dari tahun 2020, penyebab penurunan ini karena terjadinya penurunan pada komponen pajak dan retribusi daerah, dimana pelaku usaha sebagai wajib pajak tidak melakukan kegiatan bisnisnya sejak virus corona mewabah.
- 3) Dana Transfer diasumsikan sebesar Rp. 704.268.150.811,00 di luar Dana Transfer Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) .
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan dan diasumsikan sama dengan tahun 2021.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Morowali, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3) Pendayagunaan asset daerah.
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Morowali tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2018 s.d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rata-rata	Proyeksi
		2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.094.918.270.074,03	1.165.577.249.984,07	1.252.365.758.164,84	-24%	946.434.566.145,55
1.2	Pendapatan Asli Daerah	181.232.941.457,03	221.956.951.317,07	313.163.695.089,84	-23%	242.166.415.334,55
1.2.1	Pajak Daerah	45.496.062.194,16	67.145.103.499,60	84.473.398.281,00	-2%	83.025.411.447,10
1.2.2	Retribusi Daerah	74.914.511.058,00	103.687.253.544,00	139.070.296.808,84	-22%	107.971.199.252,40
1.2.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.521.871.716,00	1.679.957.568,00	1.500.000.000,00	11%	1.666.037.456,93
1.2.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	59.300.496.488,87	49.444.636.705,47	88.120.000.000,00	-44%	49.503.767.178,12
1.3	Pendapatan Transfer	913.508.328.617,00	924.625.738.802,00	939.202.063.075,00	-25%	704.268.150.811,00
1.3.1	Transfer Pemerintah Pusat	889.859.811.007,00	898.778.614.991,00	923.172.345.708,00	-26%	678.556.027.000,00
1.3.1.1	Dana Perimbangan	766.396.332.007,00	795.684.413.991,00	740.673.862.708,00	-23%	572.698.990.000,00
1.3.1.1.1	Dana Transfer Umum	567.515.447.546,00	602.147.176.672,00	572.698.990.000,00	0%	572.698.990.000,00
1.3.1.1.2	Dana Transfer Khusus	198.880.884.461,00	193.537.237.319,00	167.974.872.708,00	-100%	-
1.3.1.2	Dana Insentif Daerah	33.250.000.000,00	-	76.641.446.000,00	-100%	-
1.3.1.3	Dana Desa	90.213.479.000,00	103.094.201.000,00	105.857.037.000,00	0%	105.857.037.000,00
1.3.2	Transfer Antar-Daerah	23.648.517.610,00	25.847.123.811,00	16.029.717.367,00	60%	25.712.123.811,00
1.3.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	23.131.417.610,00	25.712.123.811,00	16.029.717.367,00	60%	25.712.123.811,00
1.3.2.2	Bantuan Keuangan	517.100.000,00	135.000.000,00	-	0%	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	177.000.000,00	18.994.559.865,00	-	0%	-

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar -24% dari tahun 2020.

2. Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2020.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakankebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2021.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Morowali tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. 2021

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rata-rata	Proyeksi
		2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)	2021
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA DAERAH	1.090.373.004.109,93	1.159.976.227.051,81	1.254.331.345.049,00	-24%	948.170.539.054,82
2.1	Belanja Operasi	642.810.649.325,93	674.901.099.412,78	802.458.358.289,87	-19%	649.490.245.579,00
2.1.1	Belanja Pegawai;	346.577.331.939,01	406.374.384.599,00	461.261.766.740,87	-31%	317.175.770.571,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.881.909.796,00	265.064.478.977,17	287.886.591.549,00	10%	316.714.475.007,18
2.1.3	Belanja Bunga	1.538.345.197,92	1.389.235.836,61	1.600.000.000,00	0%	1.600.000.000,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-		-
2.1.5	Belanja Hibah; dan	44.890.252.393,00	1.535.000.000,00	43.510.000.000,00	-91%	4.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	922.810.000,00	538.000.000,00	8.200.000.000,00	22%	10.000.000.000,00
2.2	Belanja Modal	307.690.148.308,00	280.144.328.091,11	271.638.945.159,13	-59%	110.453.844.533,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.033.899.500,00	249.250.000,00	3.000.000.000,00	83%	5.499.851.872,87
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.033.899.500,00	249.250.000,00	3.000.000.000,00	83%	5.499.851.872,87
2.4	Belanja Transfer	136.838.306.976,00	204.681.549.547,92	177.234.041.600,00	3%	182.726.597.069,95
2.4.1	Transfer Bagi Hasil	-	17.587.373.137,92	14.180.700.000,00	35%	19.099.661.069,95
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	4.761.691.237,50	-	19.099.661.069,95
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	17.587.373.137,92	9.419.008.762,50	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	136.838.306.976,00	187.094.176.410,00	163.053.341.600,00	0%	163.626.936.000,00
2.4.2.1	Bantuan Dana Desa (DD)	90.213.479.000,00	103.094.201.000,00	105.857.037.000,00	0%	105.857.037.000,00
2.4.2.2	Alokasi Dana Desa (ADD)	46.133.720.780,00	83.300.553.520,00	56.561.304.600,00	1%	57.269.899.000,00
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	15.000.000,00	177.000.000,00	135.000.000,00		-
2.4.2.4	Bantuan Kepada Partai Politik	476.107.196,00	522.421.890,00	500.000.000,00	0%	500.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	4.545.265.964,10	5.601.022.932,26	(1.965.586.884,16)	(0,00)	(1.735.972.909,27)

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2020. Adapun

pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta pembayaran pokok hutang.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Morowali diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Morowali tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Tahun 2018 s.d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rata-rata	Proyeksi
		2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)	2021
1	2	3	4	5	6	7
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.119.218.945,40	6.974.557.162,92	6.865.586.884,16	-5%	6.549.950.731,50
3.1.1	SILPA	4.119.218.945,40	6.974.557.162,92	6.865.586.884,16	-5%	6.549.950.731,50
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-		0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-		0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-		0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.798.898.025,34	1.270.966.733,34	4.900.000.000,00	-2%	4.813.977.822,23
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	1.400.000.000,00	-6%	1.313.977.822,23
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	3.500.000.000,00	0%	3.500.000.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-		
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	527.931.292,00	-	-		
	PEMBIAYAAN NETTO	2.320.320.920,06	5.703.590.429,58	1.965.586.884,16	-12%	1.735.972.909,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	6.865.586.884,16	11.304.613.361,84	(0,00)	(0,12)	(0,00)

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan tahun 2021 tentunya harus mengacu pada RPJMD tahun 2018-2023, sehingga dapat diketahui bahwa arah pembangunan tetap sejalan dengan indikasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah pembangunan memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

<i>Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama</i>		
Misi 1	Tujuan	Sasaran
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas profesional dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan Nilai-nilai kebenaran dan keadilan	Tujuan 1.1	Sasaran 1.1.1
	Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
		Sasaran 1.1.2
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Keuangan Daerah
Misi 2	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengelolaan SDA guna meningkatkan PAD dengan melibatkan UMKM lokal dan Koperasi agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyerap TK lokal dengan tetap menjaga hak-hak pekerja, iklim investasi yang baik dan kelestarian alam.	Tujuan 2.1	Sasaran 2.1.1
	Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan ekonomi kreatif (ekonomi lokal)
	Tujuan 2.2	Sasaran 2.2.1
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Misi 3	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui Pembiayaan Pendidikan	Tujuan 3.1	Sasaran 3.1.1
	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan

Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, Pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa		Sasaran 3.1.2
		Meningkatnya Nilai Nilai Kebudayaan
Misi 4	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Pembiayaan Kesehatan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, Kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman.	Tujuan 4.1	Sasaran 4.1.1
	Meningkatnya Kualitas SDM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Sasaran 4.1.2
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Misi 5	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan TTG agar tercipta kepastian harga dan pasar.	Tujuan 5.1	Sasaran 5.1.1
	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani
Misi 6	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, Listrik, fasilitas olahraga, perumahan, obyek wisata, serta seni dan budaya sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia	Tujuan 6.1	Sasaran 6.1.1
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar
		Sasaran 6.1.2
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Misi 7	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasana tempat ibadah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama.	Tujuan 7.1	Sasaran 7.1.1
	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Menurunkan Konflik SARA
		Sasaran 7.1.2
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan di Kabupaten, sehingga apa yang menjadi cita cita nasional dapat dicapai dengan di topang oleh pelaksanaan pembangunan di pemerintah kabupaten. Adapun prioritas dan sasaran nasional berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 yang juga di muat di dalam rancangan RKP tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Prioritas dan sasaran nasional

No	Prioritas	Sasaran
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1) Pengembangan Kawasan Strategis
		2) Pengembangan Sektor Unggulan
		3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
		4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
3	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
		2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
		3) Terpenuhinya layanan dasar
		4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
		5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
		6) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
		2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
		3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
		4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat

		5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
		6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
		2) Meningkatnya konektivitas wilayah
		3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
		4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
		5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		3) Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat 7 (tujuh) prioritas nasional dan 21 (dua puluh satu) sasaran nasional yang harus di dukung dan ditopang oleh setiap pemerintah daerah sehingga cita-cita nasional dapat diwujudkan. Jika di lihat dari hasil evaluasi RKP tahun 2019 oleh Bappenas maka dapat diketahui prioritas nasional yang perlu menjadi perhatian dan harus di pacu pada tahun-tahun berikutnya, adapun hasil evaluasi RKP tahun 2019 berdasarkan prioritas nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Evaluasi RKP Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	Hasil Evaluasi	
		Kinerja PN*	Simpulan Kinerja
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan	89,26	Cukup
2	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	70,74	Cukup Baik
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	66,96	Cukup Baik

4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	69,01	Cukup Baik
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	86,56	Cukup Baik

PN 3 memiliki kinerja terendah dalam upaya mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun 2019 yang ditandai dengan:

1. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa hingga triwulan III 2019 sebesar -1,24 persen dari target 6,3 persen,
2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 4,68 dari target 5,7-6,2 persen,
3. Wisatawan mancanegara sebesar 12,27 juta orang dari target 20,0 juta orang,
4. Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 4,21 persen dari target 7 persen, serta
5. Jumlah wirausaha baru yang tercipta hanya sebesar 1.809 orang dari target 272.000 orang

Berdasarkan hasil evaluasi RKP tahun 2019, maka pemerintah daerah perlu menjadikan salah satu acuan dalam menentukan prioritas daerah sehingga prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2021 kemudian menjadi selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Seiring berjalannya waktu penyusunan RKP Tahun 2020, telah terjadi pandemi corona atau covid-19 seluruh dunia sehingga menyebabkan perekonomian dunia yang tidak stabil. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa program kegiatan tahun 2020 yang tidak bisa berjalan karena adanya pergeseran anggaran untuk pencegahan penyebaran pandemi corona atau covid-19. Oleh karenanya di tahun 2021, pemerintah pusat mencoba untuk membuat suatu perencanaan dalam rangka pemulihan ekonomi yang di akibatkan pandemi tersebut.

4.2.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hasil analisis dan evaluasi pembangunan yang telah di sajikan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah.

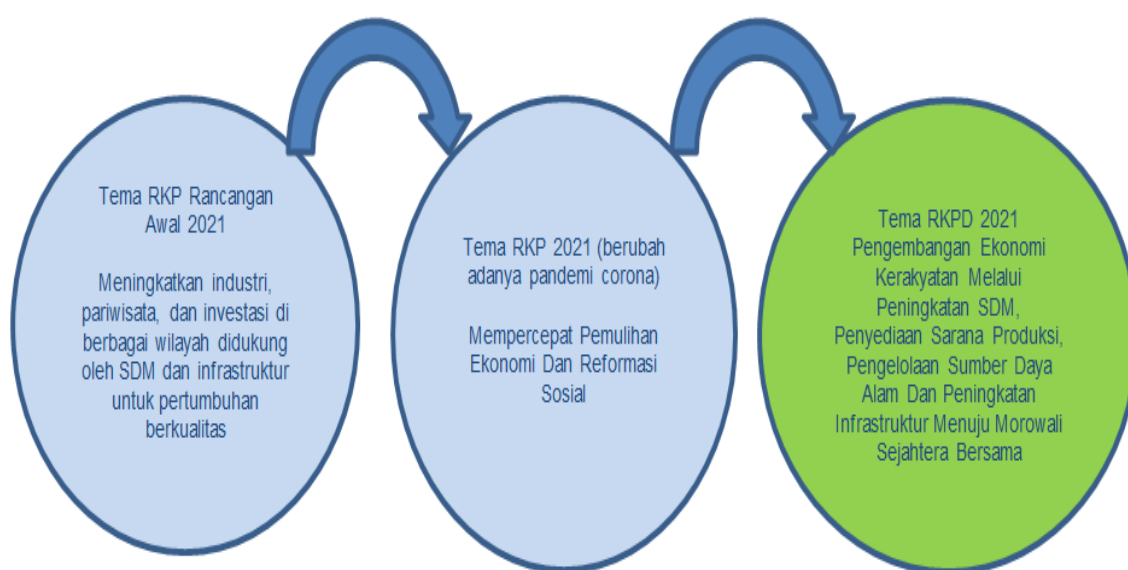
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.
3. Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar.
4. Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, koperasi, industri mikro dan jasa kecil lainnya.
5. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan akan menjadi acuan untuk menjadi menentukan kebijakan pembangunan tahun 2021. Prioritas pembangunan tersebut akan diuraikan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah diuangkan ke dalam RPJMD 2018-2023. Meskipun prioritas pembangunan tersebut telah menggambarkan sektor yang menjadi pencapaian utama, tetapi tidak mengabaikan sektor lainnya sehingga arah kebijakan pembangunan tetap masih menganut prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu melanjutkan pembangunan yang telah ada untuk lebih baik kedepannya. Adapun keselarasan prioritas nasional dan prioritas daerah dapat dilihat pada table berikut :

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, koperasi, industri mikro dan jasa kecil lainnya
		Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar
3	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi

		sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Sebagaimana permasalahan pembangunan yang kemudian ditarik menjadi prioritas pembangunan, maka yang menjadi tema pembangunan untuk tahun 2021 adalah **“PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN SDM, PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MENUJU MOROWALI SEJAHTERA BERSAMA”**. Tema tersebut juga mendukung dari hasil evaluasi RKP tahun 2019 yang rendah pencapaiannya yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya. Jika di selaraskan dengan tema nasional maka dapat dilihat pada gambar berikut :



Jika dikelompokkan, maka dapat dilihat kata kunci dari tema tersebut seperti pada tabel berikut :

Kata Kunci Tema Nasional	Kata Kunci Tema Daerah
Industri	Penyediaan sarana produksi
Pariwisata	Infrastruktur
Investasi	Pengelolaan sumber daya alam
SDM	SDM
Infrastruktur	Infrastruktur

Indikasi tema pembangunan tahun 2021 pada RPJMD tahun 2018-2023 juga terdapat sedikit perbedaan, hal ini dikarenakan adanya hasil analisis evaluasi pembangunan yang sudah berjalan bahwa ada beberapa sektor yang harus dijaga tingkat pencapaiannya. Indikasi tema pembangunan tahun 2021 pada RPJMD dengan tema RKPD tahun 2021 dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut :

Tabel 4.4. indikasi tema pembangunan RPJMD dan RKPD

Tema Pembangunan 2021 pada RPJMD 2018-2023	Tema Pembangunan RKPD tahun 2021	Hasil Evaluasi
<i>Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan sarana produksi, pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan PAD</i>	<i>Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan SDM, penyediaan sarana produksi, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan infrastruktur menuju morowali sejahtera bersama</i>	Penguatan SDM tidak terdapat pada tema pembangunan 2021 di RPJMD. Penguatan SDM kembali di prioritaskan khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan guna menjaga rasio pencapaian untuk IPM

Adapun pengelompokkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan prioritas pembangunan diatas, dapat dilihat pada tabel yang di sajikan di bawah ini :

Tabel 4.5. Pengelompokkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan berdasarkan Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan	Tujuan Pemda	Sasaran Pemda
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah.	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar
Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, industri mikro dan jasa kecil lainnya.	Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya ekonomi kreatif (ekonomi lokal)
Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani

Berdasarkan tabel diatas, untuk mencapai 5 prioritas pembangunan maka terdapat 5 tujuan dan 5 sasaran pembangunan daerah yang harus menjadi acuan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut. Adapun target kinerja prioritas tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Prioritas Pembangunan	Tujuan Pemda	Indikator Kinerja	Target 2021	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja	Target 2021
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah.	Meningkatkan Kualitas SDM	Pertumbuhan prestasi generasi pemuda		Meningkatnya kualitas pendidikan	Pertumbuhan prestasi generasi pemuda	
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	71,78	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,64
Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Indeks Williamson		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur	
Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, industri mikro dan jasa kecil lainnya.	Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi	Gini Ratio		Meningkatnya ekonomi kreatif (ekonomi lokal)	Pertumbuhan Sektor Industri Non Tambang	
Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Petani		Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP	100,44

Prioritas Pembangunan	Tujuan Pemda	Indikator Kinerja	Target 2021	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja	Target 2021
produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.						
Melanjutkan Arah Pembangunan tahun-tahun sebelumnya (pembangunan berkelanjutan)	Meningkatkan Kualitas SDM	Pertumbuhan prestasi generasi pemuda		Meningkatnya Nilai Nilai Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	71,78	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	13,40%
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Indeks Williamson		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi	Gini Ratio	0,292	Meningkatnya ekonomi kreatif (ekonomi lokal)	Pertumbuhan Sektor Industri Non Tambang	
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	15,03%	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	
	Meningkatkan kesejahteraan petani	Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Petani		Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP	100,44
	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi Morowali		Menurunya Konflik SARA	Indeks Toleransi Morowali	

Prioritas Pembangunan	Tujuan Pemda	Indikator Kinerja	Target 2021	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja	Target 2021
	Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	
				Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	
				Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	

4.2.3. KONEKTIVITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN, SASARAN PEMBANGUNAN, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dikemukakan di atas, kemudian akan di turunkan ke tujuan dan sasaran perangkat daerah sehingga akan di ketahui setiap prioritas pembangunan akan di jalankan oleh urusan daerah berdasarkan prioritas. Adapun konektivitas prioritas pembangunan sampai dengan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemda	Sasaran Perangkat Daerah
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Sekolah
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Rata Rata Harapan Hidup
Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik
		Meningkatnya infrastruktur layanan dasar dalam kondisi baik
Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, industri mikro dan jasa kecil lainnya.	Meningkatnya ekonomi kreatif (ekonomi lokal)	Meningkatnya produksi agroindustri
		Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
		Meningkatnya kunjungan wisatawan
Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan pertanian yang berkualitas
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan
Melanjutkan Arah Pembangunan tahun-tahun	Meningkatnya Nilai Nilai Kebudayaan	Meningkatnya pelesetarian seni dan budaya

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemda	Sasaran Perangkat Daerah
sebelumnya (pembangunan berkelanjutan)		Meningkatnya Prestasi pemuda dan Olah raga
		Meningkatnya Minat dan Budaya Baca
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pengendalian Penduduk
		Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Meningkatnya Kesejahteraan Anak
		Meningkatnya kemandirian Desa
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Desa Tangguh Bencana
	Meningkatkan ekonomi kreatif (ekonomi lokal)	Stabilitas harga kebutuhan pokok
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas tenaga kerja
		Meningkatnya realisasi investasi kualitas pelayanan perizinan
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan transmigran
	Menurunnya Konflik SARA	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama
	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
		Menurunnya Konflik Sosial
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Daerah
		Meningkatnya Kapasitas Kinerja Sekretariat DPRD
		Terciptanya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemda	Sasaran Perangkat Daerah
		Meningkatnya pelayanan prima hasil kegiatan statistik
		Meningkatnya pelayanan Persandian
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendaapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada peengguna SPBE
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan

Adapun terget kinerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mencapai prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Prioritas Pembangunan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target 2021
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah.	Meningkatnya Partisipasi Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	9,23
		Harapan Lama Sekolah	12,96
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.	Meningkatnya Rata Rata Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	68,64

Prioritas Pembangunan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target 2021
Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Ke Puan Dalam Kondisi Baik	20,06%
		Persentase Infrastruktur Layanan Dasar Dalam Kondisi Baik	
Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, industri mikro dan jasa kecil lainnya.	Meningkatnya produksi agroindustri	Pertumbuhan Nilai Produksi Agroindustri	100%
	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omset Per Koperasi dan UMKM	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Rata-Rata Lama Tinggal	
Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan pertanian yang berkualitas	NTP Pertanian	100,44
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan	NTP Perikanan	100,44
Melanjutkan Arah Pembangunan tahun-tahun sebelumnya (pembangunan berkelanjutan)	Meningkatnya pelesetarian seni dan budaya	Indeks Kebudayaan	
	Meningkatnya Prestasi pemuda dan Olah raga	Persentase Organisasi yang berprestasi	50%
	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca	Pertumbuhan Pemustaka	0
	Menurunnya angka kelahiran	Tingkat Penurunan TFR	na
	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS Yang madniri	0
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	0
	Meningkatnya Kesejahteraan Anak	Indeks Kesejahteraan Anak	0
	Meningkatnya kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0
	Desa Tangguh Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	
	Stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi/perubahan harga barang pokok di	1%

Prioritas Pembangunan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target 2021
		pasar	
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,56%
	Meningkatnya realisasi investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	0
	Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Pendapatan Perkapita Masyarakat Transmigran	
	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Jumlah Konflik SARA	0
		Jumlah Lembaga keagamaan yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan	na
	Menurunnya Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang tertangani	0,32%
	Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD Yang Memiliki Nilai AKIP A	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	na
	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan tepat waktu	
	Terciptanya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	0,01%
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	0
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pembangunan Wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Profil Statistik yang dipublikasikan	
	Meningkatnya pelayanan Persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan	0

Prioritas Pembangunan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target 2021
	dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	100%
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendaapatan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	26%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan Daerah	Maturitas SPIP	Level 2
	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dan Dokumen Kependudukan	na
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada peengguna SPBE	Indeks SPBE	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	IKM Perizinan	

4.2.4. KONEKTIVITAS SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN URUSAN DAERAH

Setelah mengetahui target indikator kinerja dari setiap sasaran perangkat daerah, maka selanjutnya kita akan mengelompokkan sasaran perangkat daerah dengan urusan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabe 4.6. konektivitas sasarang perangkat daerah dengan urusan daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan dan pemerataan kualitas guru antar wilayah.	Meningkatnya Partisipasi Sekolah	Pendidkan
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui optimalisasi sarana	Meningkatnya Rata Rata Harapan Hidup	Kesehatan

dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang handal serta penurunan angka stunting.		
Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum
Peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan ekonomi sektor UMKM, industri mikro dan jasa kecil lainnya.	Meningkatnya produksi agroindustri	Perindustrian
	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Koperasi Dan UKM
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pariwisata
Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi sarana dan prasarana, produksi dan produktivitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan pertanian yang berkualitas	Pangan Dan Pertanian
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan	Perikanan
Melanjutkan Arah Pembangunan tahunan sebelumnya (pembangunan berkelanjutan)	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Kebudayaan
	Meningkatnya Prestasi pemuda dan Olah raga	Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca	
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Kependudukan
	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat	Sosial
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perempuan
	Meningkatnya Kesejahteraan Anak	Perlindungan Anak
	Meningkatnya kemandirian Desa	Pemerintahan Desa
	Desa Tangguh Bencana	Pekerjaan Umum
	Stabilitas harga kebutuhan	Perdagangan

	pokok	
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Ketenagakerjaan
	Meningkatnya realisasi investasi kualitas pelayanan perizinan	Penanaman Modal
	Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Transmigrasi
	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	
	Menurunnya Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	
	Menurunnya Konflik Sosial	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Daerah	Perencanaan
	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Sekretariat DPRD	
	Terciptanya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kepegawaian
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Perpustakaan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Kewilayahan
	Meningkatnya pelayanan prima hasil kegiatan statistik	
	Meningkatnya pelayanan Persandian	
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendaapatan Daerah	Pendapatan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan Daerah	Pengawasan
	Meningkatnya kualitas	

	Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kependudukan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada peengguna SPBE	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Perizinan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui setiap prioritas pembangunan akan di capai melalui masing-masing sasaran perangkat daerah dan juga di ketahui urusan daerah yang menjadi kewenangan untuk mencapai masing-masing prioritas pembangunan daerah sehingga menjadi jelas alur pencapaian pada setiap prioritas pembangunan tersebut.



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021**

**BAB
V**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2021 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2019, perkiraan kedudukan tahun 2021 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2019-2023. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Prioritas Daerah Tahun 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					321.849.467.849,00			656.583.651.851,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					44.829.758.423,00			121.065.634.947,00
1	01	02	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					44.829.758.423,00			121.065.634.947,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	41.265.616.973,00		100	118.496.637.947,00
1	01	02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	19.727.753.549,00		100	58.377.155.044,00
			2.01			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka melanjutkan ke jenjang SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Kelulusan SD/MI	%	Wilayah kabupaten Morowali	100			100	
1	01	02		01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rasio sekolah perjumlah penduduk usia sekolah	unit	Wilayah kabupaten Morowali	1:45	462.240.000,00		1:40	21.581.831.292,00
1	01	02		02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rasio siswa per ruang kelas	unit	Wilayah Kabupaten Morowali	1:38	2.849.040.000,00		1:33	3.391.166.798,00
1	01	02		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah yang memiliki ruang guru/kepala sekolah/TU	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	924.480.000,00		75	2.574.000.000,00
1	01	02		04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki ruang UKS	unit	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02		05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan	unit	Wilayah Kabupaten Morowali	50	570.900.000,00		75	370.641.600,00
1	01	02		06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Presentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (jamban)	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	389.400.000,00		75	585.999.199,00
						Presentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (tugu batas)	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	509.400.000,00		75	630.000.000,00
1	01	02		07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentasi sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	159.270.570,00		75	600.000.000,00
1	01	02		08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentasi rehabilitasi sekolah yang rusak Sedang/Berat Ruang Kelas	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50%	4.401.385.569,00		75%	2.025.828.317,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentasi rehabilitasi ruang guru/kepsek/TU yang rusak Sedang/Berat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentasi rehabilitasi ruang perpustakaan yang rusak Sedang/Berat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentasi rehabilitasi rusak Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentasi rehabilitasi rusak Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Rasio jumlah siswa dan jumlah guru	unit	Wilayah Kabupaten Morowali	1:3	1.050.245.660,00		1:2	10.276.200.000,00
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentasi ketersediaan alat rumah tangga sekolah	Rasio	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase pengadaan Perlengkapan Sekolah	unit	-	-	0,00		-	0,00
						Rasio software pembelajaran	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		1:3	208.080.000,00
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentasi siswa miskin yang menerima bantuan seragam sekolah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		60	135.000.000,00
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Presentasi jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	unit	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentasi Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	orang	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentasi Alat Praktik dan Peraga Siswa	unit	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentasi Peserta Didik yang mengikuti ujian	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	254.370.000,00		100	430.012.838,00
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentasi sekolah yang melakukan evaluasi	%	-	-	0,00		-	0,00
						Cakupan pelaksanaan sosialisasi dana BOS dan BSM	Sekolah	Wilayah Kabupaten Morowali	174	221.038.750,00		174	104.040.000,00
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase siswa berprestasi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	348.770.000,00		-	0,00
						Persentase prestasi kompetisi yang diikuti	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio tenaga Pustakawan	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:3	0,00		1:3	561.816.000,00
						Rasio tenaga pendidik	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:28	7.229.600.000,00		1:28	14.528.781.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan	orang	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentasi sekolah terakreditasi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	70	357.613.000,00		80	104.040.000,00
						Jumlah peserta Pelatihan Operator DAPODIK Pendidikan	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	184	0,00		184	156.600.000,00
						Jumlah Dokumen Profil Pendidikan	Dokumen	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	113.118.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	14.643.430.249,00		100	51.835.620.103,00
						APM SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	Wilayah kabupaten Morowali	100			100	
						Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Kelulusan SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rasio sekolah perjumlah penduduk usia sekolah	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:65	853.266.150,00		1:60	14.387.887.528,00
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rasio siswa per ruang kelas	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:50	1.106.452.944,00		1:45	2.260.777.866,00
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah yang memiliki ruang guru/kepala sekolah/TU	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	480.260.138,00		75	3.861.000.000,00
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki ruang UKS	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	465.246.138,00		75	247.094.400,00
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Presentase sekolah yang memiliki Laboratorium Computer	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		75	2.516.240.088,00
						Presentase sekolah yang memiliki Laboratorium IPA	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	491.839.564,00		75	629.060.022,00
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Presentase sekolah yang memiliki Ruang Serba Guna/Aula	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentasi sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	159.216.000,00		75	400.000.000,00
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Presentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (tugu batas)	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	214.000.000,00		75	420.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Presentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (jamban)	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		75	390.666.133,00
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentasi rehabilitasi ruang kelas yang rusak Sedang/Berat	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	733.055.181,00		75	1.350.552.212,00
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentasi rehabilitasi perpustakaan yang rusak Sedang/Berat	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		75	738.298.465,00
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentasi rehabilitasi laboratorium yang rusak Sedang/Berat	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	249.354.014,00		75	441.163.732,00
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Rasio jumlah siswa dan jumlah guru	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:3	757.470.120,00		1:2	6.850.800.000,00
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentasi sekolah yang memiliki peraga pembelajaran	%	-	-	0,00		50	111.000.000,00
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentasi siswa miskin yang menerima perlengkapan sekolah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		60	90.000.000,00
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Persentasi jumlah Bangunan Gedung dan Ruangan Sekolah yang terpelihara	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		100	135.000.000,00
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Rasio Buku elektronik	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:10	2.455.000.000,00		1:5	5.722.200.000,00
						Rasio jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Rasio software pembelajaran	%	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		75	208.080.000,00
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentasi Peserta Didik yang mengikuti ujian	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	330.760.000,00		100	645.019.257,00
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentasi siswa berprestasi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	441.110.000,00		100	520.200.000,00
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio tenaga perpustakaan	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:3	414.000.000,00		1:3	224.726.400,00
						Jumlah tenaga Pendidik	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	320	5.492.400.000,00		340	9.685.854.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	6.143.665.675,00		100	6.743.962.000,00
						Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Putus Sekolah PAUD	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Angka Kelulusan PAUD	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rasio sekolah perjumlah penduduk usia sekolah PAUD	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:15	791.874.925,00		1:15	749.700.000,00
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Presentase sekolah PAUD yang memiliki pagar sekolah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	979.000.000,00		50	1.000.000.000,00
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Presentasi pengadaan Perlengkapan PAUD (sarana	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	200.000.000,00		75	224.400.000,00
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima biaya operasional (BOP)	Lembaga	Wilayah Kabupaten Morowali	-	0,00		75	1.100.988.000,00
						Jumlah kegiatan Hari Anak Nasional	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	52.020.000,00
						Jumlah lembaga PAUD penerima biaya operasional (BPP)	Siswa	Wilayah Kabupaten Morowali	75	2.015.852.500,00		75	102.000.000,00
						Jumlah Kegiatan sosialisasi BOP PAUD	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	104.040.000,00
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah kegiatan pemetaan mutu PAUD	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	220.041.750,00		1	520.200.000,00
						Persentasi PAUD yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi	%	Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten	50%	0,00		75%	5.202.000,00
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rasio guru dan tenaga kependidikan PAUD	Rasio	Wilayah Kabupaten Morowali	1:30	1.200.000.000,00		1:30	2.143.260.000,00
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rasio pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	%	-	-	0,00		-	0,00
						Jumlah kegiatan peningkatan Mutu PTK pada Satuan Pendidikan PAUD	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	140.655.000,00		75	70.992.000,00
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase mutu dan Kualitas Program pendidikan anak usia dini	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	156.060.000,00
						Jumlah Kegiatan penyusunan kebijakan peraturan lembaga PAUD	Kegiatan	-	-	0,00		1	75.000.000,00
						Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama PAUD	Kegiatan	-	-	0,00		1	50.000.000,00
						Persentase kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD	%	-	1-	0,00		50	100.000.000,00
						Jumlah Kegiatan gebyar PAUD	Kegiatan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	1	596.241.500,00		1	78.030.000,00
						Persentasi pengetahuan dan keterampilan pengelola PAUD	%	-	-	0,00		75	104.040.000,00
						Persentasi sekolah terakreditasi	%	-	-	0,00		95	30.000.000,00
						Jumlah Kegiatan apresiasi bunda PAUD	Kegiatan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	1	0,00		1	78.030.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentasi lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	750.767.500,00		100	1.539.900.800,00
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentasi Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	%	-	-	0,00		-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah lembaga pendidikan Nonformal/Kesetaraan penerima Biaya operasional (SKB dan PKBM)	Sekolah	-	-	0,00		9	649.800.000,00
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peresentasi proses belajar mengajar Nonformal/Kesetaraan	%	-	-	0,00		75	100.000.000,00
						Jumlah Kegiatan pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket C	Kegiatan	Wilayah kabupaten Morowali	1	74.720.000,00		1	75.000.000,00
						Jumlah Kegiatan pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket B	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	50.000.000,00
						Jumlah Kegiatan pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket A	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	50.000.000,00
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentasi Nonformal/Kesetaraan yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	39.250.000,00		75	35.000.000,00
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	75.000.000,00		75	75.000.000,00
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentasi Kelembagaan terakreditasi Nonformal/Kesetaraan	%	-	-	0,00		-	0,00
						Jumlah kegiatan Kursus dan kelembagaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	561.797.500,00		1	54.100.800,00
						Jumlah lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengembangkan pendidikan kecakapan hidup	Sekolah	-	-	0,00		5	250.000.000,00
						Jumlah kegiatan publikasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	50.000.000,00
						Jumlah kegiatan Hari Aksara Internasional	Kegiatan	-	-	0,00		1	51.000.000,00
						Persentasi pengembangan data dan informasi pendidikan Non formal/Kesetaraan	%	-	-	0,00		75	50.000.000,00
						Jumlah kegiatan pengembangan kebijakan pendidikan Non formal/Kesetaraan	Kegiatan	-	-	0,00		1	50.000.000,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan Muak TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	307.414.000,00		100	179.040.000,00
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentasi sekolah yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	-	-	124.210.000,00		-	0,00
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentasi sekolah yang menyusun kompetensi dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	-	-	0,00		-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentasi sekolah yang menyusun Silabus Muatan Lokal Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rasio tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku	-	-	0,00		-	0,00
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentasi guru mulok mengikuti pelatihan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	25	124.210.000,00		-	0,00
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentasi lembaga yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	183.204.000,00		100	179.040.000,00
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah lembaga yang menyusun kompetensi dasar Muatan Lokal Pendidikan	Sekolah	Wilayah Kabupaten Morowali	75	162.994.000,00		75	104.040.000,00
						Persentasi terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	Wilayah kabupaten Morowali	50	20.210.000,00		75	75.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	3.256.727.450,00		100	2.389.957.000,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru/Murid Sekolah TK/RA	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	3.256.727.450,00		100	2.389.957.000,00
						Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Rasio Guru/Murid Sekolah SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100			100	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompetensi	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	3.256.727.450,00		75	208.080.000,00
						Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sertifikasi	%	-	-	0,00		75	50.000.000,00
						Persentasi pembinaan Kelompok Kerja Guru SD/MI	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	72.828.000,00
						Persentasi pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	104.040.000,00
						Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	15	0,00		15	62.424.000,00
						Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S2	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	15	0,00		15	249.696.000,00
						Persentasi PTK SD/MI, SMP/MTs yang memiliki kemampuan IT	%	-	-	0,00		75	377.400.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Persentasi kepala sekolah dan calon kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs yang memiliki sertifikat kepala sekolah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	255.500.000,00
						Persentasi ketersediaan penerima TPG, TKG dan Tamsil	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	231.525.000,00
						Jumlah tenaga pendidik PAUD yang berkualitas	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	75	0,00		75	70.992.000,00
						Persentasi lembaga PAUD yang berkualitas	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	156.060.000,00
						Persentasi Pemberdayaan tendik pendidikan non formal	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	62.424.000,00
						Persentase perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	-	-	0,00		-	0,00
						Persentase kompetensi pustakawan SD/MI dan SMP/MTs	%	Wilayah Kabupaten Morowali	50	0,00		75	208.080.000,00
						Jumlah kegiatan pendataan berbasis web	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	228.888.000,00
						Jumlah kegiatan pengembangan Dapodik PAUD	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		1	52.020.000,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah pengendalian perizinan pendidikan	%	-	0	0,00		0	0,00
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentasi penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentasai Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentasi pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentasi penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentasi penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentasi pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentasi pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Pengembangan Bahasa dan sastra	Rasio	-	0	0,00		0	0,00
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan	Rasio	-	-	0,00		-	0,00
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketersediaan kamus bahasa daerah terhadap siswa	Rasio	-	-	0,00		-	0,00
1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta didik terhadap bahasa daerah	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	%	-	-	0,00		-	0,00
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Rasio ketersediaan Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Rasio	-	-	0,00		-	0,00
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	0,00		-	0,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					149.442.200.899,00			171.428.340.858,00
1	02	03	01		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					55.532.230.412,00			38.965.125.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	Kab. Morowali	100	32.128.236.998,00		100	30.000.000,00
1	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	%	Kab. Morowali	100	27.030.000,00		100	30.000.000,00
1	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	%	Kab. Morowali	100	27.030.000,00		100	30.000.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan					29.740.971.812,00			0,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	-	100	29.740.971.812,00		100	0,00
1	02	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase Dokumen Keuangan yang tersusundan kegiatan yang terlaksana	%	Kab. Morowali	100	2.360.235.186,00		100	0,00
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	144.000.000,00		100	0,00
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	189.000.000,00		100	0,00
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	1.577.685.186,00		100	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	02	01		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	35.000.000,00		100	0,00
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	33.000.000,00		100	0,00
1	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	36.750.000,00		100	0,00
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	DKPPKBD	100	344.800.000,00		100	0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	Angka	DKPPKBD	0	13.239.594.124,00		0	24.937.125.000,00
						Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	DKPPKBD	0			0	
						Angka Kesakitan	%	DKPPKBD	40			39	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota					0,00			0,00
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas								
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas								
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin								
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai								
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	DKPPKBD	100	13.187.357.124,00		100	24.537.125.000,00
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia Produktif (15–59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	Kab. Morowali	100	45.579.000,00		100	115.000.000,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat								
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	Kab. Morowali	100	42.665.000,00		100	90.000.000,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	Ka. Morowali	100	13.770.000,00		100	500.000.000,00
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	Kab. Morowali	80	0,00		90	86.250.000,00
						Prevalensi stunting	%	DKPPKBD	16	306.500.000,00		15	991.875.000,00
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah Raga	%	DKPPKBD	70	34.610.000,00		75	20.000.000,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penduduk dengan akses air minum yang layak	%	Kab. Morowali	100	122.915.000,00		100	40.000.000,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	%	Kab. Morowali	100	97.882.600,00		100	250.000.000,00
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Pada Balita	%	Kab morowali	65	0,00		70	66.000.000,00
						Persentase Cakupan Penanganan Kasus Diare	%	kab. morowali	100	0,00		100	66.000.000,00
						Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	%	Kab. Morowali	100	0,00		100	66.000.000,00
						Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini Hepatitis B sesuai standar	%	Kab. Morowali	75	0,00		78	66.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						(Annual ParaCite Indeks - API) Malaria Per 1000 Penduduk	%	Kab. Morowali	<1	112.440.000,00		<1	66.000.000,00
						Cakupan Pelayanan Orang dengan Gigitan Hewan Penyebab Rabies (GHPR) sesuai Standar	%	Kab. Morowali	100	0,00		100	66.000.000,00
						Prevalensi Penderita Kusta	%	Kab. Morowali	<1	0,00		<1	66.000.000,00
						Prevalensi Kecacingan pada Anak Usia 1 - 12 Tahun	%	Kab. Morowali	<10%	0,00		<10%	66.000.000,00
						Persentase Wanita Usia 30-50 Thn yang dideteksi Dini Kanker Serviks dan Pavudara	%	Kab. Morowali	45	0,00		50	66.000.000,00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan Kesehatan	%	Kab. Morowali	85	9.376.495.524,00		90	17.000.000.000,00
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas memiliki biaya Operasional	%	Kab. Morowali	100	2.938.360.000,00		100	4.600.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	Kab. Morowali	100	96.140.000,00		100	250.000.000,00
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data dan terintegrasi	%	DKPPKBD	100	52.237.000,00		100	400.000.000,00
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Data	%	Kab. Morowali	100	18.857.000,00		100	200.000.000,00
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Data	%	Kab. Morowali	100	33.380.000,00		100	200.000.000,00
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet								
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	Angka	Kab. Morowali	0	9.848.064.290,00		0	13.125.000.000,00
1	02	03	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	%	Kabupaten Morowali	100	9.745.818.290,00		100	13.000.000.000,00
1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	Kab. Morowali	100	9.745.818.290,00		100	13.000.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	02	03	2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00			0,00
1	02	03	2.04	01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1	02	03	2.04	02 Sertifikasi Tenaga Kesehatan								
1	02	03	2.05	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktek	%	Kab. Morowali	100	102.246.000,00		100	125.000.000,00
1	02	03	2.05	01 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang Melaksanakan Tugas Sesuai Standar	%	Kab. Morowali	100	102.246.000,00		100	125.000.000,00
1	02	03	2.05	02 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, U MOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	%	DKPPKBD	85	154.850.000,00		90	183.000.000,00
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, U MOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	%	Kab. Morowali	100	143.440.000,00		100	150.000.000,00
1	02	04	2.01	02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, U MOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	%	Kab. Morowali	100	143.440.000,00		100	150.000.000,00
1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang di periksa dan memenuhi Syarat	%	Kab. Morowali	85	11.410.000,00		90	33.000.000,00
1	02	04	2.04	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa	Jumlah TPM yang memiliki Sertifikat Laik Higiene	%	Kab. Morowali	85	11.410.000,00		90	16.500.000,00
					Persentase TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat	%	Kab. Morowali	85	0,00		90	16.500.000,00
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga sehat	%	Kab. Morowali	20	161.485.000,00		10	690.000.000,00
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah kebijakan berwawasan kesehatan	%	Kab. Morowali	9	161.485.000,00		11	690.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022		
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan tema pesan komunikasi informasi edukasi dalam gerakan masvrkat hidup sehat	%	Kab. Morowali	8	161.485.000,00		9	690.000.000,00
1	02	01	01		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI				86.980.366.833,00			125.544.307.850,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Tahun	RSUD Morowali	100%	45.776.616.833,00		100%	34.150.377.850,00
1	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	Tahun	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	45.500.000,00
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen yang tersusun	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	10.000.000,00
1	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	10.000.000,00
1	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peresentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	10.000.000,00
1	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	15.500.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Presentase Dokumen Keuangan yang tersusun dan kegiatan yang terlaksana	Dokumen	RSUD Morowali	100%	28.174.584.433,00		100%	14.993.562.570,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Tahun	RSUD Morowali	100%	28.174.584.433,00		100%	14.688.562.570,00
1	02	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	5.000.000,00
1	02	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	150.000.000,00
1	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	Dokumen	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	150.000.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	Tahun	RSUD Morowali	100%	17.602.032.400,00		100%	19.111.315.280,00
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Honorarium	Orang/ Tahun	RSUD Morowali	100%	17.126.132.400,00		100%	18.234.683.280,00
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	Tahun	RSUD Morowali	100%	900.000,00		100%	900.000,00
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Presentase Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	Tahun	RSUD Morowali	100%	475.000.000,00		100%	875.732.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia harapan Hidup	Tahun	RSUD Morowali	100%	41.203.750.000,00		100%	89.597.200.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	paket	RSUD Morowali	100%	1.203.750.000,00		Tpe B	38.897.200.000,00
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	paket	RSUD Morowali	2	0,00		2	900.000.000,00
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Tipe Rumah Sakit	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	9.197.200.000,00
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Gedung dan bangunan	paket	RSUD Morowali	100%	200.000.000,00		100%	400.000.000,00
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	paket	RSUD Morowali	100%	200.000.000,00		100%	1.200.000.000,00
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	RSUD Morowali	100%	803.750.000,00		100%	800.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	20.000.000.000,00
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Alat Kalibrasi	paket	0	100%	0,00		100%	500.000.000,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	3.000.000.000,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan BHP	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	2.000.000.000,00
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	200.000.000,00
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	200.000.000,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	500.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	paket	RSUD Morowali	100%	40.000.000.000,00		100%	50.700.000.000,00
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indek Kepuasan Masyarakat	Tahun	RSUD Morowali	100%	40.000.000.000,00		100%	50.000.000.000,00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Tingkatkan Akreditasi	unit	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	700.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	paket	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	1.796.730.000,00
1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktek	Tahun	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	1.796.730.000,00
1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun	Orang/ Tahun	RSUD Morowali	100%	0,00		100%	1.796.730.000,00
1	02	01	02		RUMAH SAKIT PRATAMA					6.929.603.654,00			6.918.908.008,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi yang tertib (%)	%	RSU PRATAMA	100	5.345.174.954,00		100	5.633.908.008,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang baik (%)	%	RSU PRATAMA	100	1.929.603.654,00		100	2.468.908.008,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji Dan Tunjangan ASN	%	RSU PRATAMA	100	1.929.603.654,00		100	2.468.908.008,00
1	02	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase kegiatan Rutin yang terlaksana	%	RSU PRATAMA	90	3.406.131.300,00		100	3.150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	RSU PRATAMA	100	60.000.000,00		100	50.000.000,00
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	unit	RSU PRATAMA	100	50.000.000,00		5	8.000.000,00
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	persentase jumlah pegawai Honoror	%	RSU PRATAMA	100	2.989.242.000,00		100	2.687.000.000,00
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	RSU PRATAMA	100	37.359.000,00		100	80.000.000,00
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	RSU PRATAMA	100	50.526.300,00		100	45.000.000,00
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	RSU PRATAMA	100	15.500.000,00		100	70.000.000,00
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kantor atau Rumah sakit yang teraliri listrik (%)	%	RSU PRATAMA	100	11.500.000,00		100	10.000.000,00
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase kebutuhan makan minum Pegawai (%)	%	RSU PRATAMA	100	44.700.000,00		100	25.000.000,00
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	RSU PRATAMA	100	147.304.000,00		22	150.000.000,00
1	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan operasional RSU Pratama paku	unit	RSU PRATAMA	1 Unit	0,00		1 Unit	25.000.000,00
1	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	%	RSU PRATAMA	85	9.440.000,00		85	15.000.000,00
1	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Pegawai yang memakai pakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	%	RSU PRATAMA	100	4.740.000,00		0	0,00
1	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase Kebutuhan pakaian Khusus hari-hari tertentu (%)	%	RSU PRATAMA	100	4.700.000,00		100	15.000.000,00
1	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PIM III)	orang	RSU PRATAMA	0	0,00		0	0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Balita (AKB)	%	RSU PRATAMA	0	1.496.388.700,00		0	1.235.000.000,00
						Angka Kematian Ibu (AKI)	%	RSU PRATAMA	0			0	
						Angka Kesakitan	%	RSU PRATAMA	40			39	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	Kategori	RSU PRATAMA	Kategori D	930.008.700,00		Kategori D	935.000.000,00
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung Rumah Sakit yang Dipelihara	Gedung	RSU PRATAMA	1 G	5.000.000,00		1 G	10.000.000,00
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	jumlah gedung Rumah Dinas yang Dipelihara	Gedung	RSU PRATAMA	12 g	0,00		12 G	10.000.000,00
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Kebutuhan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	RSU PRATAMA	71	0,00		85	20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Kebutuhan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	RSU PRATAMA	71	20.000.000,00		85	25.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Kebutuhan Alat Kesehatan Dan alat Penunjang Medik	%	RSU PRATAMA	55	0,00		65	100.000.000,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase kebutuhan obat rumah sakit	%	RSU PRATAMA	65	400.000.000,00		75	500.000.000,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Ketersediaan BHP	%	RSU PRATAMA	65	380.008.700,00		85	200.000.000,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	%	RSU PRATAMA	56	125.000.000,00		80	70.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	RSU PRATAMA	85	566.380.000,00		87	300.000.000,00
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	RSU PRATAMA	90	566.380.000,00		95	250.000.000,00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	paket	RSU PRATAMA	1 Pkt	0,00		1 pkt	50.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	%	RSU PRATAMA	85	88.040.000,00		85	50.000.000,00
1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	%	RSU PRATAMA	100	88.040.000,00		90	50.000.000,00
1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun	%	RSU PRATAMA	67	88.040.000,00		83	50.000.000,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					81.686.318.500,00			270.268.368.438,00
1	03	01	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					81.686.318.500,00			270.268.368.438,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	DPUPRD	100	9.860.863.250,00		100	10.348.776.938,00
1	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	DPUPRD	100	109.346.000,00		100	180.000.000,00
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen renstra dan Renja Perangkat Daerah	%	DPUPRD	100	2.486.000,00		100	15.000.000,00
1	03	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase jumlah Dokumen perencanaan program	%	DPUPRD	100	2.500.000,00		100	25.000.000,00
1	03	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen perencanaan program	%	DPUPRD	100	4.360.000,00		100	20.000.000,00
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	%	Kab. Morowali	100	100.000.000,00		100	120.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan					5.631.382.294,00			5.227.137.490,00
1	03	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	5.623.882.294,00		100	5.199.137.490,00
1	03	01	2.02	03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi	%	DPUPRD	100	2.500.000,00		100	8.000.000,00
1	03	01	2.02	04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	%	DPUPRD	100	2.500.000,00		100	10.000.000,00
1	03	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di Susun	%	DPUPRD	100	2.500.000,00		100	10.000.000,00
1	03	01	2.03	Administrasi Umum					3.876.199.956,00			4.549.639.448,00
1	03	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	%	DPUPRD	100	9.996.000,00		100	15.000.000,00
1	03	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	%	DPUPRD	100	46.599.996,00		100	50.000.000,00
1	03	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Tersedia	%	DPUPRD	100	25.000.000,00		100	35.000.000,00
1	03	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%	DPUPRD	100	122.000.000,00		100	126.000.000,00
1	03	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan yang tersedia	%	DPUPRD	100	2.369.367.960,00		100	2.823.639.448,00
1	03	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang tersedia	%	DPUPRD	100	35.000.000,00		100	40.000.000,00
1	03	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia	%	DPUPRD	100	50.000.000,00		100	35.000.000,00
1	03	01	2.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	%	DPUPRD	100	44.200.000,00		100	55.000.000,00
1	03	01	2.03	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	%	DPUPRD	100	9.997.000,00		100	15.000.000,00
1	03	01	2.03	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	%	DPUPRD	100	150.000.000,00		100	175.000.000,00
1	03	01	2.03	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan Dan Minuman	%	DPUPRD	100	61.239.000,00		100	60.000.000,00
1	03	01	2.03	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	%	Dalam dan Luar Daerah	100	900.000.000,00		100	1.000.000.000,00
1	03	01	2.03	20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pengadaan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	%	DPUPRD	100	38.000.000,00		100	105.000.000,00
1	03	01	2.03	25 Pengadaan Mebeleur	Persentase meubeleur yang tersedia	%	DPUPRD	100	14.800.000,00		100	15.000.000,00
1	03	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					243.935.000,00			392.000.000,00
1	03	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	DPUPRD	100	0,00		100	45.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	03	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase pengadaan pakaian kerja lapangan yang Disediakan	%	DPUPRD	100	43.935.000,00		100	47.000.000,00
1	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pejabat Struktural yang mengikuti diklat PIM	%	Luar Daerah	100	50.000.000,00		2	50.000.000,00
					Jumlah pejabat Struktural yang mengikuti diklat PIM II		orang	Luar Daerah	Tolong diisi yang benar	0,00		0	0,00
					Jumlah pejabat Struktural yang mengikuti diklat PIM III		orang	Luar Daerah	Tolong diisi yang benar	0,00		2	0,00
					Jumlah pejabat Struktural yang mengikuti diklat PIM IV		orang	Luar Daerah	Tolong diisi yang benar	0,00		0	0,00
1	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	Luar Daerah	100	0,00		100	100.000.000,00
1	03	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang mengikuti bimbingan tehnik implementasi peraturan perundang-undangan	%	Luar Daerah	100	150.000.000,00		100	150.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Konidisi Baik	%	Kab. Morowali	9,28	11.539.102.500,00		15,6	76.480.150.000,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseKegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	%	Kab. Morowali	7,24	8.259.515.000,00		12,45	62.355.150.000,00
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya								
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku								
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai								
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya								
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Tanggul sungai yang dibangun	%	Kec. Bumi Raya, Kec. Wita Ponda, Kec. Bungku Barat, Kec. Bungku Tengah, Kec. Bungku Timur, Kec. Bahodopi, Kec. Bungku Pesisir, Kec. Menken	1,25	2.380.000.000,00		5,00	15.000.000.000,00
					Panjang tanggul sungai yang dibangun ditahun-n (M)		M	-	1500	0,00		6000	0,00
					Panjang tanggul sungai yang harus dibangun (M)		M	-	120000	0,00		120000	0,00
1	03	02	2.01	17	Pembangunan Breakwater	Persentase Breakwater yang dibangun	%	Kec. Bumi Raya, Kec. Bungku Tengah	0,29	2.207.950.000,00		3,20	22.000.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Panjang Breakwater yang dibangun tahun-n (M)	M	-	360	0,00		4000	0,00
						Panjang Breakwater yang harus dibangun (M)	M	-	125000	0,00		125000	0,00
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya yang dibangun	%	Kec. Wita Ponda, Kec. B. Timur, Kec. B. Selatan, Kec. Menkep	0,87	1.745.895.000,00		5,00	15.442.650.000,00
						Panjang Seawall yang dibangun (M)	M	-	1000	0,00		5719,5	0,00
						Panjang Seawall yang harus dibangun (M)	M	-	114390	0,00		114390	0,00
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase Tanggul Sungai yang direhabilitasi	%	Kec. Bungku Timur	4,04	201.750.000,00		15,18	800.000.000,00
						Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi (M)	M	-	133	0,00		5000	0,00
						Panjang tanggul sungai yang harus direhabilitasi (M)	M	-	3294	0,00		3294	0,00
1	03	02	2.01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Persentase Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai	%	Kec. Wita Ponda, Kec. B. Barat, Kec. B. Tengah, Kec. B. Timur, Kec. Bahodopi, Kec. B. Pesisir	3,07	1.723.920.000,00		7,00	9.112.500.000,00
						Panjang Sungai yang dinormalisasi (M)	M	-	4600	0,00		10500	0,00
						Panjang Sungai yang harus dinormalisasi (M)	M	-	150000	0,00		150000	0,00
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai								
1	03	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Sawah yang terairi	%	Kab. Morowali	11,31	3.279.587.500,00		18,75	14.125.000.000,00
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentasi Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	%	Kec. Bumi Raya	0,84	353.825.000,00		10.22%	4.250.000.000,00
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun (M)	M	-	206	0,00		2500	0,00
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus dibangun (M)	M	-	24470	0,00		24470	0,00
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	%	Kec. Bumi Raya, Kec. B. Tengah, Kec. B. Timur	1,57	1.662.000.000,00		6,06%	6.375.000.000,00
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (M)	M	-	971	0,00		3750	0,00
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus ditingkatkan (M)	M	-	61907	0,00		61907	0,00
1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi								
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentasi Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	%	Kec. B.Barat, Kec. B. Timur	6,67	505.630.000,00		13,33%	1.000.000.000,00
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (M)	M	-	1000	0,00		2000	0,00
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus direhabilitasi (M)	M	-	15000	0,00		15000	0,00
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase Bendung Irigasi yang direhabilitasi (DI)	%	Kec. Bungku Tengah	4,35	109.015.000,00		4,35%	200.000.000,00
						Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi (DI)	DI	-	1	0,00		1	0,00
						Jumlah Bendung Irigasi yang harus direhabilitasi (DI)	DI	-	23	0,00		23	0,00
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentasi Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan terpelihara (DI)	%	Kec. B. Barat, Kec. Bumi Raya, Kec. B. Timur	34,78%	649.117.500,00		100%	2.300.000.000,00
						Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan terpelihara (DI)	DI	-	8	0,00		23	0,00
						Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang harus dioperasikan dan terpelihara (DI)	DI	-	23	0,00		23	0,00
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indeks Kualitas Air Minum	%	Kab. Morowali	6,40	12.120.000.000,00		6,40	7.500.000.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga Berakses air minum	%	Kab. Morowali	7,78	12.120.000.000,00		7,78	7.500.000.000,00
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM								
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM								
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase Unit Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	%	Kec. Menkep, Kec. B. Selatan, Kec. B. Timur	7,78	12.120.000.000,00		7,78	7.500.000.000,00
						Jumlah Unit Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan	RT	-	1500	0,00		1500	0,00
						Jumlah Unit Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan yang seharusnya	RT	-	19285	0,00		19285	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	03	03		07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan								
			2.01										
1	03	03		08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan								
			2.01										
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indeks Kualitas Sanitasi	%	Kab. Morowali	7,98	0,00		8,32	0,00
1	03	05											
1	03	05			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00			0,00
			2.01										
1	03	05		03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
			2.01										
1	03	05		04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
			2.01										
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	Kab. Morowali	16,39	1.162.000.000,00		14,92	12.200.000.000,00
1	03	06											
1	03	06		2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sistem drainase	%	Kec. B. Tengah, Kec. B. Barat, Kec. Bumi Raya, Kec. B. Timur	3,41	1.162.000.000,00		14,92	12.200.000.000,00
1	03	06		01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
1	03	06		05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Persentase Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam kondisi baik(m)	%	Kec. B. Tengah, Kec. B. Barat, Kec. Bumi Raya, Kec. B. Timur	2,54	1.162.000.000,00		14,53	12.000.000.000,00
						Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang akan dibangun	meter	-	1,750	0,00		10000	0,00
						Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Seharusnya dibangun	meter	-	68837	0,00		68837	0,00
1	03	06		07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Persentase Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (m)	%	Kec. B. Tengah	7,69	0,00		8,00	200.000.000,00
						Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang akan direhabilitasi	meter	-	385	0,00		400	0,00
						Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Seharusnya direhabilitasi	meter	-	5000	0,00		5000	0,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentasi Jumlah bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	%	Kab. Morowali	9,84	9.505.235.000,00		4,92	15.950.000.000,00
1	03	08											
1	03	08		2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	%	Kab. Morowali	9,84	9.505.235.000,00		4,92	15.950.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022		
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum	%	Kab. Morowali	9,84	9.485.735.000,00		4,92	15.000.000.000,00
					Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang dibangun	unit	-	6	0,00		3	0,00	
					Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya dibangun	unit	-	61	0,00		61	0,00	
					Persentase dokumen Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang diawasi	%	Kec. Bungku Tengah	9,80	0,00		7,84	600.000.000,00	
					Jumlah dokumen Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang diawasi	Dokumen	-	5	0,00		4	0,00	
					Jumlah dokumen Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya diawasi	Dokumen	-	51	0,00		51	0,00	
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Monitoring Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah	%	Kec. Bungku Tengah	3,28	19.500.000,00		4,92	350.000.000,00
					Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah	Kali	-	4	0,00		36	0,00	
					Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten yang seharusnya	Kali	-	732	0,00		732	0,00	
1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota								
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	Kab. Morowali	8.99	35.718.341.250,00		11.14	144.124.740.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik (Aspal)	%	Kab. Morowali	0,67	35.718.341.250,00		6.43	144.124.740.000,00
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	Kab. Morowali	5,16			15.85	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase Jalan Yang di Bangun	%	Kec. B.Pesisir, Kec. Wita Ponda, Kec. B.Tengah, Kec. Menkep, Kec. Bahodopi, Kec. B. Tengah	1,07	2.023.141.250,00		10.67	17.870.000.000,00
						Panjang Jalan yang dibangun (KM)	Km	-	1,6	0,00		16	0,00
						Panjang Jalan yang seharusnya dibangun (KM)	Km	-	150	0,00		150	0,00
						Peresentase pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%	Kab. Morowali	7.00	0,00		7.00	247.050.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	unit	-	7	0,00		7	0,00
						Jumlah pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya	unit	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%	Kab. Morowali	15.56	0,00		8.89	105.640.000,00
						Jumlah Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	unit	-	7	0,00		4	0,00
						Jumlah Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya (unit)	unit	-	45	0,00		45	0,00
						Persentase pengadaan alat Berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%	Kab. Morowali	4,76	0,00		19,05	1.912.050.000,00
						Jumlah pengadaan alat Berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	unit	-	1	0,00		4	0,00
						Jumlah pengadaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya	unit	-	21	0,00		21	0,00
						Persentase Pemeliharaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	%	-	50	0,00		100	325.000.000,00
						Jumlah Pemeliharaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n (unit)	unit	-	4	0,00		8	0,00
						Jumlah alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya dielihara (unit)	unit	-	8	0,00		8	0,00
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang Jalan Yang di rekonstruksi	%	Kec. Menkep dan Kec. B. Tengah	1,33	28.378.200.000,00		3.88	72.450.000.000,00
						Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km)	Km	-	12	0,00		35.00	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Panjang Jalan yang Keseluruhan (Km)	Km	-	902,25	0,00		902,25	0,00
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi	%	Kab. Morowali	0,93	200.000.000,00		2,67	400.000.000,00
						Panjang jalan yang direhabilitasi (KM)	Km	-	0,7	0,00		2,0	0,00
						Panjang Jalan yang seharusnya direhabilitasi	Km	-	75	0,00		75	0,00
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (rusak berat)	%	-	-	0,00		7,33	440.000.000,00
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan								
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase panjang Jembatan Yang dibangun	%	Kab. Morowali	5,78	4.817.000.000,00		12,22	50.000.000.000,00
						Panjang jembatan yang dibangun (KM)	Km	-	0,05	0,00		0,11	0,00
						Panjang jembatan yang seharusnya dibangun (KM)	Km	-	0,9	0,00		0,9	0,00
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan								
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan								
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase panjang batan yang dipelihara secara berkala (rusak berat)	%	Kab. Morowali	20	300.000.000,00		25	375.000.000,00
						Panjang jembatan yang dipelihara secara berkala (rusak berat) (KM)	Km	-	0,02	0,00		0,025	0,00
						Panjang jembatan yang seharusnya dipelihara secara berkala (rusak berat)	Km	-	0,1	0,00		0,1	0,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks kualitas jasa konstruksi	%	Kab. Morowali dan Luar Daerah	21,22	174.746.500,00		18,44	599.701.500,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	%	Kab. Morowali	22,44	140.626.500,00		16,89	449.701.500,00
1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Persentase Jumlah orang yang melatih	%	Kab. Morowali	10,00	0,00		10,00	70.000.000,00
						Jumlah Tenaga yang melatih n (orang)	Orang/ Tahun	-	3	0,00		3	0,00
						Jumlah Keseluruhan Tenaga yang melatih	Orang/ Tahun	-	30	0,00		30	0,00
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia	%	Palu	33,33	0,00		16,67	239.075.000,00

Kode					Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia di tahun n (orang)	Orang/ Tahun	-	40	0,00		20	0,00
						Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang seharusnya(orang)	Orang/ Tahun	-	120	0,00		120	0,00
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang bersertifikat	%	Kab. Morowali	24	140.626.500,00		24	140.626.500,00
						Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat di tahun n (orang)	Orang/ Tahun	-	60	0,00		60	0,00
						Jumlah Tenaga Terampil di 9 Kecamatan	Orang/ Tahun	-	250	0,00		250	0,00
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Dokumen SOPJasa Konstruksi	%	Kab. Morowali dan Luar Daerah	20,00	34.120.000,00		20,00	150.000.000,00
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Presentase Jumlah Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi (Dokumen)	%	Kab. Morowali dan Luar Daerah	20,00	34.120.000,00		20,00	50.000.000,00
						Jumlah Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi di tahun n (Dokumen)	Dokumen	-	1	0,00		1	0,00
						Jumlah Keseluruhan Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi (Dokumen)	Dokumen	-	5	0,00		5	0,00
						Persentase Jumlah Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	Kab. Morowali dan Luar Daerah	20,00	0,00		20,00	50.000.000,00
						Jumlah Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di tahun n (Dokumen)	Dokumen	-	1	0,00		1	0,00
						Jumlah Keseluruhan Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi (Dokumen)	Dokumen	-	5	0,00		5	0,00
						Persentase Jumlah Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dokumen)	%	Kab. Morowali dan Luar Daerah	20,00	0,00		20,00	50.000.000,00
						Jumlah Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di tahun n (Dokumen)	Dokumen	-	1	0,00		1	0,00
						Jumlah Keseluruhan Pedoman Tertib pemanfaatan jasa konstruksi (Dokumen)	Dokumen	-	5	0,00		5	0,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	Kab. Morowali	14,67	1.606.030.000,00		18,89	3.065.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab. Kota. Yang ditetapkan (Dokumen)	%	Kec. Bahodopi, Kec. B. Timur, Kec. B. Tengah	16,11	393.955.000,00		21,11	600.000.000,00
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan (Dokumen)	%	Kab. Morowali	22,22	352.356.600,00		22,22	400.000.000,00
						Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan yang dibuat (Dokumen)	Dokumen	-	2	0,00		2	0,00
						Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan yang harus dibuat (Dokumen)	Dokumen	-	9	0,00		9	0,00
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan (Dokumen)	%	Kec. Bahodopi, Kec. B. Timur, Kec. B. Tengah	10	41.598.400,00		20,00	200.000.000,00
						Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan (Dokumen)	Dokumen	-	1	0,00		2	0,00
						Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang harus disosialisasikan (Dokumen)	Dokumen	-	10	0,00		10	0,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten / Kota (%)	%	Kec. B. Barat, Kec. B. Pesisir	22,22	1.159.925.000,00		22,22	2.200.000.000,00
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota (%)	%	Kec. B. Pesisir	22,22	1.159.925.000,00		22,22	2.200.000.000,00
						Jumlah Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	Dokumen	-	2	0,00		2	0,00
						Jumlah Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota yang harus disusun (Dokumen)	Dokumen	-	9	0,00		9	0,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten terhadap RTRW/RDTR(%)	%	9 Kecamatan	9,43	30.000.000,00		14,39	140.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah rekomendasi Kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah terhadap RTRW/RDTR (%)	%	.	16,81	0,00		14,39	40.000.000,00
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia (%)	%	9 Kecamatan	18,87	30.000.000,00		18,87	100.000.000,00
						Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia (Unit)	unit	-	10	0,00		10	0,00
						Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang harus tersedia (Unit)	unit	-	53	0,00		53	0,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (%)	%	Kec. B. Pesisir, Kec. Bahodopi, Kec. B. Timur	5,67	22.150.000,00		13,33	125.000.000,00
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Jumlah dokumen pelaporan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Kesesuaian Ruang (%)	%	Kec. B. Pesisir, Kec. Bahodopi, Kec. B. Timur	5,67	22.150.000,00		13,33	125.000.000,00
						Luas Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang dibuat (Dokumen)	Dokumen	-	17	0,00		40	0,00
						Luas Rekomendasi Kesesuaian Ruang (Dokumen)	Dokumen	-	300	0,00		300	0,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					23.452.790.560,00			59.236.471.432,00
1	04	02	01		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					23.452.790.560,00			59.236.471.432,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah	%	DPKPP	100	4.647.521.560,00		100	2.626.471.432,00
1	04	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaa dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	DPKPP	100	72.135.000,00		100	30.000.000,00
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	%	KAB MOROWALI	100	860.000,00		100	10.000.000,00
1	04	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase jumlah Dokumen perencanaan program	%	KAB MOROWALI	100	750.000,00		100	7.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	04	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen evaluasi perangkat daerah	%	KAB MOROWALI	100	600.000,00		100	6.000.000,00
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	%	KAB MOROWALI	100	69.925.000,00		100	7.000.000,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kegiatan administrasi keuangan	orang	DPKPP	0	3.274.812.034,00		0	7.500.000,00
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah pegawai yang Ada	orang	-	0	3.274.812.034,00		0	0,00
1	04	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (buah)	Dokumen	KAB.MOROWALI	3	0,00		3	7.500.000,00
1	04	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang administrasi umum (%)	%	DPKPP	100	1.300.574.526,00		100	2.358.971.432,00
1	04	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jumlah penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik (rekening listrik)	%	DPKPP	100	12.000.000,00		100	12.000.000,00
1	04	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor	%	DPKPP	100	15.000.000,00		100	15.000.000,00
1	04	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara	unit	DPKPP	5	45.000.000,00		5	50.000.000,00
1	04	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Honoror	orang	DPKPP	30	673.115.976,00		30	678.771.432,00
1	04	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	orang	DPKPP	12	900.000,00		5	10.000.000,00
1	04	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (Jenis)	%	DPKPP	100	29.999.850,00		100	30.000.000,00
1	04	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (buah buku)	Dokumen	DPKPP	3	12.500.000,00		3	30.000.000,00
1	04	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Jumlah komponen instalasi listrik	%	DPKPP	40	19.997.300,00		30	50.000.000,00
1	04	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor (Unit)	%	DPKPP	100	177.223.400,00		0	0,00
1	04	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan (dos) / Jumlah Minuman/ Snack (dos)	Dos	DPKPP	2500	25.650.000,00		2880	43.200.000,00
1	04	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Kegiatan Rapat Koordinasi (Luar Propinsi & Dalam Propinsi)	Kegiatan	DPKPP	36	289.188.000,00		36	350.000.000,00
1	04	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	unit	DPKPP	2	0,00		4	460.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	04	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	%	DPKPP	0	0,00		100	100.000.000,00
1	04	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Persentase Jumlah Mebeleur	buah	DPKPP	0	0,00		35	150.000.000,00
1	04	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Gedung Kantor yang di Pelihara	%	DPKPP	0	0,00		100	150.000.000,00
1	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang terpelihara	%	DPKPP	0	0,00		100	50.000.000,00
1	04	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan kantor yang terpelihara	%	DPKPP	0	0,00		100	30.000.000,00
1	04	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	%	DPKPP	0	0,00		100	150.000.000,00
1	04	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya	%	DPKPP	100	0,00		100	230.000.000,00
1	04	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	unit	DPKPP	0	0,00		0	0,00
1	04	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Stell	DPKPP	63	0,00		0	0,00
1	04	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	buah/set	DPKPP	0	0,00		0	0,00
1	04	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	orang	DPKPP	0	0,00		10	200.000.000,00
1	04	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek (orang)	orang	DPKPP	0	0,00		5	30.000.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Perumahan yang Ditetapkan	unit	KAB. MOROWALI	17	1.099.530.000,00		100	27.380.000.000,00
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentasi rumah korban bencana yang tertangani	%	KAB. MOROWALI	100	54.450.000,00		100	3.350.000.000,00
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang teridentifikasi	unit	KAB. MOROWALI	0	0,00		90	100.000.000,00
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Ha	KAB. MOROWALI	0	0,00		18	100.000.000,00
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah data rumah korban bencana	unit	KAB. MOROWALI	60	54.450.000,00		90	100.000.000,00
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah data kerusakan rumah korban bencana	unit	KAB. MOROWALI	0	0,00		55	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Rumah akibat Bencana atau relokasi program kabupaten	unit	KAB. MOROWALI	0	0,00		55	2.500.000.000,00
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus yang terdata	unit	KAB. MOROWALI	3	0,00		3	450.000.000,00
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi	%	KAB. MOROWALI	100	45.560.000,00		100	500.000.000,00
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Pemenuhan Standar Teknis yang akan disosialisasikan	Kegiatan	KAB. MOROWALI	9	45.560.000,00		5	500.000.000,00
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tetangani	%	KAB. MOROWALI	100	999.520.000,00		100	23.030.000.000,00
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	unit	KAB. MOROWALI	55	0,00		55	2.750.000.000,00
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Dokumen	KAB. MOROWALI	5	180.000.000,00		5	250.000.000,00
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan lokasi pembangunan rumah korban bencana	Ha	KAB. MOROWALI	9	0,00		9	1.800.000.000,00
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang terbangun	unit	KAB. MOROWALI	55	819.520.000,00		55	2.750.000.000,00
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah khusus dan PSU yang terbangun	unit	KAB. MOROWALI	120	0,00		120	15.480.000.000,00
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina	unit	KAB. MOROWALI	0	0,00		3	250.000.000,00
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Presentase Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	%	KAB. MOROWALI	100	0,00		100	100.000.000,00
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Prsentase Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/Rumah Kusur	%	KAB. MOROWALI	100	0,00		100	150.000.000,00
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi yang terlaksana	%	KAB. MOROWALI	0	0,00		100	250.000.000,00
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang harus terlaksana	Kegiatan	KAB. MOROWALI	5	0,00		5	250.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Kumuh yang ditetapkan	%	KAB MOROWALI	100	15.463.425.000,00		100	21.380.000.000,00
1	04	03	2.02	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman kumuh yang ditata	Ha	KAB. MOROWALI	5	480.584.000,00		9	980.000.000,00
1	04	03	2.02	01 Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	KAB. MOROWALI	9	22.480.000,00		10	100.000.000,00
1	04	03	2.02	02 Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan kawasan kumuh yang disusun	Dokumen	KAB. MOROWALI	1	350.000.000,00		1	500.000.000,00
1	04	03	2.02	04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Regulasi pengembangan kawasan kumuh yang disosialisasikan	Dokumen	KAB. MOROWALI	1	0,00		100	180.000.000,00
1	04	03	2.02	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	KAB. MOROWALI	4	108.104.000,00		4	200.000.000,00
1	04	03	2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	%	KAB. MOROWALI	100	14.982.841.000,00		10	20.400.000.000,00
1	04	03	2.03	01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan kumuh yang memiliki perencanaan Site Plann dan DED	Dokumen	KAB. MOROWALI	1	0,00		2	400.000.000,00
1	04	03	2.03	02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	unit	KAB. MOROWALI	291	14.982.841.000,00		400	20.000.000.000,00
1	04	04		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU	%	KAB. MOROWALI	100	2.242.314.000,00		0	7.850.000.000,00
1	04	04	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU	%	KAB. MOROWALI	100	2.242.314.000,00		0	7.850.000.000,00
1	04	04	2.01	01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan PSU Perumahan	Dokumen	KAB. MOROWALI	2	100.000.000,00		10	100.000.000,00
1	04	04	2.01	02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang tersedia	%	KAB. MOROWALI	100	1.948.700.000,00		40	7.500.000.000,00
1	04	04	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah bantuan PSU yang terealisasi	%	KAB. MOROWALI	100	193.614.000,00		100	250.000.000,00
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18.168.169.940,00			25.985.417.052,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	05	04	01		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.263.486.092,00			11.823.271.945,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	xxxx	KABUPATEN	14	3.728.640.092,00		100	4.213.271.945,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi keuangan	%	KABUPATEN	100	2.463.486.136,00	100	2.307.271.945,00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan Gaji dan tunjangan	%	KABUPATEN	100	2.463.486.136,00	100	2.307.271.945,00
1	05	01	2.03		Administrasi Umum	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	KABUPATEN	100%	1.191.403.956,00	100%	1.751.000.000,00
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PersentasePemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	%	-	0	0,00	0	15.000.000,00
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebuthan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	%	KABUPATEN	100	26.460.000,00	100	36.000.000,00
1	05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	KABUPATEN	0	0,00	100	200.000.000,00
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional kantor	unit	KABUPATEN	5	130.000.000,00	5	60.000.000,00
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhanJasa Administrasi Keuangan	%	KABUPATEN	100	501.648.516,00	100	560.000.000,00
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase pemenuhan Jasa Kebersihan Kantor	%	KABUPTEN	100	900.000,00	0	15.000.000,00
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan Alat tulis kantor	%	KABUPATEN	100	21.001.440,00	100	30.000.000,00
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	%	KABUPATEN	100	10.550.000,00	100	5.000.000,00
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalsi listrik dan penerangan bangunan kantor	%	KABUPATEN	100	6.200.000,00	100	10.000.000,00
1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan dan peralatan kantor	%	KABUPATEN	100	94.794.000,00	0	200.000.000,00
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan Makan minum pegawai	%	-	0	0,00	0	45.000.000,00
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhanRapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	%	TERSEBAR	100	349.850.000,00	0	400.000.000,00
1	05	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%	KABUPATEN	0	0,00	0	75.000.000,00
1	05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	%	KABUPATEN	100	50.000.000,00	0	100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022		
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin Aparatur	%	KABUPATEN	100	73.750.000,00		100	155.000.000,00
1	05	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan	orang	KABUPATEN	45	33.750.000,00		0	35.000.000,00
1	05	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang /Kegiatan	KABUPATEN	1	40.000.000,00		0	120.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa tangguh Bencana	%	TERSEBAR	20	534.846.000,00		20	7.610.000.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase penduduk di daerah rawan bencana yang mendapatkan KIE bencana	%	TERSEBAR 9 KECAMATAN	700	0,00		0	300.000.000,00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	%	TERSEBAR	200	0,00		300	300.000.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penduduk yang mendapat pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	TERSEBAR DI 9 KECAMATAN	3	315.646.000,00		6	5.600.000.000,00
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan legal	%	-	0	0,00		3	150.000.000,00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang ikut pelatihan	orang	TERSEBAR	700	133.146.000,00		1000	300.000.000,00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapat layanan Pusdalops	Orang /Kegiatan	TERSEBAR	500	0,00		500	250.000.000,00
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang mendapat peralatan perlindungan bencana	Orang /paket	Kabupaten	1000	55.000.000,00		1000	200.000.000,00
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase penurunan desa terdampak bencana	%	TERSEBAR	4	0,00		4	400.000.000,00
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	TERSEBAR	100	127.500.000,00		100	4.000.000.000,00
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tim TRC terlatih	%	KABUPATEN	20	0,00		20	300.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan Korban bencana	%	TERSEBAR 9 KECAMATAN	100	150.000.000,00		0	1.650.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	TERSEBAR	100	60.000.000,00		100 400.000.000,00
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	TERSEBAR	100	40.000.000,00		100 250.000.000,00
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	TERSEBAR	100	50.000.000,00		100 1.000.000.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dibentuk	%	KABUPATEN	100	69.200.000,00		0 60.000.000,00
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah forum pengurangan risiko bencana terbentuk	Kelompok	KABUPATEN	4	69.200.000,00		3 45.000.000,00
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah MOU dengan lembaga, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Dokumen	-	0	0,00		3 15.000.000,00
1	05	01	01		SATUAN POLISI PAMONGPRAJA				13.904.683.848,00			14.162.145.107,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	100	13.302.283.848,00		100 13.356.328.807,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase capaian kegiatan administrasi keuangan	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	100	2.364.787.198,00		100 1.507.233.307,00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan Asn dalam 1 Tahun	%	Kabupaten Morowali	12	2.364.787.198,00		12 1.507.233.307,00
1	05	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kegiatan administrasi umum	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	100	10.937.496.650,00		100 10.969.485.500,00
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, sumber air dan listrik dalam 1 tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	35.000.000,00		12 28.800.000,00
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorer dalam 1 tahun	orang	Satpol.PP Kabupaten Morowali	375	10.628.145.000,00		375 10.628.145.000,00
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	3.500.000,00		12 4.000.000,00
1	05	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	2.000.000,00		12 5.000.000,00
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	15.831.650,00		12 30.000.000,00
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	15.070.000,00		12 20.000.000,00
1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	31.950.000,00		12 30.000.000,00
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	36.000.000,00		12 38.540.500,00
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi luar daerah dalam 1 tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	100.000.000,00		12 100.000.000,00
1	05	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	70.000.000,00		12 85.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pencapaian kegiatan peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	100	0,00		879.610.000,00
1	05	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	0,00		0,00
1	05	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sipil Nagara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	Satpol.PP Kabupaten Morowali	80	0,00		823.610.000,00
1	05	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	orang	Satpol.PP Kabupaten Morowali	23	0,00		56.000.000,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prsentase penyelesaian pelanggaran K3	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	443.750.000,00		420.000.000,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	Kasus	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	355.500.000,00		270.000.000,00
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi kamtibmas yg dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kegiatan	Satpol.PP Kabupaten Morowali	1080	176.675.000,00		50.000.000,00
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kabupaten / Kota yang di koordinasikan dalam	Kegiatan	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	100.000.000,00		100.000.000,00
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Gabungan dalam 1 Tahun	Kegiatan	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	78.825.000,00		120.000.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah PERDA yang ditegakan	peraturan daerah	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	88.250.000,00		150.000.000,00
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang di sosialisasikan dan ditegakan dalam 1 Tahun	peraturan daerah	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	52.800.000,00		100.000.000,00
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran Perda yang di tangani	peraturan daerah	Satpol.PP Kabupaten Morowali	12	35.450.000,00		50.000.000,00
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	158.650.000,00		385.816.300,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon time Rate	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	119.850.000,00		330.541.300,00
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah terinventrisasi potensi bahaya kebakaran	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	20.600.000,00		59.700.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani dalam 1 Tahun	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	81.500.000,00		12	217.191.300,00
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan Berbahaya dan beracun kebakaran yang di tangani dalam 1 Tahun	Insiden	Satpol.PP Kabupaten Morowali	0%	17.750.000,00		12	53.650.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Penyelesaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	Satpol.PP Kabupaten Morowali	100	38.800.000,00		100	55.275.000,00
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Menyatakan jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kegiatan	Satpol.PP Kabupaten Morowali	9	38.800.000,00		9	55.275.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.270.229.527,00			8.599.419.124,00
1	06	01	01		DINAS SOSIAL					4.270.229.527,00			8.599.419.124,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	%	Dinas Sosial	100	2.470.229.527,00		100	2.587.532.104,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan					1.770.229.527,00			1.748.752.737,00
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara dalam 1 tahun	orang	Kabupaten Morowali	18	1.770.229.527,00		18	1.745.076.634,00
1	06	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan dalam 1 tahun	Dokumen	Kabupaten Morowali	2	0,00		3	3.676.103,00
1	06	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase Administrasi Keuangan dalam 1 tahun	%	-	100	700.000.000,00		100	838.779.367,00
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Internet dan air dalam 1 Thun	Bulan	Dinas Sosial	12	12.000.000,00		12	12.000.000,00
1	06	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorer dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Sosial	12	417.985.996,00		12	406.821.871,00
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah iuran Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Sosial	12	2.514.004,00		12	10.000.000,00
1	06	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah iuran Peralatan Kantor yang diperbaiki dalam 1 tahun	Bulan	-	12	0,00		12	7.500.000,00
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) selama 1 Tahun dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Sosial	12	25.000.000,00		12	25.000.000,00
1	06	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Foto Copy Selama 1 (tahun)	Bulan	Dinas Sosial	12	15.000.000,00		12	24.946.000,00
1	06	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Selama 1 Tahun	Bulan	-	-	0,00		-	0,00
1	06	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga selama 1 Tahun	Bulan	-	12	0,00		-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	06	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Pembelian makan Minum Selama 1 Tahun	Bulan	Dinas Sosial	12	15.000.000,00		12	24.670.126,00
1	06	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Konsultasi Dan Koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	Bulan	Palu-Jakarta	12	192.500.000,00		12	327.841.370,00
						Jumlah Mobiler Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Bulan	-	0	0,00		-	0,00
1	06	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan dalam 1 tahun	Bulan	-	0	0,00		-	0,00
1	06	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mobiler Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Bulan	-	12	0,00		-	0,00
1	06	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala dalam 1 tahu	Bulan	-	12	0,00		-	0,00
1	06	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Sosial	12	20.000.000,00		-	0,00
1	06	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0,00			0,00
1	06	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal								
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	Bungku Timur-Bungku Barat	33,3	230.240.000,00		31,5	1.134.000.000,00
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Presentase Komunitas Adat Terpencil Yang di Berdayakan	KAT	-	30	0,00		30	50.000.000,00
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sosial	KAT	-	15	0,00		15	50.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	%	Bungku Timur-Bungku Barat	36,6	230.240.000,00		33	1.084.000.000,00
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	orang	-	14	0,00		-	0,00
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	Kelompok	-	-	0,00		10	100.000.000,00
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	Kelompok	Bungku Timur-Bungku Barat	10	230.240.000,00		18	400.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	06	02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	Kelompok	-	1	0,00		1	484.000.000,00
1	06	02	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang mendapatkan Penguatan	Kegiatan	-	1	0,00		1	100.000.000,00
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	%	9 Kecamatan	16,5	745.870.000,00		25,5	2.640.787.020,00
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlar, Lanjut Usia Terlar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas terlar, Anak Terlar, Lanjut Usia Terlar serta Gelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi	%	-	17	745.870.000,00		18	2.140.787.020,00
1	06	04	2.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlar, anak terlar, lanjut usia terlar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima penyediaan pemakanan	orang	9 Kecamatan	700	267.015.000,00		700	600.000.000,00
1	06	04	2.01	Penyediaan Sandang	Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlar, anak terlar, lanjut usia terlar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima penyediaan Sandang	orang	9 Kecamatan	200	270.005.000,00		200	745.717.020,00
1	06	04	2.01	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlar, anak terlar, lanjut usia terlar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima penyediaan alat bantu	orang	9 Kecamatan	100	208.850.000,00		100	620.070.000,00
1	06	04	2.01	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlar, Lanjut Usia Terlar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlar, anak terlar, lanjut usia terlar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima Bimbingan sosial	orang	-	100	0,00		125	175.000.000,00
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial yang direhabilitasi Sosial	orang	-	16	0,00		33	500.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah jiwaPMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima layanan Data dan pengaduani	orang	-	25	0,00		-	0,00
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah jiwaPMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bantuan Pemakanan	orang	-	-	0,00		25	150.000.000,00
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah jiwaPMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bantuan Sandang	orang	-	-	0,00		25	150.000.000,00
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah jiwaPMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bantuan alat bantu	orang	0	-	0,00		25	200.000.000,00
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah jiwaPMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bimbingan fisik mental spritual dan sosial	orang	-	14	0,00		-	0,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang ditangani	%	9 Kecamatan	98,30	648.270.000,00		98,30	1.262.100.000,00
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase Anak Terlantar yang dipelihara	%	9 Kecamatan	25	78.510.000,00		25	100.000.000,00
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	orang	9 Kecamatan	102	78.510.000,00		102	50.000.000,00
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah kecamatan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar	Kecamatan	-	-	0,00		3	50.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah yang dikelola	%	9 Kecamatan	100	569.760.000,00		100	1.162.100.000,00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah yang didata	orang	9 Kecamatan	17.518	117.664.000,00		-	0,00
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir miskin cakupan daerah yang dikelola data.	KK	9 Kecamatan	17.518	452.096.000,00		17.518	1.162.100.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa tanggap darurat	%	Palu-Kab. Morowali	100%	100.000.000,00		100%	575.000.000,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang dilindungi	%	Palu	100	65.640.000,00		100	500.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Presentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan makanan	%	Palu	100	32.820.000,00		100	250.000.000,00
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Presentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang	%	Palu	100	32.820.000,00		100	250.000.000,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	%	Kab. Morowali	100	34.360.000,00		100	75.000.000,00
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan sosialisasi kampung siaga bencana	%	-	100	0,00		-	0,00
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi Taruna Siaga Bencana	%	Kab. Morowali	100	34.360.000,00		100	75.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	%	Kec. Bungku Tengah	100%	75.620.000,00		100%	400.000.000,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	%	Kec. Bungku Tengah	100	75.620.000,00		100	400.000.000,00
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi sarana dan prasarana	unit	-	-	0,00		1	300.000.000,00
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	unit	Kec. Bungku Tengah	1	75.620.000,00		1	100.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					181.880.918.170,00			2.608.319.009.472,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.572.105.000,00			3.672.190.000,00
2	07	01	01		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH					1.572.105.000,00			3.672.190.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					900.780.000,00			2.500.000.000,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan yang berbasis Kompetensi (JENIS Kompetensi)	Angka	Bungku	32 Orang	900.780.000,00		7	2.500.000.000,00
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi (orang)	orang	LLK UKM Morowali	32	900.780.000,00		500	2.500.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	07	03	2.01	02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0,00			0,00
2	07	03	2.02	01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					321.325.000,00			580.000.000,00
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					75.000.000,00			80.000.000,00
2	07	04	2.03	02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	Palu-Bungku	6,1%	75.000.000,00		6	80.000.000,00
2	07	04	2.03	03 Job Fair/Bursa Kerja								
2	07	04	2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					246.325.000,00			500.000.000,00
2	07	04	2.05	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA Dalam Perpanjangan IMTA	orang	Bungku Palu Jakarta	20000	246.325.000,00		4000	500.000.000,00
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					350.000.000,00			592.190.000,00
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					263.810.000,00			357.190.000,00
2	07	05	2.01	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	Dokumen	Bungku-Palu	100%	23.430.000,00		500	42.190.000,00
2	07	05	2.01	02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Penetapan UMK dan UMSK	Dokumen	Bungku-Palu	2	240.380.000,00		1	315.000.000,00
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					86.190.000,00			235.000.000,00
2	07	05	2.02	03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah kasus yang ditindak lanjuti oleh Tripartit	Kasus	Bungku-Palu-Jakarta	120	86.190.000,00		100	235.000.000,00
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					750.565.555,00			1.525.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	08	01	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					750.565.555,00			1.525.000.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan	%	DPMDP3A	100	83.715.000,00		100	175.000.000,00
2	08	02		2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah, swasta dan DPRD	orang	DPMDP3A	100	83.715.000,00		100	175.000.000,00
2	08	02		2.02	01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di Desa dan Kelurahan	orang	DPMDP3A	100	83.715.000,00		100	175.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	DPMDP3A	100	99.995.000,00		100	250.000.000,00
2	08	03		2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan kekerasan	orang	DPMDP3A	2	99.995.000,00		2	250.000.000,00
2	08	03		2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang dikerjasamakan	Kasus	DPMDP3A	5	0,00		5	100.000.000,00
2	08	03		2.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	DPMDP3A	5	99.995.000,00		5	150.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	%	DPMDP3A	50	99.965.555,00		50	200.000.000,00
2	08	04		2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga pra sejahtera	Keluarga	DPMDP3A	50	99.965.555,00		50	200.000.000,00
2	08	04		2.01	03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga pra sejahtera yang dibina	Keluarga	DPMDP3A	50	99.965.555,00		50	200.000.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota layak Anak	Lembaga	DPMDP3A	46	344.075.000,00		46	500.000.000,00
2	08	06		2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas umum yang menyediakan hak anak	Fasilitas	DPMDP3A	46	344.075.000,00		50	500.000.000,00
2	08	06		2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan tentang hak anak	Lembaga	DPMDP3A	46	344.075.000,00		50	500.000.000,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Kasus anak yang tertangani	%	DPMDP3A	100	122.815.000,00		100	400.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	Kasus	DPMDP3A	40	122.815.000,00		40	400.000.000,00
2	08	07	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah kasus anak yang tertangani	Kasus	DPMDP3A	40	122.815.000,00		100	250.000.000,00
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah anak Korban Kekerasan	orang	DPMDP3A	40	0,00		8	150.000.000,00
2	09	02	01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					375.706.900,00			2.417.500.000,00
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Desa Mandiri Pangan	%	DPKP	0	0,00		42	775.000.000,00
2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan	unit	DPKP	5	0,00		5	775.000.000,00
2	09	02	2.01	01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan	unit	DPKP	0	0,00		2	300.000.000,00
2	09	02	2.01	02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	unit	KAB.MOROWALI	0	0,00		1	200.000.000,00
2	09	02	2.01	03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur yang tersedia	unit	KAB.MOROWALI	0	0,00		1	200.000.000,00
2	09	02	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah pertemuan	Kegiatan	DPKP	0	0,00		1	75.000.000,00
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	DPKP	8	277.294.900,00		29	1.262.500.000,00
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Keanekaragaman Pangan	%	DPKP	2226,7	63.929.000,00		2133,4	312.500.000,00
2	09	03	2.01	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Inflasi Bahan Makanan	Dokumen	DPKP	9	17.540.000,00		9	80.000.000,00
					Ketersediaan protein per kapita	gram	DPKP	52	26.389.000,00		52	55.000.000,00
					Ketersediaan energi per kapita	kilogram	DPKP	2174,7	20.000.000,00		2087,4	55.000.000,00
2	09	03	2.01	02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pangan lokal yang menjadi pangan pokok	Dokumen	DPKP	0	0,00		3	22.500.000,00
2	09	03	2.01	04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dan Jenis ketersediaan pasokan pangan	Dokumen	DPKP	0	0,00		1	100.000.000,00
2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Pemerintah	ton	DPKP	5	0,00		5	0,00
2	09	03	2.02	03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	DPKP	25	213.365.900,00		25	950.000.000,00
2	09	03	2.04	01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	konsumsi pangan per kapita	Dokumen	DPKP	88,1	98.409.000,00		88,3	100.000.000,00
2	09	03	2.04	02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Penganeekaragaman Pangan konsumsi Berbasis sumber daya Lokal	Kegiatan	DPKP	0	0,00		2	750.000.000,00
					Jumlah Kegiatan Hari Pangan Sedunia	Kegiatan	Kab.Parigi	1	114.956.900,00		1	100.000.000,00
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	%	DPKP	5	68.520.000,00		33	150.000.000,00
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah data Desa Rawan Pangan	Dokumen	DPKP	2	68.520.000,00		2	150.000.000,00
2	09	04	2.01	01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah desa rawan pangan dilihat dalam peta	Dokumen	DPKP	2	68.520.000,00		2	150.000.000,00
2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah rawan pangan	Kegiatan	DPKP	0	0,00		5	0,00
2	09	04	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota								
2	09	04	2.02	02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan diuji	%	DPKP	6	29.892.000,00		32	230.000.000,00
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang tersertifikasi	%	DPKP	1	29.892.000,00		4	230.000.000,00
2	09	05	2.01	02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang tersertifikasi	Dokumen	DPKP	0	0,00		2	200.000.000,00
2	09	05	2.01	05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang di uji	Dokumen	DPKP	2	29.892.000,00		2	30.000.000,00
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.397.833.000,00			7.608.674.375,00
2	10	01	01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					2.397.833.000,00			7.608.674.375,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Masyarakat	Rupiah	KAB. MOROWALI	2266024000	2.266.024.000,00		7433174375	7.433.174.375,00
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ganti Rugi Lahan Yang terselesaikan	Ha	KAB.MOROWALI	2	2.266.024.000,00		5	7.433.174.375,00
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang ditetapkan untuk diganti rugi	orang	KAB.MOROWALI	5	2.217.350.000,00		5	7.364.424.375,00
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	Kegiatan	Luar Daerah	3	48.674.000,00		4	68.750.000,00
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Luas Seluruuh Tanah Ulayat	Ha	KAB. MOROWALI	100	47.484.000,00		5	50.000.000,00
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Ulayat Yang Telah ditetapkan	Ha	KAB.MOROWALI	0	47.484.000,00		5	50.000.000,00
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Luas Tanah Ulayat	Ha	KAB.MOROWALI	5	47.484.000,00		5	50.000.000,00
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola	Ha	KAB. MOROWALI	15	84.325.000,00		15	125.500.000,00
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Luas Tanah Inventaris Yang Dimanfaatkan	Ha	KAB.MOROWALI	15	84.325.000,00		15	125.500.000,00
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Luas Tanah Kosong yang Diinventarisasi	Ha	KAB.MOROWALI	15	84.325.000,00		15	125.500.000,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.398.279.298,00			19.461.579.617,00
2	11	01	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH					13.398.279.298,00			19.461.579.617,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100	7.129.015.018,00		100	12.594.329.617,00
2	11	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100	35.100.000,00		100	82.000.000,00
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	2	2.500.000,00		2	15.000.000,00
2	11	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	0,00		1	15.000.000,00
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	%	Palu	100	32.600.000,00		100	52.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100	2.724.013.849,00		100	2.840.358.261,00
2	11	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	orang	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	0	2.721.513.849,00		39	2.830.358.261,00
2	11	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	2.500.000,00		1	10.000.000,00
2	11	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100	4.233.501.169,00		100	9.440.571.356,00
2	11	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Yang Tersedia	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	2.400.000,00		12	3.000.000,00
2	11	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa listrik tepat waktu	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	64.000.000,00		12	40.000.000,00
2	11	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tercukupi	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	11.700.000,00		12	8.000.000,00
2	11	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Yang Tercukupi	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	35.000.000,00		12	40.000.000,00
2	11	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	orang	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	140	3.275.585.388,00		146	3.071.687.892,00
2	11	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang Tersedia	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	900.000,00		12	900.000,00
2	11	01	2.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang tercukupi	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	6.500.000,00		12	11.000.000,00
2	11	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tercukupi	Jenis	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	23.078.300,00		12	45.000.000,00
2	11	01	2.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tercukupi	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	25.000.000,00		12	17.000.000,00
2	11	01	2.03	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tercukupi	unit	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	5	54.385.445,00		13	5.121.000.000,00
2	11	01	2.03	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	23.900.000,00		12	35.000.000,00
2	11	01	2.03	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	Kali	Provinsi, Nasional	37	255.710.000,00		61	352.450.000,00
2	11	01	2.03	25 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tercukupi	unit	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	48	85.429.218,00		35	75.120.646,00
2	11	01	2.03	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Tersedia	unit	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	47	319.912.818,00		47	470.412.818,00
2	11	01	2.03	32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tercukupi	Bulan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	12	50.000.000,00		12	150.000.000,00
2	11	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	Provinsi, Nasional	100	136.400.000,00		100	231.400.000,00
2	11	01	2.04	09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Provinsi, Nasional	8	136.400.000,00		8	136.400.000,00
2	11	01	2.04	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	Provinsi, Nasional	8	0,00		8	95.000.000,00
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100	1.361.700.000,00		0	400.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100	1.047.700.000,00		0	0,00
2	11	02	2.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	2	1.047.700.000,00		0	0,00
					Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	0,00		0	0,00
2	11	02	2.01	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	0	0,00		0	0,00
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Yang mempersyaratkan KLHS	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	314.000.000,00		1	400.000.000,00
2	11	02	2.02	01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Yang memiliki KLHS	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	314.000.000,00		0	0,00
2	11	02	2.02	03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah KRP yang memiliki dokumen KLHS	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	0	0,00		1	400.000.000,00
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Air	%	Kab. Morowali	100	1.592.320.000,00		100	1.945.250.000,00
					Indeks Kualitas Udara	%	Kab. Morowali	100			100	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	Kab. Morowali	100			100	
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	%	Kab. Morowali	100	144.280.000,00		100	155.250.000,00
2	11	03	2.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan (Tanah, air, udara dan laut)	Sampel	Kab. Morowali	40	144.280.000,00		45	155.250.000,00
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang di Rehabilitasi dan Restorasi	%	Kab. Morowali	30	1.448.040.000,00		30	1.790.000.000,00
2	11	03	2.02	01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Peringatan Pencemaran yang diinformasikan	%	Kab. Morowali	30	29.590.000,00		30	60.000.000,00
2	11	03	2.02	03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kawasan Yang Tercemar yang direhabilitasi	Kawasan	Kab. Morowali	30	0,00		30	400.000.000,00
					Jumlah Kawasan Yang Tercemar yang direstorasi	Kawasan	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
					Jumlah Daerah Tangkapan Air Yang Terlindungi	meter	Kabupaten Morowali	1,53	1.418.450.000,00		1,43	1.330.000.000,00
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	Kab. Morowali	100	122.350.000,00		100	462.000.000,00
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	Kab. Morowali	100	122.350.000,00		100	462.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Ha	Kab. Morowali	12	92.350.000,00		12	145.000.000,00
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	persentase luasan taman keanekaragaman hayati	%	Kab. Morowali	15	30.000.000,00		60	117.000.000,00
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Prasarana dan Sarana Keanekaragaman hayati	unit	Kab. Morowali	0	0,00		2	200.000.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	Kab. Morowali	100	20.235.000,00		100	40.000.000,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Perusahaan yang mengelola Limbah B3	%	Kab. Morowali	100	20.235.000,00		100	40.000.000,00
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perusahaan yang mengelola limbah B3	Pelaku Usaha	Kab. Morowali	136	20.235.000,00		136	40.000.000,00
						Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan	Dokumen	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	%	Kab. Morowali	100	46.675.000,00		100	195.000.000,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	%	Kab. Morowali	100	46.675.000,00		100	195.000.000,00
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Pejabat Pengawas yang bersertifikasi	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	0	21.375.000,00		100	75.000.000,00
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pemilik izin lingkungan dan izin PPLH	%	Kab. Morowali	100	0,00		100	60.000.000,00
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase pelanggaran lingkungan hasil pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang diberi sanksi	%	Kab. Morowali	100	25.300.000,00		100	60.000.000,00
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	%	Kab. Morowali	100	24.923.300,00		100	70.000.000,00
						Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat	%	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	100			100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan	Penghargaan	Kab. Morowali	3	24.923.300,00		3	70.000.000,00
					Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1			1	
2	11	09	2.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan	Penghargaan	Kab. Morowali	3	24.923.300,00		3	40.000.000,00
					Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	0,00		1	30.000.000,00
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	%	Kab. Morowali	100	23.300.000,00		100	200.000.000,00
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan	%	Kab. Morowali	100	23.300.000,00		100	200.000.000,00
2	11	10	2.01	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Aduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten	Kasus	Kab. Morowali	5	0,00		5	50.000.000,00
2	11	10	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Yang diselesaikan	Kasus	Kab. Morowali	8	23.300.000,00		8	150.000.000,00
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Tertangani	%	Kab. Morowali	100	3.077.760.980,00		100	3.555.000.000,00
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Yang Terkelola berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) pada Wilayah Layanan	%	Kab. Morowali	100	3.063.370.980,00		100	3.525.000.000,00
2	11	11	2.01	01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang disusun.	Dokumen	Kab. Morowali	1	27.153.300,00		1	60.000.000,00
2	11	11	2.01	02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah volume sampah yang tertangani melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)	ton	Kab. Morowali	5.498,48	29.681.880,00		6075,32	25.000.000,00
2	11	11	2.01	03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Timbulan Sampah Yang Tertangani melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten"	ton	Kab. Morowali	16954,04	229.110.800,00		17007,10	350.000.000,00
2	11	11	2.01	04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat dan atau Organisasi peduli sampah	Kelompok	Kab. Morowali	2	0,00		2	40.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	unit	Kab. Morowali	47	2.777.425.000,00		15	3.050.000.000,00
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pelaku Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sampah	%	Kab. Morowali	100	14.390.000,00		100	30.000.000,00
2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Izin Pendaurlangan sampah/Pengelolaan Sampah	%	Kab. Morowali	100	14.390.000,00		100	30.000.000,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.350.235.691,00			5.722.240.000,00
2	12	01	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH					4.350.235.691,00			5.722.240.000,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase program dan kegiatan terlaksana.	%	Dinas Dukcapil	100	3.345.856.891,00		100	2.900.240.000,00
2	12	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase program dan kegiatan	%	Dinas Dukcapil	100	7.250.000,00		100	12.500.000,00
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	Dinas Dukcapil	1	5.000.000,00		1	7.500.000,00
2	12	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan	Dokumen	Dinas Dukcapil	16	2.250.000,00		16	5.000.000,00
2	12	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah								
2	12	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Bulanan & Semesteran	%	Dinas Dukcapil	100	2.559.235.691,00		100	2.205.000.000,00
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayarkan gaji dan tunjangan	orang	-	25	2.550.235.691,00		25	2.200.000.000,00
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
2	12	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dinas Dukcapil	1	4.500.000,00		1	3.500.000,00
2	12	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan & Semesteran	Dokumen	Dinas Dukcapil	14	2.250.000,00		14	1.000.000,00
2	12	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	Dinas Dukcapil	1	2.250.000,00		1	500.000,00
2	12	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	%	Palu & Jakarta	100	779.371.200,00		100	557.740.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Materi	Dinas Dukcapil	40	300.000,00		40	240.000,00
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa rekening listrik	Kwh	Dinas Dukcapil	5000	18.000.000,00		5000	15.000.000,00
2	12	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan & perlengkapan kantor	Jenis	Dinas Dukcapil	12	2.000.000,00		15	7.000.000,00
2	12	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa jaminan pemeliharaan	buah	Dinas Dukcapil	1	20.000.000,00		1	2.500.000,00
2	12	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	orang	Dinas Dukcapil	25	578.400.000,00		25	173.000.000,00
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	orang	Dinas Dukcapil	2	7.171.200,00		2	10.000.000,00
2	12	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis	Dinas Dukcapil	15	2.000.000,00		15	10.000.000,00
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	Dinas Dukcapil	32	30.000.000,00		32	50.000.000,00
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis	Dinas Dukcapil	1000	2.500.000,00		1000	5.000.000,00
2	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gedung	Dinas Dukcapil	1	5.000.000,00		Na	0,00
2	12	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	unit	Dinas Dukcapil	10	0,00		20	20.000.000,00
2	12	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
2	12	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Dos	Dinas Dukcapil	250	14.000.000,00		250	15.000.000,00
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kali	Palu dan Jakarta	50	100.000.000,00		50	150.000.000,00
2	12	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								
2	12	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor								
2	12	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	paket	Dinas Dukcapil	5	0,00		3	100.000.000,00
2	12	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur								
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								
2	12	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor								
2	12	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								
2	12	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	12	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor								
2	12	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0,00			125.000.000,00
2	12	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi								
2	12	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								
2	12	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan								
2	12	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri								
2	12	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu								
2	12	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal								
2	12	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan								
2	12	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Operator SIAK ikut Bimtek	orang	Palu & Jakarta	5	0,00		5	125.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el + Persentase kecamatan yang memiliki pelayanan pendaftaran penduduk (%)	%	9 Kecamatan	19,99	98.372.850,00		66,67	550.000.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	Menkep, Bungku Selatan dan Bungku Pesisir	33,33	98.372.850,00		33,33	550.000.000,00
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk								
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk								
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pendaftaran Penduduk	orang	Menkep, Bungku Selatan dan Bungku Pesisir	33,33	45.775.000,00		3	275.000.000,00
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
2	12	02	2.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	orang	9 Kecamatan	14000	52.597.850,00		2155	275.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran, dan persentase kecamatan memiliki pelayanan pencatatan sipil (%)	%	9 Kecamatan	9,83	52.597.850,00		8,41	350.000.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pasangan nikah ber-Akta perkawinan	Orang / KK	9 Kecamatan	1,94	52.597.850,00		100	350.000.000,00
						Persentase Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pencatatan Sipil	Kecamatan	Menkep, Bungku Selatan & Bungku Pesisir	33,33			33,33	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan Kelahiran	orang	9 Kecamatan	728	52.597.850,00		7.607	100.000.000,00
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kecamatan Memiliki Pelayanan Pencatatan Sipil	Kecamatan	Menkep, Bungku Selatan dan Bungku Pesisir	3	0,00		3	250.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama + Persentase kecamatan memiliki UPT + Persentase Kecamatan terkoneksi dan teroperasikan SIAK + persentase urusan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan(%)	%	Dinas Dukcapil	66,66	853.408.100,00		77,77	1.922.000.000,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama	Lembaga	Dinas Dukcapil	33,33	3.325.000,00		66,66	212.000.000,00
2	12	04	2.01	01	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk								
2	12	04	2.01	02	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil								
2	12	04	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk	Jumlah Kecamatan tersinkronisasi data perkembangan penduduk	Kecamatan	9 Kematan	9	0,00		9	12.000.000,00
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama	Lembaga	Dinas Dukcapil	5	3.325.000,00		10	200.000.000,00
2	12	04	2.01	06	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah								
2	12	04	2.02		Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kecamatan Memiliki UPT	Kecamatan	Menkep, Bungku Selatan & Bungku Pesisir	33,33	797.116.100,00		33,33	1.500.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan memiliki UPT Penyelenggara urusan administrasi kependudukan	Kecamatan	Menkep, Bungku Selatan & Bungku Pesisir.	33,33	797.116.100,00		33,33	1.500.000.000,00
2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan								
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi sistem penyajian data kependudukan	Aplikasi	Dinas Dukcapil	100	18.664.000,00		100	60.000.000,00
2	12	04	2.03	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam								
2	12	04	2.03	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota								
2	12	04	2.03	03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting								
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								
2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.03	09	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi								
2	12	04	2.03	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah inovasi sistem penyajian data kependudukan	Aplikasi	Dinas Dukcapil	1	18.664.000,00		1	60.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase UPT penyelenggara administrasi kependudukan	Kecamatan	Menkep , Bungku Selatan & Bungku Pesisir	33,33	34.303.000,00		33,33	150.000.000,00
2	12	04	2.04	02 Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah UPT penyelenggara administrasi kependudukan	Lembaga	dukcapil	3	0,00		3	50.000.000,00
2	12	04	2.04	03 Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain	Jumlah Kepala Desa penyelenggara administrasi kependudukan	Desa	Dinas Dukcapil	10	0,00		10	40.000.000,00
2	12	04	2.04	05 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah urusan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan	produk	9 Kecamatan	23	34.303.000,00		23	60.000.000,00
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					0,00			0,00
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					0,00			0,00
2	12	05	2.01	01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
2	12	05	2.01	02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain								
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.114.577.794,00			2.347.399.059.279,00
2	13	01	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.114.577.794,00			2.347.399.059.279,00
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Perkantoran	%	DPMDP3A	100	3.650.457.794,00		100	2.340.076.414.279,00
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Kinerja (%)	%	DPMDP3A	100	2.840.657.794,00		100	2.338.658.836.000,00
2	13	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	DPMDP3A	100	2.840.657.794,00		100	2.338.613.836.000,00
2	13	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	Dokumen	DPMDP3A	2	0,00		2	45.000.000,00
2	13	01	2.03	Administrasi Umum	Jumlah Layanan dalam OPD	paket	DPMDP3A	0	757.320.000,00		0	1.062.313.279,00
2	13	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	DPMDP3A	1	0,00		1	1.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	13	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	DPMDP3A	1	20.000.000,00		1	20.000.000,00
2	13	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	DPMDP3A	1	0,00		100	28.000.000,00
2	13	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	orang	DPMDP3A	30	0,00		30	46.093.279,00
2	13	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	DAU	100	40.000.000,00		100	30.000.000,00
2	13	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	orang	DPMDP3A	16	360.720.000,00		18	387.720.000,00
2	13	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	%	DPMDP3A	100	900.000,00		100	1.000.000,00
2	13	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	DPMDP3A	8	3.800.000,00		8	3.500.000,00
2	13	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tahun	DPMDP3A	1	28.400.000,00		1	20.000.000,00
2	13	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	DPMDP3A	100	15.000.000,00		100	15.500.000,00
2	13	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	DPMDP3A	100	25.500.000,00		100	50.000.000,00
2	13	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	set	DPMDP3A	10	0,00		10	20.000.000,00
2	13	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku	DPMDP3A	126	0,00		126	94.500.000,00
2	13	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	%	DPMDP3A	100	34.200.000,00		100	35.000.000,00
2	13	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	DPMDP3A	100	213.800.000,00		100	225.000.000,00
2	13	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	unit	DPMDP3A	3	15.000.000,00		3	50.000.000,00
2	13	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	DPMDP3A	4	0,00		4	30.000.000,00
2	13	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	unit	DPMDP3A	3	0,00		3	5.000.000,00
2	13	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	DPMDP3A	100	52.480.000,00		355.265,000	355.265.000,00
2	13	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	unit	DPMDP3A	2	0,00		2	4.000.000,00
2	13	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pasang	DPMDP3A	30	0,00		30	15.000.000,00
2	13	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	paket	DPMDP3A	46	0,00		46	9.200.000,00
2	13	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	DPMDP3A	10	52.480.000,00		6	127.065.000,00
2	13	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	DPMDP3A	9	0,00		9	100.000.000,00
2	13	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	DPMDP3A	378	0,00		378	100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa mandiri	%	DPMDP3A	18	0,00		8	3.700.000.000,00
2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	DPMDP3A	23	0,00		10	3.700.000.000,00
2	13	02	2.01	01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang berubah statusnya	Desa	Kec Menui Kepulauan dan Bungku Selartan	2	0,00		32	150.000.000,00
2	13	02	2.01	02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang tertata	Desa	DPMDP3A	45	0,00		32	50.000.000,00
2	13	02	2.01	03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Perdes tentang Kewenangan Desa	Dokumen	DPMDP3A	126	0,00		126	50.000.000,00
2	13	02	2.01	05 Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Jumlah Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	%	DPMDP3A	1	0,00		1	250.000.000,00
2	13	02	2.01	06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Pembangunan Kantor Desa	Desa	DPMDP3A	45	0,00		32	1.600.000.000,00
2	13	02	2.01	07 Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa	Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	orang	Kecamatan	45	0,00		32	1.600.000.000,00
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa	%	DPMDP3A	22,22	55.510.000,00		22,22	170.000.000,00
2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama	Desa	DPMDP3A	28	55.510.000,00		37	170.000.000,00
2	13	03	2.01	01 Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	Kerja Sama	DPMDP3A	18	55.510.000,00		20	85.000.000,00
2	13	03	2.01	02 Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	Desa	Kecamatan	18	0,00		20	85.000.000,00
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina	%	DPMDP3A	126	1.093.167.000,00		29,37	1.445.000.000,00
					Persentase Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina	%	DPMDP3A	25,40			29,37	
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina dan diawasi	Desa	DPMDP3A	32	1.093.167.000,00		37	1.445.000.000,00
					Persentase desa yang dibina & diawasi	Desa	DPMDP3A	126			126	
2	13	04	2.01	01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi dalam penataan adm desa yang baik	Desa	DPMDP3A	45	0,00		32	50.000.000,00
2	13	04	2.01	02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk hukum desa yang ditetapkan	produk	DPMDP3A	10	0,00		10	25.000.000,00
2	13	04	2.01	03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa	Dokumen	DPMDP3A	126	0,00		126	20.000.000,00
2	13	04	2.01	04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)	Desa	DPMDP3A	126	195.050.000,00		126	325.000.000,00
2	13	04	2.01	05 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah perangkat desa & BPD yang mengikuti himtek	orang	DPMDP3A	252	186.800.000,00		252	350.000.000,00
2	13	04	2.01	06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Pendampingan musyawarah Desa	orang	DPMDP3A	126	0,00		126	105.000.000,00
2	13	04	2.01	07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan Peraturan Desa	Desa	DMPDP3A	126	0,00		126	20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	13	04		08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Aktif	Lembaga	DPMDP3A	32	104.470.000,00		42	150.000.000,00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	Desa	DPMDP3A	126	394.435.000,00		126	75.000.000,00
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	orang	DPMDP3A	61	38.335.000,00		10	50.000.000,00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang Cepat Berkembang	Desa	126 Desa	126	124.577.000,00		126	175.000.000,00
						Jumlah Desa yang menginput Profil Desa	Desa	DPMDP3A	126	49.500.000,00		126	100.000.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	%	DPMDP3A	85,71	315.443.000,00		100	2.007.645.000,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	Lembaga	DPMDP3A	6	315.443.000,00		7	2.007.645.000,00
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang memiliki Lembaga Adat	Desa	DPMDP3A	7	0,00		12	55.000.000,00
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah PKK aktif	Desa	PKK Kabupaten	133	0,00		133	1.542.645.000,00
						Jumlah Pokjanal, Posyandu Aktif	Lembaga	DPMDP3A	133	35.350.000,00		133	55.000.000,00
						Jumlah LPMD yang aktif	Lembaga	DPMDP3A	133	0,00		133	55.000.000,00
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes Yang Sehat	Lembaga	DPMDP3A	70	120.848.000,00		90	140.000.000,00
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	%	Provinsi	70	159.245.000,00		75	160.000.000,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					405.943.200,00			600.000.000,00
2	14	01	01		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					405.943.200,00			600.000.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	%	Kab.Morowali	100	129.200.000,00		100	200.000.000,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penurunan angka kelahiran total (TFR)	%	Kab. Morowali	100	0,00		100	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)								
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota								
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan								
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal								
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal								
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga								
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk	%	Kab. Morowali	22,5	129.200.000,00		22,5	200.000.000,00
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain								
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	%	Kab. Morowali	9	56.519.000,00		9	100.000.000,00
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase hasil Data informasi keluarga	%	Kab. Morowali	9	72.681.000,00		9	100.000.000,00
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	%	Kab.Morowali	100	127.138.200,00		100	200.000.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelayanan KB	%	Kab. Morowali	100	127.138.200,00		100	200.000.000,00
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Presentase Pembinaan KB/KR di Faskes dan Jaringanya	%	Kab. Morowali	100	127.138.200,00		100	200.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	%	Kab.Morowali	65	149.605.000,00		67	200.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Keluarga Yang mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	%	Kab. Morowali	100	149.605.000,00		100	200.000.000,00
2	14	04	2.01	03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pelaksana/Kader yang sudah mengikuti pelatihan teknis BKB, BKR, BKL, PIKR, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	%	Kab. Morowali	100	149.605.000,00		100	200.000.000,00
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					8.395.164.733,00			28.441.822.500,00
2	15	01	01	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH					8.395.164.733,00			28.441.822.500,00
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Administrasi Perkantoran (%)	%	DISHUB	22	5.013.974.733,00		22	4.061.464.500,00
2	15	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	19	3.000.000,00		7	3.000.000,00
2	15	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	2	1.500.000,00		2	1.500.000,00
2	15	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	4	1.500.000,00		4	1.500.000,00
2	15	01	2.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	1	0,00		1	0,00
2	15	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan	DISHUB	12	0,00		12	0,00
2	15	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	12	0,00		12	0,00
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	%	DISHUB	100	2.895.164.733,00		100	1.435.038.000,00
2	15	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	DISHUB	12	2.895.164.733,00		12	1.435.038.000,00
2	15	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	DISHUB	4	0,00		4	0,00
2	15	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	2	0,00		2	0,00
2	15	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	DISHUB	1	0,00		1	0,00
2	15	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Realisasi Administrasi Umum	%	DISHUB	100	1.964.810.000,00		100	2.450.426.500,00
2	15	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	DISHUB	12	30.000.000,00		12	34.250.000,00
2	15	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	DISHUB	12	5.000.000,00		12	5.350.000,00
2	15	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit/tahun	DISHUB	4	7.000.000,00		5	7.500.000,00
2	15	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	orang	DISHUB	52	1.473.769.440,00		57	1.636.173.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	15	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	DISHUB	12	1.000.000,00		12	1.200.000,00
2	15	01		09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit/tahun	DISHUB	15	7.500.000,00		15	8.000.000,00
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Bulan	DISHUB	12	18.000.000,00		12	19.250.000,00
2	15	01		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	lembar	DISHUB	5000	12.500.000,00		5000	13.500.000,00
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	DISHUB	12	5.300.000,00		12	5.671.000,00
2	15	01		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	DISHUB	9	103.115.560,00		10	123.050.000,00
2	15	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	DISHUB	12	7.000.000,00		12	5.500.000,00
2	15	01		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	DISHUB	12	7.500.000,00		12	8.000.000,00
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	orang	DISHUB	83	165.000.000,00		83	450.000.000,00
2	15	01		22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	unit/tahun	DISHUB	3	19.375.000,00		3	25.000.000,00
2	15	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Penyediaan Mebeleur	unit/tahun	DISHUB	7	28.000.000,00		7	28.000.000,00
2	15	01		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tahun	DISHUB	1	8.750.000,00		1	9.362.500,00
2	15	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit/tahun	DISHUB	5	45.000.000,00		5	48.150.000,00
2	15	01		32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	unit/tahun	DISHUB	12	21.000.000,00		12	22.470.000,00
2	15	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	DISHUB	100	151.000.000,00		100	173.000.000,00
2	15	01		01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi	unit	DISHUB	0	0,00		2	3.000.000,00
2	15	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pasang	DISHUB	85	85.000.000,00		85	100.000.000,00
2	15	01		09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang /Kegiatan	DISHUB	2	66.000.000,00		2	70.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	DISHUB	25	3.223.440.000,00		25	15.630.608.000,00
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	paket	DISHUB	1	150.000.000,00		0	137.000.000,00
2	15	02		02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ Yang ditetapkan dan disosialisasikan	Lisensi	DISHUB	3	125.000.000,00		2	112.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan LLAJ yang sesuai dengan rencana induk jaringan LLAJ	Kegiatan	KAB. MOROWALI	1	25.000.000,00		1	25.000.000,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	unit	DISHUB	1	730.000.000,00		3	10.237.108.000,00
						Persentase ketersediaan Perlengkapan pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	unit	DISHUB	5			5	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan	unit/tahun	KAB. MOROWALI	22	0,00		18	1.160.000.000,00
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan	paket	KAB. MOROWALI	1	0,00		5	5.748.072.000,00
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi	unit/tahun	KAB. MOROWALI	22	730.000.000,00		18	580.000.000,00
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi	paket	KAB. MOROWALI	22	0,00		4	2.749.036.000,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal yang terakreditasi Tipe C	%	DISHUB	20	605.000.000,00		20	1.015.000.000,00
2	15	02	2.03	01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	DISHUB	0	0,00		3	50.000.000,00
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Bangunan Terminal untuk Pemenuhan Standar Tipe C	Obyek	KEC. BUNGKU TENGAH	0	0,00		2	350.000.000,00
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal	paket	Desa Buleleng, Kec. Bungku Pesisir	2	590.000.000,00		2	590.000.000,00
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang terpelihara dan direhabilitasi	paket	-	0	0,00		1	25.000.000,00
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Terminal C	orang	DISHUB	1	15.000.000,00		0	0,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang di terbitkan	%	DISHUB	20	43.500.000,00		20	43.500.000,00
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	Tahun	DISHUB	1	37.000.000,00		1	37.000.000,00
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang diawasi	Tahun	KAB. MOROWALI	1	6.500.000,00		1	6.500.000,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji Keur	%	DISHUB	50	501.000.000,00		65	901.000.000,00
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Gedung	KTM BUNGKU	1	300.000.000,00		1	450.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor	Aplikasi	KTM BUNGKU	1	0,00		0	0,00
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	orang	DISHUB	4	120.000.000,00		3	90.000.000,00
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Wajib Uji Berkala	unit	KTM BUNGKU	1000	7.500.000,00		1000	7.500.000,00
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Slip dan Buku Keur (Buku Uji)	lembar	KTM BUNGKU	1000	7.500.000,00		1000	7.500.000,00
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di sosialisasikan	Kegiatan	KAB. MOROWALI	2	12.000.000,00		2	12.000.000,00
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Identifikasi Dan Analisis	Dokumen	KAB. MOROWALI	2	12.000.000,00		2	12.000.000,00
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	unit/tahun	KTM BUNGKU	4	0,00		4	250.000.000,00
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dikoordinasikan	Kegiatan	LUAR DAERAH	2	30.000.000,00		4	60.000.000,00
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	KTM BUNGKU	2	12.000.000,00		2	12.000.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	%	KAB. MOROWALI	100	0,00		50	150.000.000,00
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Panjang Jalan di Kab. Morowali	Dokumen	DISHUB	0	0,00		0	0,00
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	paket	KAB. MOROWALI	0	0,00		1	150.000.000,00
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi/ Persetujuan Andalalin	%	DISHUB	100	112.000.000,00		100	97.000.000,00
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin	Dokumen	DISHUB	1	28.000.000,00		1	28.000.000,00
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Penilai Andalalin	orang	LUAR DAERAH	2	30.000.000,00		1	15.000.000,00
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Penilaian Hasil	Kegiatan	KAB. MOROWALI	3	24.000.000,00		3	24.000.000,00
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang diawasi	Kegiatan	KAB. MOROWALI	2	30.000.000,00		2	30.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Angkutan Orang dan/atau Barang	%	KAB. MOROWALI	100	993.940.000,00		100	2.795.000.000,00
2	15	02	2.09	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang	unit	KAB. MOROWALI	3	968.940.000,00		12	2.770.000.000,00
2	15	02	2.09	02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dikendalikan dan diawasi	Kegiatan	KAB. MOROWALI	2	25.000.000,00		2	25.000.000,00
2	15	02	2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali	%	DISHUB	100	0,00		100	77.000.000,00
2	15	02	2.11	01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali	Dokumen	DISHUB	0	0,00		0	0,00
2	15	02	2.11	02 Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang di Tetapkan	Dokumen	DISHUB	1	0,00		1	17.000.000,00
2	15	02	2.11	03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kegiatan	KAB. MOROWALI	1	0,00		2	30.000.000,00
2	15	02	2.11	03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian (Penertiban Angkutan)	Kegiatan	KAB. MOROWALI	1	0,00		2	30.000.000,00
2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban	%	KAB. MOROWALI	100	28.000.000,00		100	28.000.000,00
2	15	02	2.14	02 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban	Kegiatan	KAB. MOROWALI	14	28.000.000,00		14	28.000.000,00
2	15	02	2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	Dokumen	KAB. MOROWALI	1	60.000.000,00		1	150.000.000,00
2	15	02	2.16	03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	Dokumen	DISHUB	1	60.000.000,00		1	150.000.000,00
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%	DISHUB	20	157.750.000,00		100	8.749.750.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	15	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Memiliki Izin	Lembaga	KAB. MOROWALI	10	350.000,00		10	350.000,00
2	15	03	2.01	01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	DISHUB	1500	350.000,00		1500	350.000,00
2	15	03	2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Angkutan Laut (Orang Perorangan atau Badan Usaha) Yang Memiliki Izin	%	DISHUB	100	54.350.000,00		100	54.350.000,00
2	15	03	2.02	01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	DISHUB	1500	350.000,00		1500	350.000,00
2	15	03	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	LUAR DAERAH	9	54.000.000,00		9	54.000.000,00
2	15	03	2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api	Jumlah Dokumen Lintas Penyeberangan yang Ditetapkan	Dokumen	KAB. MOROWALI	0	350.000,00		1	250.350.000,00
					Jumlah Usaha Angkutan Laut (Orang Perorangan atau Badan Usaha) yang memiliki Dokumen Persetujuan Pengoperasian Kapal	lembar	KAB. MOROWALI	1200			1200	
2	15	03	2.06	01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan	Dokumen	-	0	0,00		1	250.000.000,00
					Jumlah Dokumen Persetujuan Pengoperasian Kapal	lembar	DISHUB	1200	350.000,00		1200	350.000,00
2	15	03	2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	%	KAB. MOROWALI	100	36.350.000,00		100	36.350.000,00
2	15	03	2.08	01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	DISHUB	1200	350.000,00		1200	350.000,00
2	15	03	2.08	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	LUAR DAERAH	6	36.000.000,00		6	36.000.000,00
2	15	03	2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	%	DISHUB	100	12.000.000,00		100	554.000.000,00

Kode					Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Disusun	Dokumen	-	0	0,00		1	500.000.000,00
2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kegiatan	KAB. MOROWALI	9	12.000.000,00		9	54.000.000,00
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	unit/tahun	KAB. MOROWALI	12	0,00		9	7.800.000.000,00
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	unit/tahun	KAB. MOROWALI	8	0,00		7	7.100.000.000,00
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga/Tambatan Perahu	unit/tahun	KAB. MOROWALI	4	0,00		2	700.000.000,00
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	%	KAB. MOROWALI	100	54.350.000,00		100	54.350.000,00
2	15	03	2.19	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	lembar	DISHUB	1200	350.000,00		1200	350.000,00
2	15	03	2.19	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	Kab. Morowali	1	54.000.000,00		9	54.000.000,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.921.114.131,00			6.243.281.376,00
2	16	01	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.921.114.131,00			6.243.281.376,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	DISKOMINFO	100	3.405.988.431,00		100	2.707.893.976,00
2	16	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	DISKOMINFO	100	0,00		100	43.000.000,00
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	0,00		1	3.000.000,00
2	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program	Dokumen	-	0	0,00		0	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	-	0	0,00		40.000.000,00
2	16	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kegiatan administrasi keuangan	%	DISKOMINFO	100	1.823.614.131,00		10.500.000,00
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yang Ada	orang	DISKOMINFO	19	1.821.114.131,00		0,00
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di Susun yang di Susun	Dokumen	DISKOMINFO	1	2.500.000,00		2.500.000,00
2	16	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan/Semesteran	Dokumen	-	0	0,00		5.000.000,00
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	-	0	0,00		3.000.000,00
2	16	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang administrasi umum	%	DISKOMINFO	100	1.451.544.300,00		2.305.363.976,00
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Yang Tersedia	Bulan	DISKOMINFO	12	1.600.000,00		2.000.000,00
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	DISKOMINFO	12	79.800.000,00		80.000.000,00
2	16	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Tersedia	unit	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Jumlah Pegawai Yang Ada	orang	DISKOMINFO	19	0,00		0,00
2	16	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	%	-	0	0,00		0,00
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	0	0,00		10.000.000,00
2	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan Yang Tersedia	Bulan	DISKOMINFO	12	776.351.976,00		776.351.976,00
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor Yang Tersedia	Bulan	DISKOMINFO	12	900.000,00		900.000,00
2	16	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	-	0	0,00		150.000.000,00
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Bulan	DISKOMINFO	12	15.218.000,00		15.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Ada	Bulan	DISKOMINFO	12	102.500.000,00		12	105.000.000,00
2	16	01		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Penyediaan Komponen Listrik	Jenis	DISKOMINFO	2	3.000.000,00		2	3.500.000,00
2	16	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	buah	DISKOMINFO	73	17.552.000,00		74	22.432.000,00
2	16	01		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	lusin	-	0	0,00		4	2.500.000,00
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	-	0	0,00		1	5.000.000,00
2	16	01		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dos	DISKOMINFO	350	6.550.000,00		350	7.000.000,00
2	16	01		18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	Kegiatan	Luar Daerah	20	182.260.000,00		20	250.000.000,00
2	16	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	unit	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01		20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Yang Seharusnya Ada	unit	-	0	0,00		1	475.180.000,00
2	16	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas								
2	16	01		22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Yang Seharusnya Ada	set	-	0	0,00		1	20.000.000,00
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Yang Ada	unit	-	0	0,00		3	30.000.000,00
2	16	01		25	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mobileur	buah	DISKOMINFO	22	32.280.500,00		20	50.000.000,00
2	16	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan								
2	16	01		27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas								
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	-	0	0,00		1	50.000.000,00
2	16	01		29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan								
2	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	DISKOMINFO	1	10.000.000,00		2	20.000.000,00
2	16	01		31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah								
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	%	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01		33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas								
2	16	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Yang Ada	Tahun	-	0	0,00		1	200.000.000,00
2	16	01		35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	buah	-	0	0,00		22	20.000.000,00
2	16	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	16	01	2.03	37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas								
2	16	01	2.03	38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung	DISKOMINFO	1	223.531.824,00		0	0,00
2	16	01	2.03	39 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan								
2	16	01	2.03	40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	0	0,00		1	10.000.000,00
2	16	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya	%	DISKOMINFO	100	130.830.000,00		100	349.030.000,00
2	16	01	2.04	01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin/Kartu Absensi	unit	DISKOMINFO	1	1.830.000,00		41	75.030.000,00
2	16	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	pasang	-	0	0,00		20	20.000.000,00
2	16	01	2.04	03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Kerja Lapangan Yang Disediakan	pasang	-	0	0,00		20	20.000.000,00
2	16	01	2.04	04 Pengadaan Pakaian Korpri	Pakaian Korpri	pasang	-	0	0,00		20	15.000.000,00
2	16	01	2.04	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	pasang	-	0	0,00		20	50.000.000,00
2	16	01	2.04	06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	orang	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01	2.04	07 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	orang	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01	2.04	08 Pemindahan Tugas PNS	Pemindahan Tugas PNS	orang	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01	2.04	09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	DISKOMINFO	5	129.000.000,00		3	69.000.000,00
2	16	01	2.04	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	-	0	0,00		0	0,00
2	16	01	2.04	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN/PHL Yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	0	0,00		6	100.000.000,00
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Program Informasi dan Komunikasi Publik	%	DISKOMINFO	100	326.800.000,00		100	1.050.000.000,00
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	%	PEMDA KAB. MOROWALI	100	326.800.000,00		100	1.050.000.000,00
2	16	02	2.01	01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	-	0	0,00		4	100.000.000,00
2	16	02	2.01	02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pelaporan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	%	-	0	0,00		100	50.000.000,00
2	16	02	2.01	03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Presentase Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kecamatan	DISKOMINFO	9	91.800.000,00		9	150.000.000,00
2	16	02	2.01	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Perencanaan Media Komunkasi yang di kelola	Aplikasi	-	0	0,00		2	100.000.000,00
2	16	02	2.01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Informasi Pembangunan Daerah	Media	-	0	0,00		1	200.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Media Lokal yang mempublikasikan Kegiatan Pemerintah Daerah	Media	DISKOMINFO	16	35.000.000,00	16	50.000.000,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Lokal Yang Dipublikasikan	Media	DISKOMINFO	16	200.000.000,00	16	200.000.000,00
2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	%	-	0	0,00	0	0,00
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Manajemen Komunikasi Krisis	%	-	0	0,00	0	0,00
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ASN/PHL Yang Mengikuti Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Orang /Kegiatan	-	0	0,00	8	100.000.000,00
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	%	-	0	0,00	0	0,00
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	%	-	0	0,00	100	100.000.000,00
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi Informatika	%	DISKOMINFO	100	2.188.325.700,00	100	2.485.387.400,00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi Perangkat Darah	PEMDA KAB. MOROWALI	48	1.215.387.400,00	48	1.215.387.400,00
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Organisasi Perangkat Darah	-	0	0,00	0	0,00
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah OPD Yang Mengelola Website milik Pemerintah Daerah	Organisasi Perangkat Darah	PEMDA KAB. MOROWALI	48	40.000.000,00	48	40.000.000,00
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan internet	Organisasi Perangkat Darah	PEMDA KAB. MOROWALI	48	1.175.387.400,00	48	1.175.387.400,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	PEMDA KAB. MOROWALI	100	972.938.300,00	100	1.270.000.000,00
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	-	0	0,00	0	0,00
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	buah/set	DISKOMINFO	3	95.938.300,00	5	200.000.000,00
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelola Pusat Data Pemerintah Daerah	orang	DISKOMINFO	4	240.000.000,00	6	360.000.000,00
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	unit	DISKOMINFO	5	517.000.000,00	3	350.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kecamatan	Dalam Daerah	0	0,00		9	100.000.000,00
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Profil Statistik yang dipublikasikan	Buku	DISKOMINFO	1	100.000.000,00		1	100.000.000,00
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi	DISKOMINFO	1	20.000.000,00		2	60.000.000,00
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	%	-	0	0,00		0	0,00
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	%	-	0	0,00		100	50.000.000,00
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Pengembangan dan Komunikasi Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	%	-	0	0,00		0	0,00
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase pengelolaan Government Chief Information (GCIO)	orang	-	0	0,00		3	50.000.000,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.837.029.135,00			11.853.200.290,00
2	17	01	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.837.029.135,00			11.853.200.290,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Predikat	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah	B	3.312.301.537,00		B	3.458.344.290,00
2	17	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian target evaluasi kinerja Dinas Kopumkm	%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	87	1.698.250,00		90	10.000.000,00
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan renja	Dokumen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	0,00		1	5.000.000,00
2	17	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	1.698.250,00		1	5.000.000,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase capaian realisasi keuangan Dinas Kopumkm	%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100	2.006.985.601,00		100	2.033.209.859,00
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	-	12	2.006.985.601,00		12	2.033.209.859,00
2	17	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Capaian Target Administrasi Dinas Kopumkm	%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100	1.243.617.686,00		100	1.355.134.431,00
2	17	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lembar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	15.000.000,00		1	20.000.000,00
2	17	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Jumlah Layanan ketersediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS	Bulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12	0,00		12	86.925.551,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	17	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00
2	17	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah yang di Bayarkan Honorrya	orang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20	522.903.576,00		20	522.903.576,00
2	17	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor	Bulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12	900.000,00		12	1.200.000,00
2	17	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Jenis	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	15	25.000.000,00		15	30.000.000,00
2	17	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	50	19.730.000,00		50	0,00
						Jumlah Penggandaan yang tersedia	lembar	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	75.120	0,00		75.120	25.000.000,00
2	17	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10	66.172.700,00		11	56.384.590,00
2	17	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman/ Snack yang tersedia	Dos	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	488	17.000.000,00		488	17.000.000,00
						Jumlah Air Galon yang tersedia	Galon	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	240	0,00		240	0,00
2	17	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah	Kegiatan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20	352.055.000,00		20	353.514.304,00
2	17	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2	34.000.000,00		0	0,00
2	17	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	6	30.856.410,00		19	32.206.410,00
2	17	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	0,00		1	50.000.000,00
2	17	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	150.000.000,00		1	150.000.000,00
2	17	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Dinas Kopumkm yang mengikuti Diklat	%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	13	60.000.000,00		13	60.000.000,00
2	17	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin kartu absensi	unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0	0,00		0	0,00
2	17	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek	orang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2	60.000.000,00		2	60.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	Kabupaten Morowali	34,71	0,00		36,36	150.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah koperasi yang aktif	unit	Kabupaten Morowali	42	0,00		Na	150.000.000,00
2	17	03	2.01	01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang bersertifikat (NIK)	unit	Kabupaten Morowali	18	0,00		20	75.000.000,00
2	17	03	2.01	02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	unit	Kabupaten Morowali	19	0,00		22	75.000.000,00
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	%	Kabupaten Morowali	40,48	19.840.000,00		45,45	195.000.000,00
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang memiliki pertumbuhan omset yang baik	unit	Kabupaten Morowali	18	19.840.000,00		19	195.000.000,00
2	17	04	2.01	01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat	unit	Kabupaten Morowali	17	19.840.000,00		20	125.000.000,00
2	17	04	2.01	02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	unit	Kabupaten Morowali	5	0,00		5	70.000.000,00
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	Kabupaten Morowali	100	151.825.000,00		100	234.434.000,00
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	Kabupaten Morowali	100	151.825.000,00		100	234.434.000,00
2	17	05	2.01	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	orang	Kabupaten Morowali	30	151.825.000,00		30	234.434.000,00
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang difasilitasi bantuan modal	%	Kabupaten Morowali	1,65	7.102.522.500,00		4,13	5.180.492.000,00
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal	unit	Kabupaten Morowali	7	7.102.522.500,00		5	5.180.492.000,00
2	17	06	2.01	01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Jumlah Koperasi yang dibina	unit	Kabupaten Morowali	15	0,00		17	0,00
					Jumlah koperasi yang difasilitasi	unit	Kabupaten Morowali	7	7.102.522.500,00		5	5.180.492.000,00
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	Kabupaten Morowali	80	859.334.298,00		83,33	1.134.930.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	%	Kabupaten Morowali	2,59	859.334.298,00		2,99	1.134.930.000,00
2	17	07	2.01	01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dibina	unit	Kabupaten Morowali	125	17.000.000,00		150	50.000.000,00
2	17	07	2.01	02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	unit	Kabupaten Morowali	10	0,00		15	80.000.000,00
2	17	07	2.01	03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki izin	unit	Kabupaten Morowali	250	0,00		275	75.000.000,00
2	17	07	2.01	04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan	orang	Kabupaten Morowali	100	842.334.298,00		100	854.930.000,00
2	17	07	2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah temu koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Kabupaten Morowali	5	0,00		5	75.000.000,00
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas	%	Kabupaten Morowali	3,88	1.391.205.800,00		4,98	1.500.000.000,00
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	unit	Kabupaten Morowali	100	1.391.205.800,00		125	1.500.000.000,00
2	17	08	2.01	01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	unit	Kabupaten Morowali	35	1.391.205.800,00		40	1.500.000.000,00
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.874.723.809,00			5.393.494.400,00
2	18	01	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					6.874.723.809,00			5.393.494.400,00
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	100	5.139.723.809,00		100	2.613.494.400,00
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	2.376.486.309,00		100 %	10.000.000,00
2	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	-	0	2.374.723.809,00		0	0,00
2	18	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD	Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	1.762.500,00		2	10.000.000,00
2	18	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	2.701.237.500,00		100 %	2.554.494.400,00
2	18	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air dan listrik	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	24.000.000,00		12	25.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai PHL pada DPMPTSP	orang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	28	712.794.336,00		28	717.840.000,00
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan pembersih	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	10.000.000,00		12	15.000.000,00
						Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	900.000,00		12	900.000,00
2	18	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	15.000.000,00		12	10.000.000,00
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	27.896.425,00		12	35.000.000,00
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	5.000.000,00		12	20.000.000,00
2	18	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop /Note Book	unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	4	30.956.000,00		4	30.956.000,00
						Jumlah Printer Foto Copy	unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	14.938.400,00		4	14.938.400,00
						Jumlah Meja Kerja	buah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	32.157.300,00		30	120.000.000,00
						Jumlah Kursi Kerja	buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	31.350.000,00		31	100.000.000,00
						Jumlah Alat Pendingin/AC	buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	31.904.075,00		3	25.000.000,00
						Jumlah Komputer /PC	unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	64.400.000,00		10	80.000.000,00
						Jumlah Lemari Arsip	buah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	13.033.164,00		9	65.000.000,00
						Jumlah UPS	buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	6.697.800,00		4	8.000.000,00
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	25.000.000,00		12	15.000.000,00
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	Luar Daerah	12	500.000.000,00		12	650.000.000,00
2	18	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Roda Dua	unit	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	114.360.000,00		12	114.360.000,00
						Jumlah Mobil Jabatan	unit		0	0,00		2	450.000.000,00
2	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Kantor	unit	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1.000.000.000,00		0	0,00
2	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	unit	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11	34.500.000,00		10	50.000.000,00
						Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional	unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	11	6.350.000,00		10	7.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	18	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Capaian Kegiatan pada Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	24	62.000.000,00		2	49.000.000,00
2	18	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	pasang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	24	12.000.000,00		0	0,00
2	18	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM II	orang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	0,00		0	0,00
						Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM III	orang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	26.000.000,00		2	49.000.000,00
						Jumlah pegawai yang mengikuti PIM IV	orang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	24.000.000,00		0	0,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMA yang mendapat kemudahan investasi	%	9 Kecamatan	85 %	250.000.000,00		90%	275.000.000,00
						Persentase PMDN yang mendapat kemudahan investasi	%	9 Kecamatan	85 %			90%	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Capaian Sub kegiatan penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif	%	9 Kecamatan	12	100.000.000,00		6	275.000.000,00
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PMA yang Bermohon Insentif	PMA	3 Kecamatan	2	50.000.000,00		1	100.000.000,00
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tingkat capaian komponen yang mendapat insentif (Komponen)	%	3 Kecamatan	10	50.000.000,00		3	175.000.000,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi peluang Investasi	Peta	9 Kecamatan	1	150.000.000,00		0	0,00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi secara digital (Peta Digital)	Peta	9 Kecamatan	1	150.000.000,00		0	0,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase PMA baru yang berinvestasi	%	Luar Daerah	87%	550.000.000,00		95%	850.000.000,00
						Persentase PMDN baru Berinvestasi	%	Luar Daerah	80 %			95%	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%	Luar Daerah	8	550.000.000,00		35	850.000.000,00
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media yang di Promosikan	Media	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	100.000.000,00		5	350.000.000,00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor PMA baru yang berminat menanamkan modalnya	PMA	Luar Daerah	4	450.000.000,00		4	500.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	90%	550.000.000,00		95%	995.000.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki SOP	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	90%	550.000.000,00		95%	995.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dengan OSS	Jenis	Dinas Penanamn Modal dan PTSP	26	150.000.000,00		28	275.000.000,00
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	Izin Usaha	Kecamatan	620	200.000.000,00		700	370.000.000,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti	Aduan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	200.000.000,00		3	350.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketercapaian RKT	%	9 Kecamatan	90%	310.000.000,00		96%	385.000.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	9 Kecamatan	15	310.000.000,00		16	385.000.000,00
2	18	05	2.01	01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMA	Rupiah	9 Kecamatan	15	135.000.000,00		12	235.000.000,00
2	18	05	2.01	03	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Permasalahan PMA	Kasus	9 Kecamatan	4	175.000.000,00		2	150.000.000,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	80%	75.000.000,00		90%	275.000.000,00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	80%	75.000.000,00		90%	275.000.000,00
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP	%	Dinas Penanaman MODal dan PTSP	80%	75.000.000,00		90%	275.000.000,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.913.727.986,00			11.143.952.400,00
2	19	02	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					6.913.727.986,00			11.143.952.400,00
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	%	Kab. Morowali	100	5.156.820.812,00		100	4.866.927.400,00
2	19	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Kab. Morowali	2	32.645.000,00		5	115.000.000,00
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Morowali	0	0,00		1	5.000.000,00
2	19	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Morowal	0	0,00		2	10.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan	Kab. Morowali	2	32.645.000,00		2	100.000.000,00
2	19	01		2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan	Tahun	Kab. Morowali	1	3.489.016.258,00		1	3.019.714.000,00
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	3.484.534.258,00		1	3.009.714.000,00
2	19	01		2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun	Dokumen	Kab. Morowali	3	4.482.000,00		3
2	19	01	2.03		Administrasi Umum	harap disijumlah Administrasi Umum	Tahun	Kab. Morowali	1	1.635.159.554,00		1	1.732.213.400,00
2	19	01		2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	Kab. Morowali	1	2.300.000,00		1
2	19	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	30.000.000,00		1	14.000.000,00
2	19	01		2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	5.250.000,00		1
2	19	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor tenaga administrasi dalam 1 tahun	orang	Kab. Morowali	31	711.377.340,00		34	777.980.400,00
2	19	01		2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	6.552.000,00		1
2	19	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	19.494.000,00		1	25.000.000,00
2	19	01		2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggadaan dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	15.136.750,00		1
2	19	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tahun	Kab. Morowali	1	1.187.500,00		1	17.250.000,00
2	19	01		2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	unit	Kab. Morowali	1	32.091.000,00		3
2	19	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	14.384.172,00		1	10.000.000,00
2	19	01		2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dalam 1 tahun	Tahun	Kab. Morowali	1	231.430.000,00		1
2	19	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	unit	Kab. Morowali	3	123.225.000,00		3	291.890.000,00
2	19	01		2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	unit	Kab. Morowali	1	0,00		15
2	19	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	unit	Kab. Morowali	3	0,00		4	45.000.000,00
2	19	01		2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Lemari Arsip	buah	Kab. Morowali	29	92.731.792,00		3
2	19	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	Kab. Morowali	3	350.000.000,00		1	100.000.000,00
2	19	01		2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kab. Morowali	0	0,00		2
2	19	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	19	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	%	Kab. Morowali	42,86	0,00		14,29	0,00
2	19	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal								
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Capaian Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	Kab. Morowali	2	743.621.174,00		5	1.900.000.000,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	persentase pemuda pelopor	%	Kab. Morowali	0,002	0,00		0	200.000.000,00
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	orang	Kab. Morowali	0	0,00		2	200.000.000,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	Kab. Morowali	5	743.621.174,00		9	1.700.000.000,00
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	organisasi	Kab. Morowali	2	743.621.174,00		4	1.700.000.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pertumbuhan prestasi olahraga	%	Kab. Morowali	19	794.896.000,00		23	4.268.525.000,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase cabang olahraga pada jenjang pendidikan yang dibina	%	Kab. Morowali	100	135.500.000,00		100	2.214.525.000,00
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Event olahraga satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan	Event	Kab. Morowali	0	0,00		1	1.300.000.000,00
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana cabang olahraga yang dikembangkan	unit	Kab. Morowali	196	135.500.000,00		968	914.525.000,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	%	Kab. Morowali	58	609.146.000,00		63	1.400.000.000,00
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	Cabor	Kab. Morowali	10	196.068.000,00		13	700.000.000,00
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam kejuaraan	Cabor	Kab. Morowali	9	413.078.000,00		11	700.000.000,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	persentase cabang olahraga yang dibina	%	Kab. Morowali	74	0,00		79	594.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	19	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlit yang berprestasi	orang	Kab. Morowali	0	0,00		32	450.000.000,00
2	19	03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlit dan pelatih berprestasi yang diberikan penghargaan	orang	Kab. Morowali	0	0,00		40	144.000.000,00
2	19	03	04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga	%	Kab. Morowali	95	50.250.000,00		100	60.000.000,00
2	19	03	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama organisasi keolahragaan	Kerja Sama	Kab. Morowali	20	50.250.000,00		21	60.000.000,00
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kegiatan	Kab. Morowali	3	218.390.000,00		2	108.500.000,00
2	19	04	01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kegiatan	Kab. Morowali	3	218.390.000,00		2	108.500.000,00
2	19	04	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah event kepramukaan	Event	Kab. Morowali	2	218.390.000,00		1	60.000.000,00
2	19	04	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan yang tersedia	unit	Kab. Morowali	0	0,00		8	48.500.000,00
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					107.790.409.545,00			144.834.998.442,00
2	22	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					107.790.409.545,00			144.834.998.442,00
2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Dinas Pendidikan Daerah	%	Tersebar	B	106.742.111.045,00		100	139.918.754.442,00
2	22	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Daerah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100%	288.779.000,00		100	728.521.227,00
2	22	01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0,00		2	49.612.500,00
2	22	01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	Dokumen	Dinas Pendidkan Daerah Kab. Morowali	5	20.000.000,00		5	11.655.000,00
2	22	01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0,00		-	0,00
					Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	43	268.779.000,00		43	562.516.227,00
2	22	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	%	-	-	0,00		-	0,00
					Jumlah kegiatan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Kegiatan	-	-	0,00		1	49.612.500,00
2	22	01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	-	-	0,00		1	55.125.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase capaian akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan Daerah	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	103.577.567.320,00		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100%	103.365.067.320,00		
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	-	-	0,00		
						Persentasi Penyediaan operasional UPTD/Korwilcam	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	185.000.000,00		
						Persentasi Penyediaan operasional SKB	%	Kantor SKB	100	17.000.000,00		
2	22	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	%	-	-	0,00		
2	22	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	%	-	-	0,00		
2	22	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	-	-	0,00		
2	22	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	2	5.250.000,00		
2	22	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	5.250.000,00		
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	0,00		
2	22	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	-	-	0,00		
2	22	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi Umum	%	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	100	2.676.789.725,00		
2	22	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket Jasa Surat Menyurat	Kegiatan	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	26.250.000,00		
2	22	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	orang	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	5	39.500.000,00		
						Jumlah kebutuhan jasa sistem dan informasi manajemen pendidikan	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	1	0,00		
						Jumlah dokumen Profil Pendidikan dan Pangkalan Data Informasi berbasis Online	Dokumen	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	2	0,00		
2	22	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	3	15.750.000,00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	22	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Persentase Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Kegiatan	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebutuhan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	%	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	orang	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	40	781.200.000,00		40	1.200.000.000,00
2	22	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan	Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	2	12.600.000,00		2	13.986.000,00
2	22	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kegiatan	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	10.500.000,00		1	11.655.000,00
2	22	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	Tahun	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	69.902.725,00		1	275.625.000,00
2	22	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	lembar	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	12767540	35.900.000,00		135086	44.100.000,00
2	22	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	10.000.000,00		-	0,00
2	22	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	5	168.507.000,00		5	291.375.000,00
2	22	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	paket	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	30	22.200.000,00		35	33.799.500,00
2	22	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase kebutuhan Makanan dan Minuman	Dos	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	2710	48.980.000,00		3000	58.275.000,00
2	22	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan	Akan ditetapkan sesuai kebutuhan	100	525.000.000,00		120	582.750.000,00
2	22	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kebutuhan Mobil Jabatan	unit	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	Kantor Dinas Pendidikan Kab. Morowali	10	85.000.000,00		10	166.500.000,00
2	22	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	unit	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	5	52.500.000,00		5	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	22	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan Mebeleur	unit	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	158	210.000.000,00		165	233.100.000,00
2	22	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	5	52.500.000,00		5	58.275.000,00
2	22	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/mobil yang dipelihara	unit	-	-	0,00		3	11.655.000,00
2	22	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/roda dua yang dipelihara	unit	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	71	10.500.000,00		71	11.655.000,00
2	22	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Tahun	-	-	0,00		1	12.075.000,00
2	22	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	unit	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	500.000.000,00		1	877.058.064,00
2	22	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	198.975.000,00		100	403.902.576,00
2	22	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah kebutuhan Mesin/Kartu Absensi	unit	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	1	5.000.000,00		-	0,00
2	22	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kebutuhan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	lembar	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	lembar	-	-	0,00		-	0,00
2	22	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	lembar	Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali	90	13.500.000,00		-	0,00
2	22	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	-	-	0,00		20	13.403.250,00
				Jumlah peserta Pim II		orang	-	-	0,00		1	60.000.000,00	
				Jumlah peserta Pim III		orang	-	-	0,00		-	0,00	
				Jumlah peserta Pim IV		orang	Mengikuti jadwal yang akan ditetapkan	4	104.075.000,00		2	160.500.000,00	
2	22	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	-	-	0,00		1	14.546.826,00
				Jumlah kegiatan pembinaan dewan pendidikan		Kegiatan	-	-	0,00		8	22.050.000,00	
				Jumlah kegiatan pembinaan komite sekolah		Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	2	76.400.000,00		2	94.815.000,00	
2	22	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	-	-	0,00		1	38.587.500,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	998.298.500,00		100	4.258.164.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya yang dilestarikan	Kegiatan	Wilayah Kabupaten Morowali	36	796.298.500,00		35	478.584.000,00
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek budaya	buah	-	-	0,00		9	31.212.000,00
						Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival kebudayaan	Kegiatan	Provinsi Sulawesi Tengah	3	796.298.500,00		3	260.100.000,00
						Jumlah pakaian adat	lembar	-	-	0,00		14	83.232.000,00
						Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Kegiatan	-	-	0,00		-	0,00
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pelaku budaya yang dilatih	orang	-	-	0,00		9	104.040.000,00
						Jumlah kegiatan Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Kegiatan	-	-	0,00		-	0,00
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	2	202.000.000,00		100	1.460.100.000,00
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek kesenian tradisional	Obyek	-	-	0,00		20	208.080.000,00
						Jumlah pelaku kesenian yang dilatih	orang	Wilayah Kabupaten Morowali	12	100.000.000,00		12	100.000.000,00
						Jumlah Pembangunan Sanggar Seni	paket	-	-	0,00		2	1.000.000.000,00
						Jumlah sanggar seni yang dibina	Jenis	-	-	0,00		1	100.000.000,00
						Jumlah paket alat kesenian daerah	paket	-	-	0,00		-	0,00
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah sanggar/lembaga seni dan budaya yang dibina	Jenis	Wilayah Kabupaten Morowali	2	102.000.000,00		5	52.020.000,00
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat	Lembaga	-	-	0,00		10	2.319.480.000,00
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	Lembaga	-	-	0,00		10	2.319.480.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-	-	0,00		100	102.020.000,00
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	Jenis	Wilayah Kabupaten Morowali	5	0,00		10	102.020.000,00
2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistras	Jenis	-	-	0,00		5	52.020.000,00
2	22	05	2.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah pelaku budaya yang dilatih	Jenis	-	-	0,00		5	50.000.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	%	Wilayah Kabupaten Morowali	100	50.000.000,00		100	556.060.000,00
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah karya seni dan benda yang dilestarikan	paket	Wilayah Kabupaten Morowali	1	50.000.000,00		1	556.060.000,00
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah karya seni yang dilestarikan	Kegiatan	-	-	0,00		3	52.020.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	22	06		02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah karya benda yang dilestarikan	Kegiatan	Wiayah Kabupaten Morowali	10	0,00		10	150.000.000,00
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	jumlah pengunjung museum	orang	-	-	0,00		1000	104.040.000,00
						Jumlah pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah	paket	-	-	0,00		1	100.000.000,00
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang dibangun	paket	Wilayah Kabupaten Morowali	1	50.000.000,00		1	150.000.000,00
						Jumlah dokumen sistem informasi sejarah purbakala	Dokumen	Kantor Dinas Pendidikan daerah Kab. Morowali	-	0,00		-	0,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					450.332.000,00			3.084.000.000,00
2	23	01	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH					450.332.000,00			3.084.000.000,00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan binaan dan perpustakaan yang dinilai..	%	DPAD	100	410.332.000,00		100	2.959.000.000,00
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	%	DPAD	100	130.000.000,00		100	591.000.000,00
						Data pustakawan, tenaga teknis perpustakaan	Dokumen	DPAD	25			38	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pengunjung layanan perpustakaan Elektronik	Orang/ Tahun	DPAD	100	0,00		150	80.000.000,00
						Jumlah Katalog judul Buku digital	Buku	DPAD	15	10.000.000,00		25	15.000.000,00
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang di bina dan dinilai	Sekolah	DPAD	22	0,00		25	85.000.000,00
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekhasan koleksi daerah	Kamus	DPAD	2	0,00		4	10.000.000,00
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina	Sekolah	DPAD	5	20.000.000,00		5	76.000.000,00
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM tenaga pengelola perpustakaan	orang	DPAD	3	0,00		3	75.000.000,00
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Buku	DPAD	1500	100.000.000,00		1500	250.000.000,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaen	%	DPAD	100	280.332.000,00		100	2.368.000.000,00
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan daerah	orang	DPAD	4500	0,00		5000	35.000.000,00
						Jumlah Kunjungan Layanan Perpustakaan Mobil Keliling(sekolah)	Sekolah	7 kecamatan	35	80.000.000,00		40	285.000.000,00
						Jumlah kunjungan Perpustakaan kapal terapung	Desa	2 kecamatan	15	0,00		15	242.000.000,00
						Jumlah Pegiat Literasi	Kelompok	Kab. morowali	4	0,00		8	120.000.000,00
						Jumlah Kerjasama (MOU) Perpustakaan	Kerja Sama	DPAD	8	0,00		15	1.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan Budaya Baca kesekolah-sekolah(lomba cerita) &	Tahun	9 kecamatan	1	0,00		1	90.000.000,00
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Perpustakaan dan sarana prasarana	unit	-	1	0,00		5	265.000.000,00
						pembangunan pojok baca dan sejenisnya	unit	-	8	0,00		3	200.000.000,00
						Jumlah perpustakaan yang mendapatkan bantuan	Perpustakaan	-	5	0,00		5	300.000.000,00
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah kegiatan gerakan budaya gemar membaca	Tahun	DPAD	1	30.000.000,00		1	300.000.000,00
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	-	3	170.332.000,00		6	180.000.000,00
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca/ Bunda Baca	per tahun	-	3	0,00		5	350.000.000,00
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (%)	%	DPAD	100	40.000.000,00		100	125.000.000,00
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	Dokumen	9 kecamatan	2	10.250.000,00		2	75.000.000,00
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno Yang di kelola Dan Dikembangkan	Dokumen	DPAD	9	10.250.000,00		9	50.000.000,00
						Jumlah naskah kuno yang di alih mediakan	per tahun	-	2	0,00		2	25.000.000,00
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan di daerah	Dokumen	9 kecamatan	9	29.750.000,00		9	50.000.000,00
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara	Dokumen	9 kecamatan	9	29.750.000,00		9	50.000.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					4.333.170.393,00			8.918.016.793,00
2	24	01	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH					4.333.170.393,00			8.918.016.793,00
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tahun	DPAD	B	4.246.502.393,00		B	4.043.016.793,00
2	24	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	%	DPAD	100%	0,00		100%	4.000.000,00
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	-	2	0,00		2	1.500.000,00
2	24	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	0,00		1	1.500.000,00
2	24	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	0,00		1	1.000.000,00
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan	Presentase capaian target keuangan Dinas Perpustakaan Daerah (%)	%	DPAD	0	3.456.502.393,00		0	2.422.516.793,00
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima gaji dan tunjangan	orang	-	35	3.456.502.393,00		35	2.418.016.793,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	24	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tahun	-	1	0,00		1	1.500.000,00
2	24	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Bulan	-	12	0,00		12	1.500.000,00
2	24	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	-	1	0,00		1	1.500.000,00
2	24	01	2.03		Administrasi Umum	%	DPAD	0	738.000.000,00		0	1.235.500.000,00
2	24	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	DPAD	1	20.000.000,00		1	15.000.000,00
2	24	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	DPAD	20	80.000.000,00		20	20.000.000,00
2	24	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	DPAD	3	5.000.000,00		3	45.000.000,00
2	24	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	orang	DPAD	18	391.115.832,00		18	500.000.000,00
2	24	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	DPAD	12	900.000,00		12	1.500.000,00
2	24	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	DPAD	12	10.000.000,00		12	25.000.000,00
2	24	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	DPAD	12	10.000.000,00		12	15.000.000,00
2	24	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	DPAD	25	15.000.000,00		27	200.000.000,00
2	24	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tahun	-	1	0,00		1	20.000.000,00
2	24	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	DPAD	12	15.000.000,00		12	25.000.000,00
2	24	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan	DPAD	7	150.984.168,00		8	200.000.000,00
2	24	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	-	1	0,00		1	50.000.000,00
2	24	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	unit	-	15	0,00		20	84.000.000,00
2	24	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	unit	DPAD	20	10.000.000,00		23	35.000.000,00
2	24	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	DPAD	1	30.000.000,00		0	0,00
2	24	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	DPAD	0	52.000.000,00		0	381.000.000,00
2	24	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	unit	DPAD	1	2.000.000,00		1	4.000.000,00
2	24	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	orang	-	35	0,00		35	40.000.000,00
2	24	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	orang	-	35	0,00		35	15.000.000,00
2	24	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	DPAD	1	50.000.000,00		1	35.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III	orang	-	1	0,00		1	23.000.000,00
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM IV	orang	-	3	0,00		3	54.000.000,00
2	24	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	-	1	0,00		1	60.000.000,00
2	24	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	-	10	0,00		10	150.000.000,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan	%	DPAD	100%	86.668.000,00		100%	4.600.000.000,00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	DPAD	100%	50.000.000,00		100%	775.000.000,00
						Jumlah tenaga pengelola arsip dinamis yang di bina	Orang/ Tahun	DPAD	1			1	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara	Tahun	-	1	0,00		1	75.000.000,00
						jumlah penelusuran arsip dinamis	arsip	-	1	0,00		1	75.000.000,00
						Sosialisasi/pembinaan arsip dinamis	Tahun	DPAD	1	50.000.000,00		1	150.000.000,00
						Sarana dan prasana arsip dinamis	paket	-	1	0,00		1	250.000.000,00
						Jumlah pengawasan internal arsip	Tahun	-	1	0,00		1	150.000.000,00
						Bimtek pengelolaan arsip dinamis	Tahun	-	1	0,00		1	75.000.000,00
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	%	DPAD	100%	36.668.000,00		100%	3.825.000.000,00
						Jumlah SDM pengelolaan arsip statis	Orang/ Tahun	DPAD	1			1	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilestarikan	Tahun	Kab. Morowali	1	0,00		1	95.000.000,00
						Jumlah tenaga pengelola arsip statis dibina	orang	-	75	0,00		35	135.000.000,00
						Pembangunan DEPO arsip	unit	-	1	0,00		1	3.000.000.000,00
						Jumlah sarana dan prasarana arsip statis	paket	DPAD	1	0,00		1	200.000.000,00
						Jumlah pengawasan arsip statis	Tahun	DPAD	1	36.668.000,00		1	25.000.000,00
						Jumlah penelusuran arsip statis dalam dan luar daerah	Tahun	-	1	0,00		1	100.000.000,00
						Sosialisasi Arsip Statis	Tahun	-	1	0,00		1	150.000.000,00
						Bimtek pengelolaan arsip statis	Tahun	-	1	0,00		1	70.000.000,00
						Jumlah Arsip digital	arsip	-	10	0,00		25	50.000.000,00
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	per tahun	DPAD	1	0,00		1	275.000.000,00
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	DPAD	100	0,00		100	175.000.000,00
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan di tetapkan	per tahun	-	1	0,00		1	75.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang di musnahkan yang memiliki retensi di bawah 10 tahun(sesuai JRA)	per tahun	-	1	0,00		1	100.000.000,00
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip statis yang di musnahkan di kabupaten /kota	per tahun	DPAD	1	0,00		1	100.000.000,00
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah penilaian & penetapan Autentis Arsip statis yang dinyatakan hilang	per tahun	-	1	0,00		1	100.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					38.882.773.753,00			96.134.342.284,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					11.028.766.266,00			25.258.905.000,00
3	25	01	01		DINAS PERIKANAN DAERAH					11.028.766.266,00			25.258.905.000,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerinta Daerah	%	Kab. Morowali	100	4.680.662.766,00		0	2.885.061.000,00
3	25	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Dinas Perikanan Daerah Kab Morowali	100%	5.000.000,00		0	9.500.000,00
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	%	Dinas Perikanan Daerah	100	1.500.000,00		100	3.000.000,00
3	25	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Program	%	Dinas Perikanan Daerah	100	1.500.000,00		100	3.000.000,00
3	25	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	%	Dinas Perikanan Daerah	100	1.000.000,00		100	2.000.000,00
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	%	Dinas Perikanan Daerah	100	1.000.000,00		100	1.500.000,00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan	Presentase Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan	%	-	0	3.436.752.266,00		0	0,00
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah Pegawai yang ada	%	Kab. Morowali	0	3.436.752.266,00		0	0,00
3	25	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
3	25	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Administrasi Umum (%)	%	Dinas Perikanan Daerah Kab Morowali	100	1.188.910.500,00		0	2.659.561.000,00
3	25	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik (Rek Listrik)	Bulan	Kabupaten Morowali	12	36.600.000,00		12	47.400.000,00
3	25	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara	unit	Kabupaten Morowali	22	12.000.000,00		22	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	25	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Honorer Yang Ada	orang	Kabupaten Morowali	284	565.272.000,00		284	565.272.000,00
3	25	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Retribusi	Kabupaten Morowali	12	900.000,00		12	900.000,00
3	25	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	buah	Kabupaten Morowali	12	31.804.500,00		1091	35.000.000,00
3	25	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	lembar	Kabupaten Morowali	100024	37.000.000,00		100024	45.000.000,00
3	25	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor	unit	Kabupaten Morowali	1	70.000.000,00		1	100.000.000,00
						Jumlah Alat Kebersihan Kantor	buah	Dinas Perikanan Daerah	350	10.564.000,00		350	10.564.000,00
						Jumlah Peralatan Dokumenter	unit	Kantor Perikanan Morowali	1	30.000.000,00		0	0,00
						Jumlah Peralatan Komunikasi	unit	Kantor Perikanan Kabupaten Morowali	6	58.200.000,00		0	0,00
3	25	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan (dos) / Jumlah Minuman/ Snack (dos)	Dos	Kabupaten Morowali	770	24.550.000,00		2880	62.496.000,00
3	25	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Kegiatan Rapat Koordinasi (Luar Propinsi & Dalam Propinsi)	Kegiatan	Kabupaten Morowali	36	242.020.000,00		36	450.000.000,00
3	25	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	unit	Kab. Morowali	1	0,00		2	731.929.000,00
3	25	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan alat kantor	unit	-	1	0,00		1	200.000.000,00
3	25	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	unit	-	12	0,00		12	84.000.000,00
3	25	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Bulan	-	12	0,00		12	35.000.000,00
3	25	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	Kab. Morowali	22	70.000.000,00		22	92.000.000,00
3	25	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas dalam kondisi baik	unit	-	10	0,00		10	150.000.000,00
3	25	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	%	-	0	50.000.000,00		0	216.000.000,00
3	25	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bulan	Dinas Perikanan Daerah	12	0,00		0	0,00
3	25	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	Bulan	-	12	0,00		0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	25	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Pim	orang	-	4	0,00		5	101.000.000,00
						Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PPNs Perikanan dan Polsus	orang	PUSDIK Reskrim Mega Mendung Bogor	1	50.000.000,00		1	25.000.000,00
3	25	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi perundang undangan yang akan dilaksanakan	Orang /Kegiatan	-	1	0,00		1	90.000.000,00
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan Tangkap (Ton)	ton	Kab. Morowali	2.000	3.997.634.500,00		2000	11.400.000.000,00
3	25	02	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	ton	Kabupaten Morowali	750	3.408.557.000,00		1000	7.770.000.000,00
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	ton	Kab Morowali	40.000	44.805.000,00		42.000	120.000.000,00
						Jumlah Nelayan Yang mendapat KUSUKA	orang	Tersebar di 9 Kecamatan	18,84304	0,00		1000	0,00
						Jumlah KUSUKA yang tercetak (Kartu KUSUKA)	lembar	9 Kecamatan Tersebar	1000	0,00		1000	0,00
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap (unit)	unit	Kabupaten Morowali	1	500.000.000,00		1	350.000.000,00
3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB Penerima Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Kelompok)	Kelompok	Kabupaten Morowali	16	2.863.752.000,00		37	7.300.000.000,00
3	25	02	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Perikanan Tangkap yang dibina	%	Kab. Morowali	27,83217	175.980.000,00		29,3706	3.130.000.000,00
						Jumlah Kelompok Nelayan yang Terbina	Kelompok	Kab. Morowali	50			0	
						Jumlah Kelompok Nelayan Mandiri/Madya	Kelompok	Kab. Morowali	50			0	
3	25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mendapatkan Pelatihan Pengetahuan dan Teknologi (Orn)	orang	Kabupaten Morowali	10	61.000.000,00		90	450.000.000,00
3	25	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Persentase KUB yang Terbentuk	%	Kab. Morowali	26,25	0,00		26,25	100.000.000,00
						Jumlah KUB Nelayan yang Terbentuk (KUB)	Kelompok	Kabupaten Morowali	105	44.450.000,00		105	0,00
						Jumlah Koperasi Nelayan yang Terbentuk (Koperasi)	Lembaga	Kab. Morowali	1	0,00		1	10.000.000,00
						Jumlah Kelembagaan Nelayan yang Berkembang (KUB)	Kelompok	Kab. Morowali	50	0,00		50	20.000.000,00
						Persentase KUB yang Aktif	%	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
3	25	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah KUB Penerima Modal Usaha (KUB)	Kelompok	Kab. Morowali	5	0,00		10	2.100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah Nelayan yang memperoleh Kartu Asuransi Nelayan (kartu Asuransi)	orang	Kabupaten Morowali	1000	70.530.000,00		1500	400.000.000,00
						Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah(Sehat) Nelayan yang tercetak (Sertifikat)	lembar	Kab. Morowali	100	0,00		100	50.000.000,00
						Jumlah Kelompok Nelayan Kelas Pemula	Kelompok	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
3	25	02	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan tangkap yang melakukan Bongkar di TPI (Ton)	ton	Kabupaten Morowali	100	361.941.500,00		0	350.000.000,00
3	25	02	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Standar Pelayanan Opsional TPI (SOP) (Dokumen)	Dokumen	Kabupaten Morowali	1	0,00		0	0,00
						Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Perikanan TPI (TON)	ton	Kabupaten Morowali	100	161.941.500,00		100	150.000.000,00
3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana TPI (Unit)	unit	Kabupaten Morowali	3	200.000.000,00		1	200.000.000,00
3	25	02	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kapal yang Memiliki TDK (%)	%	Kabupaten Morowali	35%	51.156.000,00		35%	150.000.000,00
3	25	02	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Standar Pelayanan Opsional (SOP) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal (Dok)	Dokumen	Kabupaten Morowali	1	8.080.000,00		0	0,00
3	25	02	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Kapal yang memiliki Tanda Daftar Kapal	unit	Kabupaten Morowali	1500	43.076.000,00		1500	150.000.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (Ton)	ton	Kab. Morowali	45.390	1.521.704.000,00		4.685	9.859.195.000,00
3	25	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidaya yang Memiliki Izin Usaha Budidaya (%)	%	Kabupaten Morowali	40	26.995.000,00		30%	99.195.000,00
						Jumlah Pembudidaya yang Memiliki Izin Usaha	Dokumen	-	0			0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	25	03	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Budidaya (Dok)	Dokumen	Kabupaten Morowali	100	26.995.000,00		100	99.195.000,00
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang Terberdayakan (%)	%	Tersebar di 9 Kecamatan	16	53.422.000,00		27	970.000.000,00
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pokdakan yang Terbentuk (%)	%	menui kepulauan bungku selatan bungku pesisir	5,21	53.422.000,00		12,50	60.000.000,00
						Jumlah Pokdakan yang Terbentuk (Pokdakan)	Kelompok	menui kepulauan bungku selatan bungku pesisir	0	0,00		12	0,00
						Jumlah Koperasi yang Terbentuk (Koperasi)	Lembaga	Wita Ponda	1	0,00		1	10.000.000,00
						Jumlah Pokdakan (Pokdakan)	Kelompok	-	0	0,00		96	0,00
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase Pokdakan Penerima Modal Usaha (%)	%	-	0	0,00		7,29	700.000.000,00
						jumlah Pokdakan Penerima Modal Usaha (Pokdakan)	Kelompok	Menui kepulauan Bungku selatan wita ponda bumi raya	0	0,00		7	0,00
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pembudidaya yang Menerima Pelatihan Pengetahuan teknologi dan informasi (%)	%	Bumi raya Wita Ponda	5	0,00		12	150.000.000,00
						Jumlah Pembudidaya yang Menerima Pelatihan Pengetahuan dan Teknologi (orang)	orang	Bumi Raya Wita Ponda	60	0,00		150	0,00
						Jumlah Pembudidaya Ikan (RTP)	orang	-	0	0,00		1.249	0,00
						Jumlah Aparatur Bidang Budidaya Penerima Pelatihan Teknis (orang)	orang	Yogyakarta bogor	2	0,00		5	50.000.000,00
3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sapras (%)	%	Tersebar pada 9 kecamatan	24	1.441.287.000,00		29	8.790.000.000,00
3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	ton	9 kecamatan	217.246	41.843.750,00		221.931	35.000.000,00
						Persentase Pembudidaya yang Memiliki Kartu Pelaku Usaha Perikanan (%)	%	9 kecamatan	12	20.190.000,00		16	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah pembudidaya yang memiliki KUSUKA (orang)	orang	9 kecamatan	0	0,00		200	0,00
						Aplikasi Perikanan	Aplikasi	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pokdakan Penerima Prasarana Budidaya (%)	%	- Wita Ponda - Bumi Raya	3	0,00		3	1.030.000.000,00
						jumlah Pokdakan Penerima Prasarana Budidaya (Pokdakan)	Kelompok	-	0	0,00		3	0,00
						Jumlah prasarana Pembudidayaan ikan yang tersedia (Unit)	unit	-	0	0,00		3	0,00
						jumlah prasarana Balai Benih Udang yang Tersedia (Unit)	unit	Bumi Raya	1	772.207.500,00		1	500.000.000,00
						jumlah prasarana Balai Benih Ikan yang Tersedia (Unit)	unit	-	0	0,00		1	1.000.000.000,00
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pokdakan penerima sarana budidaya (%)	%	Calon Lokasi Mbokita Pado-pado Pebotoa umbele sampeantaba	16	585.615.750,00		26	2.600.000.000,00
						jumlah Pokdakan Penerima Sarana Budidaya(Pokdakan)	Kelompok	-	0	0,00		25	0,00
						Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan yang tersedia (Unit)	unit	-	-	0,00		25	0,00
						jumlah Sarana Balai Benih Udang yang Tersedia (Unit)	unit	Bumi Raya	2	0,00		1	350.000.000,00
						jumlah saran Balai Benih Ikan yang Tersedia (Unit)	unit	Bumi raya	0	0,00		1	500.000.000,00
3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Penyakit Ikan (Kasus)	Kasus	Palu	5	5.800.000,00		5	50.000.000,00
						jenis Penyakit Ikan (jenis)	Jenis	-Wita Ponda -Bumi Raya -Bungku Barat -Bungku Timur -Bahodopi	2	8.595.000,00		2	25.000.000,00
						kualitas air (Pokdakan)	Kelompok	Wita Ponda Bumi raya	10	7.035.000,00		50	100.000.000,00
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Pembudidayaan ikan yang Tersertifikasi (%)	%	Menui Kepulauan Bungku selatan	12	0,00		12	50.000.000,00
						jumlah Sertifikat Tanah Pembudidayaan yang Diterbitkan (Sertifikat)	Dokumen	Menui Kepulauan bungku selatan	100	0,00		150	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Persentase Pembudidaya penerima Asuransi (%)	%	Wita Ponda Bumi Raya Bungku Barat Bungku Timur	3	0,00		12	150.000.000,00
						Jumlah Asuransi Pembudidaya yang Diterbitkan (Asuransi)	buah	Wita Ponda Bumi Raya Bungku Barat Bungku Timur	40	0,00		150	0,00
3	25	03	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	luas lahan tambak yang terairi (Ha)	Ha	Bumi Raya	-	0,00		0,5	1.150.000.000,00
						Jumlah Pintu Air yang Terbangun (unit)	unit	Bumi raya	5	0,00		20	400.000.000,00
						Jumlah Panjang saluran air tambak yang Terbangun (meter2)	Meter Kuadrat	-	-	0,00		5000	750.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kasus Illegal Fishing	Kasus	Kab. Morowali	0	15.685.000,00		0	184.649.000,00
3	25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Illegal Fishing	Kasus	Kabupaten Morowali	5	15.685.000,00		12	184.649.000,00
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Illegal Fishing	Kasus	Kabupaten Morowali	12	15.685.000,00		12	184.649.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	%	Kab. Morowali	0	813.080.000,00		0	930.000.000,00
3	25	05	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase Poklaksar yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (%)	%	Kabupaten Morowali	36,58536585	40.000.000,00		36,58536585	50.000.000,00
3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan(ton)	ton	Kabupaten Morowali	10	40.000.000,00		12	50.000.000,00
						Jumlah Poklaksar yang memiliki Tanda Daftar Usaha (Dok)	Dokumen	Kabupatem Morowali	45	0,00		45	0,00
						Jumlah Polkashar yang terbentuk	Kelompok	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
						Petugas Informasi Pasar	orang	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Hasil Usaha yang layak konsumsi	%	Kabupaten Morowali	40	171.100.000,00		40	200.000.000,00
						Pengolahan Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Jaminan Mutu	Kelompok	Kab. Morowali	0			0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah POKLAHSAR Yang Mendapatkan Bimbingan dan PelatihanStandar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	%	Kabupaten Morowali	40	171.100.000,00		40	200.000.000,00
3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Poklachsar yang Memperoleh Bantuan	%	Kabupaten Morowali	35	601.980.000,00		35	680.000.000,00
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan(ton)	ton	Kabupaten Morowali	10	33.980.000,00		0	50.000.000,00
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah POKLAHSAR Yang Mendapatkan Bantuan	%	Kabupaten Morowali	35	568.000.000,00		35	630.000.000,00
						Jumlah Poklachsar Berpenghasilan Kecil	Kelompok	Kab. Morowali	0	0,00		0	0,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.368.770.598,00			3.950.000.000,00
3	26	01	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA					1.368.770.598,00			3.950.000.000,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang memiliki daya tarik	%	Kab. Morowali	29,03	105.071.000,00		32,26	700.000.000,00
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola	%	Sombori	39	105.071.000,00		42	400.000.000,00
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata	Desa	Sombori	1	0,00		1	200.000.000,00
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	Kelompok	Sombori	1	105.071.000,00		1	200.000.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi wisata	%	Kab. Morowali	82	0,00		95	300.000.000,00
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Destinasi Pariwisata yang diadakan	unit	0	0	0,00		6	300.000.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan wisatawan	%	Kab. Morowali	1,89	528.716.098,00		1,86	1.000.000.000,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	Kab. Morowali	5390	528.716.098,00		5490	1.000.000.000,00
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah even promosi yang dilaksanakan	Event	Kab. Morowali	1	528.716.098,00		1	1.000.000.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata	%	Kab. Morowali	30	734.983.500,00		45	2.250.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku usaha yang dibina	%	Kab. Morowali	84,62	734.983.500,00		92,32	2.250.000.000,00
3	26	05	2.01	05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif sektor pariwisata yang didasarkan	produk	Kab. Morowali	10	139.202.500,00		15	750.000.000,00
3	26	05	2.01	06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif sektor pariwisata yang dilatih	Pelaku Usaha	Kab. Morowali	22	595.781.000,00		24	1.500.000.000,00
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					16.922.110.999,00			37.723.973.039,00
3	27	01	01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					16.922.110.999,00			37.723.973.039,00
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	DPKP	100	11.743.821.659,00		100	4.821.388.180,00
3	27	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (%)	%	DPKP	100	1.079.197,00		0	9.954.260,00
3	27	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	DPKP	1	1.079.197,00		2	2.103.025,00
3	27	01	2.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan	Dokumen	DPKP	1	0,00		1	7.851.235,00
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	Dokumen	DPKP	1	8.187.790.764,00		1	11.915.000,00
3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentasi Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	-	100	8.186.028.239,00		100	0,00
3	27	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	DPKP	1	1.762.525,00		2	10.200.000,00
3	27	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	DPKP	1	0,00		1	1.715.000,00
3	27	01	2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100	3.419.999.198,00		100	4.738.818.920,00
3	27	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	DPKP	12	55.900.000,00		12	45.900.000,00
3	27	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
3	27	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional								
3	27	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	DPKP	12	2.754.452.280,00		12	2.754.452.280,00
3	27	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan kantor	Bulan	DPKP	12	900.000,00		12	900.000.000,00
3	27	01	2.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja								
3	27	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Alat Tulis Kantor	Bulan	DPKP	12	33.421.550,00		12	42.123.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	27	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	DPKP	12	16.005.900,00		12	28.572.000,00
3	27	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	unit	DPKP	9	80.548.374,00		4	500.250.000,00
3	27	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Dos Makanan dan Minuman	Dos	DPKP	450	18.000.000,00		450	20.000.000,00
3	27	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	DPKP	12	330.892.000,00		12	340.758.000,00
3	27	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								
3	27	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	buah/set	DPKP	1	0,00		1	50.000.000,00
3	27	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	unit	APBD	6	0,00		1	50.000.000,00
3	27	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	buah	DPKP	33	79.879.094,00		10	3.763.640,00
3	27	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan								
3	27	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5	50.000.000,00		3	3.000.000,00
3	27	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang profesional	%	DPKP	100	134.952.500,00		100	60.700.000,00
3	27	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan								
3	27	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu								
3	27	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang /Kegiatan	DPKP	5	104.952.500,00		0	0,00
					Persentase ASN Fungsional yang mengikuti Diklat Penjenjangan		%	DPKP	3	30.000.000,00		0	0,00
3	27	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan								
3	27	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang /Kegiatan	DPKP	0	0,00		4	60.700.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian (Ton)	%	TERSEBAR	100	2.786.602.265,00		100	5.427.500.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana Pertanian	%	DPKP	100	1.266.215.000,00		100	472.500.000,00
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pertanian yang dibutuhkan	unit	TERSEBAR	1	266.260.000,00		1	400.000.000,00
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kegiatan Untuk mendukung sarana Pertanian	Kegiatan	DPKP	98	999.955.000,00		20	72.500.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Jumlah SDG Hewan	%	TERSEBAR	100	0,00		100	200.000.000,00
3	27	02	2.02	01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman								
3	27	02	2.02	02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Presentase Ternak lokal yang unggul	%	TERSEBAR	0	0,00		100	200.000.000,00
3	27	02	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase benih dan bibit ternak yang bersertifikat /disertifikasi	Sampel	DPKP	0	0,00		2	75.000.000,00
3	27	02	2.03	01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Benih dan Bibit ternak yang diuji	Sampel	DPKP	0	0,00		1	25.000.000,00
					jumlah bahan pakan/pakan HMT yang diuji	Sampel	DPKP	0	0,00		1	25.000.000,00
3	27	02	2.03	02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah bahan pakan/pakan, benih hijauan	Kg	DPKP	1	0,00		1	25.000.000,00
3	27	02	2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					0,00			0,00
3	27	02	2.04	01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan								
3	27	02	2.04	02 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan								
3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase benih dan bibit ternak yang bersertifikat /disertifikasi	Sampel	DPKP	0	0,00		2	0,00
3	27	02	2.05	01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan								
3	27	02	2.05	05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak								
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	presentase ketersediaan bibit dan Pakan unggul dari daerah lain	%	TERSEBAR	100	1.520.387.265,00		100	4.680.000.000,00
					Presentase Ketersediaan Benih Unggul	%	DPKP	100			100	
3	27	02	2.06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	ekor	TERSEBAR	100	146.676.265,00		100	1.000.000.000,00
					Presentase Kebutuhan Benih Pertanian Unggul	Kg	TERSEBAR	40000	1.373.711.000,00		400000	3.680.000.000,00
3	27	02	2.06	02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain								
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian	ton	DPKP	10000	1.213.393.750,00		-	25.261.585.159,00
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Sawah yang teraliri	Ha	DPKP	100	1.213.393.750,00		0	25.261.585.159,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Jaringan Irigasi terseier yang dibangun	Km	DPKP	130	160.500.000,00		180 18.000.000.000,00
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani Tanaman pangan yang dibangun	Km	Kab. Morowali	26	909.500.000,00	27	6.141.585.159,00
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah dam parit yang dibangun	unit	Kab. Morowali	1	143.393.750,00	7	1.120.000.000,00
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage							
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air							
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong							
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya							
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0,00			0,00
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum				0,00			0,00
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum							
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum							
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum							
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Jumlah Kasus penyakit hewan	%	TERSEBAR	100	419.985.450,00	100	744.999.700,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wabah Penyakit Hewan Menular (PHM)	%	TERSEBAR	100	232.413.200,00	100	343.483.200,00
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis							
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi	unit	DPKP	1	43.483.200,00	1	43.483.200,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Biosecurity	%	TERSEBAR	100	188.930.000,00		100	300.000.000,00
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah keluar masuk hewan dan produk hewan	%	TERSEBAR	100	105.120.000,00		2	234.120.000,00
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah Penyulur atau peternak yang memiliki standar keamanan produk hewan	%	TERSEBAR	100	105.120.000,00		100	154.120.000,00
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah hewan yang diperiksa	Dokumen	DPKP	1	0,00		1	35.000.000,00
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	ekor	DPKP	2	0,00		2	20.000.000,00
						jumlah produk asal hewan yang diperiksa	Sampel	DPKP	1	0,00		1	25.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik	%	PUSAT KESEHATAN HEWAN(PUSKESWA N)	100	82.452.250,00		100	167.396.500,00
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase pelayanan jasa laboratorium	%	PUSAT KESEHATAN HEWAN(PUSKESWA N)	1	82.452.250,00		100	117.396.500,00
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah pelayanan jasa medik dan paramedik veteriner	Dokumen	DPKP	1	0,00		1	50.000.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataaan Masyarakat Veteriner	persentase kasus kesehteraan hewan yang tertangani	Dokumen	DPKP	0	0,00		0	0,00
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan								
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan								
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	persentase kasus kesehteraan hewan yang tertangani	%	DPKP	1	0,00		1	0,00
3	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya								
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Wilayah yang terkena kasus bencana Pertanian	%	TERSEBAR	100	0,00		100	0,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani	%	DPKP	0	0,00		0	0,00
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis							
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan							
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi teknis Usaha Pertanian	Dokumen	TERSEBAR	31	0,00	31	0,00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00			0,00
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian							
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian							
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0,00			0,00
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan							
3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan							
3	27	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan							
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan							
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				0,00			0,00
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan							
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan	%	DPKP	59	758.307.875,00	60	1.468.500.000,00
					Jumlah Kegiatan Penyuluh Tingkat	Kelompok	TERSEBAR	0			0	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kegiatan Penyuluhan Pertanian	%	MOROWALI	0	758.307.875,00	100	1.468.500.000,00
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Presentase Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	%	TERSEBAR	100	262.000.000,00	0	0,00
					Pembinaan kelembagaan Penyuluh Pertanian		%	TERSEBAR	100	321.340.000,00	0	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	27	07	2.01	02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase BPP yang memiliki lahan percontohan	unit	TERSEBAR	9	18.000.000,00		9	900.000.000,00
					Persentase BPP yang memiliki sarana dan prasarana	unit	TERSEBAR	6	0,00		2	18.500.000,00
3	27	07	2.01	03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Presentase Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	DPKP	100	156.967.875,00		100	100.000.000,00
3	27	07	2.01	04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah BUMS	Kelompok	TERSEBAR	10	0,00		30	450.000.000,00
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.776.307.128,00			20.292.420.245,00
3	30	01	01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					4.776.307.128,00			20.292.420.245,00
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	24	3.812.235.128,00		25	3.867.420.245,00
3	30	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	18	13.730.000,00		38	37.000.000,00
3	30	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja Dinas Dagperin	Dokumen	0	0	0,00		1	2.000.000,00
3	30	01	2.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	Orang /Kegiatan	8 Kecamatan	10	13.730.000,00		20	35.000.000,00
3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang terselesaikan.	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	20,4	2.729.482.816,00		20,4	2.365.898.550,00
3	30	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Kegiatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	30	2.729.482.816,00		32	2.360.898.550,00
3	30	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	0	0,00		1	5.000.000,00
3	30	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Kegiatan Rutin yang terlaksana.	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	23	926.022.312,00		24	1.402.664.552,00
3	30	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	OPD	12	27.500.000,00		12	18.000.000,00
3	30	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
3	30	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit Tahun	OPD	0	6.650.000,00		7	15.000.000,00
3	30	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Orang /Kegiatan	OPD	24	556.914.912,00		26	619.264.552,00
3	30	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	OPD	12	900.000,00		12	900.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	30	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	OPD	21	7.100.000,00		21	8.000.000,00
3	30	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	per tahun	OPD	12	25.000.000,00		12	25.000.000,00
3	30	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	per tahun	OPD	12	10.000.000,00		12	12.500.000,00
3	30	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit Tahun	OPD	5	107.155.000,00		10	75.000.000,00
3	30	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makanan dan Minuman	Dos	OPD	500	12.500.000,00		400	14.000.000,00
3	30	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang /Kegiatan	Palu, Jakarta dan Daerah Lainnya	27	122.302.400,00		30	350.000.000,00
3	30	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	unit	OPD	1	25.000.000,00		6	240.000.000,00
3	30	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	tersedianya Mebeleur	buah	OPD	7	25.000.000,00		7	25.000.000,00
3	30	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Disiplin Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	%	Palu dan Daerah Lainnya	36	143.000.000,00		37	61.857.143,00
3	30	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	buah/set	OPD	0	0,00		70	10.500.000,00
3	30	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	presentase pejabat struktural yang mengikuti PIM	%	Palu dan Daerah lainnya	7	138.000.000,00		93	21.357.143,00
3	30	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang /Kegiatan	Palu dan Daerah Lainnya	1	5.000.000,00		3	30.000.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin SIUP, TDP, TDG	%	0	0	0,00		26	190.000.000,00
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin SIUP, TDP	%	OPD, 9 Kecamatan	50	0,00		25	75.000.000,00
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	terlaksananya pengawasan Pelaku Usaha yang sesuai dengan Izin Usaha.	Pelaku Usaha	OPD, 9 Kecamatan	100	0,00		50	75.000.000,00
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase rekomendasi TDG yang diterbitkan	%	OPD, 9 Kecamatan	33	0,00		33	50.000.000,00
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	standarisasi penerbitan tanda daftar gudang	Dokumen	OPD, 9 Kecamatan	5	0,00		5	50.000.000,00
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Presentase Rekomendasi Perizinan STPW yang diterbitkan	%	OPD, 5 Kecamatan	40	0,00		40	20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen	OPD, 5 Kecamatan	2	0,00		2	20.000.000,00
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya yang terawasi.	%	OPD, 9 Kecamatan	33	0,00		33	45.000.000,00
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	tersedianya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya yang aman dan ramah lingkungan.	unit	OPD, 9 Kecamatan	6	0,00		6	45.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9 Kecamatan, Provinsi dan Daerah lainnya	12	526.370.000,00		29	5.120.000.000,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan yang layak	%	9 Kecamatan	10	526.370.000,00		28	4.920.000.000,00
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	tersedianya Sarana Distribusi perdagangan yang layak	unit	4 Kecamatan	5	526.370.000,00		8	4.700.000.000,00
						Tersedianya lapangan usaha dan sentra perdagangan di kawasan wisata SAMBORI (Program Pendukung Smart City)	unit	1 Kecamatan	1	0,00		5	220.000.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Presentase Pelaku Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	%	Palu dan Daerah sekitarnya	0	0,00		31	200.000.000,00
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	tersedianya SDM Pengelola Pasar yang terlatih	Orang /Kegiatan	Palu dan Daerah Lainnya	0	0,00		10	200.000.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilisasi Harga Bapokting	%	9 Kecamatan	20	105.390.000,00		37	460.000.000,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Ketersediaan jumlah Bapokting yang ada	%	9 kecamatan	0	0,00		39	100.000.000,00
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan stok barang pokok dan barang penting lainnya.	Dokumen	9 Kecamatan	0	0,00		11	100.000.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga Eceran Terendah dan Tertinggi	%	9 Kecamatan	20	105.390.000,00		38	300.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	tersedianya laporan Barang kebutuhan pokok langka.	Dokumen	9 Kecamatan	1	30.390.000,00		3	75.000.000,00
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Harga Barang kebutuhan pokok yang terjangkau.	Kegiatan	Kab. Morowali	2	75.000.000,00		3	225.000.000,00
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Pupuk bersubsidi.	%	5 Kecamatan	0	0,00		33	60.000.000,00
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	ketersediaan Pupuk Bersubsidi yang terawasi.	Jenis	5 Kecamatan	0	0,00		6	60.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Pelaku Usaha yang memiliki alat UTTP yang terkalibrasi	%	9 Kecamatan, Provinsi dan Daerah Lainnya	24	265.451.000,00		23	10.405.000.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Presentase Pelaku Usaha yang memiliki alat UTTP yang terkalibrasi	%	9 kecamatan, palu, jakarta dan daerah lainnya	19	265.451.000,00		23	10.405.000.000,00
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Standardisasi Alat UTTP	unit	9 Kecamatan, Jakarta, Palu dan daerah lainnya	50	78.870.000,00		50	80.000.000,00
						Tersedianya sarana prasarana unit metrologi legal	unit	0	0	0,00		4	8.900.000.000,00
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan UTTP Kemetrolgian Legal	unit	0	0	0,00		5	1.000.000.000,00
						Tersedianya SDM Kemetrolgian yang terlatih	Orang /Kegiatan	Bandung dan daerah lainnya	2	50.000.000,00		5	200.000.000,00
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya Penyuluhan/sosialisasi Metrologi legal	Kegiatan	0	0	0,00		2	100.000.000,00
						Terlaksananya pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.	Jenis	9 Kecamatan, Palu, Jakarta dan daerah lainnya	15	136.581.000,00		10	125.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	%	Palu, Jakarta dan Daerah Lainnya	33	66.861.000,00		33	250.000.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Dalam Daerah yang di promosikan diluar	%	Palu, Jakarta dan daerah lainnya	15	66.861.000,00		33	250.000.000,00
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	terlaksananya promosi Produk unggulan Daerah ditingkat Nasional	Jenis	Palu, Jakarta dan daerah lainnya	5	66.861.000,00		5	250.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					446.376.000,00			7.150.000.000,00
3	31	02	01		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					446.376.000,00			7.150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pertumbuhan IKM	%	OPD, Palu, Jakarta dan Daerah lainnya	20	336.921.000,00		33	6.500.000.000,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Komoditas Unggulan yang dikembangkan	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	23	336.921.000,00		33	6.500.000.000,00
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya sosialisasi bagi IKM Pangan dan/untuk mendapat <u>Sertifikat Keamanan Pangan</u>	Pelaku Usaha	OPD	30	71.944.000,00		70	800.000.000,00
						Tersedianya sertifikat Halal bagi IKM Pangan	Pelaku Usaha	Kabupaten, Palu dan Daerah Lainnya	3	30.000.000,00		50	1.500.000.000,00
						Terlaksananya pembinaan bagi Pelaku Sentra IKM Furniture	Pelaku Usaha	0	15	0,00		50	500.000.000,00
						Terlaksananya pembinaan bagi Pelaku IKM Rotan	Pelaku Usaha	Kabupaten, Palu dan Daerah lainnya	30	129.977.000,00		50	500.000.000,00
						Terlaksananya Pembinaan Pelaku Tenun Kain Batik Khas Morowali	Pelaku Usaha	0	5	0,00		5	300.000.000,00
						Terlaksananya pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan	Pelaku Usaha	0	40	0,00		80	400.000.000,00
						tersedianya Peralatan Tenun Kain Batik Khas Morowali	unit	0	2	0,00		5	100.000.000,00
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Peralatan Kemasan Produk Pangan	unit	0	50	0,00		75	750.000.000,00
						Tersedianya Sampel Galery Pusat Ole-ole Produk IKM yang di <u>adakan</u>	unit	OPD	1000	40.000.000,00		25	200.000.000,00
						Tersedianya Kerajinan Cenderamata Khas Morowali yang di produksi	unit	OPD	30	15.000.000,00		250	750.000.000,00
						Tersedianya sarana promosi produk unggulan daerah	unit	OPD	1000	50.000.000,00		2500	700.000.000,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Presentase Izin Usaha IKM yang dikendalikan	%	8 Kecamatan	20	65.265.000,00		32	300.000.000,00
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Presentase Izin Usaha IKM yang diterbitkan	%	8 Kecamatan	20	65.265.000,00		32	300.000.000,00
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha <u>Terintegrasi Secara Elektronik</u>	Jumlah IKM yang diberikan rekomendasi IUI Kecil dan IUI Menengah	Pelaku Usaha	8 Kecamatan	12	65.265.000,00		150	150.000.000,00
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah IKM yang telah memiliki Izin Usaha yang akan diawasi	Pelaku Usaha	0	0	0,00		53	150.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Pengelolaan Informasi Data Industri	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	30	44.190.000,00		37	350.000.000,00
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sarana Sistem Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang tersedia	%	OPD, Palu dan Jakarta	30	44.190.000,00		37	350.000.000,00
3	31	04	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Tersedianya Informasi Data IUI,IPUI, IUKI, dan IPKI yang akan dilaporkan	Dokumen	0	0	0,00		2	75.000.000,00
					Tersedianya sarana Sistem Informasi Industri	unit	OPD	0	0,00		1	25.000.000,00
3	31	04	2.01	02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	tersedianya Informasi Industri yang terpublikasikan dan dapat di akses secara online	Kegiatan	OPD, Palu, Jakarta	10	44.190.000,00		10	250.000.000,00
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					4.340.442.762,00			1.759.044.000,00
3	32	02	01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH					4.340.442.762,00			1.759.044.000,00
3	32	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.697.947.762,00			1.009.044.000,00
3	32	01	2.02	Administrasi Keuangan					2.878.547.762,00			0,00
3	32	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentasi Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	-	100	2.878.547.762,00		100	0,00
3	32	01	2.03	Administrasi Umum					764.400.000,00			862.000.000,00
3	32	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumber air dan listrik dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	18.600.000,00		12	12.000.000,00
3	32	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peraltan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	10.000.000,00		12	10.000.000,00
3	32	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor tenaga administrasi dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	420.000.000,00		12	475.000.000,00
3	32	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah iuran kebersihan kantor dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Morowali	12	1.800.000,00		12	10.000.000,00
3	32	01	2.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	10.000.000,00		12	10.000.000,00
3	32	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	40.000.000,00		12	40.000.000,00
3	32	01	2.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	34.000.000,00		12	50.000.000,00
3	32	01	2.03	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	32	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	25.000.000,00		12	25.000.000,00
3	32	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali	12	15.000.000,00		12	15.000.000,00
3	32	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah dalam 1 tahun	Bulan	Palu, Makassar, & Jakarta	12	175.000.000,00		12	200.000.000,00
3	32	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	0,00		12	0,00
3	32	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebuler dalam 1 tahun	Bulan	-	-	0,00		na	0,00
3	32	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun	Bulan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali	12	15.000.000,00		12	15.000.000,00
3	32	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	Bulan	-	-	0,00		na	0,00
3	32	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor								
3	32	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					55.000.000,00			147.044.000,00
3	32	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sipil Nagara yang mengikuti PIM III	orang	Palu Makassar Kendari	1	30.000.000,00		2	87.044.000,00
						Jumlah Aparatur Sipil Nagara yang mengikuti PIM IV	orang	Palu Makassar Kendari	1	25.000.000,00		2	60.000.000,00
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0,00			0,00
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					0,00			0,00
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi								
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi								
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					373.000.000,00			0,00
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					373.000.000,00			0,00
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah lahan Transmigran yang tersertifikasi	%	Bungku-Palu	69	373.000.000,00		88	0,00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					269.495.000,00			750.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian					269.495.000,00			750.000.000,00
3	32	04	2.01	01 Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah KK Transmigran yang terbina	orang	Bungku, Palu, Jakarta	100	269.495.000,00		400	750.000.000,00
3	32	04	2.01	02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman								
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					81.105.941.123,00			71.434.779.275,00
4	01			SEKRETARIAT DAERAH					58.878.602.188,00			57.567.327.736,00
4	01	01	02	BAGIAN UMUM					27.007.062.458,00			16.252.715.000,00
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Tersebar Kabupaten Morowali	100	22.913.800.489,00		100	11.780.495.000,00
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan	%	Bagian Umum dan Perlengkapan	100	12.925.703.821,00		100	90.000.000,00
4	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentasi Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	-	100	12.922.703.821,00		100	0,00
4	01	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip Sekretariat Daerah	Predikat	Bagian Umum dan Perlengkapan	B	1.000.000,00		BB	30.000.000,00
4	01	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan	Predikat	Bagian Umum dan Perlengkapan	B	1.000.000,00		BB	30.000.000,00
4	01	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Predikat	Bagian Umum dan Protoler	B	1.000.000,00		BB	30.000.000,00
4	01	01	2.03	Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum	%	Bagian Umum dan Perlengkapan	100	9.895.596.668,00		80	11.615.495.000,00
4	01	01	2.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Berupa Belanja BBM Dan Listrik	Bulan	Bagian Umum Dan Perlengkapan	12	4.449.985.164,00		12	4.440.000.000,00
4	01	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapn Kantor	unit	Bagian Umu dan Perlengkapan	1	120.000.000,00		1	120.000.000,00
4	01	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan /Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan /Dinas Operasional	unit	Bagian Umum dan Protokol	16	75.000.000,00		15	50.000.000,00
4	01	01	2.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	orang	Bagian Umum dan Perlengkapan	115	2.951.477.004,00		115	2.452.500.000,00
4	01	01	2.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	360.000.000,00		1	360.000.000,00
4	01	01	2.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	Bagian Umum dan Perlengkapan	52	45.382.000,00		52	55.000.000,00
4	01	01	2.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan Penggadaan	lembar	Bagian Umum dan Perlengkapan	316	35.000.000,00		316	35.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	Bagian Umum dan Protokol	6	387.872.500,00		-	497.500.000,00
4	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersediaan bahan logistik kantor	Bulan	Bagian Umum dan Perlengkapan	12	373.155.000,00		12	567.975.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Dos	Bagian Umum dan Perlengkapan	5000	150.000.000,00		8429	295.000.000,00
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	30	250.000.000,00		30	317.520.000,00
4	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan Rumah Jabatan Dinas	unit	Bagian Umum dan Protokol	3	156.205.000,00		5	350.000.000,00
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ketersediaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung	Bagian Umum dan Protokol	4	316.520.000,00		6	1.825.000.000,00
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	unit	Bagian Umum dan Protokol	16	225.000.000,00		16	250.000.000,00
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan di siplin dan kapasitas sumber daya	%	Bagian Umum dan Perlengkapan	100	92.500.000,00		100	75.000.000,00
4	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaiian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaiian Khusus Hari2 Tertentu	paket	Bagian Umum dan Perlengkapa	1	70.000.000,00		1	75.000.000,00
4	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Mengikuti PIM	orang	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	22.500.000,00		0	0,00
4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Indeks Pelayanan pimpinan	%	Bagian Umum dan Perlengkapan	100	4.093.261.969,00		100	4.472.220.000,00
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan Administrasi Pimpinan	%	Bagian umum dan Perlengkapan	100	4.093.261.969,00		100	4.472.220.000,00
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah kegiatan dalam dan luar daerah, Sekda, Asisten dan Staf	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	83	1.230.290.000,00		83	1.230.290.000,00
						Jumlah kegiatan dialog audiensi dengan tokoh masrakat	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	100	70.000.000,00		130	100.000.000,00
						Jumlah Kegiatan Koordiansi Unsur Muspida	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	4	50.000.000,00		4	50.000.000,00
						Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/WKD	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	42	656.975.000,00		62	656.975.000,00
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kegiatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	20	726.790.000,00		31	656.975.000,00
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Tahun	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	1.359.206.969,00		1	1.777.980.000,00
4	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan	Cakupan Perencanaan dan Keuangan	%	Bagian Umum dan Perlengkapan	100	0,00		100	0,00
4	01	04	2.04	01	Pengelolaan Perencanaan	Cakupan Dokumen Perencanaan yang di hasilkan	%	Bagian Umum dan Perlengkapan	-	0,00		-	0,00
4	01	04	2.04	03	Penatausahaan Pelaporan	Cakupan dokumen keunangan yang di hasilkan	%	Bagian Umu dan Perlengkapan	-	0,00		-	0,00
4	01	01	03		BAGIAN HUKUM					2.300.000.000,00			1.574.616.008,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai akip Bagian Hukum	Predikat	BAGIAN HUKUM	B	571.375.000,00		B	821.501.008,00
4	01	01		Administrasi Umum	Presentase adm perkantoran	%	BAGIAN HUKUM	100	571.375.000,00		100	656.501.008,00
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa dan perlengkapan kantor	unit	BAGIAN HUKUM	2	39.095.000,00		1	12.500.000,00
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	unit	BAGIAN HUKUM	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Juml;ah Jasa Adm Keuangan	orang	BAGIAN HUKUM	11	269.819.244,00		11	290.166.008,00
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	BAGIAN HUKUM	21	20.160.756,00		21	25.000.000,00
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	lembar	BAGIAN HUKUM	46000	11.500.000,00		9000	22.500.000,00
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Dos	BAGIAN HUKUM	1800	33.000.000,00		1800	63.000.000,00
4	01	01	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	%	BAGIAN HUKUM	100	187.800.000,00		100	233.335.000,00
4	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Disiplin dan Bekerja sesuai SOP Bagian Hukum	%	BAGIAN HUKUM	85	0,00		85	165.000.000,00
4	01	01	2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	BAGIAN HUKUM	-	0,00		1	50.000.000,00
4	01	01	2.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan	buah	BAGIAN HUKUM	7	0,00		7	100.000.000,00
4	01	01	2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Kegiatan	BAGIAN HUKUM	-	0,00		100	15.000.000,00
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	peresentase produk Hukum Daerah yang di hasilkan	%	BAGIAN HUKUM	100	1.728.625.000,00		100	753.115.000,00
4	01	02	2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase inisiatif eksekutif dan legislatif menjadi prolegda (%)	%	BAGIAN HUKUM	100	1.728.625.000,00		100	753.115.000,00
4	01	02	2.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dievaluasi dan fasilitasi	buah	BAGIAN HUKUM	400	1.150.000.000,00		400	159.240.000,00
4	01	02	2.03	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah penanganan perkara yang diselesaikan	Perkara	BAGIAN HUKUM	20	559.125.000,00		20	543.875.000,00
4	01	02	2.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum yang di publikasikan	buah	BAGIAN HUKUM	400	19.500.000,00		400	50.000.000,00
4	01	01	04	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					21.505.365.230,00			28.146.810.092,00
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat	%	Bag. Kesra	100	488.003.299,00		100	529.443.128,00
4	01	01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	%	Bag. Kesra	100	444.003.299,00		100	492.263.128,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	unit	Bag. Kesra	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	orang	Bag. Kesra	12	276.331.824,00		12	276.331.824,00
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Tahun)	Tahun	Bag. Kesra	1	9.972.475,00		1	10.159.474,00
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen (Tahun)	Tahun	Bag. Kesra	1	10.404.000,00		1	10.612.080,00
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	unit	Bag. Kesra	3	0,00		2	20.000.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman di Lingkup Bagian Adm. Kesra (Tahun)	Tahun	Bag. Kesra	1	5.400.000,00		1	5.670.000,00
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Tahun)	Tahun	Bag. Kesra	1	131.895.000,00		1	159.489.750,00
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal	%	Bag. Kesra	100	44.000.000,00		100	37.180.000,00
4	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	orang	Bag. Kesra	2	44.000.000,00		Na	0,00
						Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	orang	Bag. Kesra	3	0,00		3	37.180.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Keagamaan yang dilaksanakan	%	Bag. Kesra	100	21.017.361.931,00		100	27.617.366.964,00
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Bina Mensprit, Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang difasilitasi	%	Bag. Kesra	100	21.017.361.931,00		100	27.617.366.964,00
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kegiatan	Bag. Kesra	16	0,00		16	6.156.268.464,00
						Jumlah Sarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan yang diberikan Fasilitas	unit	Bag. Kesra	668	21.017.361.931,00		678	20.710.437.000,00
						Jumlah Lembaga Keagamaan yang melakukan pembinaan	Kegiatan	Bag. Kesra	4	0,00		5	625.661.500,00
4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan sosial	Dokumen	Bag. Kesra	7	0,00		7	75.000.000,00
4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	Bag. Kesra	5	0,00		5	50.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01	06		BAGIAN ORGANISASI				1.795.312.500,00			1.910.599.839,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (%)	%	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	100	764.641.453,00	100	1.010.599.839,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	85	121.082.000,00	95	429.432.633,00
4	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip Sekretariat Daerah	Predikat	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	B	32.146.000,00	BB	300.000.000,00
						Nilai Sakip Kabupaten	Predikat	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	B	88.936.000,00	BB	129.432.633,00
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Administrasi Umum (%)	%	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	100	521.909.453,00	100	491.167.206,00
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan materai	lembar	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	916	5.496.000,00	966	5.796.000,00
4	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	unit	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	12	6.300.000,00	18	15.000.000,00
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara	unit	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	4	10.066.760,00	4	10.000.000,00
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Honorer Yang Ada	orang	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	9	208.221.216,00	9	208.221.206,00
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Jenis	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	52	25.000.000,00	52	30.000.000,00
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	lembar	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	9867	10.858.776,00	9867	10.000.000,00
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor,	unit	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	3	27.207.701,00	17	65.000.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan (dos) / Jumlah Minuman/ Snack (dos)	Dos	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	750	18.165.000,00	686	17.150.000,00
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Kegiatan Rapat Koordinasi (Luar Propinsi & Dalam Propinsi)	Kegiatan	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	5	210.594.000,00	5	130.000.000,00
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	%	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	100	121.650.000,00	100	90.000.000,00
4	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN yang mengikuti PIM	orang	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	3	41.550.000,00	0	0,00
4	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum yang di Sosialisasi	Kegiatan	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	2	80.100.000,00	2	90.000.000,00
4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase OPD yang menerapkan SOP	%	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	100	1.030.671.047,00	100	900.000.000,00
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi					1.030.671.047,00		900.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang menyusun ANJAB dan ABK	Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	2	246.486.500,00		53	475.000.000,00
						Jumlah SOTK dan SKJ	Dokumen		0	0,00		0	0,00
4	01	04	2.02	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang menyusun SOP	Organisasi Perangkat Daerah		1	0,00		53	45.000.000,00
						Jumlah OPD yang menyusun SPM	Dokumen	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	1	0,00		1	50.000.000,00
						Jumlah OPD yang memiliki Inovasi	Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	2	70.232.000,00		53	30.000.000,00
						Jumlah OPD yang menggunakan Sistem SPBE	Website	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	1	47.325.547,00		0	0,00
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Kinerja ASN	%	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	75	0,00		80	300.000.000,00
						Penyelenggaraan FORKOM	Kegiatan	Bagian Organisasi Setkab. Morowali	1	666.627.000,00		0	0,00
4	01	01	07		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					950.000.000,00			608.458.579,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	407.770.000,00		100	523.827.342,00
4	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan	%	Bagian Pembangunan	100	5.000.000,00		50	5.000.000,00
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan	1	5.000.000,00		2	5.000.000,00
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase administrasi pelayanan umum	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	402.770.000,00		100	518.827.304,00
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	buah	Bagian Administrasi Pembangunan	28	5.000.000,00		28	5.000.000,00
4	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	unit	Bagian Administrasi Pembangunan	8	4.700.000,00		8	11.000.000,00
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	Bagian Administrasi Pembangunan	4	20.400.000,00		5	16.000.000,00
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan	orang	Bagian Administrasi Pembangunan	10	187.055.400,00		16	308.924.808,00
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Jenis	Bagian Administrasi Pembangunan	32	15.000.000,00		12	18.000.000,00
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Jenis	Bagian Administrasi Pembangunan	2	7.500.000,00		3	16.000.000,00
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	Bagian Administrasi Pembangunan	2	20.114.600,00		3	25.000.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat kantor	Dos	Bagian Administrasi Pembangunan	600	9.600.000,00		600	9.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	133.400.000,00		100	109.902.496,00
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pejabat Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	0,00		100	38,00
4	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah peserta PIM III dan jumlah peserta PIM IV	orang	Bagian Administrasi Pembangunan	2	0,00		1	38,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Capaian Kinerja OPD	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	542.230.000,00		100	84.631.237,00
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan	Persentase capaian tertib administrasi pembangunan	%	Bagian Administrasi Pembangunan	20	542.230.000,00		20	84.631.237,00
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Standar Biaya Umum Daerah	Dokumen	Bagian Pembangunan	100	41.000.000,00		1	84.630.625,00
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	33.830.000,00		0	186,00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	467.400.000,00		0	426,00
4	01	01	08		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.630.000.000,00			2.049.049.668,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Bagian Unit Kerja Pengadaan Barng Jasa	Predikat	Bag. ULP	B	437.640.000,00		B	646.549.668,00
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Tersediahnya Jasa Pemeliharaan Kantor dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit/tahun	Bag. ULP	1	437.640.000,00		1	646.549.668,00
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediahnya Jasa Penunjang Oprasional Kantor	unit	Bag. ULP	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersedian Jasa Administrasi Keuangan	orang	Bag. ULP	11	286.549.668,00		11	286.549.668,00
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersedian Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran kerja	Jenis	Bag. ULP	1	16.994.332,00		16	20.000.000,00
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersedian Barang Cetak dan Penggandaan	lembar	Bag. ULP	1	10.000.000,00		45	15.000.000,00
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	unit	Bag. ULP	3	68.400.000,00		5	50.000.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersedian Kunsumsi Rapat Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa	Tahun	Bag. ULP	1	10.000.000,00		600	15.000.000,00
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersedian Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Kegiatan	Bag. ULP	1	35.696.000,00		10	250.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Lama Proses Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	%	Bag. ULP	100	1.192.360.000,00		100	1.402.500.000,00
4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa	%	Bag. ULP	100	1.192.360.000,00		100	1.402.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai jadwal yang ditetapkan	Kegiatan	Bag. ULP	3	965.160.000,00		3	872.500.000,00
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Ketersedian Pengadaan Barang dan Jasa yang ditenter secara elektronik	Kegiatan	Bag. UPL	3	227.200.000,00		4	350.000.000,00
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselesainya sanggahan yang di selesaikan	paket	Bag. ULP	1	0,00		1	180.000.000,00
4	01	01	10		BAGIAN PEMERINTAHAN					1.300.000.000,00			3.289.413.492,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	749.428.000,00		95	1.609.413.492,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	178.881.000,00		95	185.000.000,00
4	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketepatan waktu Penyampaian data laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) (%)	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	178.881.000,00		95	185.000.000,00
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	495.797.000,00		100	1.230.663.492,00
4	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	unit	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10	9.700.000,00		10	95.000.000,00
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	orang	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12	270.663.492,00		12	270.663.492,00
4	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor Setda Kab. Morowali	Tahun	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	2.331.550,00		1	10.000.000,00
4	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0,00		4	150.000.000,00
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	17.668.450,00		1	20.000.000,00
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen	Tahun	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	15.797.500,00		1	20.000.000,00
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	25.244.008,00		5	150.000.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman di Lingkup Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tahun	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	44.000.000,00		1	25.000.000,00
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah	Tahun	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	95.392.000,00		1	300.000.000,00
4	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Bagian tata Pemerintahan	unit	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0,00		2	75.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	unit	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0,00		2	100.000.000,00
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya dan Terpenuhiya Kebutuhan Kendaraan Operasional	unit	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	15.000.000,00		5	15.000.000,00
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur Bagian Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	74.750.000,00		95	193.750.000,00
						Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bagian Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	%	Luar Daerah	60			80	
4	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	persentase pejabat Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang mengikuti diklat PIM	%	-	0	0,00		75	50.000.000,00
						Jumlah Pegawai Struktural yang Mengikuti PIM III	orang	-	0	0,00		1	22.500.000,00
						Jumlah Pegawai Struktural yang Mengikuti PIM IV	orang	-	0	0,00		1	21.250.000,00
						Jumlah Peserta Bimtek LKPJ, LPPD dan Pemetaan Wilayah dan Toponimi	orang	Luar Daerah	4	74.750.000,00		6	100.000.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	550.572.000,00		100	1.680.000.000,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks administrasi Kewilayahan	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	489.690.000,00		100	1.455.000.000,00
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pencapaian Kinerja Kecamatan	%	9 Kecamatan	100	59.308.000,00		100	75.000.000,00
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumah Kecamatan yang di mekarkan	Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	71.920.000,00		0	0,00
						Jumlah Tapal Batas Kabupaten	%	Kabupaten Morowali dan Luar Kabupaten	1	246.286.000,00		10	300.000.000,00
						Pesentase Tapal Batas Kecamatan	%	Kabupaten Morowali	33,33	0,00		66,67	300.000.000,00
						Persentase Tapal Batas Desa	%	Kabupaten Morowali	0,17	84.014.000,00		0,25	350.000.000,00
						Jumlah Nama Rupa Bumi (TOPONIMI) di Wilayah Kecamatan yang Terpetakan	Desa	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	15	14.368.000,00		20	300.000.000,00
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pemerintahan	Dokumen	-	0	0,00		3	75.000.000,00
						Pesntase OPD yang memiliki SPM	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50	13.794.000,00		50	55.000.000,00
						Tingkat Netralitas ASN	%	-	0	0,00		0	0,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama	%	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	60.882.000,00		100	225.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	02	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Lembaga/Universitas	Lembaga	Luar Kabupaten	3	60.882.000,00		5	150.000.000,00
4	01	02	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama yang ditindak lanjuti	Lembaga	-	0	0,00		5	75.000.000,00
4	01	01	11	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					1.526.975.000,00			2.610.000.000,00
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kinerja Pemerintah Daerah	%	Kab. Morowali	100	473.306.832,00		100	10.000.000,00
4	01	01		Administrasi Keuangan					0,00			0,00
4	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
4	01	01	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran								
4	01	01		Administrasi Umum					473.306.832,00			10.000.000,00
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional								
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Presentase penyediaan jasa administrasi keuangan	%	Kab. Morowali	100	473.306.832,00		100	10.000.000,00
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman								
4	01	01	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								
4	01	04		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Ketercapaian administrasi umum	%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	1.053.668.168,00		100	2.600.000.000,00
4	01	04		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Ketercapaian Kegiatan ke Protokol dan komunikasi pimpinan	%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	1.053.668.168,00		100	2.600.000.000,00
4	01	04	01	Fasilitasi Keprotokolan	Presentase Kegiatan pimpinan yang mendapatkan fasilitasi keprotokolan	%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	456.691.296,00		100	1.000.000.000,00
4	01	04	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Presentase kegiatan pimpinan yang di fasilitasi dan dikomunikasikan oleh Juru Bicara Pimpinan Daerah	%	Bagian Protokol	100	221.504.254,00		100	800.000.000,00
4	01	04	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Presentase Tugas Pimpinan yang di Dokumentasikan dan di Publikasikan	%	Bagian Protokol	100	375.472.618,00		100	800.000.000,00
4	01	01	12	BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM					863.887.000,00			1.125.665.058,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	100	373.304.000,00		100	499.998.058,00
4	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	100	373.304.000,00		100	499.998.058,00
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraa dinas yang terpelihara	unit	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	4	10.000.000,00		4	12.000.000,00
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Honorrer	orang	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	10	228.084.000,00		10	205.478.058,00
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	25	9.520.000,00		25	9.520.000,00
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	lembar	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	50000	3.000.000,00		50000	15.000.000,00
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Bagian Administrasi Prekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	2	15.000.000,00		2	30.000.000,00
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	paket	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	1	7.000.000,00		1	7.000.000,00
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Presentase Rapat Koordinasi	%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	100	100.700.000,00		100	221.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	inflasi Daerah	%	Bagian ekonomi Dan SDA	2,13	490.583.000,00		2,3	625.667.000,00
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang di tindak lanjuti	buah	BAgian Administrasi Perekoomian dan Sumber Daya Alam	7	490.583.000,00		1	625.667.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Deviden	Rupiah	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	1054383000	233.667.000,00		1407684000	255.667.000,00
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Presentase KUR Yang Tidak Sehat	%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	2,09	56.916.000,00		1,98	120.000.000,00
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Presentase UMKM yang taat aturan	%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	85	200.000.000,00		88	250.000.000,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD					22.227.338.935,00			13.867.451.539,00
4	02	01	01		SEKRETARIAT DPRD					22.227.338.935,00			13.867.451.539,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD	%	Kab. Morowali	100	16.349.007.035,00		100	5.500.951.539,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase capaian akuntabilitas keuangan set-DPRD	%	Kab. Morowali	95%	13.212.726.010,00		95%	14.116.517,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang terbayarkan Gaji dan tunjangan selama 1 Tahun	orang	kabupaten morowali	36	13.208.226.010,00		36	0,00
4	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan dalam 1 Tahun	%	Kab. Morowali	100%	4.500.000,00		100%	14.116.517,00
4	02	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan penyelesaian pemenuhan Adm. Umum	%	Kab. Morowali	90%	2.906.256.025,00		95%	5.296.851.825,00
4	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Dalam 1 Tahun	Kegiatan	kab. Morowali	3 Keg	3.159.225,00		4 Keg	10.000.000,00
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumber air dan listrik dalam 1 tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	4 Keg.	127.600.000,00		4 Keg.	224.000.000,00
4	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	9 Keg..	21.200.000,00		9 Keg.	20.000.000,00
4	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Op Kantor dalam 1 tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	4 Keg.	145.980.000,00		4 Keg.	75.000.000,00
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor tenaga administrasi dalam 1 tahun	orang	Kab. Morowali	55 Org	1.748.620.000,00		60 Org	1.300.000.000,00
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	12 Org	200.000.000,00		12 Org	148.000.000,00
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dalam 1 tahun	Jenis	kab. Morowali	12 Jenis	38.972.750,00		12 Jenis	35.000.000,00
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	Jenis	Kab. Morowali	5 Jenis	16.000.000,00		5 Jenis	35.000.000,00
4	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 Tahun	Jenis	Kab. Morowali	10 Jenis	30.824.050,00		16 Jenis	25.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	1 Paket.	25.000.000,00		4 Keg.	20.000.000,00
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia Dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	4 Keg.	80.000.000,00		1 Keg.	75.000.000,00
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah dalam 1 tahun	Kali	Kab. Morowali	18 Kali 18 Org	210.900.000,00		21 Kali 18 Org	306.348.300,00
4	02	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan dalam 1 tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	1 Keg.	50.000.000,00		1 Keg.	200.000.000,00
4	02	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yng dipelihara dalam 1 Tahun	buah	kab. Morowali	1 Paket	22.000.000,00		2 paket	300.000.000,00
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	1 Paket	66.000.000,00		1 Paket	23.503.525,00
4	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor dalam 1 tahun	paket	Kab. Morowali	1 paket	120.000.000,00		1 paket	2.500.000.000,00
4	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Bimbingan Teknis (%)	orang	Kab. Morowali	70%	230.025.000,00		75%	189.983.197,00
4	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara ASN yang mengikuti Bimtek dalam 1 tahun	orang	Kab. Morowali	35 org	230.025.000,00		15 org	189.983.197,00
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	presentase capaian akuntabilitas adm dan keuangan Sekretariat DPRD	%	Kab. Morowali	90%	1.824.000.000,00		95%	1.931.500.000,00
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD	Indeks Capaian Layanan Administrasi DPRD	%	Kab. Morowali	86%	1.346.500.000,00		90%	1.415.000.000,00
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah Rapat DPRD yang difasilitasi dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	85 Kali	196.500.000,00		85 Kali	250.000.000,00
4	02	02	2.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	30 Kali	10.000.000,00		30 Kali	25.000.000,00
4	02	02	2.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	"Jumlah Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Rumah Tangga Pimpinan DPRD dalam 1 Tahun"	Jenis	Kab. Morowali	12	1.140.000.000,00		12	1.140.000.000,00
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dalam 1 Tahun	%	Kab. Morowali	100%	477.500.000,00		100%	516.500.000,00
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangan dlm 1 Tahun	orang	Kab. Morowali	25	0,00		25	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dalam 1 Tahun	pasang	Kab. Morowali	100	357.500.000,00		100	357.500.000,00
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up DPRD dalam 1 Tahun	orang	Kab. Morowali	25	120.000.000,00		25	159.000.000,00
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	%	Kab. Morowali	100%	4.054.331.900,00		100%	6.435.000.000,00
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang di Hasilkan dalam 1 Tahun	buah	Kab. Morowali	28	414.700.000,00		28	550.000.000,00
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas dalam 1 Tahun	buah	Kab. Morowali	28	14.700.000,00		28	150.000.000,00
4	02	03	2.01	04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Perda Inisiatif yang di hasilkan dalam 1 tahun	Perda	Kab. Morowali	4	400.000.000,00		4	400.000.000,00
4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase ketepatan waktu Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan dalam 1 tahun	%	Kab.Morowali	100	146.500.000,00		100	310.000.000,00
4	02	03	2.02	01	pembahasan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab.Morowali	1	21.000.000,00		1	50.000.000,00
4	02	03	2.02	02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	KUPA dan PPAS Perubahan yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	1	21.000.000,00		1	50.000.000,00
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD	APBD yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	1	60.000.000,00		1	100.000.000,00
4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab.Morowali	1	22.500.000,00		1	50.000.000,00
4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pertanggung jawaban APBD yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab.Morowali	2	22.000.000,00		2	60.000.000,00
4	02	03	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	%	Kab.Morowali	85	45.000.000,00		90	100.000.000,00
4	02	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab.Morowali	30	11.250.000,00		30	25.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	02	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	30	11.250.000,00		30	25.000.000,00
4	02	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	30	11.250.000,00		30	25.000.000,00
4	02	03	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber	Kegiatan	Kab. Morowali	30	11.250.000,00		30	25.000.000,00
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	%	Kab. Morowali	80	859.900.000,00		85	2.015.000.000,00
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti bimtek dalam 1 tahun	orang	Kab. Morowali	25	325.400.000,00		25	1.425.000.000,00
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan dan didokumentasikan dalam 1 tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	1	50.000.000,00		1	100.000.000,00
4	02	03	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Pakar dan Tim Ahli dalam 1 tahun	orang	Kab. Morowali	3	270.000.000,00		3	270.000.000,00
4	02	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dalam 1 tahun	orang	Kab. Morowali	5	210.000.000,00		5	210.000.000,00
4	02	03	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD dalam 1 tahun	Dokumen	Kab. Morowali	1	4.500.000,00		1	10.000.000,00
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	%	Kab. Morowali	85	1.607.155.900,00		95	1.905.000.000,00
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah dalam 1 Tahun	Kali	Kab. Morowali	3 kali	234.690.400,00		3 kali	500.000.000,00
4	02	03	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam 1 Tahun	Dokumen	Kab. Morowali	3	4.500.000,00		3	5.000.000,00
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses dalam 1 Tahun	Kegiatan	Kab. Morowali	3	1.367.965.500,00		3	1.400.000.000,00
4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase fasilitasi Tugas Pimpinan	%	Kab. Morowali	85	981.076.000,00		90	1.555.000.000,00
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam 1 Tahun DPRD "	Kali	Kab. Morowali	78	654.096.000,00		85	1.200.000.000,00
4	02	03	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD dalam 1 Tahun	Dokumen	Kab. Morowali	1	1.500.000,00		1	5.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
4	02	03	2.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Undangan DPRD dalam 1 Tahun	Kali	Kab. Morowali	26	325.480.000,00		26	350.000.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					57.613.421.377,00			526.911.801.890,00
5	01				PERENCANAAN					9.997.858.643,00			9.149.413.051,00
5	01	02	01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH					9.997.858.643,00			9.149.413.051,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	Bappeda	100	7.472.983.643,00		100	7.854.912.951,00
5	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah	Dokumen	BAPPEDA	5	50.000.000,00		5	60.000.000,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Dan Renja	Dokumen	BAPPEDA	1	25.000.000,00		1	30.000.000,00
5	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi BAPPEDA	Dokumen	Bappeda	4	25.000.000,00		4	30.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	%	Bappeda	100	4.019.919.639,00		100	3.324.259.697,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Menerima Gaji	%	Bappeda	100	3.977.919.639,00		100	3.293.259.697,00
5	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	Bappeda	12	17.000.000,00		12	10.000.000,00
5	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	Bappeda	100	0,00		100	5.000.000,00
5	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA yang di Susun	%	Kantor BAPPEDA	1	0,00		1	0,00
5	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen	Bappeda	12	10.000.000,00		12	6.000.000,00
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	-	2	0,00		2	0,00
5	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Bappeda	1	15.000.000,00		1	10.000.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kinerja Pelayanan Administrasi Umum	%	Bappeda	100	2.918.764.004,00		100	4.015.653.254,00
5	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	%	-	100	15.000.000,00		100	5.000.000,00
5	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	Bappeda	100	60.000.000,00		100	60.000.000,00
5	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Ketersediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	%	Bappeda	100	75.000.000,00		100	350.653.500,00
5	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	unit	Bappeda	12	11.000.000,00		15	42.000.000,00
5	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorer/PHL Yang Digaji	orang	Bappeda	37	951.015.564,00		37	951.015.564,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Servis Yang Didai	orang	Bappeda	4	56.683.440,00		4	56.683.440,00
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase jumlah ATK yang tersedia	%	Bappeda	100	56.080.000,00		100	60.000.000,00
5	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang cetakan dan Penggandaan	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	50.000.000,00
5	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Kantor	%	Bappeda	100	15.000.000,00		100	25.000.000,00
5	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	%	Bappeda	100	5.000.000,00		100	248.350.750,00
5	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Ketersediaan Makanan Dan Minuman	%	Bappeda	100	60.000.000,00		100	60.000.000,00
5	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	%	BAPPEDA	100	651.985.000,00		100	900.000.000,00
5	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia (Unit)	unit	Bappeda	4	310.000.000,00		5	560.000.000,00
5	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Ketersediaan kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	166.000.000,00
5	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Tahun	Bappeda	10	247.000.000,00		10	165.950.000,00
5	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor	unit	Bappeda	15	0,00		15	50.000.000,00
5	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Tahun	Bappeda	1	100.000.000,00		1	100.000.000,00
5	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	unit	Bappeda	12	70.000.000,00		15	50.000.000,00
5	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	unit	Bappeda	10	0,00		10	5.000.000,00
5	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik	unit	Bappeda	10	10.000.000,00		10	5.000.000,00
5	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Persentase Jumlah Mebeleur Dalam Kondisi Baik	%	Kantor Bappeda	10	0,00		10	5.000.000,00
5	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung	Bappeda	1	150.000.000,00		1	100.000.000,00
5	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	Bappeda	100	484.300.000,00		100	455.000.000,00
5	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	orang	Bappeda	81	24.300.000,00		84	10.000.000,00
5	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	Bappeda	5	115.000.000,00		5	100.000.000,00
5	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tehnik implementasi peraturan perundang-undangan	orang	Bappeda	23	345.000.000,00		23	345.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	%	Bappeda	100	1.324.875.000,00		Na	735.000.000,00
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.049.875.000,00			735.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	1	350.000.000,00		0	0,00
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	Bappeda	2	250.000.000,00		2	200.000.000,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Usulan Musrenbang Yang Terakomodir Dalam RKPD (%)	%	Bappeda	30	299.875.000,00		35	360.000.000,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Program RPJMD kedalam RKPD	%	Bappeda	100	150.000.000,00		100	175.000.000,00
5	01	02	2.03	01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD kedalam APBD	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	02	2.03	02	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	Tersebar	85	275.000.000,00		85	0,00
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Presentase Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%	Bappeda	100	150.000.000,00		95	0,00
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah								
5	01	02	2.03	04	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah		%	Bappeda	100	75.000.000,00		85	0,00
5	01	02	2.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan	Dokumen	Bappeda	3	50.000.000,00		4	0,00
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Bappeda	100	450.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.01		Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	%	Bappeda	100	125.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Presentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pemerintahan	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Presentase Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Pemerintahan Pemerintahan	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Pemerintahan	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	03	2.02		Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	%	Bappeda	100	200.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Presentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia	%	Bappeda	100	75.000.000,00		100	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang <u>Pembangunan Manusia</u>	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Presentase Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja <u>Bidang Pembangunan Manusia</u>	%	Bappeda	100	100.000.000,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD <u>Bidang Pembangunan Manusia</u>	%	Bappeda	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD <u>Bidang Pembangunan Manusia</u>	%	Bappeda	100	0,00		100	0,00
5	01	03	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang <u>Kesejahteraan Masyarakat</u>	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang <u>Kesejahteraan Masyarakat</u>	%	Bappeda	100	125.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang <u>Kesejahteraan Masyarakat</u>	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang <u>Kesejahteraan Masyarakat</u>	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	0,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja <u>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</u>	%	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD <u>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</u>	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD <u>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</u>	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	Bappeda	100	375.000.000,00		100	559.500.100,00
5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian	%	Bappeda	10	123.490.000,00		100	186.000.000,00
5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Perekonomian	%	Bappeda	100	77.750.000,00		100	133.150.000,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Perekonomian	%	-	100	0,00		100	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	01	04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Perekonomian	%	Bappeda	100	10.835.000,00		100	10.515.000,00
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	%	Bappeda	100	34.905.000,00		100	42.335.000,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD	%	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	04	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	%	Bappeda	100	126.510.000,00		100	187.500.100,00
5	01	04	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Ekonomi Kreatif	%	Bappeda	100	86.300.000,00		100	124.725.000,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Ekonomi Kreatif	%	-	100	0,00		100	100,00
5	01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	%	Bappeda	100	9.150.000,00		100	14.317.500,00
5	01	04	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Kreatif (%)	%	Bappeda	100	31.060.000,00		100	48.457.500,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi Kreatif (%)	%	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Ekonomi Kreatif (%)	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	04	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam (%)	%	Bappeda	100	125.000.000,00		100	186.000.000,00
5	01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Sumber Daya Alam	%	Bappeda	100	84.750.000,00		100	133.150.000,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Sumber Daya Alam	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	04	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	%	Bappeda	100	6.960.000,00		100	10.570.000,00
5	01	04	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Persentase Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Alam	%	Bappeda	100	33.290.000,00		100	42.280.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
					Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya Alam	%	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Sumber Daya Alam	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Bappeda	100	375.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	Bappeda	100	125.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	%	-	100	0,00		100	0,00
5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	Bappeda	100	125.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	-	100	0,00		100	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	01	05	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	-	100	0,00		-	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	%	-	100	0,00		-	0,00
5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	Bappeda	100	125.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	-	100	0,00		-	0,00
5	01	05	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	Bappeda	100	25.000.000,00		100	0,00
5	01	05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	Bappeda	100	50.000.000,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	-	100	0,00		100	0,00
						Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	%	-	100	0,00		100	0,00
5	02				KEUANGAN					38.333.358.449,00			502.638.877.639,00
5	02	03	01		BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH					17.989.005.905,00			493.535.389.004,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Kinerja BPPD	%	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MOROWALI	100	16.027.522.925,00		100	2.678.517.120,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan					13.630.510.554,00			100,00
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Ketersedian Gaji Dan Tunjangan ASN	%	-	100	13.630.510.554,00		0	100,00
5	02	01	2.03		Administrasi Umum	Peningkatan Kinerja Pelayanan Masyarakat	Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.538.517.026	2.242.041.371,00		2.678.517.026	2.543.517.020,00
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	76.900.000,00		1	76.900.000,00
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Petugas administrasi kantor	orang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	60	1.301.617.020,00		60	1.301.617.020,00
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Tersedianya Alat Tulis	Tahun	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	113.524.351,00		1	165.000.000,00
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang cetakan dan Penggandaan	Jenis	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12	340.000.000,00		12	400.000.000,00
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai yang disediakan Makan dan Minumnya	Tahun	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	60.000.000,00		1	150.000.000,00
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (perjalanan dinas luar daerah)	Tahun	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	350.000.000,00		1	450.000.000,00
5	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Formal	orang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8	154.971.000,00		9	135.000.000,00
5	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Formal	orang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4	114.971.000,00		3	75.000.000,00
5	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek Implementari Peraturan Perundang-undangan	orang	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4	40.000.000,00		6	60.000.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	%	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MOROWALI	80	1.961.482.980,00		85	490.856.871.884,00
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah					1.961.482.980,00			490.856.871.884,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD (Rp)	Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PAD	150.000.000,00		PAD	313.147.000.000,00
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi PAD (Rp)	Retribusi	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17	100.000.000,00		17	0,00
5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Retribusi (Rp)	Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	126.482.980,00		0	0,00
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Pajak	Obyek	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	69107	250.000.000,00		70351	0,00
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Potensi Retribusi	Retribusi	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	195	50.000.000,00		215	0,00
5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Realisasi Pajak (Rp)	Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	65207	60.000.000,00		66229	0,00
						Realisasi Retribusi (Rp)	%	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100	125.000.000,00		100	177.709.871.884,00
						Jumlah Obyek Pajak	Obyek	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	75.000.000,00		0	0,00
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase wajib pajak yang menggunakan aplikasi online	%	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	38,46	100.000.000,00		46,51	0,00
						Persentase Hotel dan Restoran yang menggunakan alat Transaksi online	%	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	75	450.000.000,00		100	0,00
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak	Obyek	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	65,402	200.000.000,00		66,444	0,00
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	125.000.000,00		0	0,00
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Piutang Retribusi (Rp)	Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	150.000.000,00		0	0,00
5	02	02	01		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					20.344.352.544,00			9.103.488.635,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP BPKAD	Predikat	Morowali	B	16.830.463.544,00		B	4.994.290.322,00
5	02	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	Predikat	Morowali	B	200.000,00		B	46.000.000,00
5	02	01	2.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kesesuai Program Antara Renstra dan Renja (%)	%	Morowali	100	200.000,00		100	46.000.000,00
					Kesesuai Kegiatan Antara Renstra dan Renja (%)	%	Morowali	100	0,00		100	0,00
					Kesesuai Nilai Pagu Antara Renstra dan Renja (%)	%	Morowali	100	0,00		100	0,00
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Kinerja BPKAD (%)	%	Morowali	100	12.860.097.452,00		100	43.900.000,00
5	02	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ANS	Bulan	Morowali	12	12.846.749.452,00		12	0,00
5	02	01	2.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	Dokumen	Morowali	1	13.348.000,00		1	43.900.000,00
5	02	01	2.03	Administrasi Umum	Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	Morowali	0	3.884.466.092,00		90	4.854.390.322,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan layanan Komunikasi dan Listrik	Bulan	Morowali	12	120.000.000,00		12	120.000.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Frekuensi Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kali	Morowali	6	22.500.000,00		6	22.500.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Frekuensi Perbaikan Kendaraan Dinas	Kali	Morowali	9	150.000.000,00		7	50.000.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Pegawai Honorer	Bulan	Morowali	12	2.507.126.652,00		12	2.802.739.882,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Morowali	12	56.683.440,00		12	84.683.440,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	Morowali	12	200.000.000,00		12	200.000.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	Morowali	12	60.000.000,00		12	60.000.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	Morowali	10	10.000.000,00		10	10.000.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	unit	Morowali	12	351.000.000,00		12	587.967.000,00
5	02	01	2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
5	02	01	2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Tamu	Dos	Morowali	1900	27.000.000,00		1900	66.500.000,00
5	02	01	2.03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terselesaikan	Kegiatan	Morowali	31	280.156.000,00		31	500.000.000,00
5	02	01	2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								
5	02	01	2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							
5	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor	buah	Morowali	15	50.000.000,00	15	150.000.000,00
5	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah frekuansi Perbaikan Gedung Kantor	Kali	Morowali	2	50.000.000,00	2	200.000.000,00
5	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	orang	Morowali	0	85.700.000,00	11	50.000.000,00
5	02	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi							
5	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya							
5	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Moowali	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00
5	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	Morowali	1	35.700.000,00	0	0,00
5	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan							
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP	%	Morowali	100	2.532.798.000,00	100	2.836.911.500,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran	%	Morowali	100	1.008.470.000,00	100	1.199.700.000,00
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD	%	Morowali	100	88.230.000,00	100	88.230.000,00
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Perubahan KUA-PPAS dengan Perubahan RKPD	%	Morowali	100	88.230.000,00	100	88.230.000,00
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Antara RKA dengan KUA-PPAS	%	Morowali	100	86.250.000,00	100	92.500.000,00
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Antara DPA dengan APBD	%	Morowali	100	170.000.000,00	100	180.000.000,00
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Persentase Kesesuaian Antara Program/Kegiatan APBD dengan PPA	%	Morowali	100	317.700.000,00	100	335.000.000,00
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Persentase Kesesuaian Antara Program/Kegiatan APBD-P dengan PPA	%	Morowali	100	258.060.000,00	100	283.740.000,00
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perda tentang Teknik Penyusunan Anggaran SKPD	Dokumen	Morowali	0	0,00	1	132.000.000,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	%	Morowali	95	420.824.000,00	95	633.104.000,00
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Realisasi Dana Tranfer	%	Morowali	100	79.080.000,00	100	145.180.000,00
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Berkas	Morowali	7,789	70.660.000,00	7,889	76.560.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Persentase Temuan Kesalahan SPJ terhadap Jumlah Penerbitan SP2D	%	Morowali	0	179.254.000,00		0	214.000.000,00
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PEK)	Jumlah Laporan BUD/KBUD	Dokumen	Morowali	12	66.634.000,00		12	117.364.000,00
5	02	02	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sehanai Optimalisasi Kas	Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	Morowali	13,74	25.196.000,00		11,60	50.000.000,00
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SP1)	Jumlah Perbub Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan	Dokumen	Morowali	0	0,00		1	30.000.000,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Pemerintah dalam Penyampaian LKPD	%	Morowali	100	1.103.504.000,00		100	1.004.107.500,00
5	02	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perbub tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Morowali	1	177.433.500,00		1	158.690.000,00
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	Morowali	2	193.539.000,00		2	193.539.000,00
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Morowali	1	163.892.000,00		1	183.862.000,00
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Keuangan Pemda	Dokumen	Morowali	54	499.243.000,00		54	370.972.500,00
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Pendapatan dan Belanja Daerah	Dokumen	Morowali	1	0,00		1	80.048.000,00
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Penurunan Kesalahan Pencatatan atas Laporan Keuangan	%	Morowali	100	69.396.500,00		100	16.996.000,00
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan	Persentase Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD	%	Morowali	18,62	0,00		18,62	0,00
5	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	Morowali	13,74	0,00		11,06	0,00
5	02	02	2.04	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Persentase penyaluran bantuan Subsidi	%	Morowali	100	0,00		100	0,00
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Persentase penyaluran bantuan Keuangan Khusus	%	Morowali	100	0,00		100	0,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Aset	%	Morowali	103,5	981.091.000,00		103,5	1.272.286.813,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset	%	Morowali	103,5	981.091.000,00		103,5	1.272.286.813,00
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	Dokumen	Morowali	1	177.850.000,00		1	209.450.000,00
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Morowali	1	24.850.000,00		1	32.677.000,00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset/barang milik daerah (KIB A, B, C, D, E dan F)	Dokumen	Morowali	6	195.612.000,00		6	295.572.000,00
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Nilai Rill Ekonomis BMD (Rp)	Rupiah	Morowali	2.766 Milyar	85.885.000,00		2.862 Milyar	152.745.813,00
5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen bukti lelang BMD	Dokumen	Morowali	1	27.740.000,00		1	37.380.000,00
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan	Jumlah BMD Yang Dimusnakan/ Dihapus	unit	Morowali	40	0,00		40	84.122.000,00
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Pemda	Dokumen	Morowali	75	422.122.000,00		75	378.600.000,00
5	02	03	2.01	12	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen bukti atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Dokumen	Morowali	2	35.012.000,00		2	34.720.000,00
5	02	03	2.01	13	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara SKPD dan SKPKD	Dokumen	Morowali	46	0,00		46	35.000.000,00
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan Terkait Pengelolaan BMD	orang	Morowali	46	12.020.000,00		46	12.020.000,00
5	03				KEPEGAWAIAN					5.989.432.035,00			8.920.765.000,00
5	03	01	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.989.432.035,00			8.920.765.000,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu	Bulan	-	12	4.381.415.993,00		12	5.593.000.000,00
5	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	Bulan	BKPSDMD	5	0,00		5	2.000.000,00
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	Dokumen	-	0	0,00		0	0,00
5	03	01	2.01		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Renja	Dokumen	BKPSDMD	2	0,00		2	2.000.000,00
5	03	01	2.02			Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	Bulan	BKPSDMD	12	3.435.468.371,00		12	3.900.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	BKPSDMD	12	3.435.468.371,00		12	3.900.000.000,00
5	03	01	2.03		Administrasi Umum	Bulan	Kab. Morowali dan Luar Daerah	12	736.411.772,00		12	1.541.000.000,00
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	BKPSDMD	12	32.400.000,00		12	36.000.000,00
5	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	BKPSDMD	16	0,00		16	260.000.000,00
5	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	BKPSDMD	2	17.500.000,00		2	35.000.000,00
5	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	orang	BKPSDMD	19	380.671.936,00		19	460.000.000,00
5	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	BKPSDMD	12	3.893.950,00		12	5.000.000,00
5	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	BKPSDMD	12	32.667.550,00		12	35.000.000,00
5	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	lembar	BKPSDMD	2000	13.675.000,00		5000	30.000.000,00
5	03	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	BKSDMD	12	5.000.000,00		12	150.000.000,00
5	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dos	BKPSDMD	1000	24.000.000,00		1000	30.000.000,00
5	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	Kab. Morowali dan Luar Daerah	12	226.603.336,00		12	500.000.000,00
5	03	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Kab. Morowali dan Palu	1,00	209.535.850,00		0	150.000.000,00
5	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	1	0,00		0	0,00
					Jumlah Kepemimpinan Nasional Tingkat II	orang	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	1	30.261.000,00		0	0,00
					Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administrator	orang	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	2	22.125.000,00		0	0,00
					Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas	orang	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	4	59.310.000,00		0	0,00
					Persentase Pejabat Fungsional BKD yang mengikuti diklat fungsional	%	-	1,00	97.839.850,00		0	0,00
5	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	paket	Kab. Morowali	3	0,00		3	150.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	%	-	0,02	1.608.016.042,00		0,02	3.327.765.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Presentase kelengkapan data ASN	%	BKPSDMD, Makassar dan Jakarta	0,91	165.000.000,00		0,92	333.000.000,00
5	03	02	2.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah PNS yang dimutakhirkan datanya (Orang)	orang	BKPSDMD dan Makassar	3782	85.000.000,00		4132	130.000.000,00
5	03	02	2.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Jumlah kebutuhan ASN fungsional (Formasi)	Formasi	BKPSDMD dan Jakarta	250	80.000.000,00		250	100.000.000,00
						Persentase ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) (%)	%	BKPSDMD, Makassar dan Jakarta	0,02	0,00	0,020329138	83.000.000,00	
5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian (Aplikasi)	Aplikasi	BKPSDMD dan Makassar	1	0,00		0	20.000.000,00
5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian	persentase kelengkapan administrasi kepegawaian	%	Kab. Morowali, Prov. sulteng, Makassar dan Jakarta	0,91	978.816.042,00		0,92	1.690.000.000,00
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi penerimaan ASN (Formasi)	Formasi	BKPSDMD dan Jakarta	350	0,00		350	100.000.000,00
						Jumlah PNS yang difasilitasi penetapan NIPnya (Orang)	orang	BKPSDMD dan Makassar	350	0,00		350	200.000.000,00
						Jumlah kegiatan seleksi penerimaan calon PNS (Kegiatan)	Kegiatan	Kab. Morowali	1	550.000.000,00		1	700.000.000,00
5	03	02	2.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Persentase jabatan struktural yang dimutasi (%)	%	Kab. Morowali	75	26.017.100,00		75	30.000.000,00
5	03	02	2.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kependidikan	Jumlah ASN yang pindah golongan (SK Pangkat)	SK	BKD Provinsi, BKN Makassar dan Jakarta	850	100.000.000,00		850	200.000.000,00
						Persentase ASN yang mengikuti UPI dan UD (%)	%	BKPSDMD dan BPSDMD Provinsi Sulteng	1,00	104.139.442,00		1,00	120.000.000,00
5	03	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Persentase ASN yang pensiun (%)	%	BKN Makassar dan Jakarta	0,02	80.000.000,00		0,02	83.000.000,00
						Jumlah PNS yang terlayani pegurusan Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami (Orang)	orang	BKPSDMD dan Makassar	113	73.045.000,00		250	100.000.000,00
5	03	02	2.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Jumlah pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat (Orang)	orang	BKPSDMD	4	0,00		3	3.000.000,00
5	03	02	2.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mutasi keluar (orang)	orang	Kab. Morowali, Palu, Makassar dan Jakarta	12	45.614.500,00		14	77.000.000,00
						Jumlah ASN yang mutasi masuk (orang)	orang	Kab. Morowali, Palu, Makassar dan Jakarta	12	0,00		14	77.000.000,00
5	03	02	2.03		Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase peningkatan kapasitas ASN	%	Kab. Morowali, Prov. sulteng dan Jakarta	187	379.200.000,00		188	829.765.000,00
5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase kinerja ASN (%)	%	Kab. Morowali	80	0,00		81	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	03	02	2.03	03	Pengembangan Assessment Center	Persentase penempatan jabatan struktural sesuai hasil uji kompetensi (%)	%	Kab. Morowali	74,0	250.000.000,00		74,0	404.765.000,00
5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi dari kelembagaan KORPRI (%)	%	Kab. Morowali, Palu dan Jakarta	1,00	40.000.000,00		1,00	120.000.000,00
5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar (Orang)	orang	BKPSDMD	3	89.200.000,00		3	305.000.000,00
5	03	02	2.04		Pengembangan Karir ASN	Persentase penempatan ASN sesuai Analisis Jabatan (%)	%	BKPSDMD	0,02	35.000.000,00		0,02	100.000.000,00
5	03	02	2.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah dokumen (dokumen)	Dokumen	BKPSDMD	3	35.000.000,00		3	100.000.000,00
5	03	02	2.05		Pembinaan ASN	Persentase ASN yang dibina	%	Kab. Morowali dan Jakarta	1,00	50.000.000,00		1,00	375.000.000,00
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Persentase disiplin ASN (%)	%	BKPSDMD	0,99	0,00		0,99	100.000.000,00
						Jumlah Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani (Orang)	orang	BKPSDMD	45	50.000.000,00		40	200.000.000,00
						Jumlah Aduan gugatan perceraian ASN (Aduan)	Aduan	BKPSDMD	10	0,00		10	25.000.000,00
						Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan (Orang)	orang	BKPSDMD dan Kemendagri	75	0,00		75	50.000.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.012.772.250,00			6.202.746.200,00
5	04	01	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.012.772.250,00			6.202.746.200,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pertumbuhan SDM ASN	%	-	1,9	2.012.772.250,00		2	6.202.746.200,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat (%)	%	Kab. Morowali, LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	0,3	2.012.772.250,00		0,4	6.202.746.200,00
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti diklat (%)	%	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	0,2	2.012.772.250,00		0,3	1.231.858.000,00
						Jumlah Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Orang)	orang	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	3	0,00		3	90.783.000,00
						Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administrator (Orang)	orang	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	15	0,00		15	331.875.000,00
						Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (Orang)	orang	LAN, BKPSDMD Provinsi Sulteng dan BPSDM Sultra	40	0,00		40	809.200.000,00
						Persentase CPNS yang mengikuti prajabatan (%)	%	Kab. Morowali	1,00	0,00		1,00	3.250.000.000,00
						Persentase pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT (%)	%	Kab. Morowali	2	0,00		2	489.030.200,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.280.000.000,00			0,00
5	05	01	01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.280.000.000,00			0,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.280.000.000,00			0,00
5	05	02		2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentase Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan	%	Bappeda	100	580.000.000,00		100	0,00
5	05	02		2.01	03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.01	04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.01	12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase ketersediaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	Bappeda	100	580.000.000,00		100	0,00
5	05	02		2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	Bappeda	5	350.000.000,00		0	0,00
5	05	02		2.02	01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.02	03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.02	05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pariwisata Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	1	350.000.000,00		0	0,00
5	05	02		2.02	06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Kesehatan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.02	09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Tenaga Kerja Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.02	11 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Transmigrasi Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02		2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Transmigrasi Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	1	200.000.000,00		0	0,00
5	05	02		2.03	01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Pangan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Perhubungan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	1	200.000.000,00		0	0,00
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Komunikasi Dan Informatika Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Inovasi dan teknologi Yang dikembangkan	Dokumen	Bappeda	3	150.000.000,00		0	0,00
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi jenis,Prosedur dan Metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	1	150.000.000,00		0	0,00
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	Bappeda	0	0,00		0	0,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					9.606.287.172,00			9.347.000.000,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH					9.606.287.172,00			9.347.000.000,00
6	01	01	01		INSPEKTORAT DAERAH					9.606.287.172,00			9.347.000.000,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	Kantor Inspektorat Kabupaten Morowali	100	7.542.047.172,00		100	5.272.000.000,00
					Persentase Aparat Pengawasan yang Bersertifikat		%	Jakarta dan Kota-kota lainnya	100			100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat <u>Penjenjangan</u>	%	Makasar dan Kota-kota lainnya	100			100	
						Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan OPD	%	Kabupaten Morowali	100			100	
6	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kabupaten Morowali	6	10.000.000,00		6	35.000.000,00
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dihasilkan	Dokumen	Kabupaten Morowali	2	5.000.000,00		2	10.000.000,00
6	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Dihasilkan	Dokumen	Kabupaten Morowali	4	5.000.000,00		4	25.000.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	Kabupaten Morowali	3	4.116.287.172,00		3	20.000.000,00
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Ketersedian Gaji Dan Tunjangan ASN	%	-	100	4.106.287.172,00		100	0,00
6	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	Kabupaten Morowali	2	5.000.000,00		2	10.000.000,00
6	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Kabupaten Morowali	2	5.000.000,00		1	10.000.000,00
6	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase Pemenuhan <u>Kebutuhan Administrasi Umum</u>	%	Kabupaten Morowali	100	1.771.660.000,00		100	2.502.000.000,00
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	Kantor Inspektorat	12	50.000.000,00		12	50.000.000,00
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Bulan	Kantor Inspektorat	12	15.000.000,00		12	15.000.000,00
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	Kantor Inspektorat	12	767.160.000,00		12	750.000.000,00
6	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Pemenuhan Perbaikan Peralatan Kerja	Bulan	Kantor Inspektorat	12	5.000.000,00		12	5.000.000,00
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Alat Tulis Kantor	Bulan	Kantor Inspektorat	12	50.000.000,00		12	50.000.000,00
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pemenuhan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bulan	Kantor Inspektorat	12	12.000.000,00		12	12.000.000,00
6	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bulan	Kantor Inspektorat	12	150.000.000,00		12	200.000.000,00
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Dos Makanan Dan Minuman	Dos	Kabupaten Morowali	500	50.000.000,00		500	50.000.000,00
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota lainnya di Indonesia	12	600.000.000,00		12	800.000.000,00
6	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	unit	-	-	0,00		15	375.000.000,00
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit Peralatan Kantor Yang Diadakan	unit	-	-	0,00		5	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit Mebeleur yang Diadakan	unit	Kantor Inspektorat	20	40.000.000,00		25	45.000.000,00
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	unit	Kantor Inspektorat	1	32.500.000,00		1	50.000.000,00
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Ada	unit	-	0	0,00		15	50.000.000,00
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	Kabupaten Morowali, dan di luar Kabuapten Morowali	4	1.644.100.000,00		4	2.715.000.000,00
6	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Yang Diadakan	stel	Kantor Inspektorat	45	18.000.000,00		0	0,00
6	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti PIM (%)	%	Palu dan kota-kota lainnya	77,78	99.000.000,00		100	45.000.000,00
						Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti Diklat Pengawasan (orang)	orang	Jakarta dan Kota-kota lainnya	40	1.201.000.000,00		43	1.720.000.000,00
6	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan Yang Diadakan	Kegiatan	Kabupaten Morowali	2	226.100.000,00		2	800.000.000,00
6	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Impementasi Perundang-undangan	orang	Jakarta dan kota-kota lainnya	5	100.000.000,00		5	150.000.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindak lanjuti	%	Kabupaten Morowali dan Sekitarnya	65,00	1.565.000.000,00		70,00	3.150.000.000,00
						Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan hasil temuan	%	Kabupaten Morowali dan sekitarnya	73			75	
						Persentase OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	%	Kabuapten Morowali	70			80	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumah LHP Pengawasan Internal	Dokumen	Kabupaten Morowali	124	1.375.000.000,00		135	2.450.000.000,00
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Audit Kinerja dan Keuangan	Dokumen	Kabupaten Morowali	77	853.300.000,00		77	1.750.000.000,00
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumah LHP Reviu Kinerja dan Keuangan	Dokumen	Kabupaten Morowali	41	206.850.000,00		41	250.000.000,00
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Dokumen	Kabupaten Morowali	3	161.550.000,00		12	300.000.000,00
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Evauasi Kinerja dan Keuangan	Dokumen	Kabupaten Morowali	5	153.300.000,00		5	150.000.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumah LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	Kabupaten Morowali dan sekitarnya	14	190.000.000,00		9	700.000.000,00
6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Audit Kinerja dan Keuangan dengan Tujuan Tertetu	Dokumen	Kabupaten Morowali dan sekitarnya	5	169.000.000,00		5	250.000.000,00
6	01	02	2.02	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Reviu Kinerja dan Keuangan dengan Tujuan Tertetu	Dokumen	Kabupaten Morowali	2	21.000.000,00		5	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Pemantuan Kinerja dan Keuangan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	-	0	0,00		5	200.000.000,00
6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHP Evaluasi Kinerja dan Keuangan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	-	0	0,00		4	150.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang melaksanakan Zona Integritas menuju WBK	%	Kabupaten Morowali dan Sekitarnya	12,82	499.240.000,00		12,82	925.000.000,00
						Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	Kabupaten Morowali	100			100	
						Persentase Pemenuhan Dokumen Pedoman Pengawasan	%	Kabupaten Morowali dan Kota Pau	100			100	
						Persentase OPD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan	%	Kabupaten Morowali (OPD-OPD)	51,28			76,92	
						Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	%	Kabupaten Morowali dan Kota-kota lainnya	100			100	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	Kabupaten Morowali dan kota-kota lainnya	8	80.000.000,00		8	225.000.000,00
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen	Kabupaten Morowali dan Kota lainnya	3	37.100.000,00		5	150.000.000,00
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	Kabupaten Morowali dan kota-kota lainnya	3	42.900.000,00		3	75.000.000,00
6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan	Persentase Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	%	Kabupaten Morowali dan Kota-kota lainnya	100	419.240.000,00		100	700.000.000,00
6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah TLHP Kasus Pengaduan Masyarakat	Dokumen	Kabupaten Morowali dan Sekitarnya	20	159.250.000,00		20	200.000.000,00
6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah OPD/ Unit Kerja yang melakukan Asistensi dan Pendampingan	Organisasi Perangkat Darah	Kabupaten Morowali	39	259.990.000,00		39	500.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					48.950.268.687,00			41.891.761.705,00
7	01				KECAMATAN					48.950.268.687,00			41.891.761.705,00
7	01	01	01		KECAMATAN MENUI KEPULAUAN					7.752.978.392,00			7.412.360.340,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Kec.Menui Kepulauan	100	6.676.878.392,00		100%	6.199.360.340,00
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Kec.Menui Kepulauan	100	11.308.000,00		100	11.400.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Kec.Menui Kepulauan	2	5.654.000,00		2	5.700.000,00
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Kec.Menui Kepulauan	2	5.654.000,00		2	5.700.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuanga	%	Kec.Menui Kepulauan	100	5.467.139.246,00		100	4.751.997.340,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Kec.Menui Kepulauan	64	5.467.139.246,00		64	4.751.997.340,00
7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum	%	Kec.Menui Kepulauan	100	1.017.981.146,00		100	1.342.963.000,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan	%	Kec.Menui Kepulauan	100	3.195.000,00		100	2.100.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Ulunambo	%	Kel. Ulunambo	100	0,00		100	2.000.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Ulunambo	%	.	0	0,00		100	100.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kecamatan Menui Kepulauan	%	Kec.Menui Kepulauan	12	12.000.000,00		100	12.000.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharahan dan diurus perizinannya	unit	Kec.Menui Kepulauan	2	15.000.000,00		2	15.000.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Petugas Penunjang Kantor/Lapangan pada Kelurahan Ulunambo yang dibayarkan honornya	orang	Kel. Ulunambo	5	102.000.000,00		5	102.000.000,00
						Jumlah Tenaga PHL yang di bayarkan	orang	Kec.Menui Kepulauan	13	240.863.000,00		13	240.863.000,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	Kec.Menui Kepulauan	12	3.600.000,00		12	3.600.000,00
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kel. Ulunambo	%	Kel. Ulunambo	100	3.000.000,00		100	3.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Menui Kepulauan	%	Kec.Menui Kepulauan	100	5.000.000,00		100	5.000.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Penyediaan ATK Kecamatan Menui kepulauan	%	Kec.Menui Kepulauan	12	23.999.660,00		100	20.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Alat Tulis kantor Kelurahan	%	Kel. Ulunambo	100	0,00		100	9.000.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan Menui kepulauan	%	Kec.Menui Kepulauan	12	7.000.000,00		100	8.500.000,00
						Cakupan Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ulunambo	%	Kel. Ulunambo	100	4.200.000,00		Na	5.200.000,00
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Kelurahan	%	Kel. Ulunambo	1	3.500.000,00		100	15.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	%	Kec.Menui Kepulauan	12	35.000.000,00		100	35.000.000,00
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	%	Kel. Ulunambo	100	6.000.000,00		100	6.000.000,00
						Cakupan ketersediaan peralatan rumah tangga kecamatan Menui Kepulauan	%	Kecamatan Menui Kepulauan	100	7.000.000,00		100	7.000.000,00
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Ketersediaan Bahan Logistik Kelurahan	%	Kel. Ulunambo	100	36.000.000,00		100	2.000.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Ketersediaan Makanan dan Minuman Kelurahan	%	Kel. Ulunambo	100	10.000.000,00		100	10.000.000,00
						Cakupan ketersediaan Makanan Minum Kecamatan Menui kepulauan	%	Kec.Menui Kepulauan	12	25.000.000,00		100	30.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Ketersediaan Anggaran Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kel. Ulunambo)	%	Ibukota Kabupaten	100	40.000.000,00		100	30.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Anggaran Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12	250.000.000,00		100	240.000.000,00
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kec.Menui Kepulauan	1	17.223.486,00		-	0,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mobeleur kelurah Ulunambo yang diadakan	unit	Kel. Ulunambo	4	4.400.000,00		2	2.100.000,00
						Jumlah Mebeleur Kecamatan Menui yang diadakan dalam 1 tahun	unit	Kec.Menui Kepulauan	37	35.000.000,00		23	17.500.000,00
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Gedung	-	-	0,00		-	0,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	Kec.Menui Kepulauan	1	49.000.000,00		1	20.000.000,00
7	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Gedung	Kec.Menui Kepulauan	1	80.000.000,00		1	500.000.000,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase capaian kegiatan Peningkatan Disiplin ASN dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Kec.Menui Kepulauan	100	180.450.000,00		100	93.000.000,00
						Cakupana Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kelurahan)	%	.	100			100	
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	unit	Kec.Menui Kepulauan	1	2.500.000,00		-	0,00
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	%	Kec.Menui Kepulauan	100	31.950.000,00		-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Kelurahan)	orang	Palu/kendari	1	23.000.000,00		0	0,00
					- Presentase Pejabat Struktural yang mengikuti PIM	%	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, dan Wil. Di Luar Sulawesi Tengah		38	83.000.000,00		25	48.000.000,00
					-Pim III								
					-Pim IV								
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	orang	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, dan Wil. Di Luar Sulawesi Tengah	4	40.000.000,00		4	45.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	Kec.Menui Kepulauan	0,89%	48.500.000,00		0,97%	75.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pusat Pelayanan Masyarakat	%	Kec.Menui Kepulauan	0,07	48.500.000,00		0,07	75.000.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (KDH)	Kegiatan	Kec.Menui Kepulauan	9	48.500.000,00		9	75.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	Kec.Menui Kepulauan	0,07%	910.200.000,00		0,07%	1.031.000.000,00
						Presentase Penggunaan Dana Kelurahan Untuk Program Perberdayaan	%	Kelurahan Ulunambo	60			60	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok Binaan desa	Kelompok	Kec.Menui Kepulauan	6	105.000.000,00		6	125.000.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan	%	Kec.Menui Kepulauan	1,86%	45.000.000,00		1,86%	60.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Desa Yang Melaksanakan Lomba Desa	%	30.000.000,00	0,17%	30.000.000,00		0,17%	35.000.000,00
						Presentase Desa Yang melaksanakan Pembinaan PKK	%	30.000.000,00	100	30.000.000,00		100	30.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	Kelurahan Ulunambo	100	805.200.000,00		100	906.000.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan	%	Kel. Ulunambo	100	5.050.000,00		100	6.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Kelurahan Yang diadakan, dibangun, dikembangkan dan dipelihara	%	Kel. Ulunambo	80	369.000.000,00		80	400.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	Kel. Ulunambo	8	431.150.000,00		8	500.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	%	30.000.000,00	0,05	37.400.000,00		0,03	55.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif	%	30.000.000,00	100	37.400.000,00		100	55.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase konflik yang ditindaklanjuti/ difasilitasi	%	Kec.Menui Kepulauan	100	22.000.000,00		100	20.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Presentase Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat	Kegiatan	Kec.Menui Kepulauan	3	15.400.000,00		3	35.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penciptaan Stabilitas Wilayah yang Dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	Kec.Menui Kepulauan	100%	20.000.000,00		100%	25.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase urusan Pemerintahan Kecamatan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Kecamatan Menui Kepulauan	100%	20.000.000,00		100%	25.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kec.Menui Kepulauan	3	20.000.000,00		3	25.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kec.Menui Kepulauan	100	60.000.000,00		100	27.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerima fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa	%	Kec.Menui Kepulauan	100	60.000.000,00		100	27.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kades	%	Kec.Menui Kepulauan	56,52%	20.000.000,00		-	0,00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yg mendapatkan rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	%	Kec.Menui Kepulauan	78,26%	20.000.000,00		13,04%	7.000.000,00
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	Kec.Menui Kepulauan	1	20.000.000,00		1	20.000.000,00
7	01	01	02		KECAMATAN BUNGKU SELATAN					4.116.410.489,00			1.315.760.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kinerja Kecamatan Bungku Selatan	%	Kec. Bungku Selatan	100	3.927.850.489,00		100%	855.760.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi yang tersusun	%	Kec. Bungku Selatan	100	4.000.000,00		100	4.000.000,00
7	01	01	2.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Selatan	2	2.000.000,00		2	2.000.000,00
7	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Selatan	2	2.000.000,00		2	2.000.000,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Presentase capaian target keuangan perangkat daerah (%)	%	Kec. Bungku Selatan	100	2.737.965.429,00		100	0,00
7	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Kec. Bungku Selatan	0	2.737.965.429,00		0	0,00
7	01	01	2.03	Administrasi Umum	Presentase Adminstrasi Pelayanan Umum	%	Kec. Bungku Selatan	100	1.098.735.060,00		100	660.760.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Terkirim	paket	Kec. Bungku Selatan	20	500.000,00		2	1.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Kec. Bungku Selatan	12	3.000.000,00		12	3.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Kec. Bungku Selatan	12	3.000.000,00		10	10.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasiona	unit	Kec. Bungku Selatan	2	15.000.000,00		2	10.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga PHL yang di bayarkan	orang	Kec. Bungku Selatan	13	284.760.000,00		13	284.760.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Kec. Bungku Selatan	12	7.491.000,00		12	18.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	Kec. Bungku Selatan	12	9.964.060,00		12	10.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan terpenuhi dalam 1 tahun	lembar	Kec. Bungku Selatan	5000	10.000.000,00		5000	10.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang seharusnya ada	unit	Kec. Bungku Selatan	1	10.000.000,00		1	15.000.000,00
					Jumlah Alat Kebersihan Kantor	buah	Kec. Bungku Selatan	20	3.000.000,00		40	2.000.000,00
					Jumlah Peralatan Dokumenter	unit	Kec. Bungku Selatan	0	0,00		2	30.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Keperluan Kantor	liter	Kec. Bungku Selatan	188	22.500.000,00		188	22.500.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Makanan Minum Rapat dan tamu	Dos	Kec. Bungku Selatan	600	34.200.000,00		600	32.000.000,00
7	01	01	2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Kegiatan Rapat Koordinasi (Desa, Kabupaten, Propinsi & Luar Provinsi)	Kegiatan	Lokasi	2	93.820.000,00		4	150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kec. Bungku Selatan	1	157.500.000,00		1	22.500.000,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Kebutuhan Mebeleur dalam 1 tahun	unit	Kec. Bungku Selatan	12	15.000.000,00		20	20.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	Kec. Bungku Selatan	1	49.000.000,00		1	20.000.000,00
7	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan								
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Rehabilitasi Kantor	Gedung	Kec. Bungku Selatan	2	380.000.000,00		0	0,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Disiplin ASN dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Menui Kepulauan	%	Tersebar	100	87.150.000,00		100	191.000.000,00
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	unit	Kec. Bungku Selatan	1	2.500.000,00		-	0,00
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	pasang	Kec. Bungku Selatan	100	60.650.000,00		49	100.000.000,00
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Presentase Pejabat Struktural yang mengikuti PIM -Pim III -Pim IV	%	Tersebar	2	24.000.000,00		2	46.000.000,00
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	orang	Tersebar	4	0,00		4	45.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	Kec. Bungku Selatan	100	49.320.000,00		0,97%	150.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pusat Pelayanan Masyarakat	%	Kec. Bungku Selatan	100	49.320.000,00		0,07	150.000.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (KDH)	Kegiatan	Kec. Bungku Selatan	9	49.320.000,00		9	150.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	Kec. Bungku Selatan	Kec. Bungku Selatan	97.280.000,00		0,07%	125.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok Binaan desa	Kelompok	Kec. Bungku Selatan	6	97.280.000,00		10	125.000.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan	%	Kec. Bungku Selatan	2	47.420.000,00		2	75.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Desa Yang melaksanakan Pembinaan PKK	%	Kec. Bungku Selatan	100	49.860.000,00		100	50.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	%	Kec. Bungku Selatan	0,05	20.000.000,00		0,03	100.000.000,00
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif	%	Kec. Bungku Selatan	100	20.000.000,00		100	100.000.000,00
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase konflik yang ditindaklanjuti/ difasilitasi	%	Kec. Bungku Selatan	100	10.000.000,00		100	50.000.000,00
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Presentase Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat	Kegiatan	Kec. Bungku Selatan	3	10.000.000,00		2	50.000.000,00
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penciptaan Stabilitas Wilayah yang Dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	Kec. Bungku Selatan	100%	7.830.000,00		100%	65.000.000,00
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase urusan Pemerintahan Kecamatan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Kec. Bungku Selatan	100%	7.830.000,00		100%	65.000.000,00
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kec. Bungku Selatan	3	7.830.000,00		3	65.000.000,00
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kec. Bungku Selatan	100	14.130.000,00		100	20.000.000,00
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerima fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa	%	Kec. Bungku Selatan	100	14.130.000,00		100	20.000.000,00
7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kades	%	Kec. Bungku Selatan	50	14.130.000,00		10	20.000.000,00
7	01	01	03	KECAMATAN BUNGKU TENGAH					15.157.690.939,00			7.794.787.482,00
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai AKIP Kecamatan Bungku Tengah	Predikat	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	9.699.543.097,00		100 %	2.661.934.034,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan					7.306.270.265,00			0,00
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan gaji dan Tunjangan ASN	%	Kecamatan Bungku Tengah	0	7.306.270.265,00		0	0,00
7	01	01	2.03	Administrasi Umum	Jumlah Penyerapan Anggaran	Rupiah	Kantor Kecamatan Bungku Tengah	100 %	2.343.272.832,00		100 %	2.610.934.034,00
7	01	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	2.400.000,00		100%	3.600.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh, Matano	100	1.200.000,00		100	1.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	100	1.200.000,00		100	1.200.000,00
						Cakupan Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	1.200.000,00		100	1.200.000,00
						Cakupan Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tofoiso	%	Kantor kelurahan Tofoiso	100	1.200.000,00		100	1.200.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	1.200.000,00		100	1.200.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Mendui	%	Kelurahan Mendui	100	1.200.000,00		100	1.200.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	44.400.000,00		100%	24.480.000,00
						cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kelurahan Marsaoleh	%	kantor kelurahan marsaoleh	100	8.400.000,00		100	20.600.000,00
						cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	100	4.800.000,00		100	5.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	na	12.800.000,00		100	12.800.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	2.000.000,00		100	2.500.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	4.200.000,00		100	4.200.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Mendui	%	Kelurahan Mendui	100	8.160.000,00		100	10.000.000,00
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan dana jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	7.500.000,00		100%	44.472.000,00
						Cakupan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Marsaoleh	%	kantor kelurahan Marsaoleh	100	0,00		100	18.500.000,00
						Cakupan penyediaan dana jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Matano	%	Kelurhn Matano	0	0,00		100	3.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Cakupan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	0,00		100	30.500.000,00
						Cakupan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	0,00		100	17.340.250,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan penyediaan dana jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	32.950.000,00		100%	60.180.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	kantor kelurahan Marsaoleh	100	7.000.000,00		100	3.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	Kelurhn Matano	na	3.000.000,00		100	3.000.000,00
						Cakupan ketersediaan jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	%	Kelurahan Lamberea	100	1.500.000,00		100	10.000.000,00
						Cakupan ketersediaan jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	5.000.000,00		100	5.000.000,00
						Cakupan ketersediaan jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	%	Kel. Bungi	100	6.800.000,00		Na	6.800.000,00
						Cakupan ketersediaan jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	%	Kelurahan Mendui	100	1.000.000,00		100	1.000.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Bungku Tengah	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	306.024.000,00		100%	302.585.040,00
						Cakupan penyedia jasa administrasi keuangan Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	100	109.115.652,00		100	109.115.652,00
						Cakupan penyedia jasa administrasi keuangan Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	100	87.859.356,00		100	87.859.356,00
						Cakupan Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan Kel. Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	84.960.000,00		na	84.960.000,00
						Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	106.260.000,00		na	110.000.000,00
						Jumlah petugas penunjang kantor/lapangan pada Kel. Bungi yang dibayarkan honorinya	orang	Kel. Bungi	4	87.845.100,00		4	87.845.100,00
						Jumlah petugas penunjang kantor/lapangan pada Kel. Mendui yang dibayarkan honorinya	orang	Kelurahan Mendui	100	106.281.480,00		5	106.281.480,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja kel. Bungi	%	Kel. Bungi	100	4.400.000,00		Na	4.500.000,00
						Cakupan ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja kel. Mendui	%		100	2.000.000,00		na	30.000.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Bungku Tengan	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	20.000.000,00		100%	18.074.447,00
						Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	100	9.000.000,00		100	9.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	100	9.000.000,00		100	9.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	9.000.000,00		100	9.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	9.000.000,00		100	9.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	9.000.000,00		100	9.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Mendui	%	Kel. Mendui	100	9.000.000,00		100	9.000.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kec. Bungku Tengah	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	247.997 dok	21.200.000,00		465.860 dok	6.426.000,00
						Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	100	6.700.000,00		100	5.200.000,00
						Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	100	6.700.000,00		100	5.200.000,00
						Cakupan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	6.700.000,00		na	5.200.000,00
						Cakupan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	6.700.000,00		100	5.200.000,00
						Cakupan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	6.700.000,00		100	5.200.000,00
						Cakupan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Mendui	%	Kel Mendui	100	6.700.000,00		100	5.200.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Bungku Tengah	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	16 jenis	153.184.000,00		10 jenis	153.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	na	53.105.600,00		100	20.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	100	90.766.644,00		100	93.950.644,00
						Cakupan Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	103.411.000,00		100	25.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	103.000.000,00		100	173.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	17.500.000,00		100	20.000.000,00
						Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Mendui	%	Kel. Mendui	100	53.500.000,00		100	35.000.000,00
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	5.000.000,00		100	6.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	6.000.000,00		100	6.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bungi	%	Kel. Mendui	100	0,00		100	6.000.000,00
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan bahan logistik kantor	%	Kel. Bungi	100	500.000,00		Na	500.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan penyediaan makan dan minum Kantor Kecamatan Bungku Tengah	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	26.450.000,00		100%	27.030.000,00
						Cakupan penyediaan makan dan minum Kantor Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	na	27.000.000,00		100	41.000.000,00
						Cakupan penyediaan makan dan minum Kantor Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	100	11.000.000,00		100	19.750.000,00
						Cakupan Ketersediaan Makana dan Minuman Kantor Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	25.100.000,00		100	37.500.000,00
						Cakupan Ketersediaan Makana dan Minuman Kantor Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	32.500.000,00		100	59.125.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Cakupan Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	10.000.000,00		100	10.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor Kelurahan Mendui	%	Kel. Mendui	100	12.000.000,00		100	9.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kecamatan	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	150.000.000,00		100 %	172.259.065,00
						Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kelurahan	%	Kelurahan Matano	100	14.100.000,00		100	14.100.000,00
						Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	100	14.100.000,00		100	14.100.000,00
						Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	100	14.100.000,00		100	14.100.000,00
						Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	14.100.000,00		100	14.100.000,00
						Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kelurahan Mendui	%	Kel. Mendui	100	14.100.000,00		100	14.100.000,00
						Cakupan pelaksanaan rapat - rapat Kordinas dan Konsultasi keluar Daerah di Kelurahan Bungi	%	Ibukota Kabupaten	100	14.100.000,00		100	14.100.000,00
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor (Kecamatan Bungku Tengah)	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	1 paket	75.000.000,00		1 paket	76.500.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. Bungku Tengah	%	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	13 unit	25.000.000,00		13 unit	30.600.000,00
						Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Lamberea	%	-	100	0,00		100	50.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Mendui	%	Kel. Mendui	100	7.000.000,00		100	45.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	100	30.000.000,00		100	10.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	na	15.000.000,00		100	6.600.000,00
						Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	na	5.400.000,00		na	7.700.000,00
						Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	2.000.000,00		100	10.000.000,00
						Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Mendui	%	Kel. Mendui	100	30.000.000,00		100	50.000.000,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan Diklat atau Bimtek	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	3 kegiatan	50.000.000,00		3 kegiatan	51.000.000,00
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kegiatan Diklat atau Bimtek	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	3 kegiatan	50.000.000,00		3 kegiatan	51.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Predikat	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	170.000.000,00		100 %	214.200.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	130.000.000,00		100 %	132.600.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100%	130.000.000,00		100%	132.600.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan	Jenis	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	13 kegiatan	40.000.000,00		13 kegiatan	81.600.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah jenis pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	13 kegiatan	40.000.000,00		13 kegiatan	81.600.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	Desa	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	19 desa	5.149.147.842,00		19 desa	4.760.553.448,00
						Presentaase penggunaan Dana Kelurahan Untuk Program Pemberdayaan	%	9 Kelurahan di Kecamatan Bungku Tengah	50			60	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	2 kegiatan	298.312.674,00		2 kegiatan	512.903.448,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa	Desa	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	19 desa	34.100.000,00		19 desa	30.600.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kegiatan pemberdayaan	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	7 kegiatan	264.212.674,00		7 kegiatan	482.303.448,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	Kelurahan Matano	100	4.850.835.168,00		100	4.247.650.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Matano	%	Kelurahan Matano	80	4.600.000,00		80	5.850.000,00
						Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Marsaoleh	%	Kantor Kelurahan Marsaoleh	80	4.600.000,00		80	6.600.000,00
						Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Lamberea	%	Kelurahan Lamberea	100	4.600.000,00		100	4.600.000,00
						Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Tofoiso	%	Kantor Kelurahan Tofoiso	80	4.600.000,00		na	4.600.000,00
						Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Bungi	%	Kel. Bungi	80	4.800.000,00		80	5.000.000,00
						Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Mendui	%	Kelurahan Mendui	100	4.850.000,00		100	6.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Sarana dan prasarana publik kelurahan yang diadakan, dibangun, di kembangkan dan di <u>Pelihara di Kelurahan Bunni</u>	%	Kel. Bungi	100	125.000.000,00		100	160.000.000,00
						Presentase Sarana dan prasarana publik kelurahan yang diadakan, dibangun, di kembangkan dan di <u>Pelihara di Kelurahan Mendui</u>	%	Kelurahan Mendui	10	172.176.000,00		10	105.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Matano	Kegiatan	Kelurahan Matano	8	811.978.748,00		10	600.000.000,00
						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Marsaoleh	Kegiatan	kantor kelurahan marsaoleh	8	809.374.000,00		10	800.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tofoiso	Kegiatan	Kelurahan Tofoiso	10	745.640.000,00		10	700.000.000,00
						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lamberea	Kegiatan	Kelurahan Lamberea	8	784.629.000,00		10	400.000.000,00
						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Bungi	Kegiatan	Kel. Bungi	8	721.954.900,00		8	750.000.000,00
						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mendui	%	Kelurahan Mendui	9	652.032.520,00		10	700.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	41.000.000,00		100 %	41.820.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	53 kegiatan	31.000.000,00		53 kegiatan	31.620.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	Kasus	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	50 kasus	25.000.000,00		50 kasus	25.500.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah forum keagamaan tingkat kecamatan	Kelompok	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	3 forum	6.000.000,00		3 forum	6.120.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	50 kegiatan	10.000.000,00		50 kegiatan	10.200.000,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	50 pelanggaran	10.000.000,00		50 pelanggaran	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	22.000.000,00		48 kegiatan	24.480.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan forkompincam	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	100 %	22.000.000,00		100 %	24.480.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forkompincam	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	48 kegiatan	22.000.000,00		48 kegiatan	24.480.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	Desa	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	1 desa	76.000.000,00		100 %	91.800.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan untuk Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	4 kegiatan	76.000.000,00		4 kegiatan	91.800.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa	Desa	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	19 desa	8.000.000,00		19 desa	25.500.000,00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi	Surat	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	26 rekomendasi	15.000.000,00		26 rekomendasi	10.200.000,00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	Desa	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	19 desa	23.000.000,00		19 desa	25.500.000,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa & kelurahan yang difasilitasi	Desa	KECAMATAN BUNGKU TENGAH	19 desa	30.000.000,00		19 desa	30.600.000,00
7	01	01	04		KECAMATAN BUNGKU BARAT					3.798.740.773,00			3.332.008.856,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kinerja Perangkat Daerah	%	Kecamatan Bungku Barat	0	3.428.951.773,00		0	2.884.008.856,00
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Kecamatan Bungku Barat	85	100.880.000,00		90	101.000.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	Kecamatan Bungku Barat	1	4.015.000,00		1	6.000.000,00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan	Kecamatan Bungku Barat	239	96.865.000,00		230	95.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan	Dokumen	Kecamatan Bungku Barat	14	2.505.793.773,00		90	1.716.827.096,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara dalam 1 Tahun	orang	Kecamatan Bungku Barat	31	2.498.740.773,00		31	1.709.327.096,00
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Kecamatan Bungku Barat	12	7.053.000,00		14	7.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum	%	Kecamatan Bungku Barat	95	759.693.000,00		95	934.181.760,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang di gunakan untuk dokumen terkirim dalam 1 tahun	lembar	Kecamatan Bungku Barat	170	1.020.000,00		170	1.020.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	Kecamatan Bungku Barat	95	12.000.000,00		95	12.000.000,00
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	Kecamatan Bungku Barat	100	10.000.000,00		100	12.000.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	%	Kecamatan Bungku Barat	100	11.800.000,00		100	12.000.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor Tenaga administrasi keuangan tiap bulan	orang	Kecamatan Bungku Barat	14	314.584.800,00		14	324.221.760,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase penggunaan ATK yang dibeli dalam 1 tahun	Jenis	Kecamatan Bungku Barat	26	13.756.200,00		27	15.000.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang di cetak dan digandakan	lembar	Kecamatan Bungku Barat	18	10.500.000,00		40000	12.000.000,00
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	%	Kecamatan Bungku Barat	100	37.370.000,00		100	50.000.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan Makanan dan Minuman yang dibeli	Dos	Kecamatan Bungku Barat	95	23.940.000,00		840	23.940.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah yang diikuti	%	Kecamatan Bungku Barat	7	60.032.000,00		100	70.000.000,00
7	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli	Jenis	Kecamatan Bungku Barat	24	15.150.000,00		16	35.000.000,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur yang dibeli	unit	Kecamatan Bungku Barat	133	52.830.000,00		100	35.000.000,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit	Kecamatan Bungku Barat	6	10.000.000,00		6	12.000.000,00
7	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang di Rehabilitasi	Gedung	Kecamatan Bungku Barat	1	66.710.000,00		1	70.000.000,00
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Gedung	Kecamatan Bungku Barat	1	120.000.000,00		1	250.000.000,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	%	Kecamatan Bungku Barat	90	62.585.000,00		95	132.000.000,00
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang dibeli	pasang	Kecamatan Bungku Barat	-	0,00		36	22.000.000,00
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli	pasang	Kecamatan Bungku Barat	-	0,00		36	20.000.000,00
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM 3 & PIM 4	orang	Kecamatan Bungku Barat	3	62.585.000,00		3	90.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Predikat	Kecamatan Bungku Barat	90	12.790.000,00		95	13.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bungku Barat	56	12.790.000,00		65000000	13.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	%	Kecamatan Bungku Barat	56	12.790.000,00		95	13.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	1	339.449.000,00		95	345.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	Kecamatan Bungku Barat	90	339.449.000,00		95	345.000.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	Desa	Kecamatan Bungku Barat	10	23.950.000,00		10	25.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Kegiatan Lomba Desa, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Dukungan PKK,Bupati Cup dan STQ/MTQ	%	Kecamatan Bungku Barat	9	315.499.000,00		95	320.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	Kasus	Kecamatan Bungku Barat	0	0,00		0	50.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif	unit	Kecamatan Bungku Barat	0	0,00		20000000	50.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase forum keagamaan tingkat kecamatan dan Kabupaten, Festival Maulid	%	Kecamatan Bungku Barat	1	0,00		95	50.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Kecamatan Bungku Barat	100	0,00		100	20.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	Kecamatan Bungku Barat	0	0,00		20000000	20.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bungku Barat	0	0,00		6	20.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kecamatan Bungku Barat	100	17.550.000,00		100	20.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Desa	Kecamatan Bungku Barat	1	17.550.000,00		90	20.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	Desa	Kecamatan Bungku Barat	1	7.150.000,00		-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	Desa	Kecamatan Bungku Barat	10	0,00		10	10.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pendampingan Desa	Desa	Kecamatan Bungku Barat	10	10.400.000,00		10	10.000.000,00
7	01	01	05		KECAMATAN BAHODOPI					4.295.682.277,00			5.077.644.875,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kinerja Pemerintahan Kecamatan	%	Kecamatan Bahodopi	100	3.891.599.277,00		100	4.562.644.875,00
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan	Dokumen	Kecamatan Bahodopi	2	43.890.000,00		2	155.000.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Rentra Dan Renja Perangkat Kecamatan	Dokumen	Kecamatan Bahodopi	1	4.790.000,00		1	15.000.000,00
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Bahodopi	2	8.200.000,00		2	15.000.000,00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	30.900.000,00		1	125.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan	Tahun	Kecamatan Bahodopi	1	3.295.682.277,00		1	2.890.295.000,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Kecamatan Bahodopi	1	3.295.682.277,00		1	2.890.295.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum	per tahun	Kecamatan Bahodopi	1	552.027.000,00		1	1.322.349.875,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	1.800.000,00		12	1.000.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	8.400.000,00		12	12.000.000,00
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Kecamatan Bahodopi	1	3.000.000,00		8	20.000.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kecamatan Bahodopi	5	2.500.000,00		0	0,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	155.879.496,00		12	150.000.000,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	10.900.000,00		12	18.000.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	20.482.504,00		12	15.000.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	12.350.000,00		12	12.000.000,00
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	Kecamatan Bahodopi	1	1.500.000,00		1	1.500.000,00
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		4	51.849.875,00
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	buah	Kecamatan Bahodopi	0	0,00		5	10.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	29.980.000,00		30.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	Kecamatan Bahodopi	12	193.635.000,00		275.000.000,00
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kecamatan Bahodopi	1	18.500.000,00		0,00
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	Kecamatan Bahodopi	3	33.500.000,00		30.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	unit	Kecamatan Bahodopi	2	0,00		20.000.000,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	unit	Kecamatan Bahodopi	1	49.600.000,00		65.000.000,00
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Gedung	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		0,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		100.000.000,00
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kecamatan Bahodopi	1	10.000.000,00		11.000.000,00
7	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Gedung	Kecamatan Bahodopi	0	0,00		500.000.000,00
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		0,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	3	0,00		195.000.000,00
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	unit	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		0,00
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	pasang	Kecamatan Bahodopi	40	0,00		0,00
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	pasang	Kecamatan Bahodopi	0	0,00		20.000.000,00
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	Kecamatan Bahodopi	3	0,00		75.000.000,00
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	0	0,00		100.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	Kecamatan Bahodopi	100	157.825.000,00		45.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	157.825.000,00		45.000.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	3	157.825.000,00		45.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	%	Kecamatan Bahodopi	100	49.878.000,00		90.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	12	49.878.000,00		90.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa	Desa	Kecamatan Bahodopi	12	14.250.000,00		12	40.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	Kec. Bahodopi	1	35.628.000,00		1	50.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	%	Kecamatan Bahodopi	100	0,00		100	105.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	70.000.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	35.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan forum keagamaan tingkat kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	35.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	35.000.000,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	35.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	196.380.000,00		3	145.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	196.380.000,00		2	145.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya.	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	196.380.000,00		2	110.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	35.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kecamatan Bahodopi	100	0,00		100	130.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	5	0,00		5	130.000.000,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		1	30.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		25.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		35.000.000,00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		20.000.000,00
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	Kecamatan Bahodopi	1	0,00		20.000.000,00
7	01	01	06		KECAMATAN BUMI RAYA				3.730.804.536,00			3.386.722.694,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kinerja Perangkat Daerah	%	Kecamatan Bumi Raya	65	3.269.070.678,00	70	2.930.568.836,00
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Kecamatan Bumi Raya	100	24.953.000,00	100	24.953.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Tersusun	Dokumen	Kecamatan Bumi Raya	1	8.810.000,00	1	8.810.000,00
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA tersusun	Dokumen	Kecamatan Bumi Raya	4	10.264.000,00	4	10.264.000,00
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip dan IKK Tersusun	Dokumen	Kecamatan Bumi Raya	2	5.879.000,00	2	5.879.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan	%	Kecamatan Bumi Raya	100	2.430.804.536,00	100	2.103.502.694,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kantor Camat Bumi Raya	orang	Kecamatan Bumi Raya	28	2.430.804.536,00	29	2.103.502.694,00
7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	%	Kecamatan Bumi Raya	100	731.163.142,00	100	754.463.142,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Daya Listrik	Kwh	Kecamatan Bumi Raya	9000	14.400.000,00	9000	14.400.000,00
						Jumlah Pemakaian Data Internet	Bulan	Kecamatan Bumi Raya	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 Terlunasi	Unit Tahun	Kecamatan Bumi Raya	1	1.300.000,00	1	1.300.000,00
						Jumlah Pajak Kendaraan Roda 2 Terlunasi	Unit Tahun	Kecamatan Bumi Raya	2	700.000,00	3	1.050.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayarkan	orang	Kecamatan Bumi Raya	15	367.186.142,00	15	367.186.142,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Ketersediaan Alat-alat Kebersihan	Jenis	Kecamatan Bumi Raya	20	5.000.000,00	20	5.100.000,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Ketersediann Alat Tulis Kantor	Jenis	Kecamatan Bumi Raya	40	16.000.000,00	43	16.150.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Spanduk yang Dicitak	buah	Kecamatan Bumi Raya	20	6.000.000,00	20	6.000.000,00
						Jumlah Umbul-umbul yang	buah	Kecamatan Bumi Raya	50	3.750.000,00	NA	0,00
						Jumlah Penggandaan	Exemplar	Kecamatan Bumi Raya	16000000	4.800.000,00	16000000	4.800.000,00
7	01	01		12	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Balon Lampu Pijar	buah	Kecamatan Bumi Raya	15	750.000,00	15	750.000,00
						Jumlah Feeting Lampu	buah	Kecamatan Bumi Raya	15	375.000,00	15	375.000,00
						Jumlah Saklar Lampu	buah	Kecamatan Bumi Raya	15	375.000,00	15	375.000,00
						Jumlah Choke Rool	buah	Kecamatan Bumi Raya	5	125.000,00	5	125.000,00
						Jumlah Cable Instalasi	Roll	Kecamatan Bumi Raya	3	750.000,00	3	750.000,00
7	01	01		13	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Komputer Deskt Top	buah	Kecamatan Bumi Raya	1	20.000.000,00	NA	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
			2.03	Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	12.000.000,00
					Jumlah AC Split	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Kipas Angin	buah	Kecamatan Bumi Raya	1	1.500.000,00		NA	0,00
					Jumlah Genset	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Sound Sistem	set	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	25.000.000,00
					Jumlah TOA	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Tiang Mic	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Mesin Paras	unit	Kecamatan Bumi Raya	1	10.000.000,00		NA	0,00
					Jumlah Infocus	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah UPS	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Hard Disk	buah	Kecamatan Bumi Raya	1	1.200.000,00		NA	0,00
					Jumlah Kamera Digital	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	15.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Lemari Es	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	3.000.000,00
					Jumlah Televisi	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	6.000.000,00
					Jumlah Jenis Peralatan Makan dan Minum	Jenis	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Kompor Gas	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Jenis Peralatan Memasak	Jenis	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan	Dos	Kecamatan Bumi Raya	500	20.000.000,00		500	20.000.000,00
					Jumlah Snack	Dos	Kecamatan Bumi Raya	1000	17.000.000,00		1000	17.000.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan	Kecamatan Bumi Raya	6	70.252.000,00		6	70.252.000,00
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	unit	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	21.000.000,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	buah	Kecamatan Bumi Raya	1	7.500.000,00		NA	0,00
					Jumlah Lemari Arsip	buah	Kecamatan Bumi Raya	1	3.500.000,00		NA	0,00
					Jumlah Lemari Barang	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	2.500.000,00
					Jumlah Lemari Makanan	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Lemari Pakaian	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Meja Rapat	buah	Kecamatan Bumi Raya	4	8.000.000,00		2	5.000.000,00
					Jumlah Meja Makan	stel	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00
					Jumlah Kursi Kerja	buah	Kecamatan Bumi Raya	2	3.600.000,00		NA	0,00
					Jumlah Kursi Rapat	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		50	25.000.000,00
					Jumlah Spring Bad	buah	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	5.000.000,00
					Jumlah sofa	stel	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		1	10.000.000,00
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	M2	Kecamatan Bumi Raya	110	10.000.000,00		NA	0,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	M2	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00		NA	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / <u>Operasional Roda 4 Terpelihara</u>	unit	Kecamatan Bumi Raya	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00
						Jumlah Kendaraan Dinas / <u>Operasional Roda 2 Terpelihara</u>	unit	Kecamatan Bumi Raya	2	4.500.000,00	3	6.750.000,00
7	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Luasan Rumah Jabatan yang Direhab	M2	Kecamatan Bumi Raya	NA	0,00	63	75.000.000,00
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Luasan Gedung Kantor yang Direhab	M2	Kecamatan Bumi Raya	240	115.000.000,00	NA	0,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP ASN Kantor Camat Bumi Raya	Poin	Kecamatan Bumi Raya	85	82.150.000,00	86	47.650.000,00
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu Absensi	buah	Kecamatan Bumi Raya	1	4.500.000,00	NA	0,00
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan III	orang	Palu	1	30.000.000,00	NA	0,00
						Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan IV	orang	Palu	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	orang	Makassar	2	22.650.000,00	2	22.650.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	Kecamatan Bumi Raya	15	104.020.000,00	17	106.840.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	Kecamatan Bumi Raya	75	99.280.000,00	80	99.280.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	Kecamatan Bumi Raya	240	99.280.000,00	240	99.280.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	%	Kecamatan Bumi Raya	30	4.740.000,00	50	7.560.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan dilimpahkan Bupati yang Dilaksanakan Camat	Kegiatan	Kecamatan Bumi Raya	2	4.740.000,00	3	7.560.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan pada APBDes	%	Kecamatan Bumi Raya	20	336.963.858,00	25	336.963.858,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	Kecamatan Bumi Raya	45	336.963.858,00	50	336.963.858,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kehadiran Masyarakat pada Kegiatan Musrenbang Desa	%	Kecamatan Bumi Raya	10	6.175.000,00	12	6.175.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Kegiatan TP-PKK Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bumi Raya	4	81.930.000,00	4	81.930.000,00

Kode					Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
					Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan	Kegiatan	Kecamatan Bumi Raya	7	227.958.858,00		7	227.958.858,00
						Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Desa	Kecamatan Bumi Raya	13	20.900.000,00		13	20.900.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaporkan Dana APBDes Tepat Waktu	%	Kecamatan Bumi Raya	30	20.750.000,00		46	12.350.000,00
7	01	06			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	Kecamatan Bumi Raya	31	20.750.000,00		46	12.350.000,00
7	01	06		02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	Desa	Kecamatan Bumi Raya	4	7.150.000,00		6	7.150.000,00
7	01	06		03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Tertib Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset	Desa	Kecamatan Bumi Raya	4	5.200.000,00		6	5.200.000,00
7	01	06		06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	Desa	Kecamatan Bumi Raya	7	8.400.000,00		NA	0,00
7	01	01	07		KECAMATAN WITA PONDA					3.464.312.840,00			3.438.089.014,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	3.155.562.840,00		100 %	2.995.219.014,00
7	01	01		2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	3.500.000,00		100 %	53.516.000,00
7	01	01		01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	3.500.000,00		1	3.675.000,00
7	01	01		03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evluasi Perangkat daerah	Dokumen	Kantor Camat Wita Ponda	1	0,00		1	3.675.000,00
7	01	01		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan	Kantor Camat Wita Ponda	1	0,00		1	42.578.500,00
7	01	01		05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kantor Camat Wita Ponda	1	0,00		1	3.587.500,00
7	01	01		2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	2.167.812.840,00		100 %	1.920.248.049,00
7	01	01		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	2.164.312.840,00		1 Tahun	1.901.873.049,00
7	01	01		04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	Kantor Camat Wita Ponda	1 Dok	0,00		1 Dok	3.675.000,00
7	01	01		05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	kantor Camat Wita Ponda	1 Dok	0,00		1 Dok	3.675.000,00
7	01	01		06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Kantor Camat wita ponda	1 Dok	0,00		1 Dok	3.675.000,00
7	01	01		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	Kantor Camat Wita Ponda	12 Dok	0,00		12 Dok	3.675.000,00
7	01	01		09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Doumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Kantor Camat Wita Ponda	12 Dok	3.500.000,00		12 Dok	3.675.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01		Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum	%	kantor Camat Wita Ponda	100 %	934.250.000,00		100 %	901.454.965,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yag dikelola, Surat bermaterai serta jumlah dokumen terkirim	Tahun	Kantor camat Wita ponda	1 Tahun	4.280.000,00	1 Tahun	4.494.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	%	Kantor Camat Wita Ponda	1 tahun	15.000.000,00	1 tahun	14.530.228,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	%	Kantor Camat Wita Ponda	1 tahun	1.800.000,00	1 Tahun	1.800.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan tiap bulan	%	Kantor Camat wita ponda	1 Tahun	340.100.700,00	1 Tahun	276.880.512,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang dibeli	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 tahun	16.000.000,00	1 Tahun	16.800.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang di cetak dan dipandakan	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	10.000.000,00	1 tahun	10.500.000,00
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	paket	Kantor Camat Wita Ponda	1 Paket	18.750.000,00	1 paket	2.000.000,00
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	65.190.800,00	1 Tahun	71.799.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	45.700.000,00	1 Tahun	47.985.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah yang diikuti	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	151.928.500,00	1 Tahun	159.524.925,00
7	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	0,00	1 Tahun	250.641.300,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis Mebeleur yang dibeli	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1	13.000.000,00	1 tahun	0,00
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah dan Luas Rumah Jabatan Yang di Pelihara	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Tahun	Kantor camat Wita Ponda	1 Tahun	15.000.000,00	1 tahun	0,00
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	15.000.000,00	1 tahun	15.000.000,00
7	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan Jenis perlengkapan Rumah jabatan/Dinas yang dipelihara	Tahun	Kantor Camat wita ponda	1 Tahun	0,00	1 tahun	7.000.000,00
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Tahun	Kantor Camat wita ponda	1 Tahun	7.500.000,00	1 tahun	7.500.000,00
7	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah dan Luas Rumah Jabatan yang di Rehabilitasi	paket	Kantor Camat Wita ponda	1 Tahun	0,00	1 tahun	0,00
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	paket	Kantor Camat Wita ponda	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	0,00
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	50.000.000,00	100 %	120.000.000,00
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang dibeli	orang	Kantor Camat Wita Ponda	25 Orang	0,00	25 Orang	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang dibeli	orang	Kantor Camat Wita Ponda	25 Orang	0,00		25 Orang	0,00
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti PIM 3 & PIM 4	orang	Kantor Camat Wita Ponda	2 Orang	20.000.000,00		3 Orang	60.000.000,00
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	Kantor Camat Wita Ponda	3 Orang	30.000.000,00		3 Orang	60.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	KANTOR CAMAT WITA PONDA	100 %	0,00		100 %	71.400.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	0,00		100 %	42.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	0,00		1 Tahun	42.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	0,00		100 %	29.400.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	0,00		1 Tahun	29.400.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	kantor camat wita ponda	100 %	246.250.000,00		100 %	227.420.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	246.250.000,00		100 %	227.420.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	Desa	Kantor Camat Wita Ponda	9 Desa	15.000.000,00		9 Desa	15.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional , Dukungan PKK,Bupati Cup dan STQ/MTQ	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	231.250.000,00		100 %	212.420.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	30.000.000,00		100 %	76.550.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah siskamling aktif	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	30.000.000,00		100 %	65.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah forum keagamaan tingkat kecamatan dan Kabupaten, Festival Maulid	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	65.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	0,00		100 %	11.550.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tahun	Kantor Camat Wita Ponda	1 Tahun	0,00		1 Tahun	11.550.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	0,00		100 %	20.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	0,00		100 %	20.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kantor Camat Wita Ponda	4 Kegiatan	0,00		4 Kegiatan	20.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	32.500.000,00		100 %	47.500.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	%	Kantor Camat Wita Ponda	100 %	32.500.000,00		100 %	47.500.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	Desa	Kantor Camat Wita Ponda	1 Desa	2.500.000,00		1 Desa	2.500.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	Desa	Kantor Camat Wita Ponda	9 Desa	0,00		9 Desa	18.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pendampingan Desa	Desa	Kantor Camat Wita Ponda	9 Desa	30.000.000,00		9 Desa	27.000.000,00
7	01	01	08		KECAMATAN BUNGKU TIMUR					3.125.776.664,00			4.995.874.674,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai AKIP Kecamatan Bungku Timur	Predikat	Kec. Bungku Timur	B	2.846.648.664,00		A	3.804.583.774,00
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang tersusun	%	Kec. Bungku Timur	100	4.500.000,00		100	57.575.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan Bungku Timur	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	2.500.000,00		1	3.675.000,00
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	1.000.000,00		1	3.675.000,00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	?????????	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	0,00		1	46.637.500,00
7	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	1.000.000,00		1	3.587.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Target Keuangan Perangkat Daerah	%	Kec. Bungku Timur	100	1.930.776.664,00		100	1.689.946.630,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	orang	Kec. Bungku Timur	19	1.925.776.664,00		Na	1.671.571.630,00
7	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	1.000.000,00		1	3.675.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	1.000.000,00		1	3.675.000,00
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Kec. Bungku Timur	1	1.000.000,00		1	3.675.000,00
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	Kec. Bungku Timur	12	1.000.000,00		12	3.675.000,00
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Kec. Bungku Timur	12	1.000.000,00		12	3.675.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Presentase Administrasi Pelayanan Umum	%	Kec. Bungku Timur	100	847.872.000,00		100	1.746.682.144,00
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	Kec. Bungku Timur	1	800.000,00		1	750.000,00
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	%	Kec. Bungku Timur	100	4.800.000,00		100	15.015.000,00
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	%	Kec. Bungku Timur	100	2.500.000,00		100	25.000.000,00
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honor Tenaga administrasi keuangan tiap bulan	orang	Kec. Bungku Timur	15	335.772.000,00		15	338.683.644,00
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Servis Yang Digaji	orang	Kec. Bungku Timur	1	0,00		Na	3.968.500,00
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase jumlah ATK yang tersedia	%	Kec. Bungku Timur	100	10.000.000,00		100	16.800.000,00
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase jumlah ATK yang tersedia	%	Kec. Bungku Timur	100	5.000.000,00		100	10.500.000,00
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	%	Kec. Bungku Timur	100	20.000.000,00		100	295.790.000,00
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Ketersediaan Makanan Dan Minuman	%	Kec. Bungku Timur	100	10.000.000,00		100	27.300.000,00
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	%	Kec. Bungku Timur	100	30.000.000,00		100	117.875.000,00
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia (Unit)	unit	Kec. Bungku Timur	Na	40.000.000,00		Na	60.000.000,00
7	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase Ketersediaan kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	%	Kec. Bungku Timur	100	0,00		100	50.000.000,00
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	%	Kec. Bungku Timur	100	20.000.000,00		100	210.000.000,00
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor	unit	Kec. Bungku Timur	Na	10.000.000,00		Na	25.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	01	2.03	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung	Kec. Bungku Timur	1	0,00		1	10.000.000,00
7	01	01	2.03	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	unit	Kec. Bungku Timur	Na	5.000.000,00		Na	30.000.000,00
7	01	01	2.03	31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Rummah Jabatan/Dinas	paket	Kec. Bungku Timur	0	0,00		1	50.000.000,00
7	01	01	2.03	34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	paket	Kec. Bungku Timur	1	4.000.000,00		1	60.000.000,00
7	01	01	2.03	38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung	Kec. Bungku Timur	1	350.000.000,00		1	400.000.000,00
7	01	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	Kec. Bungku Timur	100	63.500.000,00		100	310.380.000,00
7	01	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang dibeli	pasang	Kec. Bungku Timur	25	0,00		25	21.750.000,00
7	01	01	2.04	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli	pasang	Kec. Bungku Timur	25	14.500.000,00		25	14.500.000,00
7	01	01	2.04	09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	Kec. Bungku Timur	2	44.000.000,00		6	254.130.000,00
7	01	01	2.04	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tehnik implementasi peraturan perundangundangan	orang	Kec. Bungku Timur	1	5.000.000,00		1	20.000.000,00
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN)	%	Kec. Bungku Timur	100	0,00		100	92.740.900,00
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Kec. Bungku Timur	Na	0,00		Na	63.340.900,00
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	Kec. Bungku Timur	Na	0,00		Na	63.340.900,00
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pusat Pelayanan Masyarakat	%	Kec. Bungku Timur	Na	0,00		Na	29.400.000,00
7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati/Kepada Camat (KDH)	Kegiatan	Kec. Bungku Timur	Na	0,00		Na	29.400.000,00
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	Kec. Bungku Timur	Na	235.128.000,00		Na	327.500.000,00
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelompok Binaan Desa	%	Kec. Bungku Timur	Na	235.128.000,00		Na	327.500.000,00
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	Desa	Kec. Bungku Timur	10	19.867.500,00		10	20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional , Dukungan PKK,Bupati Cup dan STQ/MTQ	Kegiatan	Kec. Bungku Timur	5	215.260.500,00		5	307.500.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	%	Kec. Bungku Timur	Na	21.500.000,00		Na	711.550.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Siskamling Aktif	%	Kec. Bungku Timur	100	21.500.000,00		100	700.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah forum keagamaan tingkat kecamatan dan Kabupaten, Festival Maulid	Kegiatan	Kec. Bungku Timur	Na	21.500.000,00		Na	700.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tahun	Kec. Bungku Timur	1	0,00		1	11.550.000,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tahun	Kec. Bungku Timur	1	0,00		1	11.550.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penciptaan Stabilitas Wilayah Yang Dinamis Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Umum	%	Kec. Bungku Timur	100	20.000.000,00		100	20.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Urusan Pemerintah Kecamatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	Kec. Bungku Timur	100	20.000.000,00		100	20.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kec. Bungku Timur	4	20.000.000,00		4	20.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kec. Bungku Timur	100	2.500.000,00		100	39.500.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Jumlah Desa Yang Mendapati Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	Kec. Bungku Timur	100	2.500.000,00		100	39.500.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	Desa	Kec. Bungku Timur	4	2.500.000,00		1	2.500.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	Desa	Kec. Bungku Timur	10	0,00		10	10.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pendampingan Desa	Desa	Kec. Bungku Timur	10	0,00		10	27.000.000,00
7	01	01	09	KECAMATAN BUNGKU PESISIR					3.507.871.777,00			5.138.513.770,00
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kinerja Pemerintah Daerah	%	Kec. Bungku Pesisir	100	3.259.499.777,00		100	4.426.013.770,00
7	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Pesisir	3	24.420.000,00		3	195.000.000,00
7	01	01	2.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	10.000.000,00
7	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		2	10.000.000,00
7	01	01	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	24.420.000,00		1	175.000.000,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	2.207.871.777,00		1	3.022.153.770,00
7	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	2.207.871.777,00		1	3.022.153.770,00
7	01	01	2.03	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	1.027.208.000,00		1	1.068.860.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	4.200.000,00		1	7.500.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	4.800.000,00		1	6.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	7.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		3	12.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	306.671.387,00		1	240.360.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	4.000.000,00		1	6.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	20.035.000,00		1	19.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	7.199.800,00		1	5.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	5.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	50.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	unit	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		5	25.000.000,00
7	01	01	2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	45.600.000,00		1	36.000.000,00
7	01	01	2.03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tahun	Kec. Bungku Pesisir	1	172.350.000,00		1	180.000.000,00
7	01	01	2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		2	50.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022		
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	unit	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		2	10.000.000,00
7	01	01		2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	unit	Kec. Bungku Pesisir	1	99.851.813,00		4
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	buah	Kec. Bungku Pesisir	14	30.500.000,00		10	50.000.000,00
7	01	01		2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Gedung	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung	Kec. Bungku Pesisir	1	100.000.000,00		1	200.000.000,00
7	01	01		2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Kec. Bungku Pesisir	2	32.000.000,00		2
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung	Kec. Bungku Pesisir	0	200.000.000,00		0	0,00
7	01	01		2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		4
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	unit	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	5.000.000,00
7	01	01		2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	pasang	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		35
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	pasang	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		35	17.500.000,00
7	01	01		2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pejabat yang Mengikuti PIM	orang	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		3
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		2	25.000.000,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	Kec. Bungku Pesisir	100	97.750.000,00		100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	1	97.750.000,00		1	200.000.000,00
7	01	02		03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	2	97.750.000,00		2	200.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	%	Kec. Bungku Pesisir	100	98.122.000,00		100	57.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	2	98.122.000,00		2	57.500.000,00
7	01	03		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa	Desa	Kec. Bungku Pesisir	10	22.800.000,00		10	30.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	2	75.322.000,00		1	27.500.000,00
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	%	Kec. Bungku Pesisir	100	0,00		100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	1	0,00		1	200.000.000,00
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan forum keagamaan tingkat kecamatan	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		2	200.000.000,00
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	1	52.500.000,00		1	150.000.000,00
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	1	52.500.000,00		1	150.000.000,00
7	01	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	1	52.500.000,00		2	150.000.000,00
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	%	Kec. Bungku Pesisir	100	0,00		100	105.000.000,00
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		4	105.000.000,00
7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	15.000.000,00
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	20.000.000,00
7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		4	40.000.000,00
7	01	06	2.01	08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	Kec. Bungku Pesisir	0	0,00		1	30.000.000,00
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					4.455.011.981,00			28.064.971.695,00
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.455.011.981,00			28.064.971.695,00
8	01	01	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH					4.455.011.981,00			28.064.971.695,00
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah data penunjang program perbidang dan kegiatan	Jenis	Kab. Morowali	6/7	3.513.433.981,00		7/8	22.273.091.695,00
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	%	.	na	2.923.673.981,00		na	0,00
8	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentasi Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	-	100	2.923.673.981,00		100	0,00
8	01	01	2.03	Administrasi Umum	Jumlah penyusunan administrasi umum	Bulan	Kesbangpol	12	589.760.000,00		12	22.273.091.695,00
8	01	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	1.500.000,00		12	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
8	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumber air dan listrik dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	12.000.000,00		12	15.000.000,00
						Jumlah penambahan sumber daya listrik dari 1300 kwh-3000 kwh	Kwh	Kesbangpol	3000	3.000.000,00		0	0,00
8	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	4 Unit	kesbangpol	9	2.960.000,00		9	4.450.000,00
8	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah gaji ASN dalam 1 tahun	orang	Kesbangpol	31	0,00		31	21.101.256.687,00
						Jumlah honor tenaga administrasi dalam 1 tahun	orang	Kesbangpol	10	272.486.100,00		11	272.485.008,00
8	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah iuran kebersihan kantor dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	0,00		12	900.000,00
8	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki dalam 1 tahun	unit	Kesbangpol	5	0,00		2	2.000.000,00
8	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah anggaran ATK dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	22.929.400,00		12	65.000.000,00
8	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	20.000.000,00		12	45.000.000,00
8	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik pada bangunan kantor dalam 1 tahun	Kwh	Kesbangpol	1	0,00		0	0,00
8	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	unit	Kesbangpol	6	25.000.000,00		2	14.000.000,00
8	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan harian dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	55.562.500,00		12	106.000.000,00
8	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun	Kegiatan	Kesbangpol	22	174.322.000,00		22	300.000.000,00
8	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun	unit	Kesbangpol	3	0,00		2	50.000.000,00
8	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	Kesbangpol	1	0,00		na	0,00
8	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur dalam 1 tahun	paket	Kesbangpol	1	0,00		1	125.000.000,00
8	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dalam 1 tahun	Bulan	Kesbangpol	12	0,00		12	25.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
8	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun	unit	Kesbangpol	9	0,00		9	65.000.000,00
8	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	unit	Kesbangpol	7	0,00		7	7.000.000,00
8	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	paket	Kesbangpol	1	0,00		1	25.000.000,00
8	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	%	Kesbangpol	24	0,00		24	0,00
8	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi dalam 1 tahun	unit	Kesbangpol	1	0,00		na	0,00
8	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								
8	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu								
8	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal								
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	orang	Kab. Morowali	0,003	133.400.000,00		0,003	2.205.000.000,00
						Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	orang	-	1.107			1.107	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	orang	.	900	133.400.000,00		1350	2.205.000.000,00
						Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	orang	.	774			774	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sekolah jenjang pendidikan SLTP & SLTA yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan ideologi pancasila	orang	Kab. Morowali	500	0,00		500	300.000.000,00
						Jumlah ASN dan kaum milenial yang mendapat program pembumih pancasila	orang	Kab. Morowali	500	0,00		500	300.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah OPD/ASN dan ormas/pengurus yang mendapatkan revolusi mental	orang	Kab. Morowali	773	77.734.900,00		773	500.000.000,00
						Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan bela negara	orang	Kab. Morowali	100	44.965.100,00		100	500.000.000,00
						Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Hari Kesaktian Pancasila dan Lahir Pancasila	Kegiatan	Kab. Morowali	3	10.700.000,00		3	30.000.000,00
						Jumlah forum Pembauran Kebangsaan.	Kegiatan	Kab. Morowali	1	0,00		1	125.000.000,00
						Jumlah kegiatan seminar sejarah nasional dan daerah dalam bingkai NKRI bagi pelajar, mahasiswa, tomas, toga, ASN dan ormas	orang	Kab. Morowali	200	0,00		200	300.000.000,00
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat-rapat kordinasi pembinaan ideologi dan bela negara yang dilaksanakan	Kegiatan	Kab. Morowali	12	0,00		12	150.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	%	-	5	271.528.000,00		5	1.471.880.000,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Persentase parpol yang mendapatkan pendidikan politik.	%	Kab. Morowali	5	271.528.000,00		5	1.471.880.000,00
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik.	orang	.	80	0,00		112	200.000.000,00
						Jumlah Tim Verifikasi Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik	Tim	.	1	0,00		1	221.880.000,00
						Jumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Morowali	Kegiatan	Kab. Morowali	1	207.200.000,00		1	750.000.000,00
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	orang	.	9	0,00		9	150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
					Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	orang	.	75	0,00		0	0,00
						Jumlah pemantauan situasi politik di daerah	Kecamatan	Kab. Morowali	9	64.328.000,00		9	150.000.000,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	%	Kab. Morowali	7,8	53.855.000,00		7,8	140.000.000,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	9 Kecamatan	7,8	53.855.000,00		7,8	140.000.000,00
						Persentase pengurus ormas yang diberdayakan	%	9 Kecamatan	7,8			7,8	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pendataan ormas di 9 kecamatan	organisasi	Kab. Morowali	39	53.855.000,00		45	140.000.000,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	%	Kab. Morowali	0,33	57.745.000,00		0,33	1.200.000.000,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase perkembangan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	%	.	0,33	57.745.000,00		0,33	1.200.000.000,00
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah penyalahgunaan narkotika di 9 kecamatan.	orang	9 Kecamatan	3	0,00		3	200.000.000,00
						Jumlah kegiatan fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah di 9 kecamatan	Kecamatan	Kab. Morowali	1	44.745.000,00		2	200.000.000,00
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pengurus kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	orang	Kab. Morowali	12	0,00		12	350.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu		Target Kinerja	Pagu
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Tim ketahanan ekonomi, sosial, budaya.	Kegiatan	Kab. Morowali	2	13.000.000,00		3	300.000.000,00
						Jumlah Pelaksanaan rapat Koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kegiatan	Kab. Morowali	3	0,00		3	150.000.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	%	Kab. Morowali	88	425.050.000,00		1,75	775.000.000,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang terselesaikan	%	Kab. Morowali	88	425.050.000,00		8,747	775.000.000,00
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Potensi konflik yang terpetakan (%)	%	Kab. Morowali	2,25	328.130.000,00		0,57	500.000.000,00
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi	%	Kab. Morowali	1,13	96.920.000,00		1.14	275.000.000,00
Total										744.344.090.112,00			4.038.687.318.172,00



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021**

**BAB
VI**

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1

Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Morowali Tahun 2021

Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,78
Pertumbuhan Ekonomi	15,03%
Angka Kemiskinan	13,40%
Nilai Tukar Petani	100,14%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,86%
Gini Ratio	0,292

Indikator kinerja tersebut di atas merupakan indikator kinerja makro atau kinerja pembangunan daerah Kabupaten Morowali. Selain indikator makro juga terdapat indikator pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.2 Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2021**

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	100
Angka melanjutkan ke jenjang SD/MI	100
Angka Kelulusan SD/MI	100
Rasio sekolah perjumlah penduduk usia sekolah	1:45
Rasio siswa per ruang kelas	1:38
Persentase sekolah yang memiliki ruang guru/kepala sekolah/TU	50
Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan	50
Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (jamban)	50
Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (tugu batas)	50
Persentase sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	50
Persentase rehabilitasi sekolah yang rusak Sedang/Berat Ruang Kelas	50%
Rasio jumlah siswa dan jumlah guru	1:3
Persentase Peserta Didik yang mengikuti ujian	100
Cakupan pelaksanaan sosialisasi dana BOS dan BSM	174
Persentase siswa berprestasi	50
Rasio tenaga Pustakawan	1:3
Rasio tenaga pendidik	1:28
Persentase sekolah terakreditasi	70
Jumlah peserta Pelatihan Operator DAPODIK Pendidikan Dasar	184
Jumlah Dokumen Profil Pendidikan	1
APK SMP/MTs	100
APM SMP/MTs	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	100
Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	100
Rasio sekolah perjumlah penduduk usia sekolah	1:65
Rasio siswa per ruang kelas	1:50
Persentase sekolah yang memiliki ruang guru/kepala sekolah/TU	50
Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan	50
Persentase sekolah yang memiliki Laboratorium IPA	50
Persentase sekolah yang memiliki rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	50
Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana dan utilitas sekolah (tugu batas)	50
Persentase rehabilitasi ruang kelas yang rusak Sedang/Berat	50
Persentase rehabilitasi laboratorium yang rusak Sedang/Berat	50
Rasio jumlah siswa dan jumlah guru	1:3
Rasio Buku elektronik	1:10
Persentase Peserta Didik yang mengikuti ujian	100
Persentase siswa berprestasi	100
Rasio tenaga perpustakaan	1:3
Jumlah tenaga Pendidik	320
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	100
Angka Partisipasi Sekolah PAUD	100
Angka Putus Sekolah PAUD	100
Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	100
Angka Kelulusan PAUD	100
Rasio sekolah perjumlah penduduk usia sekolah PAUD	1:15
Persentase sekolah PAUD yang memiliki pagar sekolah	50
Persentase pengadaan Perlengkapan PAUD (sarana bermain)	50
Jumlah kegiatan Hari Anak Nasional	1
Jumlah lembaga PAUD penerima biaya operasional (BPP)	75
Jumlah Kegiatan sosialisasi BOP PAUD	1
Jumlah kegiatan pemetaan mutu PAUD	1
Persentase PAUD yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi	50%
Rasio guru dan tenaga kependidikan PAUD	1:30
Jumlah kegiatan peningkatan Mutu PTK pada Satuan Pendidikan PAUD	50
Persentase mutu dan Kualitas Program pendidikan anak usia dini	50
Persentase kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD	1
Jumlah Kegiatan gebyar PAUD	1
Jumlah Kegiatan apresiasi bunda PAUD	1
Persentase lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100
Jumlah Kegiatan pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket C	1
Jumlah Kegiatan pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket B	1
Jumlah Kegiatan pelaksanaan ujian lembaga pendidikan kesetaraan Paket A	1
Persentase Nonformal/Kesetaraan yang melakukan tindak lanjut dan evaluasi	50
Rasio pendidik dan tenaga kependidikan Nonformal/Kesetaraan	50
Jumlah kegiatan Kursus dan kelembagaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah kegiatan publikasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1
Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	100
Persentase guru mulok mengikuti pelatihan	25
Persentase lembaga yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	100
Jumlah lembaga yang menyusun kompetensi dasar Muatan Lokal Pendidikan	75
Persentase terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal PAUD	50
Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	100
Rasio Guru/Murid Sekolah TK/RA	100
Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI	100
Rasio Guru/Murid Sekolah SMP/MTs	100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompentensi	50
Persentase pembinaan Kelompok Kerja Guru SD/MI	50
Persentase pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTs	50
Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	15
Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S2	15
Persentase kepala sekolah dan calon kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs yang memiliki sertifikat kepala sekolah	50
Persentase ketersediaan penerima TPG, TKG dan Tamsil	50
Jumlah tenaga pendidik PAUD yang berkualitas	75
Persentase lembaga PAUD yang berkualitas	50
Persentase Pemberdayaan tendik pendidikan non formal	50
Persentase kompetensi pustakawan SD/MI dan SMP/MTs	50
Jumlah kegiatan pendataan berbasis web	1
Jumlah kegiatan pengembangan Dapodik PAUD	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
Angka Kematian Balita (AKB)	0
Angka Kematian Ibu (AKI)	0
Angka Kesakitan	40
Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100
Persentase orang usia Produktif (15–59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	100
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	80
Prevalensi stunting	16
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah Raga	70
Persentase Penduduk dengan akses air minum yang layak	100
Cakupan Surveilans Kesehatan	100
Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Pada Balita	65
Persentase Cakupan Penanganan Kasus Diare	100
Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini Hepatitis B sesuai standar	75
Cakupan Pelayanan Orang dengan Gigitan Hewan Penyebab Rabies (GHPR) sesuai Standar	100
Persentase Wanita Usia 30-50 Thn yang dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	45
Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan Kesehatan	85
Persentase Puskesmas memiliki biaya Operasional	100
Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	100
Persentase Ketersediaan Data dan terintegrasi	100
Cakupan Ketersediaan Data	100
Cakupan Ketersediaan Data	100
Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	0
Cakupan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	100
Jumlah tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100
Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktek	100
Presentase SDM Yang Melaksanakan Tugas Sesuai Standar	100
Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik, UMAT, IRT dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	85
Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik, UMAT, IRT dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	100
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik, UMAT, IRT dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	100
Pesentase TPM yang di periksa dan memenuhi Syarat	85
Jumlah TPM yang memiliki Sertifikat Laik Higiene	85
Persentase TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat	85
Indeks Keluarga sehat	20
jumlah kebijakan berwawasan kesehatan	9
cakupan tema pesan komunikasi informasi edukasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat	8
Usia harapan Hidup	100%
Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	100%
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	2
Tipe Rumah Sakit	100%
Gedung dan bangunan	100%
Presentase Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	100%
Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%
Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%
Alat Kalibrasi	100%
Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin	100%
Persentase ketersediaan BHP	100%
Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%
Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%
Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%
Indek Kepuasan Masyarakat	100%
Tingkatkan Akreditasi	100%

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	100%
Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktek	100%
Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun	100%
Angka Kematian Balita (AKB)	0
Angka Kematian Ibu (AKI)	0
Angka Kesakitan	40
Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	Kategori D
Jumlah gedung Rumah Sakit yang Dipelihara	1 G
jumlah gedung Rumah Dinas yang Dipelihara	12 g
Persentase Kebutuhan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	71
Persentase Kebutuhan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	71
Persentase Kebutuhan Alat Kesehatan Dan alat Penunjang Medik	55
persentase kebutuhan obat rumah sakit	65
Pesentase Ketersediaan BHP	65
Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	56
Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85
Indeks Kepuasan Masyarakat	90
Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	1 Pkt
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	85
Persentase pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota	100
Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun	67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Persentase Sumber Daya Air Dalam Konidisi Baik	9,28
PersentaseKegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	7,24
Persentase Tanggul sungai yang dibangun	1,25
Panjang tanggul sungai yang dibangun ditahun-n (M)	1500
Panjang tanggul sungai yang harus dibangun (M)	120000
Persentase Breakwater yang dibangun	0,29
Panjang Breakwater yang dibangun ditahun-n (M)	360
Panjang Breakwater yang harus dibangun (M)	125000
Persentase Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya yang dibangun	0,87
Panjang Seawall yang dibangun (M)	1000
Panjang Seawall yang harus dibangun (M)	114390
Persentase Tanggul Sungai yang direhabilitasi	4,04
Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi (M)	133
Panjang tanggul sungai yang harus direhabilitasi (M)	3294
Persentase Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai	3,07
Panjang Sungai yang dinormalisasi (M)	4600
Panjang Sungai yang harus dinormalisasi (M)	150000
Persentase Luas Sawah yang terairi	11,31
Persentasi Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	0,84
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun (M)	206
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus dibangun (M)	24470
Persentase Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	1,57

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (M)	971
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus ditingkatkan (M)	61907
Persentase Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	6,67
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (M)	1000
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang harus direhabilitasi (M)	15000
Persentase Bendung Irigasi yang direhabilitasi (DI)	4,35
Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi (DI)	1
Jumlah Bendung Irigasi yang harus direhabilitasi (DI)	23
Persentase Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan terpelihara (DI)	34.78%
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan terpelihara (DI)	8
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang harus dioperasikan dan terpelihara (DI)	23
Indeks Kualitas Air Minum	6,40
Persentase rumah tangga Berakses air minum	7,78
Persentase Unit Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	7,78
'Jumlah Unit Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan	1500
'Jumlah Unit Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan yang seharusnya	19285
Indeks Kualitas Sanitasi	7,98
Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	16,39
Persentase pengelolaan sistem drainase	3,41
Persentase Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam kondisi baik(m)	2,54
Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang akan dibangun	1,750
Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Seharusnya dibangun	68837
Persentase Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (m)	7,69
Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang akan direhabilitasi	385
Panjang Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Seharusnya direhabilitasi	5000
Persentase Jumlah bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	9,84
Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	9,84
Persentase Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum	9,84
'Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang dibangun	6
Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya dibangun	61
Persentase dokumen Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang diawasi	9,80
Jumlah dokumen Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang diawasi	5
Jumlah dokumen Pengawasan Bangunan pemerintah/fasilitas umum yang seharusnya diawasi	51
Frekuensi Monitoring Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten	3,28
Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah	4

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Kabupaten	
Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten yang seharusnya dilakukan	732
Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	8,99
Persentase jalan dalam kondisi baik (Aspal)	0,67
Persentase jembatan dalam kondisi baik	5,16
Persentase Jalan Yang di Bangun	1,07
Panjang Jalan yang dibangun (KM)	1,6
Panjang Jalan yang seharusnya dibangun (KM)	150
Persentase pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	7,00
Jumlah pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	7
Jumlah pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya	100
Persentase Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	15,56
Jumlah Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	7
Jumlah Pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya (unit)	45
Persentase pengadaan alat Berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	4,76
Jumlah pengadaan alat Berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n(unit)	1
Jumlah pengadaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya	21
Persentase Pemeliharaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	50
Jumlah Pemeliharaan alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota di tahun n (unit)	4
Jumlah alat berat kebinamargaan yang mendukung penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang seharusnya dipelihara (unit)	8
Persentase panjang Jalan Yang di rekonstruksi	1,33
Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km)	12
Panjang Jalan yang Keseluruhan (Km)	902,25
Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi	0,93
Panjang jalan yang direhabilitasi (KM)	0,7
Panjang Jalan yang seharusnya direhabilitasi	75
Persentase panjang Jembatan Yang dibangun	5,78
Panjang jembatan yang dibangun (KM)	0,05
Panjang jembatan yang seharusnya dibangun (KM)	0,9
Persentase panjang batan yang dipelihara secara berkala (rusak berat)	20
Panjang jembatan yang dipelihara secara berkala (rusak berat) (KM)	0,02
Panjang jembatan yang seharusnya dipelihara secara berkala (rusak berat)	0,1
Indeks kualitas jasa konstruksi	21,22
Persentase Jumlah Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	22,44
Persentase Jumlah orang yang melatih	10,00
Jumlah Tenaga yang melatih n (orang)	3

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Keseluruhan Tenaga yang melatih	30
Persentase Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia	33,33
Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersedia di tahun n (orang)	40
Jumlah (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi yang seharusnya(orang)	120
Persentase tenaga terampil yang bersertifikat	24
Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat di tahun n (orang)	60
Jumlah Tenaga Terampil di 9 Kecamatan	250
Persentase Jumlah Dokumen SOPJasa Konstruksi	20,00
Presentase Jumlah Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi (Dokumen)	20,00
Jumlah Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi di tahun n (Dokumen)	1
Jumlah Keseluruhan Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi (Dokumen)	5
Persentase Jumlah Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	20,00
Jumlah Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di tahun n (Dokumen)	1
Jumlah Keseluruhan Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi (Dokumen)	5
Persentase Jumlah Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dokumen)	20,00
Jumlah Pedoman Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di tahun n (Dokumen)	1
Jumlah Keseluruhan Pedoman Tertib pemanfaatan jasa konstruksi (Dokumen)	5
Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	14,67
Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab. Kota. Yang ditetapkan (Dokumen)	16,11
Persentase Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan (Dokumen)	22,22
Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan yang dibuat (Dokumen)	2
Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten/Kota yang mendapat persetujuan yang harus dibuat (Dokumen)	9
Persentase Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan (Dokumen)	10
Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang disosialisasikan (Dokumen)	1
Jumlah Produk Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang yang harus disosialisasikan (Dokumen)	10
Persentase Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten / Kota (%)	22,22
Persentase Jumlah Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota (%)	22,22
Jumlah Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	2
Jumlah Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten/Kota yang harus disusun (Dokumen)	9
Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten terhadap RTRW/RDTR(%)	9,43
Persentase Jumlah rekomendasi Kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah terhadap RTRW/RDTR (%)	16,81

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia (%)	18,87
Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia (Unit)	10
Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang harus tersedia (Unit)	53
Persentase Luas pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (%)	5,67
Persentase Jumlah dokumen pelaporan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Kesesuaian Ruang (%)	5,67
Luas Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang dibuat (Dokumen)	17
Luas Rekomendasi Kesesuaian Ruang (Dokumen)	300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Jumlah Perumahan yang Ditetapkan	17
Persentasi rumah korban bencana yang tertangani	100
Jumlah rumah korban bencana yang teridentifikasi	0
Jumlah lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	0
Jumlah data rumah korban bencana	60
Jumlah data kerusakan rumah korban bencana	0
Jumlah Penerima Rumah akibat Bencana atau relokasi program kabupaten	0
Jumlah Rumah sewa, rumah susun dan rumah khusus yang terdata	3
Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi	100
Pemenuhan Standar Teknis yang akan disosialisasikan	9
Jumlah rumah yang tertangani	100
Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	55
Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	5
Luas lahan lokasi pembangunan rumah korban bencana	9
Jumlah rumah yang terbangun	55
Jumlah Rumah khusus dan PSU yang terbangun	120
Jumlah rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina	0
Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100
Persentase Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/Rumah Khusus	100
Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi yang terlaksana	0
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang harus terlaksana	5
Persentase Kawasan Kumuh yang ditetapkan	100
Persentase Kawasan Permukiman kumuh yang ditata	5
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	9
Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan kawasan kumuh yang disusun	1
Jumlah Regulasi pengembangan kawasan kumuh yang disosialisasikan	1
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	4
Persentase kawasan kumuh yang tertangani	100
Jumlah kawasan kumuh yang memiliki perencanaan Site Plan dan DED	1
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	291
Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU	100
Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU	100
Jumlah dokumen perencanaan PSU Perumahan	2
Jumlah PSU yang tersedia	100
Jumlah bantuan PSU yang terealisasi	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Persentase Desa tangguh Bencana	20
Prosentase penduduk di daerah rawan bencana yang mendapatkan KIE bencana	700
Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	200
Persentase penduduk yang mendapat pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	3
Prosentase penyelesaian Dokumen sampai dinyatkansah/legal	0
Jumlah penduduk yang ikut pelatihan	700
Jumlah penduduk yang mendapat layanan Pusdalops	500
Jjumlah penduduk yang mendapat peralatan perlindungan bencana	1000
Persenatase penurunan desa terdampak bencana	4
Persentase Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100
Persentase Jumlah Tim TRC terlatih	20
Persentase penanganan Korban bencana	100
Persenatase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100
Persentase jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100
Persentase pemenuhan kebutuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dibentuk	100
Jumlah forum pengurangan risiko bencana terbentuk	4
Jumlah MOU dengan lembaga, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	0
Prsentase penyelesaian pelanggaran K3	0%
Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	0%
Jumlah operasi kamtibmas yg dilaksanakan dalam 1 Tahun	1080
Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kabupaten / Kota yang di koordinasikan dalam 1 Tahun	12
Jumlah Operasi Gabungan dalam 1 Tahun	12
Jumlah PERDA yang ditegakan	12
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang di sosialisasikan dan ditegakan dalam 1 Tahun	12
Jumlah pelanggaran Perda yang di tangani	12
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0%
Penyelesaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100
Jumlah Menyatakan jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	33,3
Presentase Komunitas Adat Terpencil Yang di Berdayakan	30
Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sosial	15
Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	36,6
Jumlah PSM Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	14
Jumlah PSKS Keluarga Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	10

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah PSKS Kelembagaan Dalam Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	1
Jumlah LK3 yang mendapatkan Penguatan	1
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	16,5
Presentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi	17
Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima penyediaan pemakanan	700
Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima penyediaan Sandang	200
Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima penyediaan alat bantu	100
Jumlah Jiwa penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis diluar panti yang menerima Bimbingan sosial	100
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial yang direhabilitasi Sosial	16
Jumlah jiwa PMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima layanan Data dan pengaduan	25
Jumlah jiwa PMKS diluar Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti yang menerima bimbingan fisik mental spritual dan sosial	14
Presentase PMKS yang ditangani	98,30
Presentase Anak Terlantar yang dipelihara	25
Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	102
Presentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah yang dikelola	100
Jumlah Fakir miskin cakupan daerah yang didata	17,518
Jumlah KK Fakir miskin cakupan daerah yang dikelola data.	17.518
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa tanggap darurat	100%
Presentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang dilindungi	100
Presentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan makanan	100
Presentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang	100
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100
Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan sosialisasi kampung siaga bencana	100
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi Taruna Siaga Bencana	100
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	100%
Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	100
jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
Jumlah Pelatihan yang berbasis Kompetensi (JENIS Kompetensi)	32 Orang

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Pencari kerja Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi (orang)	32
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	6,1%
Jumlah TKA Dalam Perpanjangan IMTA	20000
Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	100%
Jumlah Penetapan UMK dan UMSK	2
Jumlah kasus yang ditindak lanjuti oleh Tripartit	120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Persentase Partisipasi Perempuan	100
Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah, swasta dan DPRD	100
Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di Desa dan kelurahan	100
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100
Jumlah perempuan yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan kekerasan	2
Jumlah kasus yang dikerjasamakan	5
Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	5
Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	50
Jumlah keluarga pra sejahtera	50
Jumlah keluarga pra sejahtera yang dibina	50
Kota layak Anak	46
Jumlah fasilitas umum yang menyediakan hak anak	46
Jumlah kelembagaan tentang hak anak	46
Presentase Kasus anak yang tertangani	100
Jumlah kasus anak	40
Jumlah kasus anak yang tertangani	40
Jumlah anak Korban Kekerasan	40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
Presentase Desa Mandiri Pangan	0
Jumlah Ketersediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan	5
Jumlah Lumbung Pangan	0
Jumlah Lantaijemur	0
Jumlah Infrastruktur yang tersedia	0
Jumlah pertemuan	0
Ketersediaan energi dan protein per kapita	8
Keanekaragaman Pangan	2226,7
Inflasi Bahan Makanan	9
Ketersediaan protein per kapita	52
Ketersediaan energi per kapita	2174,7
Jumlah pangan lokal yang menjadi pangan pokok	0
Jumlah dan Jenis ketersediaan pasokan pangan	0
Cadangan Pangan Pemerintah	5
Angka Kecukupan Gizi (AKG)	25
konsumsi pangan per kapita	88,1
Jumlah Kelompok Penganekaragaman Pangan konsumsi Berbasis sumber daya Lokal	0
Jumlah Kegiatan Hari Pangan Sedunia	1

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase daerah rawan pangan tertangani	5
Jumlah data Desa Rawan Pangan	2
Jumlah desa rawan pangan dilihat dalam peta	2
Jumlah Daerah rawan pangan	0
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan diuji	6
Persentase pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang tersertifikasi	1
Jumlah pangan segar asal Tumbuhan (PSAT) yang tersertifikasi	0
Jumlah pangan segar yang di uji	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Masyarakat	2266024000
Ganti Rugi Lahan Yang Terselesaikan	2
Jumlah masyarakat yang ditetapkan untuk diganti rugi	5
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	3
Luas Seluruh Tanah Ulayat	100
Tanah Ulayat Yang Telah ditetapkan	0
Pemetaan Luas Tanah Ulayat	5
Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan dan/ Terkelola	15
Luas Tanah Inventaris Yang Dimanfaatkan	15
Luas Tanah Kosong yang Diinventarisasi	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100
Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100
Jumlah Dokumen RPPLH	2
Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	1
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	0
Persentase Dokumen Yang mempersyaratkan KLHS	1
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Yang memiliki KLHS	1
Jumlah KRP yang memiliki dokumen KLHS	0
Indeks Kualitas Air	100
Indeks Kualitas Udara	100
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100
Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	100
Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan (Tanah, air, udara dan laut)	40
Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang di Rehabilitasi dan Restorasi	30
Persentase Peringatan Pencemaran yang diinformasikan	30
Jumlah Kawasan Yang Tercemar yang direhabilitasi	30
Jumlah Kawasan Yang Tercemar yang direstorasi	0
Jumlah Daerah Tangkapan Air Yang Terlindungi	1,53
Persentase Ruang Terbuka Hijau	100
Persentase Ruang Terbuka Hijau	100
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	12
persentase luasan taman keanekaragaman hayati	15
Jumlah Prasarana dan Sarana Keanekaragaman hayati	0
Presentase Pengelolaan Limbah B3	100
Persentase Perusahaan yang mengelola Limbah B3	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Perusahaan yang mengelola limbah B3	136
Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan	0
Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	100
Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	100
Persentase Pejabat Pengawas yang bersertifikasi	0
Persentase pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pemilik izin lingkungan dan izin PPLH	100
Persentase pelanggaran lingkungan hasil pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang diberi sanksi	100
Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	100
Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat	100
Jumlah Penghargaan Lingkungan	3
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1
Jumlah Penghargaan Lingkungan	3
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1
Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	100
Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	100
Jumlah Aduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten	5
Jumlah Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Yang diselesaikan	8
Persentase Sampah Yang Tertangani	100
Persentase Sampah Yang Terkelola berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) pada Wilayah Layanan	100
Jumlah Dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang disusun.	1
Jumlah volume sampah yang tertangani melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)	5.498,48
Jumlah Timbulan Sampah Yang Tertangani melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten"	16954,04
Jumlah Kelompok Masyarakat dan atau Organisasi peduli sampah	2
Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	47
Persentase Pelaku Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sampah	100
Persentase Rekomendasi Izin Pendaaur Ulangan sampah/Pengelolaan Sampah	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Persentase penduduk yang memiliki KTP-el + Persentase kecamatan yang memiliki pelayanan pendaftaran penduduk (%)	19,99
Persentase Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pendaftaran Penduduk	33,33
Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	14000
Persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran, dan persentase kecamatan memiliki pelayanan pencatatan sipil (%)	9,83
Persentase pasangan nikah ber-Akta perkawinan	1,94

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase Kecamatan yang Memiliki Pelayanan Pencatatan Sipil	33,33
Jumlah Pencatatan Kelahiran	728
Jumlah Kecamatan Memiliki Pelayanan Pencatatan Sipil	3
Persentase lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama + Persentase kecamatan memiliki UPT + Persentase Kecamatan terkoneksi dan teroperasikan SIAK + persentase urusan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan(%)	66,66
Persentase lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama	33,33
Jumlah Kecamatan tersinkronisasi data perkembangan penduduk	9
Jumlah lembaga melakukan Perjanjian Kerja Sama	5
Persentase Kecamatan Memiliki UPT	33,33
Jumlah kecamatan memiliki UPT Penyelenggara urusan administrasi kependudukan	33,33
Persentase inovasi sistem penyajian data kependudukan	100
Jumlah inovasi sistem penyajian data kependudukan	1
Persentase UPT penyelenggara administrasi kependudukan	33,33
Jumlah UPT penyelenggara administrasi kependudukan	3
Jumlah Kepala Desa penyelenggara administrasi kependudukan	10
Jumlah urusan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan	23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Persentase desa mandiri	18
Jumlah Desa Mandiri	23
Jumlah Desa yang berubah statusnya	2
Jumlah Desa yang tertata	45
Jumlah Perdes tentang Kewenangan Desa	126
Jumlah Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	1
Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Pembangunan Kantor Desa	45
Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	45
Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa	22,22
Jumlah desa yang melakukan kerjasama	28
Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	18
Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa	18
Persentase Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina	126
Persentase Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina	25,40
Jumlah BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina dan diawasi	32
Persentase desa yang dibina & diawasi	126
Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi dalam penataan adm desa yang baik	45
Jumlah Produk hukum desa yang ditetapkan	10
Jumlah dokumen perencanaan desa	126
Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)	126
Jumlah perangkat desa & BPD yang mengikuti bimtek	252
Jumlah Pendampingan musyawarah Desa	126
Jumlah Desa yang menerapkan Peraturan Desa	126
Jumlah BUMDes yang Aktif	32
Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	126
Jumlah Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	61
Jumlah Desa yang Cepat Berkembang	126

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Desa yang menginput Profil Desa	126
Persentase lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	85,71
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	6
Jumlah desa yang memiliki Lembaga Adat	7
Jumlah PKK aktif	133
Jumlah Pokjanal, Posyandu Aktif	133
Jumlah LPMD yang aktif	133
Jumlah BUMDes Yang Sehat	70
Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100
Penurunan angka kelahiran total (TFR)	100
Kepadatan Penduduk	22,5
Persentase Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	9
Persentase hasil Data informasi keluarga	9
Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	100
Cakupan Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelayanan KB	100
Presentase Pembinaan KB/KR di Faskes dan Jaringannya	100
Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	65
Presentase Keluarga Yang mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	100
Cakupan Pelaksana/Kader yang sudah mengikuti pelatihan teknis BKB, BKR, BKL, PIKR, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	100
Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25
Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	1
Jumlah rencana induk jaringan LLAJ Yang ditetapkan dan disosialisasikan	3
Persentase kesesuaian rencana pembangunan LLAJ yang sesuai dengan rencana induk jaringan LLAJ	1
Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	1
Persentase ketersediaan Perlengkapan pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	5
Jumlah Prasarana Jalan	22
Jumlah Perlengkapan Jalan	1
Jumlah Prasarana Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi	22
Jumlah Perlengkapan Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi	22
Persentase Terminal yang terakreditasi Tipe C	20
Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal	2
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Terminal C	1
Presentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang di terbitkan	20
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	1
Jumlah Fasilitas Parkir yang diawasi	1
Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji Keur	50
Jumlah Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1
Jumlah Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen - Pengujian	1

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Kendaraan Bermotor	
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4
Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Wajib Uji Berkala	1000
Jumlah Slip dan Buku Keur (Buku Uji)	1000
Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di sosialisasikan	2
Jumlah Dokumen Identifikasi Dan Analisis	2
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	4
Jumlah Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dikoordinasikan	2
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	2
Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	100
Persentase Rekomendasi/ Persetujuan Andalalin	100
Jumlah Dokumen Andalalin	1
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Penilai Andalalin	2
Jumlah Penilaian Hasil	3
Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang diawasi	2
Persentase Ketersediaan Angkutan Orang dan/atau Barang	100
Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang	3
Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dikendalikan dan diawasi	2
Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali	100
Jumlah Kebijakan yang di Tetapkan	1
Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1
Jumlah Kegiatan Pengendalian (Penertiban Angkutan)	1
Jumlah Kegiatan Penertiban	100
Jumlah Kegiatan Penertiban	14
Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	1
Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	1
Persentase Pengelolaan Pelayanan	20
Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Memiliki Izin	10
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	1500
Persentase Usaha Angkutan Laut (Orang Perorangan atau Badan Usaha) Yang Memiliki Izin	100
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	1500
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	9
Jumlah Dokumen Lintas Penyeberangan yang Ditetapkan	0
Jumlah Usaha Angkutan Laut (Orang Perorangan atau Badan Usaha) yang memiliki Dokumen Persetujuan Pengoperasian Kapal	1200
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan	0
Jumlah Dokumen Persetujuan Pengoperasian Kapal	1200
Persentase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	1200
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6
Persentase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	100
Jumlah Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Disusun	0
Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	9
Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12
Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	8
Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga/Tambatan Perahu	4
Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	100
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Penerbitan Perijinan dan Non Perijinan	1200
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Jumlah Program Informasi dan Komunikasi Publik	100
Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100
Persentase Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	9
Jumlah Media Lokal yang mempublikasikan Kegiatan Pemerintah Daerah	16
Jumlah Media Lokal Yang Dipublikasikan	16
Jumlah Aplikasi Informatika	100
Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48
Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	0
Jumlah OPD Yang Mengelola Website milik Pemerintah Daerah	48
Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan internet	48
Jumlah Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100
Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	3
Pengelola Pusat Data Pemerintah Daerah	4
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5
Profil Statistik yang dipublikasikan	1
Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
Persentase koperasi yang aktif	34,71
Jumlah koperasi yang aktif	42
Jumlah koperasi yang bersertifikat (NIK)	18
Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	19
Persentase koperasi yang sehat	40,48
persentase koperasi yang memiliki pertumbuhan omset yang baik	18

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah koperasi yang sehat	17
Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	5
Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100
Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100
Jumlah pengurus Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30
Persentase koperasi yang difasilitasi bantuan modal	1,65
Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal	7
Jumlah Koperasi yang dibina	15
Jumlah koperasi yang difasilitasi	7
Persentase usaha mikro yang naik kelas	80
Persentase usaha mikro yang diberdayakan	2,59
Jumlah usaha mikro yang dibina	125
Jumlah usaha mikro yang bermitra	10
Jumlah usaha mikro yang memiliki izin	250
Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan	100
Jumlah temu koordinasi yang dilaksanakan	5
Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas	3,88
Jumlah usaha mikro yang naik kelas	100
Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
Persentase PMA yang mendapat kemudahan investasi	85 %
Persentase PMDN yang mendapat kemudahan investasi	85 %
Capaian Sub kegiatan penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif	12
Jumlah PMA yang Bermohon Insentif	2
Tingkat capaian komponen yang mendapat insentif (Komponen)	10
Peta potensi peluang Investasi	1
Jumlah Peta Potensi secara digital (Peta Digital)	1
Persentase PMA baru yang berinvestasi	87%
Persentase PMDN baru Berinvestasi	80 %
Cakupan Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	8
Jumlah Media yang di Promosikan	4
Jumlah Investor PMA baru yang berminat menanamkan modalnya	4
Persentase Perijinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	90%
Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki SOP	90%
Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dengan OSS	26
Jumlah Izin yang diterbitkan	620
Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti	2
Persentase Ketercapaian RKT	90%
Cakupan Capaian Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15
Jumlah Realisasi Investasi PMA	15
Jumlah Permasalahan PMA	4
Persentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP	80%
Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP	80%
Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP	80%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Persentase Capaian Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
persentase pemuda pelopor	0,002
Persentase organisasi pemuda yang dibina	5
Jumlah organisasi pemuda yang dibina	2
Pertumbuhan prestasi olahraga	19
Persentase cabang olahraga pada jenjang pendidikan yang dibina	100
Jumlah sarana dan prasarana cabang olahraga yang dikembangkan	196
Persentase kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	58
Jumlah kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	10
Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam kejuaraan	9
persentase cabang olahraga yang dibina	74
Persentase organisasi olahraga	95
Jumlah Kerjasama organisasi keolahragaan	20
Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3
Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3
Jumlah event kepramukaan	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan	100
Persentase budaya yang dilestarikan	36
Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival kebudayaan	3
Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	2
Jumlah pelaku kesenian yang dilatih	12
Jumlah sanggar/lembaga seni dan budaya yang dibina	2
Jumlah cagar budaya yang dikelola	5
Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	100
Jumlah karya seni dan benda yang dilestarikan	1
Jumlah karya benda yang dilestarikan	10
Jumlah museum yang dibangun	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
Persentase perpustakaan binaan dan perpustakaan yang dinilai..	100
Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	100
Data pustakawan, tenaga teknis perpustakaan	25
Jumlah pengunjung layanan perpustakaan Elektronik	100
Jumlah Katalog judul Buku digital	15
Jumlah Perpustakaan yang di bina dan dinilai	22
Jumlah kekhasan koleksi daerah	2
Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina	5
Jumlah SDM tenaga pengelola perpustakaan	3
Jumlah pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1500
Persentase Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaen	100
Jumlah Pengunjung Perpustakaan daerah	4500
Jumlah Kunjungan Layanan Perpustakaan Mobil Keliling(sekolah)	35
Jumlah kunjungan Perpustakaan kapal terapung	15
Jumlah Pegiat Literasi	4
Jumlah Kerjasama (MOU) Perpustakaan	8
Jumlah kegiatan sosialisasi dan Budaya Baca kesekolah-sekolah(lomba cerita) & Masyarakat	1
Pembangunan Perpustakaan dan sarana prasarana	1
pembangunan pojok baca dan sejenisnya	8
Jumlah perpustakaan yang mendapatkan bantuan	5

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah kegiatan gerakan budaya gemar membaca	1
Jumlah perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	3
Jumlah duta baca/ Bunda Baca	3
Persentase Jumlah Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (%)	100
Jumlah naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	2
Jumlah Naskah Kuno Yang di kelola Dan Dikembangkan	9
Jumlah naskah kuno yang di alih mediakan	2
Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan di daerah	9
Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan	100%
Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100%
Jumlah tenaga pengelola arsip dinamis yang di bina	1
Jumlah arsip dinamis yang dipelihara	1
jumlah penelusuran arsip dinamis	1
Sosialisasi/pembinaan arsip dinamis	1
Sarana dan prasana arsip dinamis	1
Jumlah pengawasan internal arsip	1
Bimtek pengelolaan arsip dinamis	1
Jumlah arsip statis yang dikelola	100%
Jumlah SDM pengelolaan arsip statis	1
Jumlah arsip statis yang dilestarikan	1
Jumlah tenaga pengelola arsip statis dibina	75
Pembangunan DEPO arsip	1
Jumlah sarana dan prasarana arsip statis	1
Jumlah pengawasan arsip statis	1
Jumlah penelusuran arsip statis dalam dan luar daerah	1
Sosialisasi Arsip Statis	1
Bimtek pengelolaan arsip statis	1
Jumlah Arsip digital	10
Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	1
Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100
Jumlah Arsip yang dinilai dan di tetapkan	1
Jumlah Arsip yang di musnahkan yang memiliki retensi di bawah 10 tahun(sesuai JRA)	1
Jumlah Arsip statis yang di musnahkan di kabupaten /kota	1
Jumlah penilaian & penetapan Autentis Arsip statis yang dinyatakan hilang	1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pertumbuhan produksi perikanan Tangkap (Ton)	2.000
Jumlah Produksi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	750
Jumlah Data Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	40.000
Jumlah Nelayan Yang mendapat KUSUKA	18,84304
Jumlah KUSUKA yang tercetak (Kartu KUSUKA)	1000
Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap (unit)	1
Jumlah KUB Penerima Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Kelompok)	16
Persentase Nelayan Perikanan Tangkap yang dibina	27,83217
Jumlah Kelompok Nelayan yang Terbina	50

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Kelompok Nelayan Mandiri/Madya	50
Jumlah Nelayan yang mendapatkan Pelatihan Pengetahuan dan Teknologi(Org)	10
Persentase KUB yang Terbentuk	26,25
Jumlah KUB Nelayan yang Terbentuk (KUB)	105
Jumlah Koperasi Nelayan yang Terbentuk (Koperasi)	1
Jumlah Kelembagaan Nelayan yang Berkembang (KUB)	50
Persentase KUB yang Aktif	0
Jumlah KUB Penerima Modal Usaha (KUB)	5
Jumlah Nelayan yang memperoleh Kartu Asuransi Nelayan (kartu Asuransi)	1000
Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah(Sehat) Nelayan yang tercetak (Sertifikat)	100
Jumlah Kelompok Nelayan Kelas Pemula	0
Jumlah Produksi Perikanan tangkap yang melakukan Bongkar di TPI (Ton)	100
Standar Pelayanan Opsional TPI (SOP) (Dokumen)	1
Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Perikanan TPI (TON)	100
Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana TPI (Unit)	3
Persentase Kapal yang Memiliki TDK (%)	35%
Standar Pelayanan Opsional (SOP) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal (Dok)	1
Jumlah Kapal yang memiliki Tanda Daftar Kapal	1500
Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (Ton)	45.390
Persentase Pembudidaya yang Memiliki Izin Usaha Budidaya (%)	40
Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Budidaya (Dok)	100
Persentase pembudidaya ikan kecil yang Terberdayakan (%)	16
Persentase Pokdakan yang Terbentuk (%)	5,21
Jumlah Koperasi yang Terbentuk (Koperasi)	1
Persentase Pembudidaya yang Menerima Pelatihan Pengetahuan teknologi dan informasi (%)	5
Jumlah Pembudidaya yang Menerima Pelatihan Pengetahuan dan Teknologi (orang)	60
Jumlah Aparatur Bidang Budidaya Penerima Pelatihan Teknis (orang)	2
Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Saprasi (%)	24
Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	217.246
Persentase Pembudidaya yang Memiliki Kartu Pelaku Usaha Perikanan (%)	12
Persentase Pokdakan Penerima Prasarana Budidaya (%)	3
jumlah prasarana Balai Benih Udang yang Tersedia (Unit)	1
Persentase Pokdakan penerima sarana budidaya (%)	16
jumlah Sarana Balai Benih Udang yang Tersedia (Unit)	2
Jumlah kasus Penyakit Ikan (Kasus)	5
jenis Penyakit Ikan (jenis)	2
kualitas air (Pokdakan)	10
Persentase Pembudidaya ikan yang Tersertifikasi (%)	12
jumlah Sertifikat Tanah Pembudidaya yang Diterbitkan (Sertifikat)	100
Persentase Pembudidaya penerima Asuransi (%)	3
Jumlah Asuransi Pembudidaya yang Diterbitkan (Asuransi)	40
Jumlah Pintu Air yang Terbangun (unit)	5
Jumlah Kasus Illegal Fishing	5
Jumlah Kasus Illegal Fishing	12
Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	0

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase Poklaksar yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (%)	36,58536585
Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan(ton)	10
Jumlah Poklaksar yang memiliki Tanda Daftar Usaha (Dok)	45
Persentase Hasil Usaha yang layak konsumsi	40
Jumlah POKLAHSAR Yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40
Persentase Poklaksar yang Memperoleh Bantuan	35
Jumlah Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan(ton)	10
Jumlah POKLAHSAR Yang Mendapatkan Bantuan	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
Persentase destinasi wisata yang memiliki daya tarik	29,03
Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola	39
Jumlah Desa Wisata	1
Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	1
Persentase sarana dan prasarana destinasi wisata	82
Persentase pertumbuhan wisatawan	1,89
Jumlah Kunjungan Wisatawan	5390
Jumlah even promosi yang dilaksanakan	1
Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata	30
Persentase pelaku usaha yang dibina	84,62
Jumlah jenis produk ekonomi kreatif sektor pariwisata yang dipasarkan	10
Jumlah pelaku usaha kreatif sektor pariwisata yang dilatih	22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
Produksi Pertanian (Ton)	100
Persentase ketersediaan sarana Pertanian	100
Jumlah Sarana Pertanian yang dibutuhkan	1
Jumlah Kegiatan Untuk mendukung sarana Pertanian	98
Meningkatkan Jumlah SDG Hewan	100
jumlah bahan pakan/pakan, benih hijauan	1
persentase benih dan bibit ternak yang bersertifikat /disertifikasi	0
presentase ketersediaan bibit dan Pakan unggul dari daerah lain	100
Presentase Ketersediaan Benih Unggul	100
Jumlah Bibit Ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	100
Presentase Kebutuhan Benih Pertanian Unggul	40000
Produksi Pertanian	10000
Luas Sawah yang teraliri	100
Panjang Jaringan Irigasi terseier yang dibangun	130
Panjang Jalan Usaha Tani Tanaman pangan yang dibangun	26
jumlah dam parit yang dibangun	1
Presentase Jumlah Kasus penyakit hewan	100
Wabah Penyakit Hewan Menular (PHM)	100
Jumlah Hewan yang divaksinasi	1
Jumlah Biosecurity	100
persentase jumlah keluar masuk hewan dan produk hewan	100
jumlah Penyalur atau peternak yang memiliki standar keamanan produk hewan	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
jumlah hewan yang diperiksa	1
jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	2
jumlah produk asal hewan yang diperiksa	1
Presentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik	100
Persentase pelayanan jasa laboratorium	1
jumlah pelayanan jasa medik dan paramedik veteriner	1
persentase kasus kesehateraan hewan yang tertangani	1
Persentase Wilayah yang terkena kasus bencana Pertanian	100
Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani	0
Jumlah Rekomendasi teknis Usaha Pertanian	31
Presentase Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan	59
Jumlah Kegiatan Penyuluh Tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten	0
Persentase Kegiatan Penyuluhan Pertanian	0
Presentase Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	100
Pembinaan kelembagaan Penyuluh Pertanian	100
Persentase BPP yang memiliki lahan percontohan	9
Persentase BPP yang memiliki sarana dan prasarana	6
Presentase Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100
Jumlah BUMP	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
Presentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin SIUP, TDP	50
terlaksananya pengawasan Pelaku Usaha yang sesuai dengan Izin Usaha.	100
Presentase rekomendasi TDG yang diterbitkan	33
standardisasi penerbitan tanda daftar gudang	5
Presentase Rekomendasi Perizinan STPW yang diterbitkan	40
Jumlah Rekomendasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) yang terintegrasi secara elektronik	2
Presentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya yang terawasi.	33
tersedianya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya yang aman dan ramah lingkungan.	6
Presentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12
Presentase sarana distribusi perdagangan yang layak	10
tersedianya Sarana Distribusi perdagangan yang layak	5
Tersedianya lapangan usaha dan sentra perdagangan di kawasan wisata SAMBORI (Program Pendukung Smart City)	1
Stabilisasi Harga Bapokting	20
Harga Eceran Terendah dan Tertinggi	20
tersedianya laporan Barang kebutuhan pokok langka.	1
Harga Barang kebutuhan pokok yang terjangkau.	2
Presentase Pelaku Usaha yang memiliki alat UTTP yang terkalibrasi	24
Presentase Pelaku Usaha yang memiliki alat UTTP yang terkalibrasi	19
Standardisasi Alat UTTP	50
Tersedianya SDM Kemetrolagian yang terlatih	2
Terlaksananya pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.	15
Persentasen Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	33
Jumlah Produk Dalam Daerah yang di promosikan diluar	15
terlaksananya promosi Produk unggulan Daerah ditingkat Nasional	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Presentase Pertumbuhan IKM	20
Presentase Komuditas Unggulan yang dikembangkan	23
Terlaksananya sosialisasi bagi IKM Pangan dan/untuk mendapat Sertifikat Keamanan Pangan	30
Tersedianya sertifikat Halal bagi IKM Pangan	3
Terlaksananya pembinaan bagi Pelaku Sentra IKM Furniture	15
Terlaksananya pembinaan bagi Pelaku IKM Rotan	30
Terlaksananya Pembinaan Pelaku Tenun Kain Batik Khas Morowali	5
Terlaksananya pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan	40
tersedianya Peralatan Tenun Kain Batik Khas Morowali	2
Tersedianya Peralatan Kemasan Produk Pangan	50
Tersedianya Sampel Galery Pusat Ole-ole Produk IKM yang di adakan	1000
Tersedianya Kerajinan Cenderamata Khas Morowali yang di produksi	30
Tersedianya sarana promosi produk unggulan daerah	1000
Presentase Izin Usaha IKM yang dikendalikan	20
Presentase Izin Usaha IKM yang diterbitkan	20
Jumlah IKM yang diberikan rekomendasi IUI Kecil dan IUI Menengah	12
Presentase Pengelolaan Informasi Data Industri	30
Jumlah Data dan Sarana Sistem Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI yang tersedia	30
tersedianya Informasi Industri yang terpublikasikan dan dapat di akses secara online	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
Jumlah lahan Transmigran yang tersertifikasi	69
Jumlah KK Transmigran yang terbina	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Indeks Pelayanan pimpinan	100
Cakupan pelayanan Administrasi Pimpinan	100
Jumlah kegiatan dalam dan luar daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	83
Jumlah kegiatan dialog audiensi dengan tokoh masrakat	100
Jumlah Kegiatan Koordiansi Unsur Muspida	4
Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/WKD	42
Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	20
Jumlah Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	1
Cakupan Perencanaan dan Keuangan	100
persentase produk Hukum Daerah yang di hasilkan	100
Persentase inisiatif eksekutif dan legislatif menjadi prolegda (%)	100
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang dievaluasi dan fasilitasi	400
jumlah penanganan perkara yang diselesaikan	20
jumlah produk hukum yang di publikasikan	400
Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Keagamaan yang dilaksanakan	100
Persentase Kegiatan Bina Mensprit, Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang difasilitasi	100
Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	16
Jumlah Sarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan yang diberikan Fasilitas	668
Jumlah Lembaga Keagamaan yang melakukan pembinaan difasilitasi	4

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan sosial	7
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan Masyarakat	5
Persentase OPD yang menerapkan SOP	100
Jumlah OPD yang menyusun ANJAB dan ABK	2
Jumlah OPD yang menyusun SOP	1
Jumlah OPD yang menyusun SPM	1
Jumlah OPD yang memiliki Inovasi	2
Jumlah OPD yang menggunakan Sistem SPBE	1
Persentase Kinerja ASN	75
Penyelenggaraan FORKOM	1
Presentase Capaian Kinerja OPD	100
Persentase capaian tertib administrasi pembangunan	20
Tersusunnya Standar Biaya Umum Daerah	100
Persentase Capaian Kinerja	100
Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100
Lama Proses Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	100
Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa	100
Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai jadwal yang ditetapkan	3
Ketersediaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diterter secara elektronik	3
Terselesainya sanggahan yang di selesaikan	1
Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	100
Indeks administrasi Kewilayahan	100
Persentase Pencapaian Kinerja Kecaamatan	100
Jumah Kecamatan yang di mekarkan	2
Jumlah Tapal Batas Kabupaten	1
Pesentase Tapal Batas Kecamatan	33,33
Persentase Tapal Batas Desa	0,17
Jumlah Nama Rupa Bumi (TOPONIMI) di Wilayah Kecamatan yang Terpetakan	15
Pesentase OPD yang memiliki SPM	50
Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama	100
Jumlah Kerjasama Lembaga/Universitas	3
Presentase Ketercapaian administrasi umum	100
Presentase Ketercapaian Kegiatan ke Protokol dan komunikasi pimpinan	100
Presentase Kegiatan pimpinan yang mendapatkan fasilitasi keprotokolan	100
Presentase kegiatan pimpinan yang di fasilitasi dan dikomunikasikan oleh Juru Bicara Pimpinan Daerah	100
Presentase Tugas Pimpinan yang di Dokumentasikan dan di Publikasikan	100
inflasi Daerah	2,13
Jumlah kebijakan perekonomian yang di tindak lanjuti	7
Deviden	1054383000
Presentase KUR Yang Tidak Sehat	2,09
Presentase UMKM yang taat aturan	85
presentase capaian akuntabilitas adm dan keuangan Sekretariat DPRD	90%
Indeks Capaian Layanan Administrasi DPRD	86%
Jumlah Rapat DPRD yang difasilitasi dalam 1 Tahun	85 Kali

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD dalam 1 Tahun	30 Kali
"Jumlah Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Rumah Tangga Pimpinan DPRD dalam 1 Tahun"	12
Persentase Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dalam 1 Tahun	100%
Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangan dlm 1 Tahun	25
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dalam 1 Tahun	100
Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up DPRD dalam 1 Tahun	25
Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	100%
Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang di Hasilkan dalam 1 Tahun	28
Jumlah Rancangan Perda yang dibahas dalam 1 Tahun	28
Jumlah Naskah Akademik Perda Inisiatif yang di hasilkan dalam 1 tahun	4
Persentase ketepatan waktu Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100
KUA dan PPAS yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	1
KUPA dan PPAS Perubahan yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	1
APBD yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	1
APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	1
Pertanggung jawaban APBD yang ditetapkan tepat waktu dalam 1 Tahun	2
Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	85
Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	30
Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	30
Jumlah permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	30
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	30
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	80
Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti bimtek dalam 1 tahun	25
Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan dan didokumentasikan dalam 1 tahun	1
Jumlah Pakar dan Tim Ahli dalam 1 tahun	3
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dalam 1 tahun	5
Jumlah Laporan Program Kerja DPRD dalam 1 tahun	1
Persentase Aspirasi yang ditindak lanjuti dalam 1 Tahun	85
Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah dalam 1 Tahun	3 kali
Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam 1 Tahun	3
Jumlah Pelaksanaan Reses dalam 1 Tahun	3
Persentase fasilitas Tugas Pimpinan	85
"Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam 1 Tahun DPRD "	78
Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD dalam 1 Tahun	1
Jumlah Pelaksanaan Undang-undang DPRD dalam 1 Tahun	26
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	
Indeks Kualitas Perencanaan	100
Jumlah Dokumen Perencanaan	1
Jumlah Dokumen Perencanaan	2

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase Usulan Musrenbang Yang Terakomodir Dalam RKPD (%)	30
Persentase Program RPJMD kedalam RKPD	100
Persentase Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD kedalam APBD	100
Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	85
Persentase Hasil Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100
Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan	3
Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	100
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pemerintahan	Na
Persentase Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Pemerintahan	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Pemerintahan	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Pembangunan Manusia	100
Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Pembangunan Manusia	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100
Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100
Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian	10
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Perekonomian	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Perekonomian	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Perekonomian	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	100
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Ekonomi Kreatif	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Ekonomi Kreatif	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Kreatif (%)	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi Kreatif (%)	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Ekonomi Kreatif (%)	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam (%)	100
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Sumber Daya Alam	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Sumber Daya Alam	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Alam	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya Alam	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Sumber Daya Alam	100
Indeks KuaLiTas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Kebnamargaan dan Perhubungan	
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Kebnamargaan dan Perhubungan	100
Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
Penjabaran Konsistensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
Ketepatan Waktu Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
Persentase Capaian Kinerja Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RPJMD dan RKPD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
Persentase Kesesuaian Pagu Indikatif antara RKPD dan APBD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	100
KEUANGAN	
Rasio PAD terhadap APBD	80
Realisasi PAD (Rp)	PAD
Realisasi PAD (Rp)	17
Nilai Retribusi (Rp)	0
Jumlah Potensi Pajak	69107
Jumlah Potensi Retribusi	195
Realisasi Pajak (Rp)	65207
Realisasi Retribusi (Rp)	100
Jumlah Obyek Pajak	0
Persentase wajib pajak yang menggunakan aplikasi online	38,46
Persentase Hotel dan Restoran yang menggunakan alat Transaksi online	75
Jumlah Wajib Pajak	65,402
Nilai Piutang Pajak (Rp)	0
Nilai Piutang Retribusi (Rp)	0
Persentase Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP	100
Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran	100
Kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD	100
Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Perubahan KUA-PPAS dengan Perubahan RKPD	100
Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Antara RKA dengan KUA-PPAS	100
Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Antara DPA dengan APBD	100
Persentase Kesesuaian Antara Program/Kegiatan APBD dengan PPA	100
Persentase Kesesuaian Antara Program/Kegiatan APBD-P dengan PPA	100
Jumlah Dokumen Perda tentang Teknik Penyusunan Anggaran SKPD	0
Persentase Penyerapan Anggaran	95
Realisasi Dana Tranfer	100
Jumlah SP2D yang diterbitkan	7,789
Persentase Temuan Kesalahan SPJ terhadap Jumlah Penerbitan SP2D	0
Jumlah Laporan BUD/KBUD	12
Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah (%)	13,74
Jumlah Perbub Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan	0
Ketepatan Waktu Pemerintah dalam Penyampaian LKPD	100
Jumlah Dokumen Perbub tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2
Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1
Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Keuangan Pemda	54
Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Pendapatan dan Belanja Daerah	1
Persentase Penurunan Kesalahan Pencatatan atas Laporan Keuangan	100
Persentase Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD	18,62
Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah (%)	13,74
Persentase penyaluran bantuan Subsidi	100
Persentase penyaluran bantuan Keuangan Khusus	100
Persentase Nilai Aset	103,5
Persentase Nilai Aset	103,5
Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	1
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1
Jumlah dokumen pencatatan aset/barang milik daerah (KIB A, B, C, D, E dan F)	6
Nilai Rill Ekonomis BMD (Rp)	2.766 Milyar
Jumlah Dokumen bukti lelang BMD	1
Jumlah BMD Yang Dimusnakan/ Dihapus	40
Jumlah Sertifikat Tanah Pemda	75
Jumlah Dokumen bukti atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	2
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara SKPD dan SKPKD	46
Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan Terkait Pengelolaan BMD	46
KEPEGAWAIAN	
Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	0,02
Presentase kelengkapan data ASN	0,91
Jumlah PNS yang dimutakhirkan datanya (Orang)	3782
Jumlah kebutuhan ASN fungsional (Formasi)	250
Persentase ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) (%)	0,02
Jumlah aplikasi kepegawaian (Aplikasi)	1
persentase kelengkapan administrasi kepegawaian	0,91
Jumlah formasi penerimaan ASN (Formasi)	350
Jumlah PNS yang difasilitasi penetapan NIPnya (Orang)	350
Jumlah kegiatan seleksi penerimaan calon PNS (Kegiatan)	1
Persentase jabatan struktural yang dimutasi (%)	75
Jumlah ASN yang pindah golongan (SK Pangkat)	850
Persentase ASN yang mengikuti UPI dan UD (%)	1,00
Persentase ASN yang pensiun (%)	0,02
Jumlah PNS yang terlayani pegurusan Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami (Orang)	113
Jumlah pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat (Orang)	4
Jumlah ASN yang mutasi keluar (orang)	12
Jumlah ASN yang mutasi masuk (orang)	12
Persentase peningkatan kapasitas ASN	187
Persentase kinerja ASN (%)	80
Persentase penempatan jabatan struktural sesuai hasil uji kompetensi (%)	74,0
Persentase ASN yang mendapat fasilitasi dari kelembagaan KORPRI (%)	1,00
Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar (Orang)	3
Presentase penempatan ASN sesuai Analisis Jabatan (%)	0,02

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah dokumen (dokumen)	3
Persentase ASN yang dibina	1,00
Persentase disiplin ASN (%)	0,99
Jumlah Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani (Orang)	45
Jumlah Aduan gugatan perceraian ASN (Aduan)	10
Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan (Orang)	75
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Pertumbuhan SDM ASN	1,9
Persentase ASN yang mengikuti diklat (%)	0,3
Persentase ASN yang mengikuti diklat (%)	0,2
Jumlah Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Orang)	3
Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administrator (Orang)	15
Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (Orang)	40
Persentase CPNS yang mengikuti prajabatan (%)	1,00
Persentase pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT (%)	2
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Persentase Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan	100
Persentase ketersediaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)	5
Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pariwisata Yang Ditindaklanjuti (Dok)	1
Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Perhubungan Yang Ditindaklanjuti (dok)	1
Jumlah Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif Yang Ditindaklanjuti (Keg)	1
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindak lanjuti	65,00
Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti hasil temuan	73
Persentase OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	70
Jumlah LHP Pengawasan Internal	124
Jumlah LHP Audit Kinerja dan Keuangan	77
Jumlah LHP Reviu Kinerja dan Keuangan	41
Jumlah LHP Pemantauan Kinerja dan Keuangan	3
Jumlah LHP Evaluasi Kinerja dan Keuangan	5
Jumlah LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14
Jumlah LHP Audit Kinerja dan Keuangan dengan Tujuan Tertentu	5
Jumlah LHP Reviu Kinerja dan Keuangan dengan Tujuan Tertentu	2
Persentase OPD yang melaksanakan Zona Integritas menuju WBK	12,82
Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100
Persentase Pemenuhan Dokumen Pedoman Pengawasan	100
Persentase OPD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan	51,28
Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	8
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3
Persentase Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	100
Jumlah TLHP Kasus Pengaduan Masyarakat	20

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah OPD/ Unit Kerja yang melakukan Asistensi dan Pendampingan	39
UNSUR KEWILAYAHAN	
Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	0,89%
Presentase Pusat Pelayanan Masyarakat	0,07
Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (KDH)	9
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	0,07%
Presentase Penggunaan Dana Kelurahan Untuk Program Perberdayaan	60
Jumlah Kelompok Binaan desa	6
Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan	1,86%
Presentase Desa Yang Melaksanakan Lomba Desa	0,17%
Presentase Desa Yang melaksanakan Pembinaan PKK	100
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan	100
Persentase Sarana dan Prasarana Publik Kelurahan Yang diadakan, dibangun, dikembangkan dan dipelihara	80
Jumlah Kegiatan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	8
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	0,05
Jumlah siskamling aktif	100
Persentase konflik yang ditindaklanjuti/ difasilitasi	100
Presentase Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat	3
Presentase Penciptaan Stabilitas Wilayah yang Dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%
Presentase urusan Pemerintahan Kecamatan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%
Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100
Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa	100
Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kades	56,52%
Jumlah Desa yg mendapatkan rekomendasi Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	78,26%
Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	1
Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100
Presentase Pusat Pelayanan Masyarakat	100
Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (KDH)	9
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	Kec. Bungku Selatan
Jumlah Kelompok Binaan desa	6
Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan	2
Presentase Desa Yang melaksanakan Pembinaan PKK	100
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	0,05
Jumlah siskamling aktif	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Persentase konflik yang ditindaklanjuti/ difasilitasi	100
Presentase Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat	3
Presentase Penciptaan Stabilitas Wilayah yang Dinamis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%
Presentase urusan Pemerintahan Kecamatan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%
Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100
Jumlah Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa	100
Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kades	50
Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100 %
Jumlah Kegiatan peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	100 %
Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	100%
Jumlah jenis pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan	13 kegiatan
Jumlah jenis pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan	13 kegiatan
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	19 desa
Presentaase penggunaan Dana Kelurahan Untuk Program Pemberdayaan	50
Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan	2 kegiatan
Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa	19 desa
Jumlah kegiatan kegiatan pemberdayaan	7 kegiatan
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Matano	80
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Marsaoleh	80
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Lamberea	100
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Tofoiso	80
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB Kelurahan Bungi	80
Presentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Terakomodir dalam APB	100

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Kelurahan Mendui	
Presentase Sarana dan prasarana publik kelurahan yang diadakan, dibangun, di kembangkan dan di Pelihara di Kelurahan Bungi	100
Presentase Sarana dan prasarana publik kelurahan yang diadakan, dibangun, di kembangkan dan di Pelihara di Kelurahan Mendui	10
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Matano	8
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Marsaoleh	8
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tofoiso	10
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lamberea	8
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Bungi	8
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mendui	9
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53 kegiatan
Jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	50 kasus
Jumlah forum keagamaan tingkat kecamatan	3 forum
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	50 kegiatan
Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti	50 pelanggaran
persentase kegiatan yang dilaksanakan	100 %
Jumlah kegiatan forkompincam	100 %
Jumlah kegiatan forkompincam	48 kegiatan
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	1 desa
Jumlah Kegiatan untuk Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 kegiatan
Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa	19 desa
Jumlah rekomendasi	26 rekomendasi
Jumlah Desa Yang Difasilitasi	19 desa
Jumlah desa & kelurahan yang difasilitasi	19 desa
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56
Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90
Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	10
Prosentase Kegiatan Lomba Desa, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Dukungan PKK,Bupati Cup dan STQ/MTQ	9
Prosentase forum keagamaan tingkat kecamatan dan Kabupaten, Festival Maulid	1
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100
Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	1
Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	1
Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	10
Jumlah pendampingan Desa	10

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100
Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	1
Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	100
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	12
Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa	12
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100
Jumlah siskamling aktif	1
Jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	1
Jumlah Kegiatan forum keagamaan tingkat kecamatan	1
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	1
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	1
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku. Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya.	1
Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100
Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5
Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	1
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1
Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1
Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1
Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	1
Indeks Pelyanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	15
Persentase Peningkatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75
Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	240
Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	30
Jumlah Urusan dilimpahkan Bupati yang Dilaksanakan Camat	2
Persentase Kegiatan Pemberdayaan pada APBDes	20
Persentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	45
Persentase Kehadiran Masyarakat pada Kegiatan Musrenbang Desa	10
Jumlah Kegiatan TP-PKK Kecamatan	4
Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan	7
Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	13
Persentase Desa yang Melaporkan Dana APBDes Tepat Waktu	30
Persentase Desa Tertib Admnistrasi	31

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	4
Jumlah Desa Tertib Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset	4
Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	7
Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %
Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Tahun
Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100 %
Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Tahun
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %
Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	9 Desa
Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional , Dukungan PKK,Bupati Cup dan STQ/MTQ	100 %
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %
Jumlah siskamling aktif	100 %
Jumlah forum keagamaan tingkat kecamatan dan Kabupaten, Festival Maulid	1 Tahun
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Tahun
Jumlah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Kegiatan
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100 %
Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100 %
Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	1 Desa
Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	9 Desa
Jumlah pendampingan Desa	9 Desa
Index pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN)	100
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Na
Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Na
Presentase Pusat Pelayanan Masyarakat	Na
Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari BupatiKepada Camat (KDH)	Na
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	Na
Jumlah Kelompok Binaan Desa	Na
Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	10
Jumlah Kegiatan Lomba Desa, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional ,	5

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Dukungan PKK,Bupati Cup dan STQ/MTQ	
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	Na
Jumlah Siskamling Aktif	100
Jumlah forum keagamaan tingkat kecamatan dan Kabupaten, Festival Maulid	Na
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
Presentase Penciptaan Stabilitas Wilayah Yang Dinamis Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100
Presentase Urusan Pemerintah Kecamatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100
Presentase Jumlah Desa Yang Mendapati Fasilitas, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	100
Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	4
Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	10
Jumlah pendampingan Desa	10
Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100
Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	100
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	2
Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa	10
Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2
Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100
Jumlah Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	1
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya	1
Persentase Desa Yang Melaporkan Dana APBDes tepat Waktu	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	0,003
Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	1.107
Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	900
Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	774
Jumlah sekolah jenjang pendidikan SLTP & SLTA yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan ideologi pancasila	500

Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah	Target Kinerja
Jumlah ASN dan kaum milenial yang mendapat program pembumih pancasila	500
Jumlah OPD/ASN dan ormas/pengurus yang mendapatkan revolusi mental	773
Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan bela negara	100
Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Hari Kesaktian Pancasila dan Lahir Pancasila	3
Jumlah forum Pembauran Kebangsaan.	1
Jumlah kegiatan seminar sejarah nasional dan daerah dalam bingkai NKRI bagi pelajar, mahasiswa, tomas, toga, ASN dan ormas.	200
Jumlah Rapat-rapat kordinasi pembinaan ideologi dan bela negara yang dilaksanakan	12
Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	5
Persentase parpol yang mendapatkan pendidikan politik.	5
Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik.	80
Jumlah Tim Verifikasi Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik	1
Jumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Morowali	1
Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	9
Jumlah pengurus partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	75
Jumlah pemantauan situasi politik di daerah	9
Presentase pengurus Ormas yang aktif	7,8
Persentase pemberdayaan dan pengawasan ormas	7,8
Persentase pengurus ormas yang diberdayakan	7,8
Jumlah pendataan ormas di 9 kecamatan	39
Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	0,33
Persentase perkembangan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	0,33
Jumlah penyalahgunaan narkoba di 9 kecamatan.	3
Jumlah kegiatan fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah di 9 kecamatan	1
Jumlah pengurus kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	12
Jumlah Rapat Tim ketahanan ekonomi, sosial, budaya.	2
Jumlah Pelaksanaan rapat Koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	3
Persentase Daerah Rawan Konflik	88
Presentase konflik yang terselesaikan	88
Potensi konflik yang terpetakan (%)	2,25
Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi	1,13

6.2. INOVASI DAERAH

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka konsekuensinya adalah adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya Desentralisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tanggap (responsif) terhadap kepentingan masyarakat luas, memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah secara konsekuen tentunya akan tercermin pada hasil capaian seluruh indikator pelaksanaan urusan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
2. Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;
3. Mampu menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Morowali melakukan Inovasi Daerah dalam rangka menjawab visi misi kepala daerah yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama”***.

Program dan Inovasi Daerah juga mengandung nilai-nilai strategis yang secara langsung dapat memengaruhi dalam mengupayakan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang inovatif. Nilai-nilai strategis dimaksud antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

1. MBA GESIT (MOROWALI BERSAMA DALAM GERAKAN INTERVENSI STUNTING TERPADU)

Latar belakang



Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2017 di beberapa wilayah puskesmas yang menjadi sample gambaran prevalensi Stunting di kabupaten Morowali adalah sebanyak 34,3 % dari 300 balita yang menjadi sampel. Sementara pencapaian beberapa indikator kinerja Program Gizi masyarakat di Kabupaten morowali pada tahun 2018 belum mencapai

target antara lain : Gizi Buruk :2,9 %; Gizi Kurang : 4,7%, Gizi Baik : 90 %; Gizi Lebih : 1,9 %. Sementara data stunting untuk tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tercatat ada 504 balita stunting di kabupaten Morowali.

Anak yang tumbuh dengan stunting mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor. Jika proporsi anak yang mengalami kurang gizi, gizi buruk dan stunting besar, maka akan berdampak pada proporsi kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Anak-anak yang bertumbuh dan berkembang tidak proporsional pada saat ini, pada umumnya akan mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata - rata dibandingkan dengan anak yang tumbuh dengan baik. Anak dengan masalah gizi akan lebih mudah terkena penyakit menular dimasa pertumbuhan, dan rentan menderita penyakit degeneratif ketika memasuki usia produktif.

Intervensi stunting dilakukan melalui pendekatan secara langsung (spesifik)dan tidak langsung (sensitif). Untuk intervensi spesifik antara lain dengan memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang balita . Adapun pendekatan tidak langsung (sensitif) antara lain dilakukan melalui pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, peningkatan

pengetahuan ibu/keluarga tentang gizi seimbang, pemenuhan akses jamban dan air bersih yang layak sesuai standar kesehatan.

Permasalahan

1. Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan tingginya prevalensi Stunting (34%), jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang.
2. Kondisi Kesehatan Lingkungan belum sesuai harapan, ditandai dengan Cakupan akses jamban sehat dan sarana air bersih belum mencapai 100%.
3. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum optimal, ditandai dengan cakupan jumlah RT berPHBS masih diangka 33,56 %.

Tujuan

- Terbentuknya Tim pencegahan dan penanggulangan Stunting anak balita Tingkat Kecamatan yang di perkuat dengan adanya regulasi (SK), sebagai wadah koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting secara terintegrasi dan terpadu;
- Adanya penentuan pilot proyek Kecamatan sebagai sasaran kegiatan penanggulangan dan pencegahan Stunting;
- Tersusunnya rencana kegiatan penanggulangan dan pencegahan Stunting dengan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing program/sektor di satu Kecamatan.
- Terlaksananya program pencegahan/penanggulangan Stunting di seluruh wilayah Kabupaten, secara terintegrasi dan terpadu.

Manfaat

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga target-target pembangunan Nasional dapat tercapai;
- Menunjang percepatan pencapaian target sasaran pokok RPJMN Bidang Kesehatan;
- Pembenahan sistem, Proses dan prosedur kerja dalam berbaikan kerja;
- Mewujudkan Peningkatan kesehatan pemerintah daerah melalui inovasi;
- Masyarakat dapat menikmati pelayanan prima dari aparaturnya;

- Masyarakat bisa mengakses dengan mudah informasi-informasi sesuai kebutuhannya;
- Masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah.

2. RUMAH SENDIRI (RUMAH SEJAHTERA MANDIRI)

Latar Belakang



Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3.037,04 km² dan berpenduduk sebanyak 129.814 jiwa. Morowali adalah kabupaten terluas ke- 10, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah.

Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan. Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut.

Kepulauan Sombori merupakan salah satu objek wisata yang ada di Desa Mbokitta Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Pulau ini menyajikan eksotisme wisata laut dan pantai dengan pemandangan yang sangat indah. Pulau Sombori dihuni oleh masyarakat nelayan yang sebagian besar masih hidup dalam tingkat kesejahteraan yang rendah. Penghasilan sebagai nelayan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya potensi wisata Pulau Sombori merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk menambah penghasilan.

Hal tersebut menjadi dasar untuk menggagas ide inovasi daerah **“RUMAH SENDIRI”**. Rumah masyarakat nelayan Desa Mbokitta bisa “disulap” menjadi hunian yang layak untuk disewakan kepada wisatawan sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat nelayan. Pemerintah daerah akan mengajak masyarakat dan pihak swasta untuk berswadaya melakukan rehabilitasi rumah milik nelayan agar layak disewakan dan juga dapat difungsikan sebagai tempat

pameran kerajinan dan penjualan hasil laut masyarakat nelayan. Selain itu masyarakat nelayan juga akan diberikan latihan dasar kepariwisataan dari aspek pelayanan wisatawan sehingga mereka dapat melayani para wisatawan yang akan menyewa “**RUMAH SENDIRI**” secara professional, serta bimbingan teknis pembuatan souvenir terbuat dari bahan local (kerang-kerangan, akar bahar dan lainnya).

Tujuan

1. Terwujudnya RUMAH SENDIRI diseluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Morowali
2. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan Kabupaten Morowali

Manfaat

1. Memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat nelayan;
2. Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
3. Masyarakat mendapatkan keterampilan dan pengetahuan dalam memanfaatkan kekayaan alam ;
4. Menjadi pilot project untuk rumah-rumah nelayan di objek wisata lainnya;
5. Dapat meningkatkan PAD Kabupaten Morowali;
6. Dapat mengentaskan kemiskinan diwilayah pesisir.

3. PROGRAM GEMA SI WIRA

Latar Belakang



GEMA SI WIRA akronim dari Gerakan Masyarakat Pesisir Berwirausaha yakni suatu upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin di kawasan pesisir melalui kewirausahaan berbasis pengolahan potensi lokal di Kabupaten Morowali. Potensi ikan roa, ikan tuna, dan ikan teri yang sangat melimpah selama ini belum dikelola secara maksimal karena

kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Melalui proyek perubahan ini masyarakat miskin di kawasan pesisir akan diberdayakan dalam mengolah ikan roa, ikan tuna dan ikan teri menjadi produk bernilai jual tinggi. Mereka akan dilatih mulai dari proses pengolahan, packing produk sampai ke pemasaran sehingga memberikan nilai tambah ekonomis bagi rumah tangganya.

Manfaat

1. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
2. Memberikan tambahan pendapatan bagi rumah tangga;
3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Dapat menjadi produk khas unggulan daerah.

4. PROGRAM SI- GUDA MOROWALI

Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali sebagai perangkat daerah teknis sangat memerlukan ketersediaan data yang akurat untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang berkualitas demi terciptanya misi Kabupaten Morowali yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama”***.

Hasil diagnosa terhadap tugas pokok dan fungsi Bappeda maka ditemukan masalah belum optimalnya pengelolaan data dan informasi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari belum maksimalnya pengelolaan data di dalam internal Bappeda itu sendiri, sering terjadi kehilangan data, seringnya terjadi inkonsistensi data, belum adanya sumberdaya yang khusus untuk mengelola data, sarana penyimpanan data yang belum memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka bappeda Kabupaten Morowali menuangkan gagasan untuk membuat Sistem Informasi Gudang Data Morowali (Si-Guda Morowali) yang merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan data/dokumen yang berbasis elektronik.

Tujuan

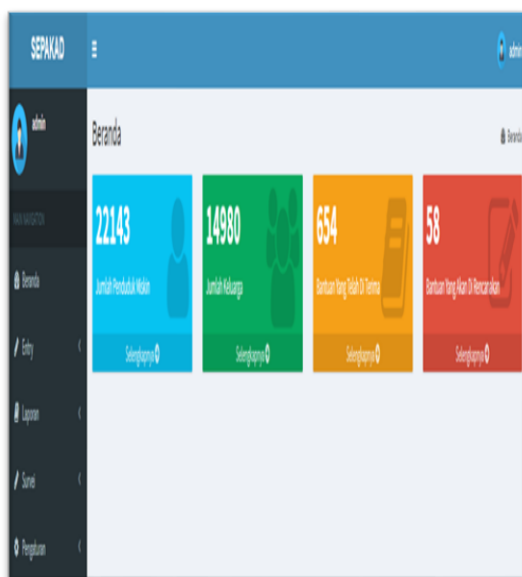
Tujuan penyediaan data dukung perencanaan berbasis elektronik yaitu implementasi Sistem Informasi Gudang Data Morowali sudah terintegrasi pada semua OPD yang berada di Kabupaten Morowali.

Manfaat

1. Memberikan kemudahan dalam memperoleh data/dokumen untuk kebutuhan perencanaan.
2. Sebagai media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan verifikasi renja OPD
3. Konsistensi data
4. Memberikan kemudahan bagi OPD dalam memperoleh data/dokumen sebagai bahan penyusunan kegiatan atau untuk bahan evaluasi kegiatan OPD bersangkutan.
5. Mengatasi masalah kehilangan data
6. Sebagai sumber bahan rujukan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan data/dokumen untuk membuat kajian, penelitian, dsb.

5. SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SEPAKAD)

Latar Belakang



Untuk mendukung pencapaian visi misi daerah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI YANG SEJAHTERA BERSAMA”** Sebagaimana salah satu isue daerah adalah kemiskinan hal ini sejalan dengan masih tingginya angka kemiskinan kabupaten morowali bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sulawesi tengah sejalan dengan issue tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi *“Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan*

penelitian bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Infra Struktur” dihadapkan oleh beberapa masalah antara lain:

- a. Tidak tersedianya data kemiskinan daerah dan informasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan setiap tahun
- b. Lemahnya kordinasi antar sektor
- c. Kurangnya Informasi program penanggulangan kemiskinan setiap tahun

Realitas permasalahan kemiskinan sebetulnya telah mendapat beragam upaya penyelesaian dari pemerintah, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, selama lebih dari 15 tahun terakhir. Program-program yang pernah dilakukan oleh aktor-aktor tersebut diantaranya adalah yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pendekatan infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Namun, ini semua tidak mampu mencapai target secara optimal karena adanya permasalahan sinkronisasi program. Sebuah kenyataan bahwa Kabupaten Morowali memiliki Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang secara normatif bertugas untuk mengoordinir seluruh upaya pengurangan angka kemiskinan, tetapi kondisi faktual menyebutkan bahwa seluruh anggota tim tersebut bekerja tanpa terkoordinir dengan baik hal ini sebagai wujud dari lemahnya kordinasi antar sektor. Sebuah hal yang sangat krusial yang terjadi adalah adanya beragam definisi mengenai konsep “miskin” yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali. Ketika masing-masing OPD memiliki definisi eksklusif mengenai konsep “miskin”, maka program dan kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan menjadi tidak saling mendukung sehingga penanggulangan kemiskinan daerah dinilai lambat.

Sebagai upaya untuk mengurai permasalahan tersebut maka sangatlah penting untuk membangun sebuah *sistim penanggulangan kemiskinan* yang menyajikan data penduduk miskin kabupaten morowali berdasarkan indikator daerah dan informasi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi penanggulangan kemiskinan, yang tujuannya untuk mendukung fungsi kelitbanan dalam melakukan pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan yang tepat sebagai pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

Tujuan

1. Tersedianya data penanggulangan kemiskinan daerah di semua kecamatan di Kabupaten Morowali;
2. Terintegrasinya Sistem informasi penanggulangan kemiskinan dengan e-musrembang

Manfaat

1. Dapat memudahkan intervensi program kegiatan secara tepat dan berkelanjutan;
2. Program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin

BAB VII



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021

PENUTUP

Penyusunan RKPD Tahun 2021 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ini merupakan bagian dari tahap awal penyusunan RKPD Tahun 2021 tersebut. Sebagai tahapan awal, rancangan awal RKPD ini tentu saja belum sempurna dan membutuhkan pengembangan dan pencermatan lebih lanjut untuk menjadi RKPD Tahun 2021 yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Morowali di tahun 2021 sebagai bagian langkah untuk memenuhi sasaran pembangunan RPJMD 2019 - 2023. Beberapa data dan analisis pada dokumen ini masih bersifat sementara dan akan dilengkapi serta disempurnakan seiring dengan berjalannya tahapan menuju tersusunnya RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2021.

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

H. MOHAMAD JAFAR HAMID, SH.,MM